

LAPORAN SKRIPSI

**KANTOR KEPOLISIAN RESOR KOTA “POLRESTA”
DIKOTA PASURUAN
DENGAN TEMA ARSITEKTUR POSMODERN
“KISHO KUROKAWA”**

SKRIPSI – AR. 8324

SEMESTER GENAP 2010 - 2011

Diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Teknik Arsitektur



Disusun Oleh :

CHAIRUMIN ALFIN

NIM. 07.22.037

Dosen Pembimbing :

Ir. Daim Triwahyono, MSA

Ir. Gatot Adi Susilo, MT

**PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

2011

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

JUDUL

KANTOR KEPOLISIAN RESOR KOTA "POLRESTA"
DIKOTA PASURUAN
DENGAN TEMA ARSITEKTUR POSMODERN
"KISHO KUROKAWA"

Laporan ini telah diperiksa dan disetujui sebagai Laporan Skripsi untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Arsitektur di Program Studi Arsitektur – FTSP ITN Malang

Disusun oleh :
Nama : Chairumin Alfin
NIM : 07.22.037

MENYETUJUI :

Dosen Pembimbing I,



Ir. Daim Triwahyono, MSA
NIP. 195603241984031002

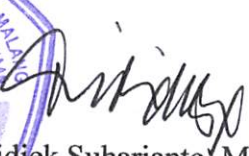
Dosen Pembimbing II,



Ir. Gatot Adi Susilo, MT
NIP: 101.880.0185



Ketua Program Studi Arsitektur


Ir. Didiek Suharjanto, MT
NIP: 103.900.0215

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

Nama : CHAIRUMIN ALFIN
NIM : 07.22.037
Program Studi : ARSITEKTUR
Judul : KANTOR KEPOLISIAN RESOR KOTA "POLRESTA"
DIKOTA PASURUAN
DENGAN TEMA ARSITEKTUR POSMODERN
"KISHO KUROKAWA"


Dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Skripsi jenjang Program Strata Satu (S-1)

Pada Hari : KAMIS
Tanggal : 28 JULI 2011
Dengan Nilai : B+

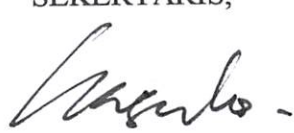
PANITIA UJIAN SKRIPSI



KETUA,

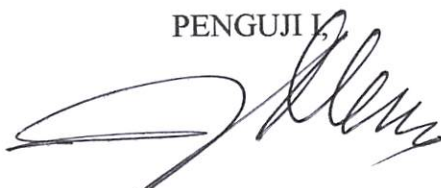

Ir. Didiék Suharjanto, MT
NIP: 103.900.0215

SEKERTARIS,



Ir. Gaguk Sukowiyono, MT
NIP: 102.850.0114

ANGGOTA PENGUJI

PENGUJI I,


Ir. Djoko Suwanto
NIP: 101.880.0184

PENGUJI II,


Ir. Yuni Setyo Pramono, MT
NIP: 196306091993021001

LEMBAR PENGESAHAN Pengerjaan Skripsi

Nama : CHAIRUMIN ALFIN
NIM : 07.22.037
Program Studi : ARSITEKTUR
Judul : KANTOR KEPOLISIAN RESOR KOTA "POLRESTA"
DIKOTA PASURUAN
DENGAN TEMA ARSITEKTUR POSMODERN
"KISHO KUROKAWA"

Waktu Pelaksanaan : 16 Maret s/d 28 Juli 2011

Waktu Pengujian : 28 Juli 2011

Hasil Ujian : **Lulus Nilai B+**

No	Tahap Pelaksanaan	Minggu ke																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Visualisai Desain	■	■	■	■	■	■	■	■											
2	Proses Desain								■	■	■	■	■	■						
3	Drafting													■	■	■	■			
4	Penyusunan Laporan																	■	■	■

Malang, 15 Agustus 2011

Mahasiswa

(Chairumin Alfin)
NIM: 07.22.037

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan skripsi dengan judul **KANTOR KEPOLISIAN RESOR KOTA “POLRESTA” DIKOTA PASURUAN DENGAN TEMA ARSITEKTUR POSMODERN “KISHO KUROKAWA”**.

Penyusunan laporan ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Institut Teknologi Nasional Malang.

Menyadari bahwa penyusunan laporan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penyusun dengan tulus hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Daim Triwahyono, MSA selaku dosen pembimbing I yang dengan tegas membimbing, perhatian dan memberikan arahan yang sangat besar manfaatnya.
2. Bapak Ir. Gatot Adi Susilo, MT selaku dosen pembimbing II dan Koordinator Studio Skripsi yang telah banyak memberikan masukan-masukan dan arahan yang sangat berguna dalam proses bimbingan.
3. Bapak Ir. Djoko Suwanto, MT selaku dosen penguji I.
4. Bapak Ir. Yuni Setyo Pramono, MT selaku dosen penguji II.
5. Bapak Ir. Didiek Suharjanto, MT selaku Ketua Jurusan Teknik Arsitektur Institut Teknologi Nasional Malang.
6. Bapak/Ibu dosen Institut Teknologi Nasional Malang khususnya Jurusan Teknik Arsitektur atas bimbingan dan pengajaran yang telah diberikan.

Juga tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya khususnya kepada :

1. Keluarga tercinta Bapak, Ibu, Kakak, dan Adikku yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa restu, motivasi serta dorongan baik berupa materiil maupun non materiil.

2. Rekan-rekan mahasiswa dan sahabat-sahabat yang telah banyak menyumbangkan tenaga, pikiran serta motivasi sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan segala bantuan dan dukungan moril dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyusunan yang lebih baik. Dan semoga hasil yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bidang arsitektur, dan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Malang, Agustus 2011

Penyusun

**KANTOR KEPOLISIAN RESOR KOTA “POLRESTA”
DI KOTA PASURUAN
DENGAN TEMA ARSITEKTUR POSMODERN
”KISHO KUROKAWA”**

Chairumin Alfin

(Program Studi Arsitektur, FTSP – ITN Malang)

A B S T R A K S I

Kantor Kepolisian Resor Kota “POLRESTA” yaitu tempat mengurus atau berlangsungnya suatu pekerjaan, tempat bekerja atau wadah untuk Badan Pemerintah (sekelompok Pegawai Negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum pada wilayah (hukum) kekuasaan atau lingkungan kerja yang terletak di Pusat kegiatan politik dan administrasi pemerintah serta tempat kedudukan pemimpin pemerintahan pusat.

Kota Pasuruan, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pasuruan berada di jalur utama Surabaya - Banyuwangi, Surabaya-Malang dan Banyuwangi-Malang. Kota Pasuruan memiliki visi dan misi atau memiliki identitas yaitu Kota Santri. Kota Pasuruan terdiri dari tiga kecamatan 34 kelurahan. Tindak kriminal masih marak terjadi di Kota Pasuruan seperti pencurian, rampok, copet, obat-obatan terlarang, sex, dll yang semakin marak terjadi menunjukkan bahwa masalah tindak kriminal untuk ditangani secara serius, namun tidak diimbangi dengan sarana dan fasilitas “hukum” sehingga jumlah tindak pidana atau kriminalitas tidak diketahui dengan jelas. Oleh karena itu Kota Pasuruan membutuhkan kantor kepolisian resort kota yang mendukung system/program *Quick Wins* yang telah direncanakan oleh polri dalam 3 tahapan yang telah direncanakan yakni Tahap I (2009-2010) membangun kepercayaan masyarakat (public trust building), Tahap II (2011-2015) membangun Kemitraan Masyarakat (Pathnership Building), dan Tahap III (2016-2025) melakukan pelayanan Prima (Strive For Excellence) yang lebih mengutamakan pendekatan segi pelindung, pengayom dan pelayan terhadap

masyarakat sehingga tidak adanya fungsi pelayanan yang terpisah dari lingkup lingkungan kepolisian.

Arsitektur Postmodern “Kisho Kurokawa” mengkomunikasikan *identitas regional, identitas kultural, atau identitas historikal*. Sehingga memberikan perasaan aman, nyaman, nikmat, gambaran dan kenyataan yang sejujur-jujurnya. Serta memberi kesadaran terhadap manusia akan budayanya. Berdasar dari hal-hal tersebut perlu adanya perencanaan dan perancangan kantor kepolisian resort kota (*polresta*), yang sesuai dengan sistem masyarakat (*Quick Wins*) yang telah digariskan pemerintah dan juga memperhatikan kodrat penghuninya dengan menggunakan penekanan desain Arsitektur Posmodern “Kisho Kurokawa”.

Inti dari perancangan *Kantor Kepolisian Resor Kota* di Kota Pasuruan adalah Bagaimana menerapkan konsep arsitektur post-modern ke dalam desain arsitektural yang ada sebagai terjemahan bangunan kantor kepolisian resort di Pasuruan nantinya, sehingga image kepolisian yang “*menyeramkan/menakutkan*” lebih menjadi “*berwibawa/tegas/mengayomi*”. Dan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada Kepolisian di Kota Pasuruan. Yang diselesaikan dengan pendekatan terhadap Arsitektur postmodern “Kisho Kurokawa” yang pada prinsipnya dilandasi oleh *Pemahaman yang mendasar terhadap identitas regional, identitas kultural, atau identitas historikal*.

Kata Kunci : *Arsitektur postmodern, Kantor kepolisian resor kota, Quick wins, identitas regional, identitas kultural, dan identitas historikal.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAKSI	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR DIAGRAM	xiv

BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	6
1.2..1 Permasalahan Umum	6
1.2..2 Permasalahan Khusus	6
1.3. Batasan-Batasan.....	7
1.4. Tujuan Dan Sasaran	7
1.4. Tujuan	7
1.4. Sasaran	8
1.5. Metodologi / Pola Pemikiran	9

BAB II

KAJIAN TEMA	10
2.1. Latarbelakang Arsitektur Postmodern	10
2.1..1. Sejarah Postmodern	10
2.1..2. Sejarah Arsitektur Posmodern	11
2.2. Definisi Arsitektur Postmodern	13
2.2..1. Definisi Postmodern	13
2.2..2. Definisi Arsitektur Postmodern	16
2.3. Tentang Arsitektur Postmodern	17

2.3..1. Arsitektur Postmodern Sebagai Reaksi Arsitektur Modern..	17
2.3..2. Pokok Pikiran Arsitektur Postmodern	18
2.4. Teori Arsitektur Postmodern Menurut Pandangan Tokoh.....	20
2.4..1. Teori Arsitektur Postmodern (Kisho Kurokawa)	20
2.4..2. Ciri-Ciri Arsitektur Postmodern (Kisho Kurokawa)	21
2.4..3. Cara Ber-Arsitektur Postmodern (Pola Pikir) Menurut Kisho Kurokawa.....	22
2.4..4. Contoh Kasus.....	22
2.5. Kesimpulan	23
2.6. Diagram Proses Analisa.....	24

BAB III

TINJAUAN LOKASI	25
3.1. Tinjauan Umum Kota Pasuruan.....	25
3.1..1. Sejarah Kota Pasuruan.....	26
3.2. Kebijakan Rencana Pengembangan Kota	30
3.3. Peraturan Bangunan Setempat	31
3.4. Pendekatan Lokasi Dan Tapak.....	33
3.4..1. Kriteria Penentuan Lokasi	33
3.4..2. Kriteria Penentuan Site	33
3.5. Data Tapak	35
3.4..1. Data Eksisting Tapak.....	36
a. Dimensi Tapak.....	36
b. Peraturan Pemerintah.....	36
c. Aksesibilitas (Pola Sirkulasi Tapak).....	37
d. Batas Tapak	38
e. Vegetasi Sekitar Tapak	39
f. Sistem Utilitas Tapak	40
g. View To Site	41
h. View From Site.....	42

BAB IV

TINJAUN OBJEK.....	43
4.1. Kajian Tentang Kantor Kepolisian	43
4.1..1. Pengertian Judul.....	43
4.1..2. Fungsi Dan Tugas Kepolisian.....	47
4.1..3. Ratio Kepolisian	58
4.1..4. Sarana Dan Prasarana Kepolisian	58
4.1..5. Fungsi Pelayanan Kepolisian.....	59
4.2. Kajian Tentang Program Quick Wins.....	89
4.3. Studi Banding	90
4.3..1. Studi Banding Objek.....	90

BAB V

METODE KAJIAN	96
5.1. Metode Pengumpulan Data.....	96
5.1..1. Data Primer	96
5.1..2. Data Skunder	97
5.2. Metode Pengolahan Data	98
5.3. Metode Pembahasan	98
5.4. Metode Perancangan.....	99
5.5. Metodologi.....	102
5.6. Skema Proses Analisa.....	103

BAB VI

ANALISA PEMBAHASAN	104
A. Analisa Bentuk Dan Tampilan.....	104
B. Analisa Tapak.....	109
C. Analisa Ruang	125
D. Analisa Utilitas.....	161
E. Analisa Struktur.....	168

BAB VII

KONSEP 171

- A. Konsep Bentuk..... 171
- B. Konsep Ruang 174
- C. Konsep Tapak..... 174
- D. Konsep Utilitas..... 175
- E. Konsep Struktur..... 177

BAB VIII

- Hasil Rancangan** 179

DAFTAR PUSTAKA 195

LAMPIRAN 197

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1	:	proyek perumahan di Kota Al Sarir, Libya.....	22
Gambar	2.2	:	Disain Perumahan di Kota Al Sarir, Libya.....	23
Gambar	3.1	:	Peta Kota Pasuruan.....	34
Gambar	3.2	:	Data Tapak.....	34
Gambar	3.3	:	Dimensi Tapak.....	36
Gambar	3.4	:	Aksesibilitas (Pola Sirkulasi Sekitar Tapak).....	37
Gambar	3.5	:	Batas Tapak.....	38
Gambar	3.6	:	Vegetasi Tapak.....	39
Gambar	3.7	:	Sistem Utilitas Tapak.....	40
Gambar	3.8	:	View To Site.....	41
Gambar	3.9	:	View From Site.....	42
Gambar	4.1	:	Polresta Pasuruan.....	90
Gambar	4.2	:	Pembagian Massa Bangunan.....	90
Gambar	4.3	:	Massa 1 Denah Lantai 1.....	91
Gambar	4.4	:	Massa 1 Denah Lantai 2.....	91
Gambar	4.5	:	Massa 2 Denah Lantai 1.....	92
Gambar	4.6	:	Massa 3 Denah Lantai 1.....	92
Gambar	4.7	:	Massa 4 Denah Lantai 1.....	92
Gambar	4.8	:	Massa 5 Denah Lantai 1.....	92
Gambar	4.9	:	Massa 5 Denah Lantai 2.....	92
Gambar	4.10	:	Struktur Organisasi Polresta Pasuruan.....	93
Gambar	6.1	:	Analisa Dan Konsep Bentuk Dasar.....	107
Gambar	6.2	:	Olah Bentuk.....	108
Gambar	6.3	:	Perspektif Bentuk Dasar.....	108
Gambar	6.4	:	Analisa Data Tapak.....	155
Gambar	6.5	:	Analisa Dimensi Tapak.....	155
Gambar	6.6	:	Analisa Aksesibilitas Luar Tapak.....	155
Gambar	6.7	:	Pencapaian Lahan.....	155
Gambar	6.8	:	Perletakan Titik Enterance.....	155

Gambar	6.9	: Analisa Vegetasi.....	107
Gambar	6.10	: Vegetasi Sebagai Pemfilter.....	108
Gambar	6.11	: Vegetasi Sebagai Kontrol Pandangan.....	108
Gambar	6.12	: Vegetasi Sebagai Pengendali Iklim.....	155
Gambar	6.13	: Vegetasi Sebagai Pengendali Suara.....	155
Gambar	6.14	: Vegetasi Sebagai Penyaring Suara.....	155
Gambar	6.15	: Analisa View.....	155
Gambar	6.16	: Analisa Matahari Pagi.....	155
Gambar	6.17	: Analisa Matahari Siang.....	155
Gambar	6.18	: Analisa Matahari Sore.....	155
Gambar	6.19	: Analisa Pendaerahan (Zonning).....	155
Gambar	6.20	: Analisa Pola Sirkulasi Dalam Tapak.....	155
Gambar	6.21	: Alternarif Pola Sirkulasi.....	157
Gambar	6.22	: Double Loaded Corridor.....	158
Gambar	6.23	: Single Loaded Corridor.....	158
Gambar	6.24	: Perimeter Corridor/Exterior Corridor.....	158
Gambar	6.25	: Pembatas Spasial Ruang.....	159
Gambar	6.26	: Perbedaan Ketinggian Lantai.....	159
Gambar	6.27	: Perbedaan Warna Lantai.....	159
Gambar	6.28	: Perbedaan Material Pada Lantai.....	160
Gambar	6.29	: Penggunaan Furniture.....	160
Gambar	6.30	: Air Bersih Distribusi Dari PDAM.....	161
Gambar	6.31	: Air Bersih Distribusi Dari Sumur (Cadangan).....	162
Gambar	6.32	: Sistem Plafon Pemantul Bunyi.....	164
Gambar	6.33	: Sistem Pengkondisian Udara Dengan Single Pachege Unit	165
Gambar	6.34	: AC Single Pachege Unit.....	166
Gambar	6.35	: Sistem Penangkal Petir Franklin.....	167
Gambar	6.36	: Pondasi Foot Plat.....	168
Gambar	6.37	: Modul Dengan Pola Grid.....	169
Gambar	6.38	: Modul Dengan Pola Melingkar.....	169
Gambar	6.39	: Modul Dengan Pola Segi Tiga.....	169

Gambar	6.40	: Hubungan Antara Balok Dan Kolom.....	170
Gambar	8.1	: Site Plan.....	179
Gambar	8.2	: Lay Out Plan.....	180
Gambar	8.3	: Denah Lantai 1.....	181
Gambar	8.4	: Denah Lantai 2.....	182
Gambar	8.5	: Denah Lantai 3.....	183
Gambar	8.6	: Denah Lantai 4.....	184
Gambar	8.7	: Potongan Bangunan.....	185
Gambar	8.8	: Tampak Bangunan.....	186
Gambar	8.9	: Rencana Sloof Dan Pondasi.....	187
Gambar	8.10	: Rencana Pembalokan Lantai 2.....	188
Gambar	8.11	: Rencana Pembalokan Lantai 3.....	189
Gambar	8.12	: Rencana Pembalokan Lantai 4.....	190
Gambar	8.13	: Rencana Atap Dan Ring Balk.....	191
Gambar	8.14	: Perspektif 3D.....	192
Gambar	8.15	: Perspektif.....	193
Gambar	8.16	: 3D Interior.....	194

DAFTAR TABEL

Tabel 6.1	:	Program Ruang (macam-Macam Ruang).....	127
Tabel 6.2	:	Besaran Ruang Kapolresta.....	145
Tabel 6.3	:	Besaran Ruang Wakapolresta.....	145
Tabel 6.4	:	Besaran Ruang Lobby Pimpinan.....	145
Tabel 6.5	:	Besaran Ruang Siwas.....	146
Tabel 6.6	:	Besaran Ruang Sium.....	146
Tabel 6.7	:	Besaran Ruang Sipropam.....	146
Tabel 6.8	:	Besaran Ruang Sikeu.....	146
Tabel 6.9	:	Besaran Ruang Lobby Seksi.....	147
Tabel 6.10	:	Besaran Ruang Taud.....	147
Tabel 6.11	:	Besaran Ruang Unit P3d.....	147
Tabel 6.12	:	Besaran Ruang Biddokkes.....	148
Tabel 6.13	:	Besaran Ruang Bensat.....	148
Tabel 6.14	:	Besaran Ruang Ur Telematika.....	148
Tabel 6.15	:	Besaran Ruang Staf Khusus.....	148
Tabel 6.16	:	Besaran Ruang Bag Ops.....	149
Tabel 6.17	:	Besaran Ruang Bag Binamitra.....	149
Tabel 6.18	:	Besaran Ruang Bag Ren.....	149
Tabel 6.19	:	Besaran Ruang Bag Sumda.....	150
Tabel 6.20	:	Besaran Ruang Lobby Bagian.....	150
Tabel 6.21	:	Besaran Ruang SPK.....	150
Tabel 6.22	:	Besaran Ruang Sat Lantas.....	151
Tabel 6.23	:	Besaran Ruang Sat Binmas.....	151
Tabel 6.24	:	Besaran Ruang Sat Samapta.....	152
Tabel 6.25	:	Besaran Ruang Sat Sabhara.....	152
Tabel 6.26	:	Besaran Ruang Sat Pam Obvit.....	152
Tabel 6.27	:	Besaran Ruang Sat Intelkam.....	153
Tabel 6.28	:	Besaran Ruang Sat Reskrim.....	153
Tabel 6.29	:	Besaran Ruang Sat Reskoba.....	154

Tabel 6.30	:	Besaran Ruang Sat Pol Air.....	154
Tabel 6.31	:	Besaran Ruang Sat Tahti.....	154
Tabel 6.32	:	Besaran Ruang Lobby Satuan.....	155
Tabel 6.33	:	Besaran Ruang Penunjang Khusus.....	155
Tabel 6.34	:	Besaran Ruang Penunjang Umum.....	155
Tabel 6.35	:	Besaran Ruang MEE.....	156
Tabel 6.36	:	Rekapitulasi Besaran Ruang.....	156
Tabel 6.37	:	Karakteristik Dan Suasana Ruang.....	156

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	:	Skema Pola Pemikiran.....	9
Diagram 2.1	:	Skema Pola Pikir Arsitektur Posmodern.....	22
Diagram 2.2	:	Skema Proses Analisa.....	24
Diagram 5.1	:	Skema Metodologi.....	102
Diagram 5.2	:	Skema Proses Analisa.....	103
Diagram 6.1	:	Skema Analisa Bentuk Lokasi VS Tema.....	104
Diagram 6.2	:	Skema Analisa Bentuk “Metaphor”.....	105
Diagram 6.3	:	Skema Analisa Bentuk “Ambiguitas”.....	106
Diagram 6.4	:	Skema Konsep Dan Ide Bentuk.....	107
Diagram 6.5	:	Zona Ruang.....	128
Diagram 6.6	:	Organisasi Ruang.....	129
Diagram 6.7	:	Hubungan Ruang Kapolresta.....	130
Diagram 6.8	:	Hubungan Ruang Wakapolresta.....	130
Diagram 6.9	:	Hubungan Ruang Lobby Pimpinan.....	130
Diagram 6.10	:	Hubungan Ruang Siwas.....	131
Diagram 6.11	:	Hubungan Ruang Sium.....	131
Diagram 6.12	:	Hubungan Ruang Sipropam.....	131
Diagram 6.13	:	Hubungan Ruang Sikeu.....	132
Diagram 6.14	:	Hubungan Ruang Lobby Seksi.....	132
Diagram 6.15	:	Hubungan Ruang Unit P3d.....	132
Diagram 6.16	:	Hubungan Ruang Taud	133
Diagram 6.17	:	Hubungan Ruang Bensat	133
Diagram 6.18	:	Hubungan Ruang Biddokkes	134
Diagram 6.19	:	Hubungan Ruang Ur Telematika.....	134
Diagram 6.20	:	Hubungan Ruang Staf Khusus.....	135
Diagram 6.21	:	Hubungan Ruang Bag Ops.....	135
Diagram 6.22	:	Hubungan Ruang Bag Binamitra.....	136
Diagram 6.23	:	Hubungan Ruang Bag Ren.....	136
Diagram 6.24	:	Hubungan Ruang Bag Sumda.....	137

Diagram 6.25	:	Hubungan Ruang Lobby Bagian.....	137
Diagram 6.26	:	Hubungan Ruang SPK.....	138
Diagram 6.27	:	Hubungan Ruang Sat Lantas.....	138
Diagram 6.28	:	Hubungan Ruang Sat Binmas.....	139
Diagram 6.29	:	Hubungan Ruang Sat Samapta.....	140
Diagram 6.30	:	Hubungan Ruang Sat Sabhara.....	141
Diagram 6.31	:	Hubungan Ruang Sat Pam Obvit.....	141
Diagram 6.32	:	Hubungan Ruang Sat Intelkam.....	142
Diagram 6.33	:	Hubungan Ruang Sat Reskrim.....	143
Diagram 6.34	:	Hubungan Ruang Sat Reskoba.....	143
Diagram 6.35	:	Hubungan Ruang Sat Pol Air.....	144
Diagram 6.36	:	Hubungan Ruang Sat Tahti.....	144
Diagram 6.37	:	Skema Distribusi Air Bersih.....	161
Diagram 6.38	:	Skema Pembuangan Air Kotor.....	163
Diagram 6.39	:	Skema Pembuangan Air Hujan.....	163
Diagram 6.40	:	Skema Sistem Elektrikal.....	163
Diagram 6.41	:	Skema Sistem Pembuangan Sampah.....	164
Diagram 7.1	:	Skema Analisa Bentuk Lokasi VS Tema.....	171
Diagram 7.2	:	Skema Analisa Bentuk “Metaphor”.....	172
Diagram 7.3	:	Skema Analisa Bentuk “Ambiguitas”.....	173

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Polri dianjurkan lebih bersifat transparan serta penuh dengan tanggung jawab terhadap menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan bagi masyarakat, maka dalam hal ini Polri menentukan arah Kebijakan dan Strategi Kapolri Tentang Pedoman pelaksanaan transparansi penyidikan dengan SURAT PERINTAH NO. POL : SPRIN/390.A/RA/III/2009/BARESKRIM TANGGAL 31 MARET 2009 yang mempunyai maksud dan tujuan program *Quick Wins*. Tujuan pelaksanaan program Quick Wins, tersebut antara lain profesional, proporsional, transparan, cepat dan tepat serta berkeadilan, hal tersebut melalui beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut :

1. Tahap I (2009-2010) membangun kepercayaan masyarakat (public trust building).
2. Tahap II (2011-2015) membangun Kemitraan Masyarakat (Pathnership Building)
3. Tahap III (2016-2025) melakukan pelayanan Prima (Strive For Excellence)

Dimana dalam beberapa tahapan tersebut yang telah dijalankan adalah Tahap I membangun kepercayaan masyarakat (public trust building) yaitu membenahan pencitraan kepolisian untuk membangun kepercayaan masyarakat, dan yang sedang dicanangkan tahap II membangun kemitraan masyarakat yaitu membangun kerjasama dengan masyarakat melalui pemerintah kedinasan, organisasi kemasyarakatan (ormas), sedangkan pada tahap III melakukan pelayanan prima (Strive For Excellence) masih belum menemukan formula (bentuk bangunan/penataan fungsi bangunan) yang masih dalam satu kesatuan lingkungan kepolisian, untuk dapat melakukan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Beberapa pra-kondisi tersebut dapat juga dijadikan parameter dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan bila diletakkan dalam konteks reformasi,



maka hal ini menuntut adanya perubahan pemahaman dari sekedar orientasi untuk membenahi dan meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan saja, tetapi terutama harus diarahkan untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Melalui analogi dengan pemikiran yang dikembangkan dalam dunia bisnis, maka organisasi dan kinerja organisasi penyelenggara pelayanan publik harus dilaksanakan dalam koridor *customers satisfaction*. Hal terakhir inilah yang menyebabkan persoalan ‘bagaimana masyarakat sebagai customer dapat dipenuhi hak-haknya tidak saja menyangkut peningkatan kualitas ‘produk’ pelayanan publiknya, tetapi juga peningkatan standar kualitas mekanisme dan proses pelayanan serta mekanisme dan proses yang tersedia bagi masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan dan keluhan-keluhannya atas pelayanan publik yang diperolehnya.

Disamping berfungsi sebagai salah satu lembaga penegak hukum dan penjaga keamanan masyarakat, kepolisian juga memiliki fungsi sebagai instansi yang memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan publik (yang di lingkungan kepolisian dikenal dengan istilah pelayanan masyarakat / YANMAS) sebenarnya merupakan esensi pekerjaan polisi, dalam rangka mewujudkan filosofi POLRI “Rastra Sewakottama” yang berarti abdi utama nusa dan bangsa (masyarakat). Abdi utama di sini dimaksudkan sebagai pelayanan prima yang kemudian menjwai kode etik POLRI baru. Pelayanan publik bagi kepolisian tercantum dalam TRI BRATA yang merupakan filosofi POLRI yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri khususnya Pasal 13 huruf c “memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” dan Pasal 14 huruf k “memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kepentingannya di dalam lingkup tugas kepolisian”. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, dalam pembagian tugas ditentukan kewilayahan pemerintahan, dimana setiap ada pemerintahan mengharuskan adanya kantor kepolisian dalam pemerintahan tersebut untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat pada suatu daerah



tersebut, misalnya pemerintah kota diharuskan ada Mapolresta, sedangkan pemerintah kabupaten diharuskan ada Mapolres. Arah kebijakan strategi Polri yang mendahulukan tampilan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dimaksud bahwa, dalam setiap kiprah pengabdian anggota Polri baik sebagai pemelihara Kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdikan bagi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Memperhatikan hal diatas, maka lembaga Kepolisian memiliki perbedaan dengan lembaga lainnya, karena tugas pelayanan kepada masyarakat hanyalah merupakan salah satu dari tugasnya, selain bertugas sebagai penegak hukum, yang tampak lebih dominan.

Kepolisian memberikan pelayanan berupa administrasi dan operasional/ lapangan dimana setiap pelayanan dilaksanakan oleh suatu bagian khusus atau petugas khusus yang memahami masing-masing fungsi dan prosedur pelayanan. Prosedur dan standar pelayanan kepolisian diatur melalui undang-undang, peraturan pemerintah, dan juklak dari Kapolri.

Seperti halnya di beberapa daerah Propinsi Jawa Timur; Polres Malang, Polres Blitar tersebut fungsi pelayanan terpisah menjadi dua tempat yaitu Kepolisian Resor dan Samsat seperti LANTAS, kantor kepolisiannya yang terpisah tersebut untuk menuju tahap III program quick wins tentang pelayanan prima (*strive for excellence*) akan menjadi terhambat. Hal tersebut juga terjadi di kantor Kepolisian Resor kota pasuruan dimana fungsi pelayanannya terpisah menjadi 3 bagian; LANTAS, pengurusan SIM, dan kantor kepolisian, sehingga tahap III program quick wins tersebut dalam pelayanan prima (*strive for excellence*) akan menjadi terhambat, dikarenakan dalam akses prosedur pelayanannya tidak membuat masyarakat merasa nyaman mendapatkan pelayanan public yang disebabkan oleh terpisahnya LANTAS, pengurusan SIM dari kawasan lingkungan kepolisian. Oleh karena itu pemilihan lokasi yang dijadikan objek, berada di Kota Pasuruan, tepatnya berada jantung kota



berdekatan dengan gedung-gedung pemerintahan, perumahan dan permukiman penduduk. Sehingga sangat strategis jalur aksesibilitas menuju pemilihan lokasi kantor kepolisian kota pasuruan.

Kota Pasuruan, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pasuruan berada di jalur utama Surabaya - Banyuwangi, Surabaya-Malang dan Banyuwangi-Malang. Kota Pasuruan berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara, serta Kabupaten Pasuruan di sebelah timur, selatan, dan tengah. Kota Pasuruan terdiri dari tiga kecamatan 34 kelurahan. Kota pasuruan memiliki luas 13,86 Km² berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara, serta kabupaten Pasuruan disebelah timur, selatan, dan barat. Pasuruan dapat ditempuh dari Surabaya menggunakan bus dalam waktu 2 jam, dan juga dapat ditempuh dari Malang menggunakan bus dalam waktu 1 jam.

Sejak tanggal 14 Agustus 1950 dinyatakan Kotamadya Pasuruan sebagai daerah otonom yang terdiri dari desa dalam 1 kecamatan. Pada tanggal 21 Desember 1982 Kotamadya Pasuruan diperluas menjadi 3 kecamatan dengan 19 kelurahan dan 15 desa. Pada tanggal 12 Januari 2002 terjadi perubahan status desa menjadi kelurahan berdasarkan PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2002, dengan demikian wilayah Kota Pasuruan terbagi menjadi 34 kelurahan. Berdasarkan UU NO.22 TAHUN 1999 TENTANG OTONOMI DAERAH terjadi perubahan nama dari kotamadya menjadi kota maka Kotamadya Pasuruan berubah menjadi Kota Pasuruan.

Kota Pasuruan terdiri atas 3 kecamatan, yang terbagi atas 34 kelurahan. Kecamatan di Kota Pasuruan yaitu Bugulkidul, Gadingrejo, dan Purworejo.

- **Kecamatan Bugulkidul** memiliki kelurahan-kelurahan: Kepel, Blandongan, Tapaan, Sekargadung, Bakalan, Krampyangan, Tamanan, Pekuncen, Bugul Kidul, Bugul Lor, Kandang Sapi, Panggung Rejo, Mandaran Rejo.
- **Kecamatan Gadingrejo** memiliki kelurahan-keluarahan :Karangketug, Gentong, Sebani, Petahunan, Bukir, Randusari, Krapyakrejo, Karanganyar, Gadingrejo, Tamba'an ,Trajeng.



- **Kecamatan Purworejo** memiliki kelurahan-keluarahan :Pohjentrek, Wirogunan, Tembokrejo, Purutrejo, Kebonagung, Purworejo, Bangilan, Kebonsari, Mayangan, Ngemplak Rejo.

Kota Pasuruan merupakan salah satu dari sedikit kawasan pemerintah kota di Jawa Timur yang memiliki fasilitas infrastruktur pembangunan yang lengkap. Secara geografis, Kota Pasuruan terletak antara 112⁰45'-112⁰55' BT dan 7⁰35'-7⁰45' LS. Wilayahnya yang seluas 36,57 Km² berada pada ketinggian ±4m di atas permukaan laut dengan iklim sedang dan curah hujan rata-rata sebesar 1.337 mm/tahun. Dengan jumlah penduduknya mencapai 165.992 jiwa yang terdiri dari 81.313 penduduk laki – laki dan 84.679 penduduk perempuan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,19% per tahun dan kepadatan rata-rata 4.437 jiwa/Km². Topografi wilayah Kota Pasuruan adalah datar melandai dari selatan ke utara dengan kemiringan 0-1% dan di sebelah selatan agak cekung. Kondisi hidrologinya antara lain dipengaruhi oleh keberadaan 6 buah sungai dengan panjang total 26,5Km. Jenis penggunaan tanahnya meliputi pemukiman, pertanian, industri, pekarangan, sekolah, pasar dan perkantoran.

Dari uraian diatas di kota pasuruan membutuhkan kantor kepolisian resort kota (*polresta*) dengan tema arsitektur post-modern yang mendukung sistem Pemasarakatan diwujudkan dalam program *Quick Wins* dengan bentuk bangunan yang lebih mengutamakan pendekatan segi zona-zona fungsi pelayanan kepolisian terpisah dari satu lingkungan kepolisian serta pembinaan dengan tetap mempertahankan segi keamanan, memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan bagi pelaksanaan pembinaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasarakatan. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta tercapainya tugas dan peran tersebut dapat dijalankan dengan baik. Diperlukan kemauan dan kemampuan untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya, tentang fungsi dan peran kepolisian, terutama peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.



Di dalam dunia arsitektur, postmodern menunjuk pada suatu proses atau kegiatan dan dapat dianggap sebagai suatu langgam, yakni langgam postmodern. Dalam kenyataan hasil karya arsitekturnya, langgam ini muncul dalam tiga versi / sub langgam yakni purna modern, neo modern, dan dekonstruksi. Mengingat bahwa masing –masing pemakai dan pengikut dari sub langgam / versi tersebut cenderung tidak peduli pada sub langgam / versi yang lain, maka masing – masing menamakannya langgam purna modern, langgam neo modern, dan langgam dekonstruksi.

Penekanan desain konsep arsitektur post-modern dipilih karena dapat mengkomunikasikan identitas regional, identitas kultural, atau identitas historikal. Sehingga memberikan perasaan aman, nyaman, nikmat, gambaran dan kenyataan yang sejujur-jujurnya. Serta memberi kesadaran terhadap manusia akan budayanya.

Berdasar dari hal-hal tersebut perlu adanya perencanaan dan perancangan kantor kepolisian resort (*polres*), yang sesuai dengan sistem masyarakat (*Quick Wins*) yang telah digariskan pemerintah dan juga memperhatikan kodrat penghuninya dengan menggunakan penekana desain konsep Arsitektur post-modern.

1.2. Permasalahan.

1.2..1. Umum.

- Bagaimana menampung semua aktivitas dan kegiatan kepolisian di pasuruan dalam satu lingkungan kepolisian.

1.2..2. Khusus.

- Bagaimana program *Quick Wins* tahap III dapat berjalan/berlangsung pada tahun yang tercantum di “SURAT PERINTAH NO. POL : SPRIN/390.A/RA/III/2009/BARESKRIM TANGGAL 31 MARET 2009”.
- Bagaimana membuat bangunan kantor kepolisian resort di Pasuruan yang memenuhi tingkat kenyamanan ruang, kelengkapan fasilitas, kemudahan sirkulasi, dan pengendalian kebisingan, agar anggota kepolisian dapat menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dengan nyaman. Sehingga masyarakat



mendapatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang baik dari kepolisian. Serta masyarakat menjadi aman, tentram, dan damai.

- Kebisingan yang diakibatkan oleh kendaraan umum menjadi titik berat permasalahan pemilihan lokasi.
- Bagaimana menerapkan konsep arsitektur post-modern ke dalam desain arsitektural yang ada sebagai terjemahan bangunan kantor kepolisian resort di Pasuruan nantinya, sehingga image kepolisian yang “menyeramkan/menakutkan” lebih menjadi “berwibawa/tegas/mengayomi”.

1.3. Batasan-Batasan.

- Gedung kantor polisi yang akan digunakan merupakan Gedung kantor kepolisian resor kota, tepatnya berada di Kota Pasuruan, Wilayah Malang, Propinsi Jawa Timur.
- Gedung kantor polisi ini kegiatan atau aktivitasnya hanya dibatasi untuk kegiatan atau aktivitas kantor saja.
- Bentuk dan tampilan arsitektur Dibatasi sesuai dengan Tema Arsitektur Postmodern dengan tokoh Kisho Kurokawa.

1.4. Tujuan Dan Sasaran.

1.4.1. Tujuan.

- merumuskan berbagai potensi dan permasalahan kantor kepolisian resort kota pasuruan yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas, untuk dapat dianalisis dan ditemukan berbagai pemecahan arsitektural yang selanjutnya dapat dituangkan dalam perencanaan dan perancangan suatu kantor kepolisian resort kota pasuruan yang tidak hanya sesuai dengan fungsi dan peranannya saja, tapi juga yang menunjang kegiatan didalamnya dengan optimal untuk masa yang akan datang.
- Mempersatukan fungsi-fungsi pelayanan yang terpisah dari satu kesatuan lingkungan kepolisian.
- Menberi citra (*image*) berwibawa terhadap kantor kepolisian resort kota pasuruan yang dulunya ber-citra “buruk/menyeramkan/menakutkan” dengan penekanan arsitektur post-modern.



- Dengan dipilihnya lokasi tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat menuju lokasi dengan mudah, baik menggunakan kendaraan umum kendaraan pribadi dikarenakan dekat dengan terminal, gedung-gedung pemerintahan, perumahan dan permukiman penduduk.

1.4..2. Sasaran.

- Sasaran yang dimaksudkan disini adalah untuk dapat melaksanakan program kepolisian *Quick Wins* tahap III (*Strive For Excellence*) dengan penekanan arsitektur post-modern.



1.5. Metodologi / Pola Pemikiran.

Aktualita

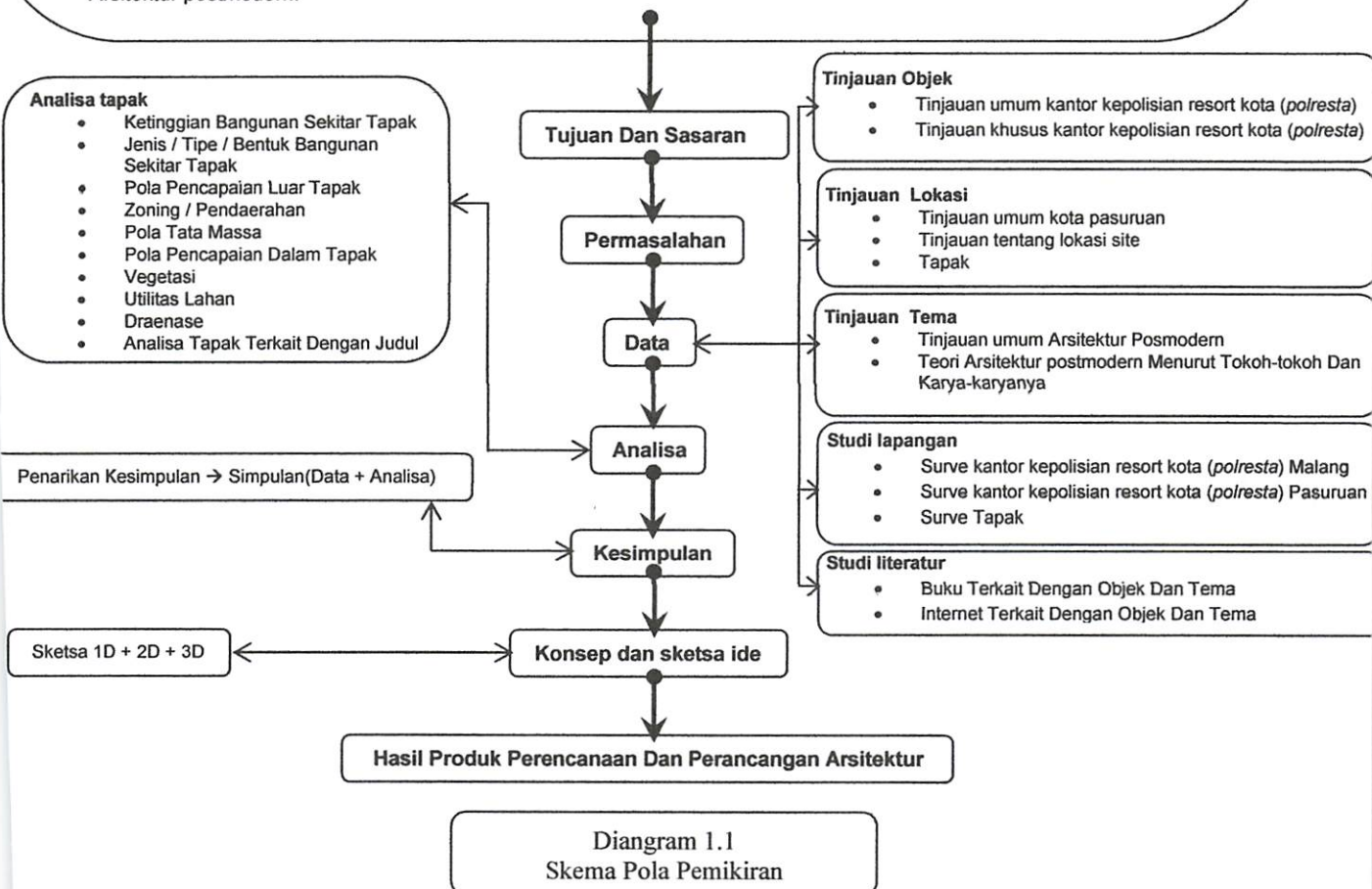
- Kantor Kepolisian Resort kota (*POLRESTA*) di Kota Pasuruan yang pada saat ini fungsi pelayanannya masih terpisah dari satu kesatuan lingkungan kepolisian Kota Pasuruan sehingga kurang mendukung proses pembinaan yang sesuai dengan system pemasyarakatan.
- Bentuk Fisik (*FASAD*) Kantor Kepolisian Resort kota (*POLRESTA*) di Kota Pasuruan mempunyai *image* “menyeramkan/menakutkan/kurang berwibawa” bagi masyarakat pasuruan.
- Belum terlaksananya program kepolisian *IQUICK WINS* yang terdiri dari 3 tahap yakni:
 - Tahap I (2009-2010) membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*).
 - Tahap II (2011-2015) membangun Kemitraan Masyarakat (*Pathnership Building*)
 - Tahap III (2016-2025) melakukan pelayanan Prima (*Strive For Excellence*)
- pada tahap III melakukan pelayanan prima (*Strive For Excellence*) masih belum menemukan formula (bentuk bangunan/penataan fungsi bangunan) yang masih dalam satu kesatuan lingkungan kepolisian, untuk dapat melakukan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Urgensi

Di kota Pasuruan membutuhkan kantor kepolisian resort yang mendukung system/program *Quick Wins* yang telah direncanakan oleh polri dalam 3 tahapan yang telah direncanakan yakni Tahap I (2009-2010) membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*), Tahap II (2011-2015) membangun Kemitraan Masyarakat (*Pathnership Building*), dan Tahap III (2016-2025) melakukan pelayanan Prima (*Strive For Excellence*) yang lebih mengutamakan pendekatan segi pelindung, pengayom dan pelayan terhadap masyarakat sehingga tidak adanya fungsi pelayanan yang terpisah dari lingkup lingkungan kepolisian.

Originalitas

Merencanakan dan merancang kantor kepolisian resort kota pasuruan, yang sesuai dengan program *quick wins* tahap 3 pelayanan Prima (*Strive For Excellence*) yang telah digariskan kepolisian dengan menggunakan penekanan desain konsep Arsitektur postmodern.



BAB II

KAJIAN TEMA

2.1. Latarbelakang Arsitektur Postmodern.

2.1..1. Sejarah Post-Modern

Dalam bukunya, *The Structure of Scientific Revolutions* yang diterjemahkan dengan judul *Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, Thomas Kuhn (2000) menjelaskan bagaimana revolusi sains (ilmu pengetahuan) terjadi. Menurut Kuhn, ilmu pengetahuan sendiri merupakan akumulasi fakta, teori, dan metode yang dihimpun oleh para ilmuwan dalam suatu pola tertentu. Sebuah teori baru bukan semata-mata sesuatu yang ditambahkan pada teori lama, melainkan di dalamnya terdapat rekonstruksi dan re-evaluasi terhadap fakta-fakta yang ada pada masa sebelumnya. Sebuah teori baru dapat menciptakan revolusi ilmu pengetahuan baru.

Sumalyo (1997) menyatakan bahwa perkembangan arsitektur sejalan dengan kebudayaan manusia, yaitu pola pikir dan pola hidupnya. Hal itu berarti perkembangan arsitektur dipengaruhi oleh perkembangan pola pikir dan pola hidup manusia pada zamannya. Pola pikir manusia dipengaruhi oleh cara pandangnya (*world view*) terhadap dunia serta realitas yang tampak dan yang tak tampak. Jencks (1995) menyatakan bahwa wujud arsitektur dipengaruhi oleh *worldview* manusia dan masyarakatnya, dengan prinsip "*Form Follow Worldview*".

Gerakan arsitektur modern dapat dipandang sebagai cara pandang, meminjam istilah Lyotard, "masyarakat industrial". Kemudian, dalam perkembangan baru muncul fenomena "masyarakat post-industrial"- juga istilah dari Lyotard. Cara pandang masyarakat pasca-industrial mengalami perubahan paradigma yang kemudian dikenal sebagai paradigma posmodernisme. Arsitektur sebagai bagian dari kebudayaan fisik manusia ikut mengalami perubahan cara pandang, yang kemudian disebut sebagai "posmodernisme arsitektur".

Istilah "postmodern" sendiri sebenarnya tidak hanya digunakan dalam bidang arsitektur. Pemikiran tentang "posmodern" atau "posmodernisme" berkembang di dalam bidang yang sangat luas, mulai dari bidang sastra, seni,



film, sosiologi, politik, geografi, sains, dan agama. Setidaknya itulah yang terdapat di dalam buku *The Post-Modern Reader* (Jencks, 1992) yang merupakan kumpulan berbagai tulisan tentang posmodern dan posmodernisme yang diedit oleh Charles Jencks.

Keragaman pemikiran posmodern di dalam bidang arsitektur dapat dilihat dari beberapa teori posmodern yang muncul. Teori-teori posmodernisme arsitektur dapat dikaji dalam beberapa buku. Pertama, *Complexity and Contradiction in Architecture* karya Robert Venturi (1966) dengan konsep “both-and”-nya. Buku karya Charles Jencks *The Language of Postmodern Architecture* (1977) dengan konsep “double coding”-nya. Buku karya Paolo Portoghesi *Postmodern* (1983) dengan konsep “presence of the past”-nya. Buku *The History of Postmodern Architecture*, karya Heinrich Klotz (1998), dengan “fiction and function”-nya. Buku karya Kurokawa *Intercultural Architecture* (1991) dengan konsep *simbiosis*-nya.

Para teoritikus tersebut mengaggas posmodernisme di dalam arsitektur berdasarkan versinya masing-masing. Perbedaan pemikiran mereka dengan ragam dan rentang pemikiran yang cukup luas memunculkan ketidakjelasan pemikiran tentang apa sesungguhnya posmodernisme di dalam arsitektur. Hal inilah yang pada akhirnya memunculkan berbagai pertanyaan tentang posmodernisme di dalam arsitektur. Pertanyaan mendasar yang dicoba diungkap dalam buku makalah ini adalah konsep dan metode (ekspresi) formal apa yang telah ditawarkan pemikiran-pemikiran posmodernisme di dalam arsitektur. Sebagai langkah awal, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian-pengertian umum yang berkaitan dengan “modernism”, “modernisasi”, “modernitas”, dan “posmodernisme”.

2.1..2. Sejarah Arsitektur Post-Modern

Dalam bukunya, *The Structure of Scientific Revolutions* yang diterjemahkan dengan judul *Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, Thomas Kuhn (2000) menjelaskan bagaimana revolusi sains (ilmu pengetahuan) terjadi. Menurut Kuhn, ilmu pengetahuan sendiri merupakan akumulasi fakta, teori, dan metode yang dihimpun oleh para ilmuwan dalam suatu pola tertentu.



Sebuah teori baru bukan semata-mata sesuatu yang ditambahkan pada teori lama, melainkan di dalamnya terdapat rekonstruksi dan re-evaluasi terhadap fakta-fakta yang ada pada masa sebelumnya. Sebuah teori baru dapat menciptakan revolusi ilmu pengetahuan baru.

Sumalyo (1997) menyatakan bahwa perkembangan arsitektur sejalan dengan kebudayaan manusia, yaitu pola pikir dan pola hidupnya. Hal itu berarti perkembangan arsitektur dipengaruhi oleh perkembangan pola pikir dan pola hidup manusia pada zamannya. Pola pikir manusia dipengaruhi oleh cara pandangnya (*world view*) terhadap dunia serta realitas yang tampak dan yang tak tampak. Jencks (1995) menyatakan bahwa wujud arsitektur dipengaruhi oleh *worldview* manusia dan masyarakatnya, dengan prinsip "*Form Follow Worldview*".

Gerakan arsitektur modern dapat dipandang sebagai cara pandang, meminjam istilah Lyotard, "masyarakat industrial". Kemudian, dalam perkembangan baru muncul fenomena "masyarakat post-industrial"- juga istilah dari Lyotard. Cara pandang masyarakat pasca-industrial mengalami perubahan paradigma yang kemudian dikenal sebagai paradigma posmodernisme. Arsitektur sebagai bagian dari kebudayaan fisik manusia ikut mengalami perubahan cara pandang, yang kemudian disebut sebagai "posmodernisme arsitektur".

Istilah "postmodern" sendiri sebenarnya tidak hanya digunakan dalam bidang arsitektur. Pemikiran tentang "postmodern" atau "posmodernisme" berkembang di dalam bidang yang sangat luas, mulai dari bidang sastra, seni, film, sosiologi, politik, geografi, sains, dan agama. Setidaknya itulah yang terdapat di dalam buku *The Post-Modern Reader* (Jencks, 1992) yang merupakan kumpulan berbagai tulisan tentang postmodern dan posmodernisme yang diedit oleh Charles Jencks.

Keragaman pemikiran postmodern di dalam bidang arsitektur dapat dilihat dari beberapa teori postmodern yang muncul. Teori-teori posmodernisme arsitektur dapat dikaji dalam beberapa buku. Pertama, *Complexity and Contradiction in Architecture* karya Robert Venturi (1966) dengan konsep "*both-and*"-nya. Buku karya Charles Jencks *The Language of Postmodern*



Architecture (1977) dengan konsep “*double coding*”-nya. Buku karya Paolo Portoghesi *Postmodern* (1983) dengan konsep “*presence of the past*”-nya. Buku *The History of Postmodern Architecture*, karya Heinrich Klotz (1998), dengan “*fiction and function*”-nya. Buku karya Kurokawa *Intercultural Architecture* (1991) dengan konsep *simbiosis*-nya.

Para teoritikus tersebut menggagas posmodernisme di dalam arsitektur berdasarkan versinya masing-masing. Perbedaan pemikiran mereka dengan ragam dan rentang pemikiran yang cukup luas memunculkan ketidakjelasan pemikiran tentang apa sesungguhnya posmodernisme di dalam arsitektur. Hal inilah yang pada akhirnya memunculkan berbagai pertanyaan tentang posmodernisme di dalam arsitektur. Pertanyaan mendasar adalah konsep dan metode (ekspresi) formal apa yang telah ditawarkan pemikiran-pemikiran posmodernisme di dalam arsitektur.

2.2. Definisi Arsitektur Post-Modern.

2.2..1. Devinisi Postmodern.

Pengertian *posmodern* di dalam kamus *Oxford English Dictionary's (OED)* suplemen tahun 1982, yang dikutip oleh Rose, diartikan sebagai berikut:

“*Post-mo.dern and also post-modern, subsequent to, or later than, what is 'modern': spec. in arts, esp. Archit., applied to a movement in reaction against that designated 'modern'.* (Jencks, 1992:120)

(Pos-mo.dern atau pos-modern adalah sesuatu sesudah atau yang kemudian dari apa yang disebut “modern”. Khususnya, di dalam bidang seni, terlebih arsitektur, istilah ini diberikan untuk sebuah gerakan yang bereaksi melawan apa-apa yang menandakan modern).

Terhadap definisi posmodern di atas, Rose dalam Jencks (1992) memberikan dua pendapatnya. *Pertama*, kata posmodern tidak selalu merupakan pemikiran sesudah modern, tetapi mungkin sama kontemporernya dengan modern, sebagaimana pendapat Lyotard. *Kedua*, *posmodern* di dalam arsitektur dilihat sebagai sebuah reaksi sederhana terhadap arsitektur modern,



digambarkan sebagai “*double coding*” dari gaya modern dengan beberapa gaya atau “*code*”.

Menurut Fetherstone (Sofian, 2001), istilah posmodern merupakan istilah generic (turunan). Awalan *pos* berarti ‘sesuatu yang datang sesudah, pecahan dari atau pemutusan hubungan dengan’. Istilah posmodern lebih cenderung sebagai “bentuk penegasan terhadap modern, sesuatu perpecahan atau pergeseran dari gambaran definitive modern”.

Menurut Lyotard dalam *The Postmodern Condition*, awalan *pos* menekankan sesuatu ‘setelah’, bukan sebelum modernism, dan memiliki tujuan mendasar “hybrid”, yaitu mengibarkan yang modern dan budaya lokal (Jencks, 1992).

Di pihak lain, menurut Sugiharto (1996), awalan *pos* berarti kritik filosofis terhadap *worldview*, epistemologi, dan ideology modernism. Akhiran *isme* berarti sebuah system pemikiran. Posmodernisme bisa memiliki banyak arti. Lyotard dan Gellner mengartikan “pemutusan hubungan dengan modernisme”. Posmodernisme juga dipandang sebagai perkembangan lanjut dari budaya modern atau modernitas, seperti pendapat Baudrillard dan Foucault, yang menyatakan posmodernisme sebagai “bentuk radikal dari kemodernan”. Di pihak lain, Habermas mengartikan “proyek modernisasi yang belum selesai”. Giddens berpendapat sebagai “wajah modern yang sadar diri”, dan menurut Griffin, “koreksi terhadap aspek-aspek tertentu dari modernisme”.

Pemikiran posmodernisme meliputi berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang seni, menurut Baudrillard, posmodern berarti “pencampuradukan gaya hingga seni kehilangan orisinalitasnya dan hanya merupakan pengulangan gaya masa lalu”. Dalam bidang sosial ekonomi, menurut Daniel Bell, posmodernisme berarti “meningkatnya kecenderungan yang saling bertolak belakang”. Dalam bidang budaya, menurut Frederic Jameson, posmodern berarti “logika kultural berdasarkan dominasi teknologi reproduksi dan sistem kapitalisme global”. Dalam bidang filsafat, menurut Lyotard, posmodern berarti “Ketidakpercayaan terhadap segala bentuk narasi besar, filsafat metafisis dan sejarah, degala bentuk pemikiran mentotalisasi dari paradigma modern” (Sugiharto, 1996).



Jencks (1992) menyatakan bahwa Ihab Hasan sampai yotard, David Lodge sampai David Harvey, dari fisafat sampai arsitektur menyetujui bahwa pengertian posmodernisme ad sebagai berikut:

“Post-Modernism means the end of a single world view and, by extension, ‘a war of totality’, a resistance to single explanations, a respect for difference and a celebration of regional, local and particular” (Jencks, 1992:11).

(Posmodernisme berarti berakhirnya worldview tunggal, dengan kata lain, perang terhadap totalitas, resistensi terhadap eksplanasi tunggal, penghargaan terhadap perbedaan dan perayaan yang bersifat regional, lokal atau khusus).

Secara kontradiktif, menurut Jencks (1992), posmodernisme juga berarti kelanjutan modernisme. Ia menyatakan,

“Post-Modernism means the continuation of modernism and its transcendence, a double activity that acknowledges our complex relationship to proceeding paradigm and world view” (Jencks, 1992:11).

(Posmodernisme berarti kelanjutan modernisme dan transendensinya. Sebuah aktivitas ganda yang mengetahui hubungan kompleks dengan paradigma dan world view sebelumnya)

Posmodernisme bukan berarti perpindahan dari “eksplanasi totalitas” modernisme menuju “eksplanasi totalitas” yang lain. Gerakan ini berpikir dengan menggunakan *binary terms* ‘istilah-istilah biner’, yaitu sebuah model berpikir relatifitas yang membentuk kontinum, jaringan, *rhizome* atau pola-pola. Pergantian dari posmodernisme dari paradigma sebelumnya bukan berarti oposisi (perlawanan), namun lebih sebagai *hybridization* (turunan) dan *complexification* (pengkayaan) elemen modern dengan sesuatu yang lain. Itulah yang disebut *doube coding* (Jencks, 1992).

Jencks (1992) tampaknya mengikuti pendapat John Barth, Linda HUtcheon dan Andreas Huyssen, yang menegaskan bahwa gerakan ini “bukan anti-modernisme”. Gerakan ini tetap menerima modernisasi atau industrialisasi, tetapi menolak untuk menempatkan kemajuan teknologi dan world view sebagai nabi seperti yang dilakukan paradigma sebelumnya.



Penjelasannya tentang alam semesta (*universe*), masyarakat dan alam yang masih relevan tetap dipertahankan, namun secara terbatas. Posmodernisme berarti menata ulang asumsi-asumsi modernisme dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih benar. Dengan demikian, awalan *pos* bukan berarti “penghancuran”, melainkan “penghalusan” terhadap pendahulunya.

Perbedaan pendapat tentang posmodernisme sebagai oposisi atau afirmatif dari modernisme tampaknya masih merupakan perdebatan panjang. Foster (1985) dalam Turner (2003) mengkaji karya-karya Lyotard dan Frederic Jameson dan melihat adanya perbedaan pemikiran “posmodernisme sebagai perlawanan” dan “posmodernisme sebagai reaksi” di dalamnya.

Satu hal yang penting diingat adalah bahwa tujuan gerakan posmodernisme adalah terciptanya pluralisme untuk mengatasi elitisme yang inheren di dalam paradigma sebelumnya.

2.2.2.2. Devinisi Arsitektur Postmodern.

- Arsitektur yang sudah melepaskan diri dari aturan-aturan modernisme. Tapi kedua-duanya masih eksis.
- Anak dari Arsitektur Modern. Keduanya masih memiliki sifat/ karakter yang sama.
- Koreksi terhadap kesalahan Arsitektur Modern. Jadi hal-hal yang benar dari Arsitektur Modern tetap dipakai.
- Merupakan pengulangan periode 1890-1930.
- Arsitektur yang menyatu-padukan Art dan Science, Craft dan Technology, Internasional dan Lokal. Mengakomodasikan kondisi-kondisi paradoksal dalam arsitektur.
- Tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Arsitektur Modern.

Perubahan mendasar dalam sejarah dunia arsitektur adalah saat hadirnya arsitektur modern. Arsitektur sampai abad ke-19 dianggap sebagai seni bangunan. Reformasi pemikiran Arsitektur Modern ini mulai muncul pada abad ke-18, dimana yang dimaksud Arsitektur Modern bukan karya arsitektur, melainkan ide, gagasan, pikiran atau pengetahuan dasar tentang arsitektur.



Pemikiran tersebut baru dapat direalisasikan pada pertengahan abad ke-19 dikarenakan pendidikan Arsitektur yang dibagi menjadi dua, sebagai kesenian dan sebagai ilmu teknik sipil, dan munculnya industri bahan bangunan.

Antara tahun 1890-1930 muncul berbagai macam pergerakan, antara lain : Art and Craft, Art Nouveau, Ekspresionisme, Bauhaus, Amsterdam School, Rotterdam School, dll. Periode tersebut merupakan puncak sekaligus titik awal dari arsitektur modern.

Pada tahun 1950-1960, terdapat 2 pihak yang berlawanan :

- Kelompok yang berpihak pada teknologi dan industrialisasi; tahun 1950 dikatakan sebagai titik puncak kejayaan Arsitektur Modern.
- Kelompok yang memuja estetik dan artistik; tahun 1950-an dilihat sebagai titik awal kemerosotan Arsitektur Modern.

Sekitar tahun 1960-an, pertentangan antara kedua pihak itu terjadi lagi dikarenakan adanya perbedaan pendapat tentang ‘untuk siapa arsitektur itu diciptakan?’. Hal tersebut yang menjadi titik awal lahirnya Post Modernisme yang melawan Modernisme dengan pernyataan: *Less Is Bore*. Media massa juga ikut berperan dalam memicu timbulnya pluralism yang menjadi bahan dasar post modernisme.

Perbedaan karakter Modernisme dan Post Modernisme :

- Modernisme : singular, seragam, tunggal.
- Post Modernisme : plural, beraneka ragam, bhinneka.

2.3. Tentang Arsitektur Post-Modern.

2.3..1. Arsitektur Postmodern Sebagai Reaksi Arsitektur Modern.

Arsitektur modern berkembang dan menjadi arus yang dominan sampai pada tahun 1970-an. Ia memajukan program industrialisasi dan menyingkirkan aneka ragam corak lokal. Akibatnya ekspansi arsitektur modern sering menghancurkan struktur bangunan tradisional. Ia hampir meratakan semua bangunan tradisional dengan bulldozer. Bulldozer adalah alat yang merupakan cetusan jiwa modern untuk "maju"(progress).



Beberapa arsitek modern belum puas jika perubahan hanya dalam bidang arsitektur. Mereka ingin agar perubahan dalam bidang arsitek, terjadi juga dalam bidang-bidang seni, ilmu pengetahuan, dan industri. Arsitektur postmodern muncul sebagai reaksi terhadap arsitektur modern.

Penolakan oleh postmodern terhadap modern didasarkan kepada sebuah prinsip. *Prinsip arsitektur postmodern adalah arsitektur yang bersifat simbolik.* Karya seni modern hanya merupakan sebuah teknik membangun tanpa nuansa artistik. Padahal sebuah struktur bangunan memerlukan dimensi artistik agar dapat *menyampaikan suatu kisah atau melambangkan suatu dunia imajiner.* Ini yang dikritik oleh kaum postmodern terhadap kaum modern. Kaum Postmodern berusaha mengembalikan elemen "fiksi" dari sebuah arsitektur dengan *menambahkan ornamen-ornamen* pada arsitektur. Arsitektur harus kembali berperan untuk *menciptakan "bangunan-bangunan yang kreatif dan imajinatif."*

Arsitektur postmodern menolak tuntutan modern di mana sebuah bangunan harus mencerminkan kesatuan. Justru sebaliknya buah karya post-modern berusaha menunjukkan dan memperlihatkan gaya, bentuk, corak, yang saling bertentangan. Mereka ingin menemukan sebuah bahasa baru yang *menghargai keaneka-ragaman dan pluralisme.*

Arsitektur postmodern sengaja *memberikan ornamen (hiasan).* Ini merupakan lawan dari arsitektur modern yang membuang segala hiasan-hiasan yang tidak perlu. Arsitektur postmodern juga *menggunakan beberapa teknik dan gaya seni tradisional* yang dahulu dibuang oleh arsitektur modern.

2.3..2. Pokok Pikiran Arsitektur Postmodern.

Pokok-pokok pikiran yang dipakai arsitek Post Modern yang tampak dari ciri-ciri di atas berbeda dengan Modern. Di sini akan disebutkan tiga perbedaan penting dengan yang modern itu, yakni;

- Tidak memakai semboyan *Form Follows Function*



Arsitektur posmodern tidak menganut teori *Form Follows Function* melainkan arsitektur posmo mendefinisikan arsitektur sebagai sebuah bahasa atau rasa sehingga arsitektur tidak mewadahi melainkan mengkomunikasikan.

- Fungsi (bukan sebagai aktivitas atau apa yang dikerjakan oleh manusia terhadap arsitektur)

Yang dimaksud dengan 'fungsi' di sini bukanlah 'aktivitas', bukan pula 'apa yang dikerjakan/dilakukan oleh manusia terhadap arsitektur' (keduanya diangkat sebagai pengertian tentang 'fungsi' yang lazim digunakan dalam arsitektur modern). Dalam arsitektur posmo yang dimaksud fungsi adalah peran dan kemampuan arsitektur untuk mempengaruhi dan melayani manusia, yang disebut manusia bukan hanya pengertian manusia sebagai makhluk yang berpikir, bekerja melakukan kegiatan, tetapi manusia sebagai makhluk yang berpikir, bekerja, memiliki perasaan dan emosi, makhluk yang punya mimpi dan ambisi, memiliki nostalgia dan memori. Manusia bukan manusia sebagai makhluk biologis tetapi manusia sebagai pribadi.

Fungsi = apa yang dilakukan arsitektur, bukan apa yang dilakukan manusia; dan dengan demikian, 'FUNGSI bukan AKTIVITAS'

Dalam posmo, perancangan dimulai dengan melakukan analisa fungsi arsitektur, yaitu :

- Arsitektur mempunyai fungsi memberi perlindungan kepada manusia (baik melindungi nyawa maupun harta, mulai nyamuk sampai bom),
- Arsitektur memberikan perasaan aman, nyaman, nikmat,
- Arsitektur mempunyai fungsi untuk menyediakan dirinya dipakai manusia untuk berbagai keperluan,
- Arsitektur berfungsi untuk menyadarkan manusia akan budayanya akan masa silamnya,
- Arsitektur memberi kesempatan pada manusia untuk bermimpi dan berkhayal,



- Arsitektur memberi gambaran dan kenyataan yang sejajurnya.
- Bentuk dan Ruang

Didalam posmo, bentuk dan ruang adalah komponen dasar yang tidak harus berhubungan satu menyebabkan yang lain (sebab akibat), keduanya menjadi 2 komponen yang mandiri, sendiri, merdeka, sehingga bisa dihubungkan atau tidak. Yang jelas bentuk memang berbeda secara substansial, mendasar dari ruang.

Ciri pokok dari bentuk adalah ‘ada dan nyata/terlihat/teraba’, sedangkan ruang mempunyai ciri khas ‘ada dan tak-terlihat/tak-nyata’. Kedua ciri ini kemudian menjadi tugas arsitek untuk mewujudkannya.

2.4. Teori Arsitektur Postmodern Menurut Pandangan Tokoh.

Berikut pengkajian bagaimana perkembangan pemikiran tentang postmodernisme dalam arsitektur. Beberapa pemikir arsitektur postmodern seperti Charles Jencks, Heinrich Kotz, Michael Graves, Robert Venturi, Kisho Kurokawa dan pemikir-pemikir arsitektur postmodern lainnya. Dipilih satu pemikir postmodern dalam arsitektur yaitu *Kisho Kurokawa* untuk dikaji teori arsitekturnya, ciri-ciri arsitekturnya maupun bagaimana cara ber-arsitekturnya. Kisho Kurokawa adalah arsitek dan pemikir posmodern dalam aarsitektur dari Jepang. Kurokawa memulai pemikirannya berawal dari pemikiran tokoh postmodern sebelumnya “Charles Jencks”, dan mengembangkannya lebih lanjut.

2.4..1. Teori Arsitektur Postmodern (Kisho Kurokawa).

Kisho Kurokawa dalam *Intercultural Architecture* (1991) mencoba mendefinisikan postmodernisme arsitektur dengan menggunakan pendekatan analisis filsafah-kebudayaan. Kurokawa menganjukan konsep “*simbiosis*” sebagai dasar pemikiranposmodernismenya. Pengertian postmodern juga berubah mengikuti arah transformasi besar nilai-nilai di dalam masyarakat secara keseluruhan (Kurokawa 1991).



Menurut Kurokawa (1991:163), filsafah simbiosis adalah sebuah teks untuk mendekonstruksikan metafisika, logos, dan budaya. Filsafah ini mencakup simbiosis budaya yang bermacam-macam (*heterogen*), manusia dan teknologi, interior dan eksterior, *whole* dan *part*, sejarah dan masa depan, agama dan ilmu, serta manusia dan alam. Dalam era postmodern, material dan mental, fungsi dan emosi, keindahan dan ketakutan, pemikiran analitik dan sintetik akan ada (*eksis*) dalam simbiosis.

Arsitektur berdasarkan filsafah simbiosis diciptakan dengan menelusuri akar sejarah dan budaya secara mendalam, dan pada saat yang sama berusaha menggabungkan (*unification*) elemen-elemen dari budaya lain didalam karyanya. Tidak ada satupun ikon arsitektur ideal yang *unifersal*. Arsitek harus meng-*ekspresi*-kan budayanya, padasaat yang sama “*menabrakkan*” (*collision*) dengan budaya lain, menyesuaikan dengan imaginasi (*dialog*), dan melalui simbiosis menciptakan arsitektur baru (Kurokawa 1991).

2.4..2. Ciri-Ciri Arsitektur Postmodern (Kisho Kurokawa).

Menurut Kisho Kurokawa, terdapat 9 ciri Arsitektur postmodern:

- Ditinggalkannya pemikiran *humanisme*.
- Zaman (*the third class*).
- Menghargai *pluralitas*.
- Penghargaan atas sejarah (*respect to history*).
- *Pleasure (intermediate zone)*.
- Simbiosis *whole and part*.
- *Hybrid style*.
- *Simulacra* dalam zaman pertukaran simbol.
- Ambiguitas



2.4.3. Cara Ber-Arsitektur Post-Modern (Pola Pikir) Menurut Kisho Kurokawa.

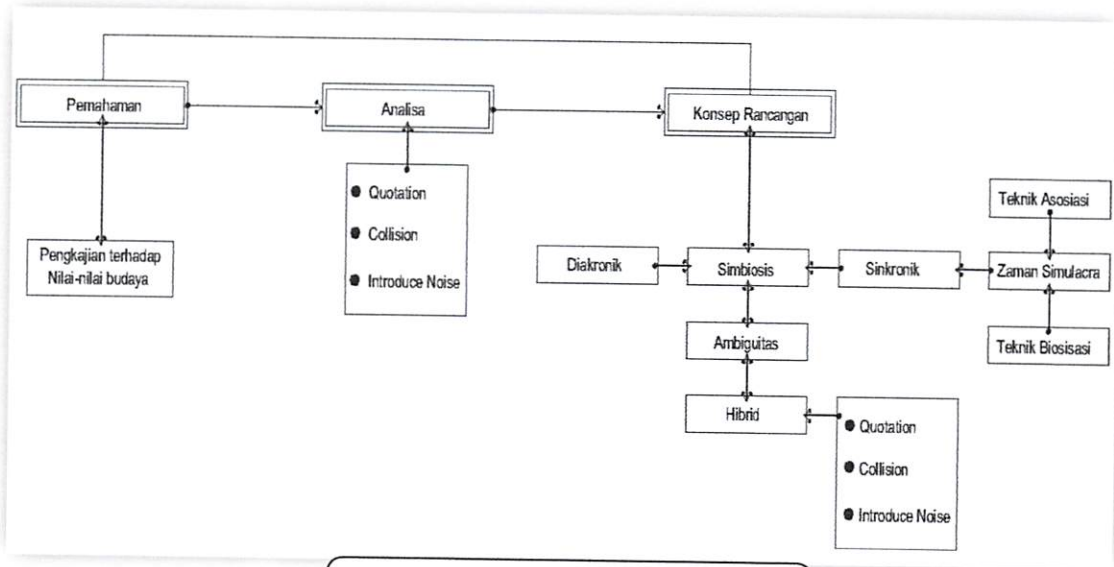
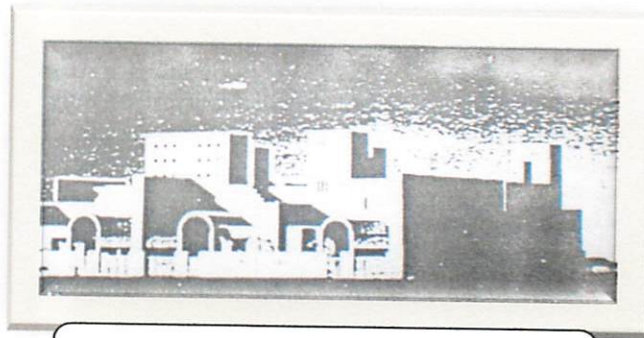


Diagram 2.1
Skema Pola Pikir Arsitektur Postmodern

2.4.4. Contoh Kasus.

Satu-satunya contoh penggunaan metode desain yang dijelaskan Kisho Kurokawa sebagai metode desain postmodern dengan konsep simbiosisnya adalah proyek perumahan di Kota Al Sarir, Libya.

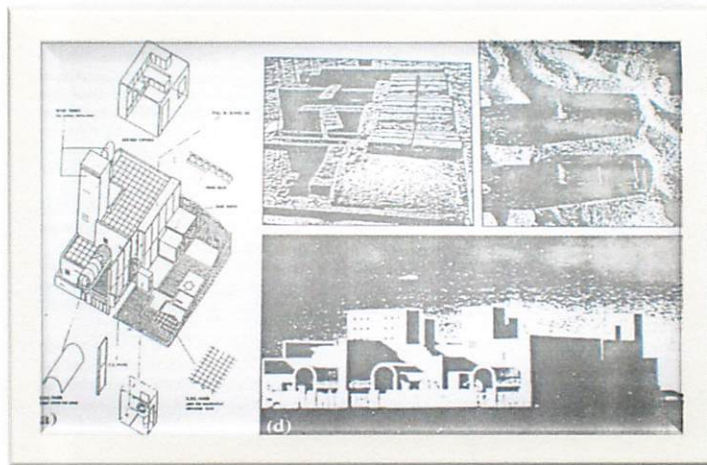


Gambar 2.1
Proyek Perumahan di Kota Al Sarir, Libya

Dalam karyanya pemukiman di Al-Sarir, Libya 1979 – 84 (1991, 93 -94) Kurokawa memadukan teknologi baru dengan alam padang pasir, antara lain dengan memanfaatkan bahan dasar bangunan sand-bricks, dipadukan dengan materi prefabrikasi untuk bahan atap, juga pengaturan sirkulasi udara, dll. Tiap lay out dan desain diupayakan memenuhi keinginan tiap penghuni sehingga tiap



rumah memiliki bentuk yang berbeda walau dengan bahan dan struktur yang sama.



Gambar 2.2
Disain Perumahan di Kota Al Sarir, Libya

Desain yang mengeksplorasi pola pergerakan udara alami (*natural air movement*) paadang pasir ini meniru kecerdikan suku badui dalam menyikapi iklim gurun. Disain ini merupakan contoh simbiosis antara teknologi maju dan budaya gurun arab. Simbiosis terjalin antara kemampuan ilmu dan teknologi maju untuk membuat pasir bata keras dengan kebijakan orang badui menyikapi iklim gurun.

2.5. Kesimpulan.

Dari penjelasan diatas tentang teori arsitektur postmodern kurokawa dapat disimpulkan bahwa metode dalam proses perancangannya adalah metode *simbiosis*. simbiosis diciptakan dengan menelusuri akar sejarah dan budaya secara mendalam, dan pada saat yang sama berusaha menggabungkan (*unification*) elemen-elemen dari budaya lain, material dan mental, fungsi dan emosi, keindahan dan ketakutan, pemikiran analitik dan sintetik akan ada (*eksis*) dalam simbiosis. Arsitektur harus meng-*ekspresi*-kan budayanya, pada saat yang sama “*menabrakkan*” (*collision*) dengan budaya lain, menyesuaikan dengan imajinasi (*dialog*), dan melalui simbiosis menciptakan arsitektur baru.



2.6. Diagram Proses Analisa

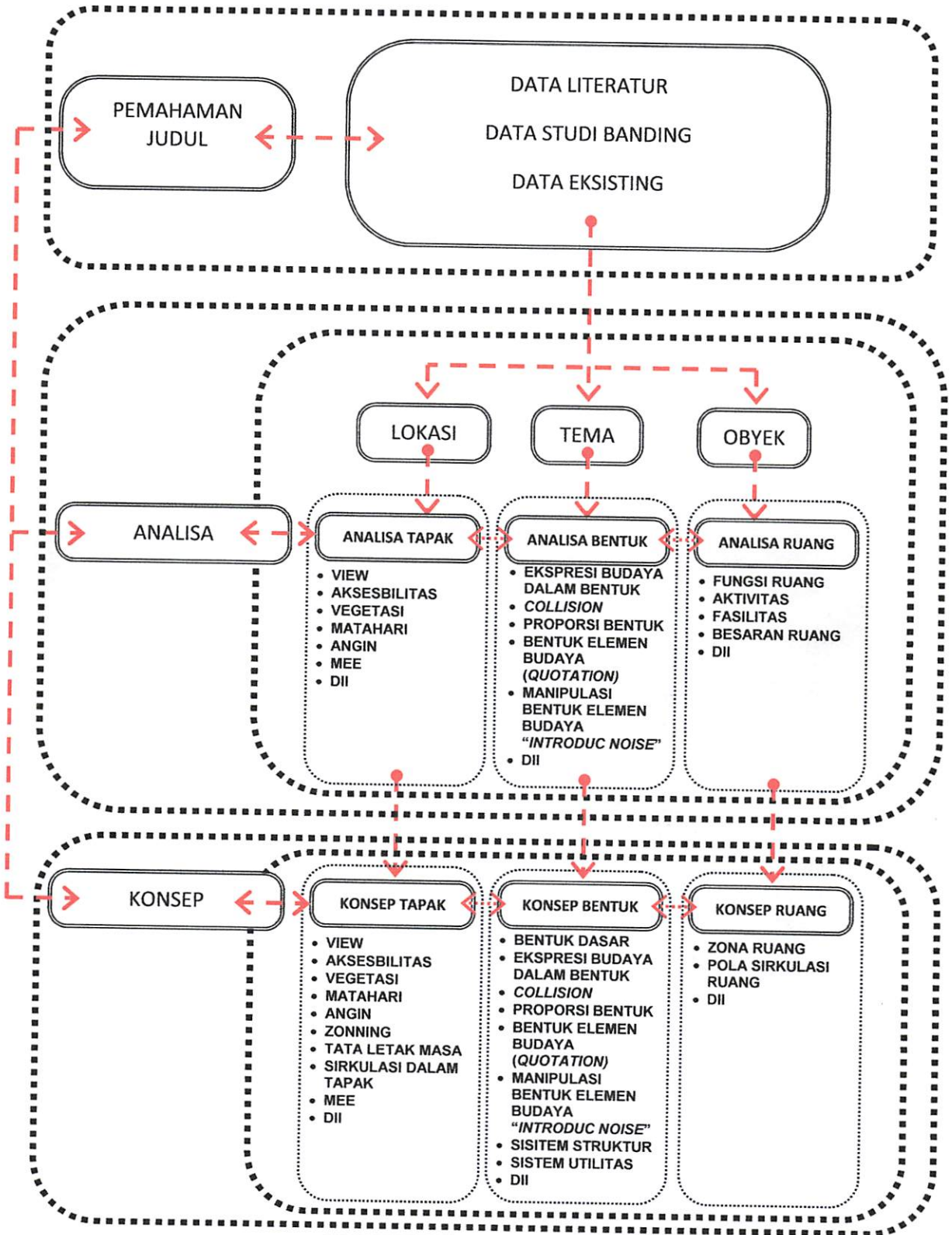
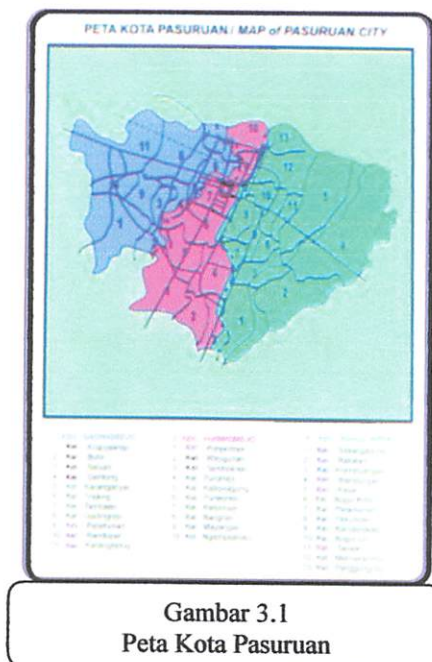


Diagram 2.2
Skema Proses Analisa



BAB III TINJAUAN LOKASI

3.1. Tinjauan Umum Kota Pasuruan.



Gambar 3.1
Peta Kota Pasuruan

Kota Pasuruan, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pasuruan berada di jalur utama Surabaya - Banyuwangi, Surabaya-Malang dan Banyuwangi-Malang. Kota Pasuruan berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara, serta Kabupaten Pasuruan di sebelah timur, selatan, dan tengah. Kota Pasuruan terdiri dari tiga kecamatan 34 kelurahan. Kota pasuruan memiliki luas 13,86 Km² berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara, serta kabupaten Pasuruan disebelah timur, selatan, dan barat. Pasuruan dapat ditempuh dari Surabaya menggunakan bus dalam waktu 2 jam, dan juga dapat ditempuh dari Malang menggunakan bus dalam waktu 1 jam.

Sejak tanggal 14 Agustus 1950 dinyatakan Kotamadya Pasuruan sebagai daerah otonom yang terdiri dari desa dalam 1 kecamatan. Pada tanggal 21 Desember 1982 Kotamadya Pasuruan diperluas menjadi 3 kecamatan dengan 19 kelurahan dan 15 desa. Pada tanggal 12 Januari 2002 terjadi perubahan status desa menjadi kelurahan berdasarkan PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2002, dengan demikian wilayah Kota Pasuruan terbagi menjadi 34 kelurahan. Berdasarkan UU NO.22 TAHUN 1999 TENTANG OTONOMI DAERAH terjadi perubahan



nama dari kotamadya menjadi kota maka Kotamadya Pasuruan berubah menjadi Kota Pasuruan.

Kota Pasuruan terdiri atas 3 kecamatan, yang terbagi atas 34 kelurahan. Kecamatan di Kota Pasuruan yaitu Bugulkidul, Gadingrejo, dan Purworejo.

- **Kecamatan Bugulkidul** memiliki kelurahan-kelurahan: Kepel, Blandongan, Tapaan, Sekargadung, Bakalan, Krampyangan, Tamanan, Pekuncen, Bugul Kidul, Bugul Lor, Kandang Sapi, Panggung Rejo, Mandaran Rejo.
- **Kecamatan Gadingrejo** memiliki kelurahan-keluarahan :Karangketug, Gentong, Sebani, Petahunan, Bukir, Randusari, Krapyakrejo, Karanganyar, Gadingrejo, Tamba'an ,Trajeng.
- **Kecamatan Purworejo** memiliki kelurahan-keluarahan :Pohjentrek, Wirogunan, Tembokrejo, Purutrejo, Kebonagung, Purworejo, Bangilan, Kebonsari, Mayangan, Ngemplak Rejo.

Kota Pasuruan merupakan salah satu dari sedikit kawasan pemerintah kota di Jawa Timur yang memiliki fasilitas infrastruktur pembangunan yang lengkap. Secara geografis, Kota Pasuruan terletak antara 112⁰45'-112⁰55' BT dan 7⁰35'-7⁰45' LS. Wilayahnya yang seluas 36,57 Km² berada pada ketinggian ±4m di atas permukaan laut dengan iklim sedang dan curah hujan rata-rata sebesar 1.337 mm/tahun. Dengan jumlah penduduknya mencapai 165.992 jiwa yang terdiri dari 81.313 penduduk laki – laki dan 84.679 penduduk perempuan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,19% per tahun dan kepadatan rata-rata 4.437 jiwa/Km². Topografi wilayah Kota Pasuruan adalah datar melandai dari selatan ke utara dengan kemiringan 0-1% dan di sebelah selatan agak cekung. Kondisi hidrologinya antara lain dipengaruhi oleh keberadaan 6 buah sungai dengan panjang total 26,5Km. Jenis penggunaan tanahnya meliputi pemukiman, pertanian, industri, pekarangan, sekolah, pasar dan perkantoran.

3.1.1. Sejarah Kota Pasuruan.

PASURUAN adalah kota Bandar kuno. Pada zaman Kerajaan Airlangga, Pasuruan sudah dikenal dengan sebutan " Paravan " . Pada



masa lalu, daerah ini merupakan pelabuhan yang sangat ramai. Letak geografisnya yang strategis menjadikan Pasuruan sebagai pelabuhan transit dan pasar perdagangan antar pulau serta antar negara. Banyak bangsawan dan saudagar kaya yang menetap di Pasuruan untuk melakukan perdagangan. Hal ini membuat kemajemukan bangsa dan suku bangsa di Pasuruan terjalin dengan baik dan damai.

Pasuruan yang dahulu disebut Gembong merupakan daerah yang cukup lama dikuasai oleh raja-raja Jawa Timur yang beragama Hindu. Pada dasa warsa pertama abad XVI yang menjadi raja di Gamda (Pasuruan) adalah Pate Supetak, yang dalam babad Pasuruan disebutkan sebagai pendiri ibukota Pasuruan.

Menurut kronik Jawa tentang penaklukan oleh Sultan Trenggono dari Demak, Pasuruan berhasil ditaklukan pada tahun 1545. Sejak saat itu Pasuruan menjadi kekuatan Islam yang penting di ujung timur Jawa. Pada tahun-tahun berikutnya terjadi perang dengan kerajaan Blambangan yang masih beragama Hindu-Budha. Pada tahun 1601 ibukota Blambangan dapat direbut oleh Pasuruan.

Pada tahun 1617-1645 yang berkuasa di Pasuruan adalah seorang Tumenggung dari Kapulungan yakni Kiai Gede Kapoeloengan yang bergelar Kiai Gedee Dermoyudho I. Berikutnya Pasuruan mendapat serangan dari Kertosuro sehingga Pasuruan jatuh dan Kiai Gedee Kapoeloengan melarikan diri ke Surabaya hingga meninggal dunia dan dimakamkan di Pemakaman Bibis (Surabaya).

Selanjutnya yang menjadi raja adalah putra Kiai Gedee Dermoyudho I yang bergelar Kiai Gedee Dermoyudho II (1645-1657). Pada tahun 1657 Kiai Gedee Dermoyudho II mendapat serangan dari Mas Pekik (Surabaya), sehingga Kiai Gedee Dermoyudho II meninggal dan dimakamkan di Kampung Dermoyudho, Kelurahan Purworejo Kota Pasuruan. Mas Pekik memerintah dengan gelar Kiai Dermoyudho (III)



hingga meninggal dunia pada tahun 1671 dan diganti oleh putranya, Kiai Onggojoyo dari Surabaya (1671-1686).

Kiai Onggojoyo kemudian harus menyerahkan kekuasaannya kepada Untung Suropati. Untung Suropati adalah seorang budak belian yang berjuang menentang Belanda, pada saat itu Untung Suropati sedang berada di Mataram setelah berhasil membunuh Kapten Tack. Untuk menghindari kecurigaan Belanda, pada tanggal 8 Februari 1686 Pangeran Nerangkusuma yang telah mendapat restu dari Amangkurat I (Mataram) memerintahkan Untung Suropati berangkat ke Pasuruan untuk menjadi adipati (raja) dengan menguasai daerah Pasuruan dan sekitarnya.

Untung Suropati menjadi raja di Pasuruan dengan gelar Raden Adipati Wironegoro. Selama 20 tahun pemerintahan Suropati (1686-1706) dipenuhi dengan pertempuran-pertempuran melawan tentara Kompeni Belanda. Namun demikian dia masih sempat menjalankan pemerintahan dengan baik serta senantiasa membangkitkan semangat juang pada rakyatnya.

Pemerintah Belanda terus berusaha menumpas perjuangan Untung Suropati, setelah beberapa kali mengalami kegagalan. Belanda kemudian bekerja sama dengan putra Kiai Onggojoyo yang juga bernama Onggojoyo untuk menyerang Untung Suropati. Mendapat serangan dari Onggojoyo yang dibantu oleh tentara Belanda, Untung Suropati terdesak dan mengalami luka berat hingga meninggal dunia (1706). Belum diketahui secara pasti dimana letak makam Untung Suropati, namun dapat ditemui sebuah petilasan berupa gua tempat persembunyiannya pada saat dikejar oleh tentara Belanda di Pedukuhan Mancilan Kota Pasuruan.

Sepeninggal Untung Suropati kendali kerajaan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Rakhmad yang meneruskan perjuangan sampai ke timur dan akhirnya gugur di medan pertempuran (1707).

Onggojoyo yang bergelar Dermoyudho (IV) kemudian menjadi Adipati Pasuruan (1707). Setelah beberapa kali berganti pimpinan pada



tahun 1743 Pasuruan dikuasai oleh Raden Ario Wironegoro. Pada saat Raden Ario Wironegoro menjadi Adipati di Pasuruan yang menjadi patihnya adalah Kiai Ngabai Wongsonegoro.

Suatu ketika Belanda berhasil membujuk Patih Kiai Ngabai Wongsonegoro untuk menggulingkan pemerintahan Raden Ario Wironegoro. Raden Ario dapat meloloskan diri dan melarikan diri ke Malang. Sejak saat itu seluruh kekuasaan di Pasuruan dipegang oleh Belanda. Belanda menganggap Pasuruan sebagai kota bandar yang cukup penting sehingga menjadikannya sebagai ibukota karesidenan dengan wilayah: Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bangil.

Karena jasanya terhadap Belanda, Kiai Ngabai Wongsonegoro diangkat menjadi Bupati Pasuruan dengan gelar Tumenggung Nitingoro. Kiai Ngabai Wongsonegoro juga diberi hadiah seorang putri dari selir Kanjeng Susuhunan Pakubono II dari Kertosuro yang bernama Raden Ayu Berie yang merupakan keturunan dari Sunan Ampel Surabaya.

Pada saat dihadihkan Raden Ayu Berie dalam keadaan hamil, dia kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki yang bernama Raden Groedo. Saat Kiai Ngabai Wongsonegoro meninggal dunia, Raden Groedo yang masih berusia 11 tahun menggantikan menjadi Bupati Pasuruan dengan gelar Kiai Adipati Nitiadiningrat (Berdasarkan Resolusi tanggal 27 Juli 1751).

Adipati Nitiadiningrat menjadi Bupati di Pasuruan selama 48 tahun (hingga 8 November 1799). Adipati Nitiadiningrat (I) dikenal sebagai Bupati yang cakap, teguh pendirian, setia kepada rakyatnya, namun pandai mengambil hati Pemerintah Belanda. Karya besarnya antara lain mendirikan Masjid Agung Al Anwar bersama-sama Kiai Hasan Sanusi (Mbah Slagah).

Raden Beji Notokoesoemo menjadi bupati menggantikan ayahnya sesuai Besluit tanggal 28 Februari 1800 dengan gelar



Toemenggoeng Nitiadiningrat II. Pada tahun 1809 Toemenggoeng Nitiadiningrat II digantikan oleh putranya yakni Raden Pandjje Brongtokoesoemo dengan gelar Raden Adipati Nitiadiningrat III. Raden Adipati Nitiadiningrat III meninggal pada tanggal 30 Januari 1833 dimakamkan di belakang Masjid Al Anwar. Penggantinya adalah Raden Amoen Raden Tumenggung Ario Notokoesoemo dengan gelar Raden Tumenggung Ario Nitiadiningrat IV yang meninggal dunia tanggal 20 Juli 1887. Kiai Nitiadiningrat I sampai Kiai Nitiadiningrat IV lebih dikenal oleh masyarakat Pasuruan dengan sebutan Mbah Surga-Surgi.

Pemerintahan Pasuruan sudah ada sejak Kiai Dermoyudho I hingga dibentuknya Residensi Pasuruan pada tanggal 1 Januari 1901. Sedangkan Kotapraja (Gementee) Pasuruan terbentuk berdasarkan Staatblat 1918 No.320 dengan nama Stads Gemeente Van Pasoeroean pada tanggal 20 Juni 1918.

Sejak tanggal 14 Agustus 1950 dinyatakan Kotamadya Pasuruan sebagai daerah otonom yang terdiri dari desa dalam 1 kecamatan. Pada tanggal 21 Desember 1982 Kotamadya Pasuruan diperluas menjadi 3 kecamatan dengan 19 kelurahan dan 15 desa. Pada tanggal 12 Januari 2002 terjadi perubahan status desa menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2002, dengan demikian wilayah Kota Pasuruan terbagi menjadi 34 kelurahan. Berdasarkan UU no.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah terjadi perubahan nama dari kotamadya menjadi kota maka Kotamadya Pasuruan berubah menjadi Kota Pasuruan.

3.2. Kebijakan Rencana Pengembangan Kota.

Sesuai dengan pola dasar pembangunan, adanya kebijakan tata ruang dimaksudkan untuk menjamin laju perkembangan dan pertumbuhan daerah, serta memelihara keseimbangan dan kesinambungan pelaksanaannya secara menyeluruh, terarah dan terpadu.

Dalam kebijakan tata ruang kota, untuk penyebarluasan kegiatan pembangunan diseluruh wilayah kota pasuruan, ditetapkan adanya



penentuan Bagian Wilayah Kota (BWK) dan unit lingkungan.

Kebijaksanaan tata ruang kota pasuruan yang tertuang dalam bentuk perwilayahan pembangunan bertujuan:

- a. Mengusahakan pemerataan pembangunan yang serasi didalam dan antar wilayah serta sub wilayah pembangunan, agar perbedaan fungsi pembangunan antar wilayah (yang maju dan terbelakang) dapat diperkecil.
- b. Mengusahakan dan mengarahkan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan potensi, kondisi, serta fungsi yang terdapat pada setiap wilayah dan sub wilayah pembangunan.
- c. Mengembangkan hubungan perekonomian antar wilayah dan sub wilayah pembangunan secara saling menguntungkan demi terjalannya interaksi yang harmonis dalam kegiatan perekonomian, sosial budaya, dan hukum kepolisian sehingga terwujudnya ekonomi daerah yang kuat dan mampu menunjang/memperkokoh perkembangan regional dan nasional.

3.3. Peraturan Bangunan Setempat.

- **Tata Guna Lahan**

Kecamatan Bugulkidul memiliki kegiatan dominan seperti: pendidikan, perumahan, perkantoran, pemerintahan, perdagangan dan jasa. Dengan adanya kegiatan – kegiatan tersebut maka daerah ini diarahkan tingkat pelayanannya sampai tingkat regional. Untuk pengelolaan struktur ruang yang ada di kecamatan Bugulkidul, karena masih banyak lahan kosong, maka pada masa yang akan datang diperkirakan sudah habis sehingga yang akan terjadi adalah perubahan fungsi atau peralihan fungsi. Kawasan permukiman yang berada di kecamatan Bugulkidul berubah menjadi kawasan komersial seperti fasilitas umum maupun perdagangan, dan untuk kawasan permukiman cenderung berkembang di area/wilayah terbelakang kota.



Tata guna lahan di sekitar tapak meliputi : perumahan, fasilitas umum (perkantoran, pendidikan, kesehatan), perdagangan.

- **Tata Ruang Kota**

Penggunaan tanah yang terdapat di suatu kawasan akan membentuk kondisi intensitas bangunan di kawasan tersebut. Adapun kondisi intensitas bangunan dapat dilihat dari Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Tinggi lantai Bangunan (TLB). Kondisi Intensitas bangunan ini akan membentuk kualitas lingkungan kawasan perkotaan secara keseluruhan yang pada akhirnya akan membentuk wujud kawasan perkotaan yang harmonis dan serasi apabila ditata dengan baik.

1. KDB (Koefisien Dasar Bangunan), yaitu merupakan angka perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan bangunan–bangunan dalam tiap petak peruntukan dibanding dengan dengan luas petak peruntukan.
2. KLB (Koefisien Lantai Bangunan), yaitu merupakan angka perbandingan jumlah luas lantai bangunan dibanding luas kapling bangunan.
3. TLB (Tinggi lantai Bangunan), yaitu merupakan penentuan tinggi bangunan didasarkan pada enveloper bangunan.

Berdasarkan pola guna tanah pada wilayah perencanaan, maka dapat dilihat kondisi intensitas bangunan di wilayah perencanaan sesuai dengan fungsi bangunan/kawasan sebagai berikut:

Mengingat obyek yang dipilih merupakan obyek yang bergerak pada bidang perkantoran dan pemerintahan maka adapun peraturan yang ada pada kecamatan Bugulkidul, khususnya kelurahan Pekuncen untuk kawasan perkantoran, pemeritahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa yaitu:



- Kawasan perkantoran

Pada kawasan perkantoran disepanjang jalan – jalan utama kawasan, Jln. Balaikota dan Jln. Pahlawan Memiliki peraturan tata ruang kota:

- KDB= 40% - 70%
- KLB= 1,2 – 2
- TLB= 1 – 2 lantai.
- GSB di Jln. Pahlawan 15 meter.

3.4. Pendekatan Lokasi Dan Tapak.

3.4..1. Kriteria Penentuan Lokasi

Kriteria lokasi bagi pendirian kantor kepolisian resort kota (*POLRESTA*) adalah:

- a. *POLRESTA* harus dibangun di lokasi yang sesuai dengan zona peruntukan dan keserasian lingkungan dengan memperhatikan rencana tata ruang dan tata guna tanah yang ada.
- b. *POLRESTA* harus dibangun pada lokasi yang memungkinkan berfungsinya dengan baik saluran-saluran pembuangan air hujan dan jaringan air limbah kota.
- c. Lokasi *POLRESTA* harus mudah dicapai angkutan yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung pada waktu pembangunan serta perkembangan di masa mendatang dengan memperhatikan keamanan, ketertiban dan gangguan pada lokasi sekitarnya.
- d. Lokasi *POLRESTA* harus dijangkau oleh pelayanan jaringan air bersih dan listrik Lokasi tapak berada di Kota Pasuruan, tepatnya di jalan Pahlawan yang diperuntukan sebagai lahan kantor pemerintahan.

3.4..2. Kriteria Penentuan Site

Dalam penentuan site, diperlukan beberapa kriteria pendukung agar lokasi *POLRESTA* tersebut dapat sesuai dengan yang diharapkan, adapun kriteria-kriteria tersebut adalah:

- a. Pencapaian *POLRESTA*.



Kemudahan pencapaian dari jalan utama kelokasi *POLRESTA*
Terdapat jalur angkutan yang menghubungkan lokasi *POLRESTA*
dengan pusat kota.

b. Kebijakan pemerintah.

Pemilihan site harus mendukung pembagian zona yang sudah ada.
Site harus menaati KLB, KDB dan GSB yang sudah ada.

c. Suasana lingkungan.

Meliputi kebisingan, keamanan dan kenyamanan, jauh dari bangunan
industri.

d. Fasilitas.

Kedekatan dengan fasilitas-fasilitas penunjang seperti; n sakit, bank,
kantor-kantor pemerintahan, fasilitas pendidikan, pusat kota, dll

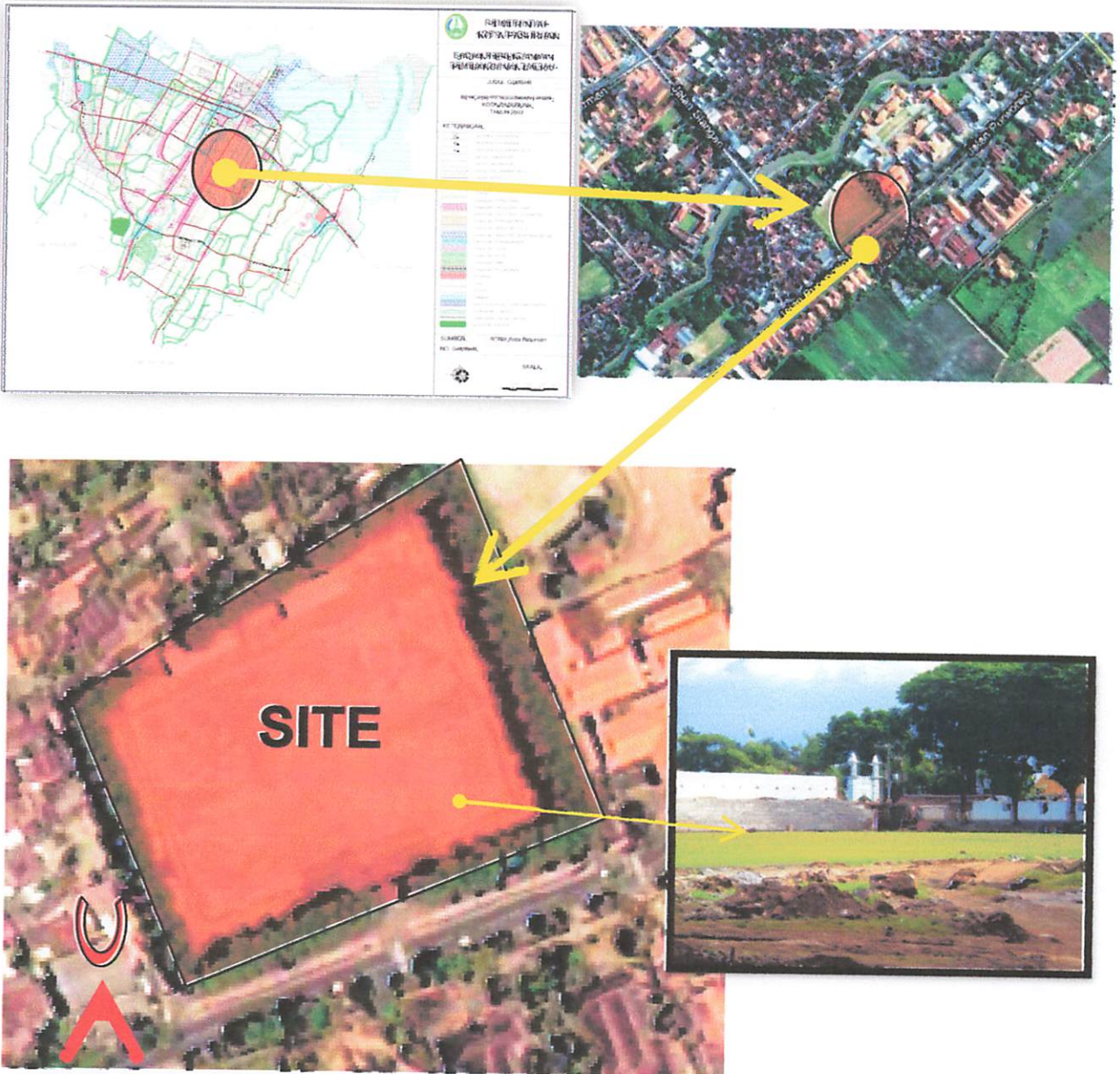
e. Utilitas.

Sudah tersedianya jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan
komunikasi, jaringan air kotor.



3.5. Data Tapak.

- Kota : Pasuruan
- Kecamatan : Bugulkidul
- Kelurahan : Pekuncen
- Lokasi Site : Jl. Pahlawan



Gambar 3.2
Data Tapak



- Koefisien lantai bangunan 1,2 - 2.
- Koefisien dasar bangunan 40 % - 70 %.
- Tinggi lantai bangunan 1-2 lantai.
- Garis sepadan bangunan \pm 15 m.

c. Aksesibilitas (Pola Sirkulasi Sekitar Tapak).

Kondisi aksesibilitas sekitar tapak adalah :

- Pencapaian mudah (dapat dicapai) lewat 1 jalur utama yaitu Jalan Pahlawan.
- Angkutan kota telah tersedia cukup banyak untuk menuju site.
- Arus Lalu lintas tidak padat.
- Arus lalu lintas utama pada Jalan Pahlawan menggunakan jalur 2 arah.



Gambar 3.4
Aksesibilitas (Pola Sirkulasi Sekitar Tapak)



d. Batas Tapak.

- Batas Utara : Permukiman penduduk.
- Batas Selatan : SDN Pekuncen dan Perkantoran.
- Batas Timur : Lapangan tenis dan kantor walikota.
- Batas Barat : Bank BRI dan TPQ Yayasan Mbah Slagah.



Gambar 3.5
Batas Tapak



e. Vegetasi Sekitar Tapak.

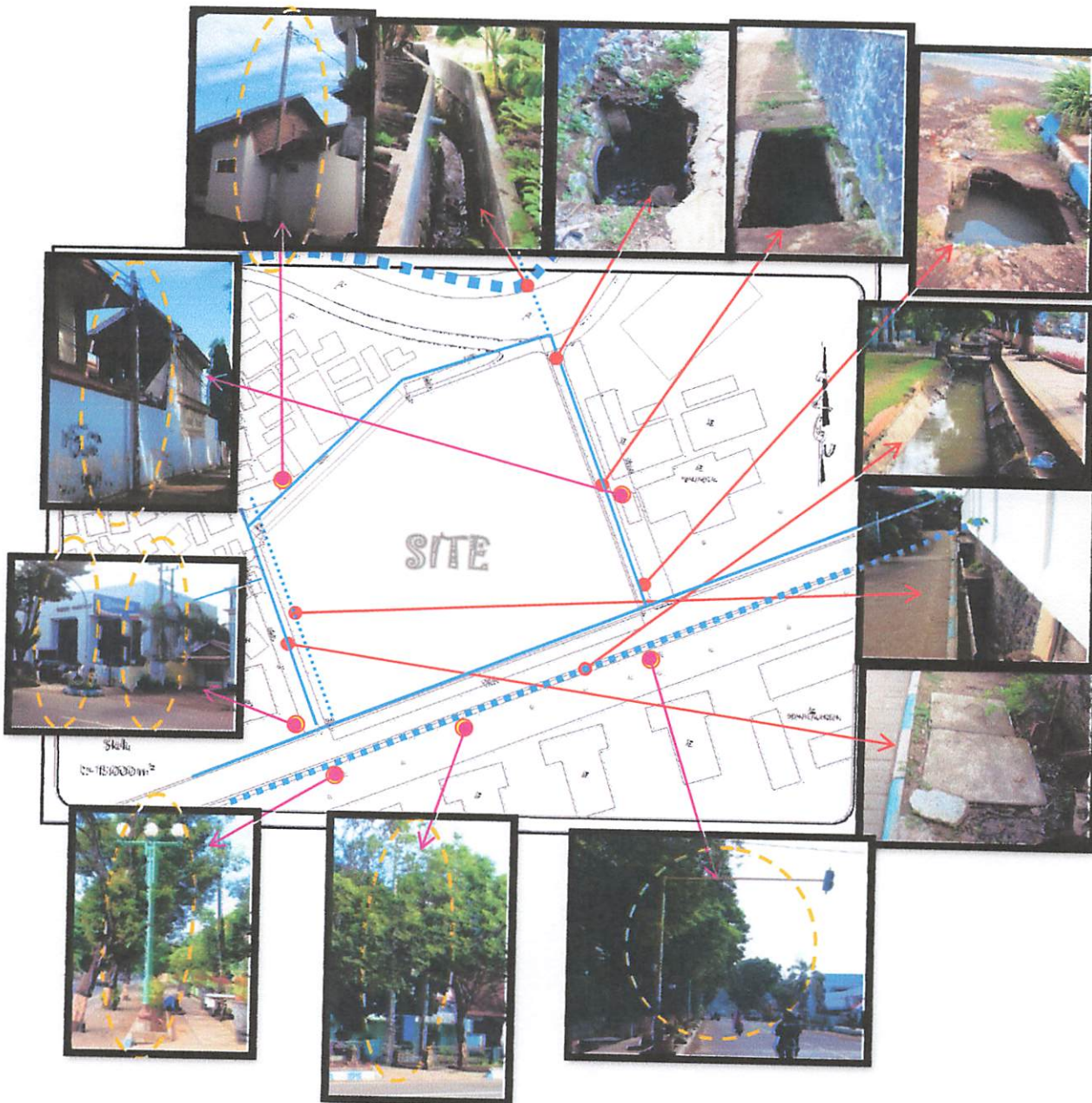


Gambar 3.6
Vegetasi Sekitar Tapak



f. Sistem Utilitas Tapak.

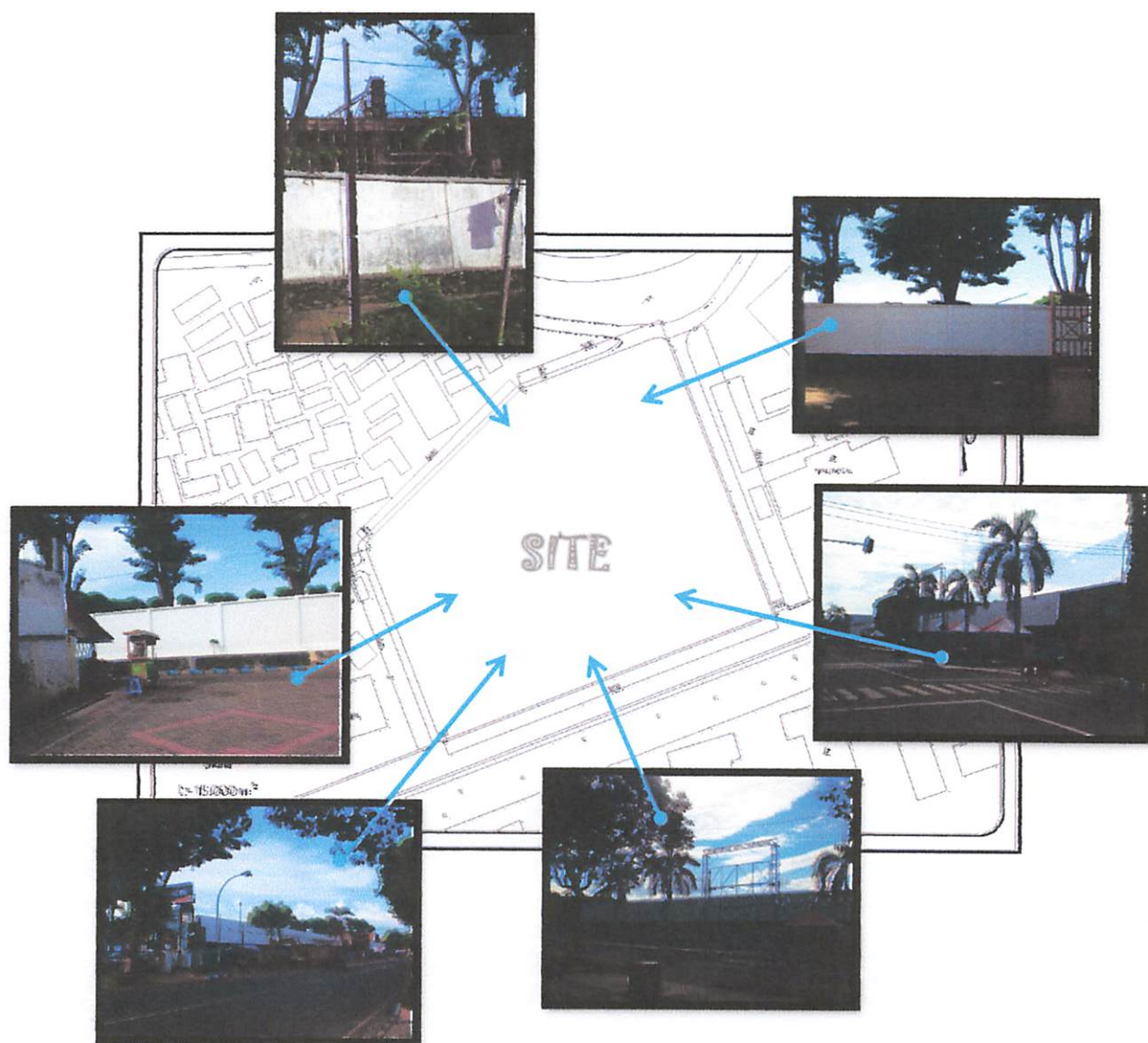
Pada wilayah sekitar site terdapat sistem utilitas tapak seperti: jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air bersih, riol kota, draenase dan sungai.



Gambar 3.7
Sistem Utilitas Tapak



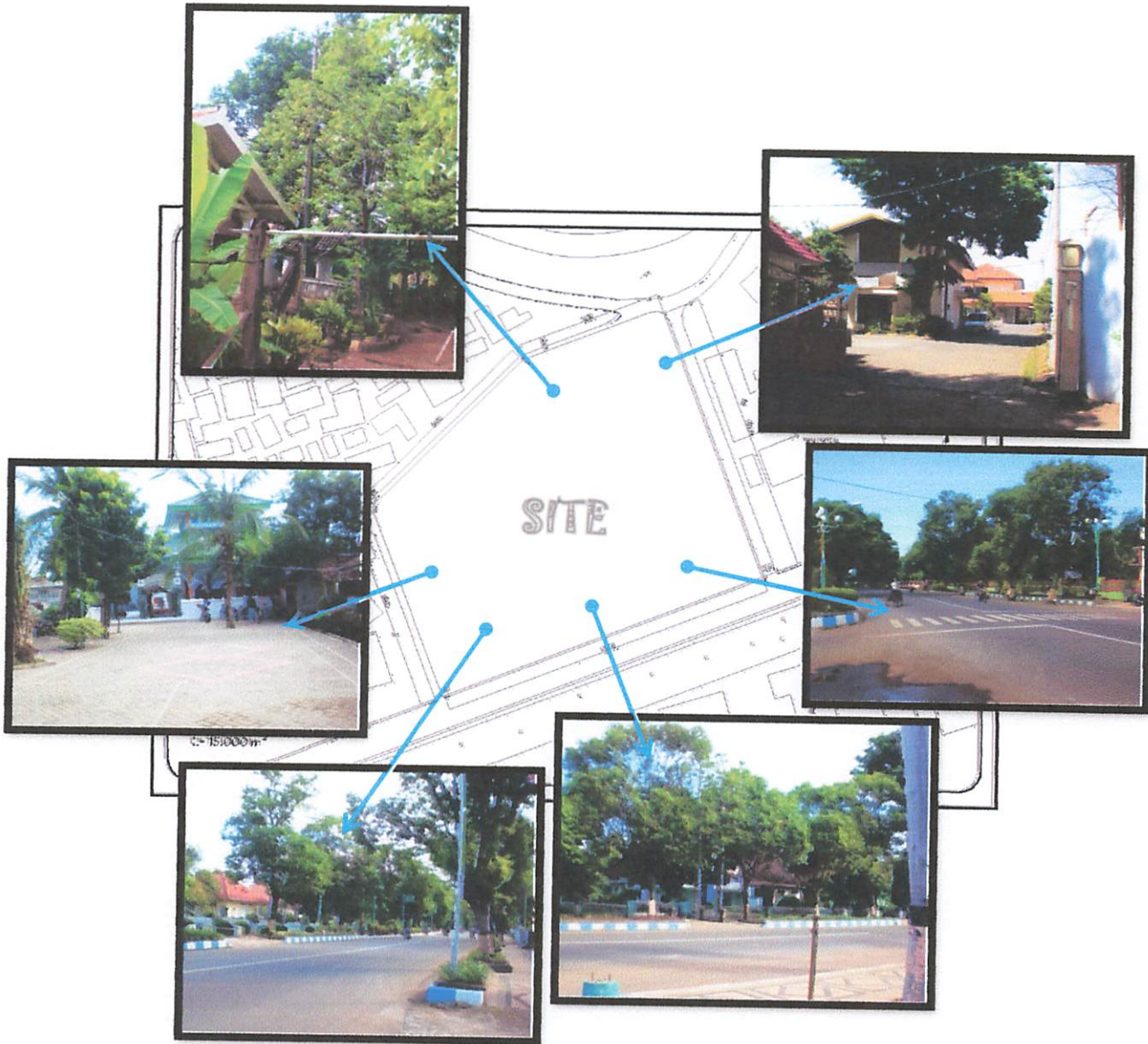
g. View To Site.



Gambar 3.8
View To Site



h. View From Site.



Gambar 3.9
View From Site



BAB IV KAJIAN OBJEK

4.1. Kajian Tentang Kantor Kepolisian.

4.1.1. Pengertian Judul.

a) Kantor.

Balai (gedung, rumah, ruang) tempat mengurus atau berlangsungnya suatu pekerjaan (perusahaan dsb), tempat bekerja atau wadah untuk pekerja.

Istilah tata ruang kantor berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Office Layout* atau sering disebut juga *Layout* saja. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya didalam ruangan yang tersedia. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tata ruang kantor diantaranya, sebagai berikut :

- Menurut George Terry yang disadur pula oleh The Liang Gie menyatakan "Tata ruang kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan dalam penggunaan ruang secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak" (1988:200).
- Menurut Littlefield dan Peterson menyatakan "Tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia" (1956:117).

Tata ruang kantor disusun berdasarkan aliran pekerjaan kantor sehingga perencanaan ruangan kantor dapat membantu para pekerja dalam meningkatkan produktifitas. Selain itu pengaturan tata ruang kantor yang baik akan memberikan keuntungan-keuntungan, diantaranya :

- Mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai, karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu.



- Menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan.
- Memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai tertentu dapat dipergunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya.
- Mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan memenuhi suatu bagian tertentu. (The Liang Gie, 1983:162).

b) Kepolisian “Polisi”.

• Pengertian Polisi Secara Umum.

Istilah Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Pengertian Polisi yang sekarang misalnya adalah berbeda dengan pengertian Polisi pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri, adapun pengertian Polisi diantaranya sebagai berikut:

- a. Pertama kali ditemukannya Polisi dari perkataan Yunani “Politea” yang berarti seluruh pemerintahan kota. Pada masa itu yaitu abad sebelum Masehi, negara Yunani terdiri dari kota-kota tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Baru setelah timbul agama Nasrani, maka pengertian polisi sebagai pemerintahan negara kota dikurangi urusan agama.¹
- b. Charles Reith dalam bukunya “The blind eye of history” mengemukakan pengertian polisi dalam bahasa Inggris “*Politea Indonesia Came To Mean Of Planning For Improving Orgering Communal Existence*”² yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpangkal tolak dari pemikiran, bahwa manusia adalah makhluk sosial, hidup berkelompok, membuat aturan-aturan yang disepakati bersama. Ternyata dalam kelompok itu terdapat

¹ Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hal. 5.

² STR John May lam, The Police of Britain, Terjemahan Bhayangkan, Majalah Bhayangkan, Jakarta, 1953, hal. 4.



anggota yang tidak mematuhi aturan bersama sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki atau menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar. Dari pemikiran ini kemudian diperlukan Polisi, baik orangnya maupun tugasnya untuk memperbaiki dan menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat tersebut.

c. Didalam *Encyclopaedia and Social Science* dikemukakan bahwa pengertian Polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dan pengawasan keseharian umum. Kemudian dalam arti yang sangat khusus dipakai dalam hubungannya dengan penindasan pelanggaran-pelanggaran politik, yang selanjutnya meliputi semua bentuk pengertian dan ketertiban umum. Dengan kata lain Polisi diberikan pengertian sebagai hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

d. Dalam kamus bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita, dikemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian ;

1. Badan Pemerintah (sekelompok Pegawai Negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
2. Pegawai Negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Dalam pengertian ini istilah polisi mengandung 2 (dua) pengertian makna Polisi tugas dan sebagai organnya.

• **Pengertian Polisi Menurut UU.**

“Kepolisian” dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian diartikan sebagai segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan Pejabat Kepolisian Negara adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c) Resor.

Arti resor memiliki tiga pengertian yakni;

- Daerah kecil.
- Wilayah kekuasaan.
- Lingkungan kerja.

d) Kota.

Secara umum kota adalah tempat bermukimnya warga kota, tempat bekerja, tempat kegiatan dalam bidang ekonomi, pemerintah dan lain-lain.

Kota yang telah berkembang maju mempunyai peranan yang lebih luas lagi antara lain sebagai berikut :

- Sebagai pusat pemukiman penduduk.
- Sebagai pusat kegiatan ekonomi.
- Sebagai pusat kegiatan social budaya.
- Pusat kegiatan politik dan administrasi pemerintah serta tempat kedudukan pemimpin pemerintahan.

• **Ciri-ciri fisik dan kehidupan kota**

Ciri fisik kota meliputi hal sebagai berikut :

- Tersedianya tempat-tempat untuk pasar dan pertokoan.
- Tersedianya tempat-tempat untuk kantor-kantor pemerintahan.
- Tersedianya tempat-tempat untuk parkir.



- Terdapatnya sarana rekreasi dan sarana olahraga.

Ciri kehidupan kota adalah sebagai berikut :

- Adanya pelapisan sosial ekonomi misalnya perbedaan tingkat penghasilan, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan.
- Adanya jarak social dan kurangnya toleransi social diantara warganya.
- Adanya penilaian yang berbeda-beda terhadap suatu masalah dengan pertimbangan perbedaan kepentingan, situasi dan kondisi kehidupan.
- Warga kota umumnya sangat menghargai waktu.
- Cara berpikir dan bertindak warga kota tampak lebih rasional dan berprinsip ekonomi.
- Masyarakat kota lebih mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan social disebabkan adanya keterbukaan terhadap pengaruh luar.
- Pada umumnya masyarakat kota lebih bersifat individu sedangkan sifat solidaritas dan gotong royong sudah mulai tidak terasa lagi.

e) Kantor Kepolisian Resor Kota “POLRESTA”

Maka pengertian kantor polresta yaitu tempat mengurus atau berlangsungnya suatu pekerjaan, tempat bekerja atau wadah untuk Badan Pemerintah (sekelompok Pegawai Negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum pada wilayah (hukum) kekuasaan atau lingkungan kerja yang terletak di Pusat kegiatan politik dan administrasi pemerintah serta tempat kedudukan pemimpin pemerintahan pusat.

4.1..2. Fungsi Dan Tugas Kepolisian.

Kepolisian sangat memegang peranan penting untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap Kriminalitas atau tindak pidana,



karena Kepolisian merupakan salah satu unsur penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPOLISIAN NEGARA, maupun UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG UNDANG-UNDANG ACARA PIDANA ATAU LEBIH DIKENAL SEBAGAI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP), terdapat wewenang Kepolisian Negara dalam penyidikan suatu perkara. Wewenang yang sifatnya umum tidak terdapat di dalamnya, dan dalam kata-kata secara logis dapat dipastikan bahwa dimana ada penugasan haruslah ada wewenang-wewenang yang menyertainya. Sebab tanpa tugas yang mendasari polisi untuk bertindak, tugas tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

- **Landasan Hukum Kepolisian.**

Dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri terdapat beberapa ketentuan hukum yang menjadi landasan pelaksanaannya yaitu :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri ditegaskan tentang tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam pasal 13 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya oleh Polri kemudian membentuk dan menyusun struktur organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat Markas Besar dan kewilayahan Polri dengan menerbitkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 dan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 berikut perubahan-perubahannya, diantaranya dengan Keputusan Kapolri No. Pol.



: Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divpropam Polri, di mana tugas pokok Divpropam Polri dinyatakan secara tegas dalam pasal 2 yaitu membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri pada pasal 22 yang menegaskan bahwa Provos Polri berwenang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan, membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri.
- Kep. Kapolri No. Pol. : Kep/97/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divpropam Polri pada pasal 22 ayat (3) huruf c yang menegaskan bahwa Pusprovos menyelenggarakan penyelidikan / penyidikan dalam rangka menegakkan hukum disiplin terhadap personel tingkat Markas Besar Polri dan personel tertentu sesuai kebijakan dan perintah Kapolri termasuk pengawasan dan pengendalian atas penegakan hukum oleh satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Markas Besar dan kewilayahan Polri. Berkenaan dengan penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri, pelaksanaannya dipertanggung jawabkan kepada Provos Polri baik di tingkat Markas Besar maupun kewilayahan Polri yang secara langsung berada di bawah kendali teknis operasional dan pembinaan Divpropam Polri.
- Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri pada pasal 18 tentang tugas Provos Polri untuk menindaklanjuti laporan yang diterima, pasal 23



tentang Tugas Provos Polri melakukan pemanggilan guna pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin.

- Pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan disiplin anggota Polri tersebut dilakukan dengan memperhatikan bentuk pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3, 4, 5 dan pasal 6 PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri mengenai pelanggaran tentang kewajiban dan larangan bagi setiap anggota Polri di dalam pelaksanaan tugas maupun di dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

- **Tugas Dan Wewenang Menurut UU Kepolisian.**

Undang-undang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penjelasan dari pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa rumusan pasal tersebut tidak didasarkan pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting. Dalam pelaksanaannya pun tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan.

Dalam UU kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat diartikan sebagai:

“suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional



dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjami kermanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;



- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas utama polisi untuk menegakkan hukum berhubungan dengan peran polisi sebagai salah satu bagian dari system peradilan pidana Indonesia. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, polisi berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.



- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

“Tindakan lain” yang dimaksud adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Selain tugas dan wewenang yang disebutkan di dalam UU Kepolisian ini, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan umum, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Tindakan menurut penilaian sendiri ini hanya data dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.



- **Tugas Dan Wewenang Menurut KUHP.**

- a. **Wewenang Penyidik**

Upaya paksa merupakan kegiatan polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dalam system peradilan pidana Indonesia. Upaya paksa meliputi kegiatankegiatan: penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit menjelaskan pengertian dari upaya paksa namun di dalamnya disebutkan mengenai tugas dan wewenang polisi sebagai penyidik. Menurut ketentuan dalam Pasal 6 KUHP:

- Penyidik adalah:
 - Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
 - Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU.

Sedangkan wewenang yang dimiliki oleh penyidik diatur di dalam pasal 7 KUHP yang berbunyi:

- Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
 - Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - Melakuakan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;



- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - Mengadakan penghentian penyidikan;
 - Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dari pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.
 - Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

b. Penangkapan

Mengenai penangkapan disebutkan bahwa baik untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan, penyidik memiliki wewenang untuk memerintahkan atau untuk melakukan penangkapan. Penangkapan (atau perintah penangkapan) dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Tata cara pelaksanaan penangkapan adalah dengan memperlihatkan surat tugas petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat diperiksa. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Apabila penangkapan dilakukan segera pada saat terjadi suatu kejahatan atau dalam hal tertangkap tangan, penangkapan



dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

c. Penahanan

Penahanan dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik untuk kepentingan suatu penyidikan. Penahanan dapat juga dilakukan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan maupun oleh Hakim itu sendiri di sidang Pengadilan dengan penetapannya.

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan bilamana terdapat kekhawatiran seorang tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

KUHAP menyebutkan bahwa suatu penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 25 dan pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* tahun 1931 nomor 471), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 nomor 8), pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal



48 Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara nomor 3086).

Menurut ketentuan pasal 22, jenis penahanan dapat berupa:

- Penahanan Rumah Tahanan Negara.
- Penahanan rumah.
- Penahanan kota.
- Penggeledahan.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP.

Pasal 37 KUHAP menyebutkan:

“Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita”.

“Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.”

- Penyitaan

KUHAP mendefinisikan penyitaan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.



Suatu penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun demikian, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yakni bila penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan izin terlebih dahulu, penyidik tersebut dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak.

Hal-hal yang menjadi obyek penyitaan adalah:

- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

4.1..3. Ratio Kepolisian.

Ratio (*Standar Police Employee Rate*) atau perbandingan anggota kepolisian dengan penduduk yang berada pada wilayah hukum polres yaitu 1:750, maksudnya adalah 1 anggota kepolisian wajib bertugas melayani 750 masyarakat.

4.1..4. Sarana Dan Prasarana Kepolisian.

Pengadaan sarana dan prasarana polisi sudah jauh meningkat, polsek-polsek di kota-kota besar sudah banyak memiliki kendaraan patroli yang memadai dengan jumlah yang relative cukup, banyak kantor-kantor polisi dibangun sehingga bermunculan gedung-gedung mentereng, serta kebijakan Pemerintah dan pimpinan Polri yang kondusif



untuk mengembangkan sarana dan prasarana ini dengan mengalokasikan dukungan dana yang cukup besar.

Namun disisi lain bahwa pengadaan sarana dan prasarana yang bagus tersebut juga harus diikuti pengalokasian dana pemeliharaan yang cukup sehingga agar tidak timbul masalah dibidang pemeliharannya.

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri adalah aspek sarana dan fasilitas meliputi peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, apakah sarana dan fasilitas yang ada sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dan masih dapat dipakai, apakah sarana yang ada telah digunakan secara efektif dan sarana apa yang perlu diadakan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sarana dan fasilitas yang perlu diadakan untuk proses penegakan hukum disiplin anggota Polri adalah :

- Alat transportasi dan alat komunikasi.
- Alat deteksi.
- Ruang kerja yang kondusif.
- Peralatan administrasi yang memadai.
- Komputer dan internet yang memiliki program dan jaringan luas.
- Sarana pustaka hukum sebagai bahan referensi bagi para penyidik.

4.1..5. Fungsi Pelayanan Kepolisian.

❖ Fungsi Bagian.

a) BAG OPS

BAGIAN OPERASI atau disingkat BAG OPS adalah unsur pembantu Kapolres yang wajib berupaya menjamin dinamika dan keterpaduan kegiatan / tindakan operasional oleh segenap unsur pelaksana utama Polres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.

BAGIAN OPERASI dipimpin oleh KABAG OPS, yang dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :



1. Kasubbag Bin Ops atau Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasi, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kabag Ops Polres yang bertugas meliputi :
 - o Menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan data / informasi Polres dan jajaran.
 - o Menyelenggarakan pekerjaan / kegiatan staf dalam manajemen operasional khususnya yang bersifat terpadu baik antar fungsi operasional maupun yang secara bersama melibatkan komponen lain dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara.
 - o Melaksanakan pengkajian masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang operasional Polres.
 - o Mengatur penyelenggaraan gelar operasional maupun laporan kesatuan sesuai kebutuhan.
 - o Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kasubbag Bin Ops dibantu oleh Bamin dan Banum.

2. Kasubbag Wattah atau Kepala Sub Bagian Perawatan Tahanan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kabag ops Polres, yang bertugas meliputi :
 - o Menyelenggarakan dan melaksanakan perawatan terhadap tahanan yang berada di Polres.
 - o Menyelenggarakan dan melaksanakan pendataan terhadap jumlah tahanan.
 - o Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kasubbag Wattah dibantu oleh Banum.



3. Ka SPK atau Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian Polres adalah unsur pelaksana Polres dibawah Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kabag Ops
- o Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan laporan / pengaduan, pemberian pertolongan / perlindungan / bantuan kepolisian dan tindakan pertama di tempat kejadian
 - o Memonitor secara aktif dan terus menerus tentang situasi kamtibmas dari seluruh jajaran Polres.
 - o Menyusun jurnal tentang situasi Kamtibmas yang terjadi diseluruh wilayah Polres.
 - o Melaporkan secara cepat dan tepat kejadian penting kepada pimpinan Polres dan Siaga Polda / Mabes Polri.
 - o Menyampaikan komando / perintah kepada unsur-unsur pelaksana operasional dan wilayah secara cepat dan tepat.

b) **BAG MIN**

Bagian Administrasi atau disingkat BAG MIN adalah Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres.

Bagian Administrasi bertugas menyelenggarakan, menyusun rencana/program kerja dan anggaran pembinaan dan administrasi personil, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.

Bagian administrasi dipimpin oleh Kepala Bagian disingkat Kabagmin yang bertanggungjawab kepada Kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya di bawah kendali Waka Polres.

Kabagmin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh:

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan disingkat Kasubbag Ren



2. Kepala Sub Bagian Personil disingkat Kasubbag Pers
3. Kepala Sub Bagian Pelatihan disingkat Kasubbag Lat
4. Kepala Sub Bagian Logistik disingkat Kasubbag Log

c) **BAG BINAMITRA**

Bagian Binamitra atau disingkat BAG BINAMITRA adalah Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres.

Bagian Binamitra bertugas menyelenggaraan dan mengawasi serta mengarahkan pelaksanaan penyuluhan kepada karyawan, pengguna jasa dan masyarakat serta pengamanan swakarsa dalam lingkungan polres.

Bagian Binamitra dipimpin oleh Kepala Bagian disingkat Kabag Binamitra yang bertanggungjawab kepada Kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya di bawah kendali Waka Polres.

Kabag Binamitra, adalah unsur pelaksanaan pada tingkat Mapolres yang bertugas membina dalam batas kewenangannya menyelenggarakan bimbingan masyarakat dan pembinaan kemitraan dalam lingkungan Polres. Dalam pelaksanaan tugasnya Bag Binamitra menyelenggarakan Fungsi :

1. Penyelenggaraan manajemen bimbingan masyarakat yang meliputi penyuluhan masyarakat, pembinaan ketertiban masyarakat, pembinaan / pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban serta terjadinya hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
2. Pembinaan hubungan kerja sama dengan organisasi / lembaga / tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dalam upaya



meningkatkan kesadaran ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, terbinanya ketertiban masyarakat, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.

3. Pembinaan teknis koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan koordinasi / mamagerial dalam rangka pengembangan kemampuan penyidik Pegawai Negeri Sipil pada tingkat Polres.
 4. Pengaturan pemberdayaan segenap personil, baik dalam lingkungan Mapolres maupun Polsek jajarannya dalam upaya peningkatan kesadaran ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat.
 5. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan keamanan swakarsa.
 6. Bag Binamitra Polres dipimpin oleh Kabag Binamitra Polres yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari – hari dikoordinasikan oleh Kabag Ops maupun Wakapolres.
 7. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kabag Binamitra dibantu oleh Kasubbag dan Banum
- **Penjabaran Tugas Kabag Binamitra**
 1. Memberikan masukan, saran dan menjabarkan pelaksanaan tugas secara berjenjang kepada Kasubbag Kerma, Babinkamtibmas dan Staf.
 2. Menyusun dan mengkoordinir dan mengendalikan anggota dalam pelaksanaan tugas



3. Dalam pelaksanaan tugas Kabag Binamitra bertanggung jawab kepada kapolres serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

- **Penjabaran Tugas Kasubag Kerma**

1. Menerima dan menjabarkan perintah yang diberikan oleh pimpinan.
2. Membina kerjasama dengan organisasi / lembaga / tokoh sosial / ppns / dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan
3. Merancang sarana komunikasi dan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan pembinaan.
4. Membantu kabag dalam pembuatan rencana kegiatan dan laporan hasil kegiatan.
5. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas sehari-hari kepada Kabag Binamitra.

- **Penjabaran Tugas Kasubag Bimas**

1. Unsur pelaksana staf di bawah kabag binamitra.
2. Bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi / mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
3. Mengadakan pelatihan satpam.
4. Mengadakan pelatihan ppns.
5. Mengadakan pelatihan linmas.
6. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada kabag binamitra



d) BAG SUMDA

Kabag Sumda, adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana pada Mapolres yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi perencanaan dan anggaran, personil, Logistik dan latihan serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut di lingkungan dan yang dipusatkan pada tingkat Mapolres dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Polres :

1. Bag Sumda dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi, disingkat Kabag Min, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya meliputi :
 - Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi perencanaan dan anggaran, personil, logistik dan latihan pada tingkat Polsek maupun Mapolres.
 - Menyusun rencana Program Kerja dan Anggaran Mapolres serta memadukan penyusunan rencana Program Kerja dan Anggaran Mapolres dan Polsek jajarannya
 - Memadukan dan mengawasi pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Polres jajarannya
 - Menyelenggarakan administrasi anggaran Polres
 - Menyelenggarakan administrasi personil
 - Menyelenggarakan perawatan personil yang meliputi pembinaan rohani, mental ideologi dan tradisi, pembinaan penyaluran dan penyediaan lapangan kerja.
 - Menyelenggarakan latihan antara Fungsi / Satuan, drill pasukan, penataran dan ceramah di lingkungan Polres
 - Menyelenggarakan pembinaan administrasi logistik di lingkungan



Polres

- Mengumpulkan, dan mengolah dan menyajikan data dan informasi yang menyangkut aspek pembinaan
 - Penyusun dan menyiapkan laporan-laporan yang berkenaan dengan fungsi pembinaan
2. Bag Sumda Polres dalam melaksanakan tugas kewilayahannya dibantu oleh :
- Kasubbag Ren** atau Kepala Sub Bagian Perencanaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kabag Min Polres
- a. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi perencanaan dan anggaran di lingkungan Polres.
 - b. Menyiapkan Rencana Program Kerja dan Anggaran Mapolres.
 - c. Memadukan Rencana Program Kerja dan Anggaran Polsek-Polsek dalam jajarannya.
 - d. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dan penyajian data / informasi baik yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun operasional untuk kepentingan perencanaan Program dan Anggaran.
 - e. Menyiapkan dan menyusun laporan tentang pelaksanaan Program dan Anggaran serta laporan sesuai dengan fungsinya.
 - f. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi perawatan personil di lingkungan Mapolres.
 - g. Melaksanakan pembinaan rohani, mental, Ideologi dan tradisi / kejuangan pada tingkat Mapolres dan melaksanakan peraturan pembinaan mental di lingkungan Polres



- h. Membantu pelaksanaan fungsi penyaluran dan penyediaan lapangan kerja

Kasubbag Pers atau Kepala Sub Bagian Personil yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kabag Min Polres

- a. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi administrasi personil dilingkungan Polres.
- b. Membantu pelaksanaan penerimaan personil dan seleksi masuk pendidikan beserta administrasi
- c. Melaksanakan administrasi penggunaan yang meliputi penempatan / jabatan, kepangkatan dan pendidikan dilingkungan Polres sesuai dengan kewenangan yang ada.
- d. Membantu penyelenggaraan dan pelaksanaan administrasi pengakhiran dinas termasuk pembinaan administrasi purnawirawan / warakawuri dan yatim piatu serta keluarga Polri dilingkungan Polri.
- e. Membantu penyelenggaraan dan melaksanakan pembinaan administrasi personil sipil Polri.
- f. Melaksanakan administrasi dan dokumentasi personil dalam rangka pengendalian karier.
- g. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kasubbag Pers dibantu oleh Baur

Kasubbag Lat atau Kepala Sub Bagian Latihan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kabag Min Polres



- a. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan latihan di lingkungan Polres
- b. Merencanakan dan mengatur penyelenggaraan latihan di lingkungan Polres.
- c. Melaksanakan latihan yang dipusatkan di tingkat Mapolres.
- d. Menyelenggarakan latihan khusus bagi komponen lain dari pelaksanaan fungsi kepolisian dan kekuatan penertiban dan peyelamatan masyarakat
- e. Melaksanakan pembinaan jasmani di lingkungan Mapolres.
- f. Dalam melaksanakan tugas kewajibannya Kasubbag Lat dibantu oleh Baur

Kasubbag Log adalah unsur pelaksana tugas kewajibannya kepada Kabag Min

- a. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi logistik dalam lingkungan Polres dan Polsek
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan dalam lingkungan Polres dan Polsek
- c. Penyiapan dan pendistribusian materil bagi keperluan Mapolres dan Polsek
- d. Melaksanakan administrasi penditribusian materil dari tingkat Mapolres ke Polsek-Polsek jajaran
- e. Memelihara materil Polres, Polsek dan dipusatkan pada tingkat Polres
- f. Pengurusan perbendaharaan materil sesuai perundang-undangan
- g. Pengendalian data inventaris dalam lingkungan Polres.



❖ **Fungsi Satuan.**

e) **SAT LANTAS**

Kasat Lantas adalah unsur pelaksana pada tingkat Mapolres yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan Fungsi Lalu Lintas dilingkungan Polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan Fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah / antar Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres.

1. Dalam melaksanakan tugas Sat lantas menyelenggarakan Fungsi :

- Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan Fungsi teknis Lalu Lintas pada tingkat Polres.
- Menyelenggarakan administrasi registrasi / identifikasi kendaraan bermotor yang dipusatkan pada tingkat Mapolres.
- Menyelenggarakan dan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, pendidikan masyarakat dan pengkajian masalah dibidang lalulintas.
- Penyelenggaraan operasi Kepolisian dibidang lalulintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalulintas.
- Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan Fungsi lalu lintas pada tingkat Polres termasuk dalam rangka pengungkapan kasus - kasus kecelakaan lalulintas yang menonjol.
- Menyelenggarakan administrasi operasi termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi baik yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan Fungsinya.
- Sat Lantas Polres dipimpin oleh Kasat Lantas Polres yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari - hari dikoordinasikan oleh Kahag Ops maupun Wakapolres.



- Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kasat Lantas dibantu oleh Kanit dan Kasubnit.
 - KBO Sat Lantas disingkat Kepala Urusan pembinaan Operasi lantas yang bertanggung Jawab kepada Kasat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas. KBO dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dibantu oleh kanit Patroli, Kanit Dikyasa, dan kanit laka lantas.KBO lantas membawai tentang urusan Administrasi anggota dan ketatausahaan serta sejumlah unit.
2. Kasat Lantas dalam pelaksanaannya dibantu oleh :
- Kepala Urusan pembinaan Operasi Sat Lantas disingkat KBO sat lantas yang bertanggung Jawab kepada Kasat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas. KBO dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dibantu oleh kanit Patroli, Kanit Dikyasa, dan kan= it laka lantas. KBO lantas membawai tentang urusan Administrasi anggota dan ketatausahaan serta sejumlah unit.
 - Kepala unit Patroli Sat Lantas disingkat kanit Patroli bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas. Kanit Patroli dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Unit Patmor dan Unit Gaktur. Kanit Patroli membawai tentang urusan unit patmor dan unit Gaktur serta administrasi.
 - Kepala Unit Laka Satlantas disingkat Kanit Laka sat lantas yang membawahi tentang urusan unit Laka dan Administrasi Laka serta bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari - hari dibawah kendali Kasat Lantas. Kanit Laka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh unit Laka.



- o Kepala Unit Dikyasa sat lantas disingkat Kanit Dikyasa Sat Lantas bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas.

f) SAT SAMAPTA

Satuan Samapta disingkat SAT. SAMAPTA adalah Unsur pelaksana utama yang berada dibawah kapolres/ta.

Sat samapta bertugas menyelenggarakan/membina fungsi kesamaptaan kepolisian/tugas polisi, umum dan pengamanan obyek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sat samapta juga berperan dalam memberikan pembinaan teknis kepada fungsi samapta satuan kewilayahan/polsek, menyelenggarakan dan melaksanakan operasional fungsi samapta tingkat polres dan antar polsek, memberikan back up operasional kewilayahan polsek.

Tugas Pokok :

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
- Mencegah dan menangkal seagala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya.
- Melaksanakan tindakan Refresif Tahap Awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat.



- Melakukan tindakan refresif terbatas (Tipiring dan pengakan Perda)
- Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional Polri.
- Melaksanakan SAR terbatas.

Kepala satuan samapta disingkat KASAT SAMAPTA, adalah perwira yang ditunjuk untuk memimpin satuan samapta, dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya dibantu oleh kepala urusan pembinaan operasional samapta disingkat KBO Samapta.

Kedudukan Kasat Samapta dibawah kapolres/ta dan bertanggung jawab kepada kapolres/ta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kasat samapta membawahi dan mengendalikan beberapa unit di antaranya :

1. Unit patroli
2. Unit penjagaan mako/yanmas
3. Unit penjagaan tahanan
4. Unit pengendalian massa
5. Unit s.a.r terbatas
6. Unit pengamanan/pengawalan v.i.p
7. Unit satwa.

Kepala unit patroli disingkat KANIT PATROLI, adalah perwira yang ditunjuk untuk memimpin unit patroli yang merupakan bagian dari satuan samapta.

Kedudukannya dibawah kasat samapta dan bertanggung jawab kepada kasat samapta dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai kanit patroli.

Kanit patroli dalam mengendalikan unit operasional patroli yang merupakan perwujudan tindakan preventif, di bantu oleh kepala/komandan regu disingkat DANRU.



Kanit patroli membawahi dan mengendalikan beberapa unit patroli di antaranya :

1. Unit patroli samapta berroda empat disingkat UPS R.4
2. Unit patroli samapta berroda dua disingkat UPS R.2
3. Unit patroli samapta bersepeda
4. Unit patroli samapta berjalan kaki.

Pengendalian massa disingkat DALMAS, adalah suatu ikatan baik kompi/peleton yang bertugas sebagai unit pengendalian massa yang dapat digerakkan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Untuk tingkat peleton, dalmas dipimpin oleh komandan peleton disingkat DANTON, yang bertanggung jawab kepada kasat samapta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Danton dalmas berkewajiban mengawasi dan mengendalikan anggotanya. Danton dalmas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh wakil komandan peleton disingkat WADANTON.

Dasar hukum

Peraturan Kapolri NO. POL. : 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Bintara administrasi operasional samapta disingkat BAMIN OPS SAMAPTA, adalah bintara yang ditunjuk menangani ruang lingkup administrasi, tata kearsipan dan surat-menyurat baik itu intern samapta maupun ekstern samapta. Bamin ops berkedudukan dibawah kaurbin ops samapta.

Bamin ops bertanggung jawab kepada kasat samapta dalam menyelenggarakan administrasi operasional samapta serta pemberdayaan dan pemeliharaan materiil logistik/ inventaris dinas sat samapta yang dibantu oleh Staff Samapta beserta Pembantu Umum disingkat Banum.



Bamin ops beserta staff dan banum samapta bersama-sama melaksanakan administrasi yang dibutuhkan oleh unit-unit samapta dilapangan baik dalam hal surat menyurat maupun tata kearsipan.

Staff Samapta adalah unsur min ops samapta dalam menyelenggarakan administrasi, tata kearsipan, surat-menyurat serta pemberdayaan dan pemeliharaan materiil logistik/ inventaris dinas sat samapta, yang selanjutnya dibantu oleh Banum.

Staff samapta berkedudukan dibawah bamin ops dan bertanggung jawab kepada kasat samapta dalam hal pelaksanaan tugas administrasi sehari-harinya

g) SAT INTELKAM

Satua Intelijen Keamanan atau disingkat SAT INTELKAM merupakan salah satu Fungsi Operasional Polri yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan terhadap segala bentuk ancaman dan gangguan yang akan mempengaruhi situasi dan kondisis keamanan pada umumnya.

Sat Intelkam bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polres Metro Bandara Soekarno Hatta dan peringatan dini bagi seluruh jajaran Polres serta memberikan pelayanan administrasi & pengawasan senjata api/bahan peledak, orang asing dan kegiatan sosial /politik masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sat Intelkam dipimpin oleh Kepala Satuan Intelkam, disingkat Kasat Intelkam, yang bertanggung jawab kepada Kapolres Kota dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres. Kasat Intelkam dibantu oleh Kaur Bin Ops Intelkam, disingkat KBO Intelkam, yang bertanggung jawab kepada Kasat Intelkam.



Tugas Pokok

1. Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat.
2. Mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas.
3. Melaksanakan pengamatan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam masyarakat di bidang Ipoleksosbudhankam bagi kepentingan yang membahayakan masyarakat khususnya dalam kegiatan kontra Intelijen
4. Menciptakan kondisi tertentu yang menguntungkan dalam masyarakat bagi pelaksanaan tugas Polri.

Dalam melaksanakan tugasnya Sat Intelkam memiliki unit kerja sebagai berikut :

- Unit Bidang Sosial Ekonomi
- unit Bidang Sosial Budaya
- Unit Bidang Keamanan
- Unit Bidang Politik
- Unit Jihandak (Perijinan Senjata dan=C2=A0 Bahan Peladak)
- Unit Undercover
- Unit POA (Pengawasan Orang asing)

Fungsi SAT INTELKAM

Pengamanan dan penggalangan untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fun= gsi kepolisian, terutama penegakan hukum, pembinaan



kamtibmas, serta keperluan tugas bantuan pertahanan dan kekuatan sosial.

h) SAT RESKRIM

SAT RESKRIM bertugas membina Fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.

Kasat Reskrim

1. Bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas SATUAN RESERSE.
2. Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah Perencanaan, Pengorganisasian, dan control terhadap tugas anggota.
3. Melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan instansi = samping.
4. Melakukan supersif staf.
5. Mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama= operasi yang dibebankan.

KBO Reskrim

1. Membantu Kasat Reskrim melakukan pengawasan terhadap anggota Unit Reskrim, Urmindik, Urmin, Ur Tahti dan Ur Indentifikasi.



2. Membantu kasat VReskrim dalam menyiapkan administrasi, formulir-formulir yang ditentukan untuk pelaksanaan tugas anggota reskrim.
3. Membantu kasat Reskrim menjamin ketertiban dan ketentuan pengisian formulir-formulir, register-register penyidikan.
4. Memberikan input data kepada Kasat Reskrim melalui Urmidik, Urmin, Ur Tahti, Ur Identifikasi dalam Pulahjianta.
5. Membantu kasat reskrim dalam melancarkan, mengontrol menertibkan petunjuk cara pengisian register yang dibutuhkan untuk administrasi penyidikan.

KA Unit

1. Melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus atau tindak pidana yang akan atau sedang atau telah terjadi.
2. Menertibkan daftar pencarian orang maupun barang guna pencarian/penyelidikan.
3. Memyelesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang sedang ditangani dan bekerjasama dengan unbin ops dalam pemanggilan, SPDP dan administrasi lain.
4. Melakukan pemberkasan perkara dan mengajukan kepada Ur Bin Ops untuk dikoreksi dan dikirim kekejari.
5. Menyiapkan data-data yang ditangani.

i) SAT RESKOBA

Sat Reserse Narkoba atau disingkat SAT RESKOBA Adalah unsur pelaksana utama Polres yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba). Kasat



1. Penyelenggaraan manajemen bimbingan masyarakat yang meliputi penyuluhan masyarakat, pembinaan ketertiban masyarakat, pembinaan / pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban serta terjadinya hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
2. Pembinaan hubungan kerja sama dengan organisasi / lembaga / tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, terbinanya ketertiban masyarakat, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
3. Pembinaan teknis koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan koordinasi / managerial dalam rangka pengembangan kemampuan penyidik Pegawai Negeri Sipil pada tingkat Polres.
4. Pengaturan pemberdayaan segenap personil, baik dalam lingkungan Mapolres maupun Polsek jajarannya dalam upaya peningkatan kesadaran ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat.
5. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan keamanan swakarsa.
6. Bag Binamitra Polres dipimpin oleh Kabag Binamitra Polres yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada



Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari – hari dikoordinasikan oleh Kabag Ops maupun Wakapolres.

7. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kabag Binamitra dibantu oleh Kasubbag dan Banum.

k) SAT PAM OBVIT

Satuan Pengamanan Obyek Vital disingkat SAT PAM OVBIT Adalah Unsur pelaksana utama Polres yang merupakan pemekaran dari Sat Samapta dan berada di bawah Kapolres.

Sat Pam Obvit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan obyek vital yang meliputi obyek/proyek vital, VIP dan pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus.

Sat Pam Obvit dipimpin oleh Kepala Satuan Pam Obvit di singkat Kasat Pam Obvit, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polres.

Sat Pam Obvit terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan serta sejumlah unit.

Unit Sat Pam Obvit:

- Menjabarkan dan melaksanakan tugas pokok Pam Obvit, provit, VIP dan Pariwisata sesuai progiat yang ditetapkan
- Melaksanakan tugas penjagaan, pengamanan, pengawalan dan patroli dilingkungan obvit yang ada di wilayah hukum Polres.
- Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian apabila terjadi gangguan keamanan dilingkungan obvit bersama-sama dengan satpam serta melaporkan kepada pimpinan.
- Memberikan bimbingan teknis kepada satpam obvit dalam rangka penyelenggaraan guna meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan kinerja satpam.



- Melaporkan kegiatan dan hasil yang dicapai kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijaksanaan lebih lanjut.

❖ **Fungsi Staf Khusus.**

L) UNIT P3D

Unit P3D adalah unsur pelaksana staf khusus pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres.

Unit P3D bertugas membina & menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban, pengamanan internal, penegakan disiplin & ketertiban di lingkungan Polres termasuk pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Unit P3D menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan/perumusan kebijakan Kapolres dalam bidang bin fungsi pengawasan umum, pengamanan internal & bin disiplin dalam lingkungan Polres.
- Pembinaan/penyelenggaraan pengamanan internal yang meliputi: personil, materil, kegiatan & bahan keterangan.
- Pembinaan/penyelenggaraan pembinaan dan penegakan disiplin & tata tertib.
- Pembinaan pelayanan dalam penerimaan laporan/pengaduan warga masyarakat tentang sikap & tindakan anggota Polri/PNS.
- Pengendalian & monitoring terhadap penanganan laporan/pengaduan warga masyarakat oleh satuan–satuan dalam lingkungan Polres.



Kanit P3D

1. Unsur pelaksana staf khusus pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres, dan pengendali sehari-hari dibawah Waka Polres.
2. Membantu pimpinan untuk menyeleggarakan pengamanan internal, penegakan hukum dan tata tertib disiplin anggota dilingkungan Polri/PNS.
3. Membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban pam internal, penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polres/ta termasuk pelayanan dan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan yang dilakukan anggota Polri/PNS.
4. Penyiapan/perumusan kebijakan Kapolres/ta dalam bidang fungsi pengawasan umum, pengamanan internal dan bidang disiplin dalam lingkungan Polres.
5. Pembinaan/penyelenggaraan pengamanan internal, pembinaan disiplin dan penegakan hukum.
6. Pengendalian kebijaksanaan pimpinan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan satuan dalam lingkungan Polres.

Dalam melaksanakan tugasnya UNIT P3D memiliki unsur pelaksana dan staff kerja sebagai berikut :

- Panit Propam
- Unit Provos
- Ba Ur Pam
- Ba UR Gakkum
- Ba Ur Binplin



Panit Propam

Panit Propam adalah unsur pelaksana staf pada Unit P3D yang berada dibawah Kanit P3D Polres/ta.

- Panit Propam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi pengamanan internal, yang meliputi pengamanan personil, materil, kegiatan dan bahan keterangan dalam lingkungan Polres/ta.
- Panit Propam dipimpin oleh Perwira Propam disingkat Pa Propam yang bertanggung jawab kepada Kanit P3D Polres/ta.
- Panit Propam dalam melaksanakan tugas operasional
- Paminal dibantu oleh anggota Paminal.

Unit Provos

Provos adalah unsur pelaksana pada unit P3D yang berada dibawah Kanit P3D Polres/ta

- Provos bertugas menyelenggarakan & membina fungsi Provos yang meliputi pembinaan disiplin, penegakan hukum dan penyelesaian perkara dan pelanggaran disiplin.
- Provos dalam melaksanakan tugasnya terdiri dari :
 - Bintara urusan bagian pengamanan disingkat Baur Pam.
 - Bintara urusan bagian penegakan hukum disingkat Baur Gakkum.
 - Bintara urusan bagian pembinaan disiplin disingkat Baur Binplin.
- Masing-masing urusan dipimpin oleh Bintara Urusan, disingkat Baur.



Ba Ur Binplin

1. Unsur pelaksana Unit Provos yang berada dibawah Kanit P3D.
2. Melakukan pembinaan dan memelihara disiplin, tata tertib personil dilingkungan Polres/ta.
3. Meningkatkan tatib disiplin anggota polri dengan melakukan penegakan dan pembinaan sikap mental disiplin, sehingga anggota integritas disiplin yang tinggi dan mampu mendukung keberhasilan tugas.
4. Membantu Kanit P3D menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri/PNS.

m) TAUD

Tata Urusan Dalam atau disingkat TAUD merupakan salah satu Bagian tak terpisahkan dengan Satuan – satuan lain dibawah Komando Polres, walaupun terkadang terlupakan namun Taud merupakan ujung tombak dari kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan–Satuan di Polres, oleh Karenanya Fungsi Taud sebagai salah satu Unsur Pelaksana Staff khusus pembantu pimpinan yang berada dibawah Komando langsung Kapolres dan pengendalian sehari–hari dibawah Waka Polres merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya dengan satuan–satuan lain di Polres, namun tentunya kegiatan yang dilaksanakan oleh fungsi Taud bersifat Intern (Ke Dalam).

Tugas Utama dari fungsi Taud adalah melaksanakan ketata Usahaan dan urusan dalam yang meliputi :

- Korespondensi ke tata Usahaan Perkantoran.
- Dokumentasi
- Penyelenggaraan Rapat



- Penyelenggaraan Upacara / Apel
- Kebersihan dan Ketertiban Mako
- Pemeliharaan barang–barang Inventaris.
- menjaga kerahasiaan surat sesuai Klasifikasinya serta memberikan pelayanan Administrasi Kepada Satuan Kerja dan Masyarakat, dimana setiap bulannya melaporkan kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan ke Satuan atas.

Tata Urusan Dalam (TAUD) pada pelaksanaan tugasnya di pimpin oleh seorang Kepala Taud yang di singkat KATAUD dengan dibantu oleh Bintara Administrasi (BA MIN) dan Bintara Urusan Umum (BANUM).

N) BENSAT

Bendaharawan Satker atau disingkat BENSAT Bensat adalah unsur pelaksana staf pada polres yang berada di bawah Kapolres.

Bensat bertugas, menerima dan membukukan dokumen sumber antara lain DIK/DIP Satker, SKO, SPM, dan NPB, menyiapkan SPP, SPPR, beserta kelengkapannya dan mengajukan tagihan kepada KPN/Kabidku yang melayani mencairkan SPM Belanja Pegawai serta dana satker lainnya. mengirimkan arsip data komputer (ADK) dan laporan keuangan setiap bulan kepada Kabidku, membuat analisa untuk catatan atas laporan keuangan (Daya serap anggaran, posisi kas, dan lain–lain), menyelenggarakan pencatatan secara manual untuk hal–hal yang belum termasuk komputerisasi SAI, menyelenggarakan pengarsipan dokumen akuntansi, melaksanakan pengelolaan Belanja Pegawai di Satkernya. dan bertanggungjawab kepada Kapolres.

o) UR TELEMATIKA

- Urtelematika adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang berada di bawah Kapolres.



- Urtelematika bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.
- Urtelematika dipimpin oleh Kepala Urtelematika, disingkat Kaur Telematika, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

p) BID DOKKES

Bidang Kedokteran Dan Kesehatan atau disingkat BID DOKES adalah unsur pelaksana staf khusus polres yang berada dibawah Kapolres.

BID DOKES bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi kedokteran dan kesehatan Polri yang meliputi bidang kedokteran kepolisian, kesamaptaaan dan pelayanan kesehatan, baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia maupun melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Dalam melaksanakan tugas, BID DOKES menyelenggarakan fungsi sebagai:

- Pembina dan penyelenggaraan kedokteran kepolisian untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polresta.
- Penyelenggaraan dan pembinaan kesehatan personel / PNS Polri yang meliputi kesemaptaaan dan pelayanan kesehatan.
- Penyelenggaraan dan pembinaan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka mendukung terselenggaranya fungsi kedokteran kepolisian dan pelayanan kesehatan polri

BID DOKES dipimpin oleh Kepala Biddokkes, disingkat Kabiddokkes, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada dibawah kendali Wakapolres.



BID DOKES terdiri dari:

- a. Sub Bidang Dukungan Kesehatan, disingkat Subbiddukkes.
 - Subbiddukkes adalah unsur pelaksana pada Biddokkes yang berada dibawah Kabiddokkes.
 - Subbiddukkes bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi dukungan kedokteran kepolisian terhadap tugas operasional dan kesamaptaan personel.
 - Subbiddukkes dipimpin oleh kepala Subbiddukkes, disingkat Kasubbidokkes , yang bertanggung jawab kepada Kabbiddokkes.
- b. Sub Bidang pelayanan dan Materiil/Fasilitas kesehatan, di singkat Subbidyanmatfaskes.
 - Subbidyanmatfaskes adalah unsur pelaksana yang berada dibawah Kabiddokkes.
 - Subbidyanmatfaskes bertugas menyelenggarakan dan membina pelayanan kesehatan serta dukungan materiil dan fasilitas kesehatan.
 - Subbidyanmatfaskes dipimpin oleh kepala subbidyanmatfaskes, di singkat Kasubbidyanmatfaskes yang bertanggung jawab kepada Kabiddokkes.
- c. Poliklinik Kepolisian atau disingkat Polipol.
 - Polipol adalah unsur pelaksana pada Biddokkes Polda persiapan Yang berada di bawah Kabiddokkes.
 - Polipol bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi personel Polri dan keluarga serta menyelenggarakan dukungan kedokteran kepolisian kesehatan bagi tugas operasional dan pembinaan polri.
 - Polipol dipimpin oleh Kepala Poliklinik Kepolisian, disingkat KapoliPol yang bertanggung jawab kepada Kabiddokkes.



4.2. Kajian Tentang Program Quick Wins.

Pentingnya proses penyidikan yang dilakukan Kepolisian dianjurkan lebih bersifat transparan serta penuh dengan tanggung jawab terhadap menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan bagi masyarakat, maka dalam hal ini Kepolisian menentukan arah Kebijakan dan Strategi Kepolisian Tentang Pedoman pelaksanaan transparansi penyidikan dengan SURAT PERINTAH NO. POL : SPRIN/390.A/RA/III/2009/BARESKRIM TANGGAL 31 MARET 2009 yang mempunyai maksud dan tujuan antara lain : Maksud sebagai pedoman bagi penyidik dlm pelaksanaan program *Quick Wins* bidang transparansi penyidikan. Tujuan penyidikan yg profesional, proporsional, transparan, cepat dan tepat serta berkeadilan guna membangun *grand strategi* tersebut ada 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai kepercayaan masyarakat (*trust building*), membangun kemitraan (*Partnership building*) dan pelayanan prima (*Strive for Excellence*).

1. Tahap I : Trust Building (2005 - 2010).

Keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas memerlukan dukungan masyarakat dengan landasan kepercayaan (trust)

2. Tahap II : Partnership Building (2011 - 2015).

Merupakan kelanjutan dari tahap pertama, di mana perlu dibangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaan Polri.

3. Tahap III : Strive For Excellence (2016 - 2025).

Membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul dan dipercaya masyarakat. Dengan demikian kebutuhan masyarakat akan pelayanan Polri yang optimal dapat diwujudkan.

Dimana program *Quick Wins* ini merupakan suatu bentuk program kebijakan yang berkaitan dengan kerjasama antara Kepolisian dan masyarakat, tentunya dalam hal penyidikan, memberikan perlindungan HAM kepada masyarakat dalam proses penyelidikan dan penyidikan, seperti halnya hak persamaan dihadapan hukum, mendapatkan informasi, mendapatkan perlindungan



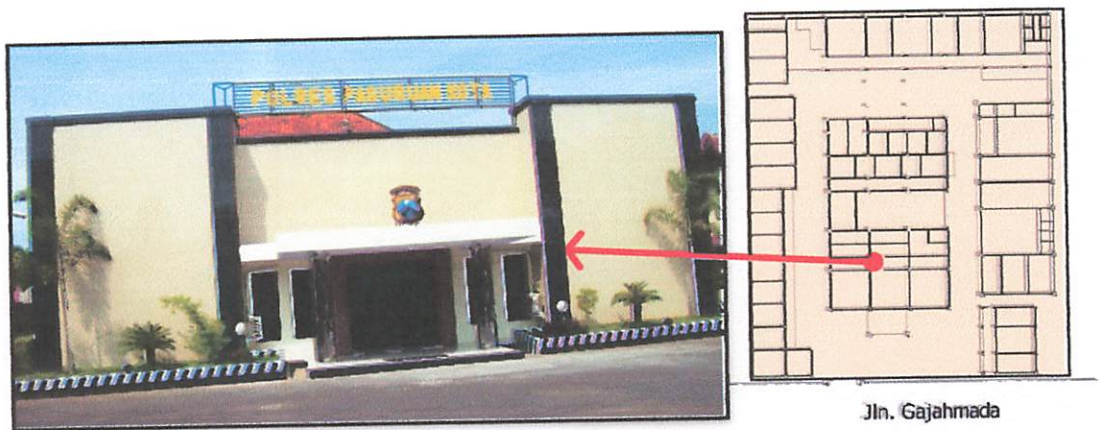
hukum, melakukan komplain terhadap kasus yang belum di informasikan atau di proses pada tahap penyelidikan dan penyidikan melalui pengaduan masyarakat.

4.3. Studi Banding.

4.3.1. Studi Banding Objek

a) Studi Banding Kantor Kepolisian Resor Kota Pasuruan.

Kantor Kepolisian Resor Kota Pasuruan, Jawa Timur terletak di Jalan Gajahmada, merupakan sebuah gedung yang memfasilitasi dan melayani masyarakat.

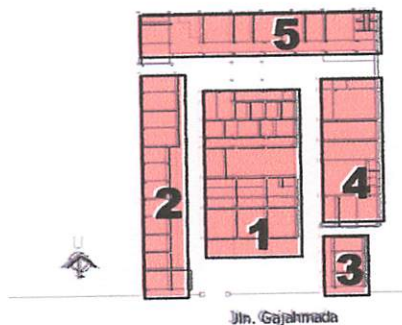


Gambar 4.1
Polresta Pasuruan

❖ Pembagian Massa Bangunan.

Bangunan Kantor Kepolisian Resor Kota Pasuruan ini dibagi menjadi 5 massa bangunan, yaitu

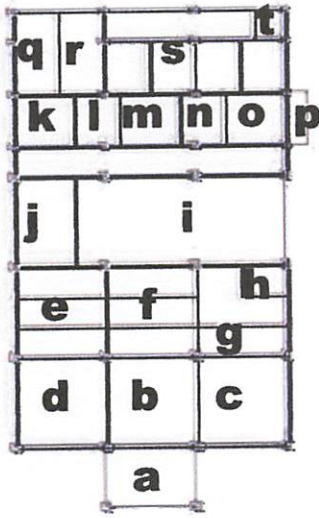
- Massa 1
- Massa 2
- Massa 3
- Massa 4
- Massa 5



Gambar 4.2
Pembagian Massa Bangunan



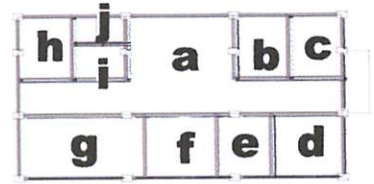
• Massa 1



LANTAI 1

Gambar 4.3
Massa 1 Denah Lantai 1

- a. Teras
- b. Lobby
- c. R.Kapolresta
- d. R.Wakapolresta
- e. Taud
- f. Sikeu
- g. Gudang
- h. Toilet
- i. R. Rapat utama
- j. R. Kontrol
- k. Kasat tahti
- l. -----
- m. -----
- n. -----
- o. -----
- p. Tangga
- q. R.Besuk tahanan
- r. R.Berkumpul tahanan
- s. R.Tahanan
- t. Toilet Tahanan



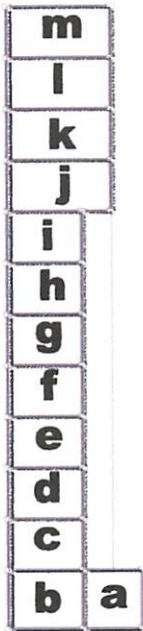
LANTAI 2

Gambar 4.4
Massa 1 Denah Lantai 2

- a. R.Informasi
- b. R.Kanit I reskrim
- c. R.Kanit II reskrim
- d. Gudang
- e. R.Kanit I Reskoba
- f. R.Kanit II Reskoba
- g. R.Kanit III Reskoba
- h. R.Kasat reskoba
- i. Musholla
- j. Toilet



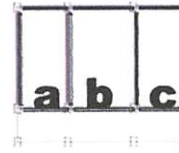
• Massa 2



- a. R.SPK
- b. R.KA SPK
- c. R.Kasub humas
- d. R.Paminal
- e. R.Provos
- f. R.Kanit P3D
- g. R.Baur Inden
- h. R.Kanit Sabhara
- i. R.SKCK
- j. R.Tahanan wanita
- k. R.Tahanan wanita
- l. R.BB
- m. R.BB

Gambar 4.5
Massa 2 Denah Lantai 1

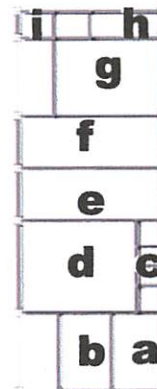
• Massa 3



- a. R.Kabag Ops
- b. R.Rapat
- c. R.Kasubag

Gambar 4.6
Massa 3 Denah Lantai 1

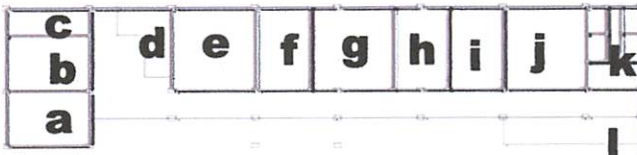
• Massa 4



- a. R.Kasat intelkam
- b. R.KBO intelkam
- c. Toilet
- d. R.Unit intelkam
- e. -----
- f. R.Paur Log
- g. Kantin
- h. Pantri
- i. Toilet

Gambar 4.7
Massa 4 Denah Lantai 1

• Massa 5



LANTAI 1

Gambar 4.8
Massa 5 Denah Lantai 1



LANTAI 2

Gambar 4.9
Massa 5 Denah Lantai 2

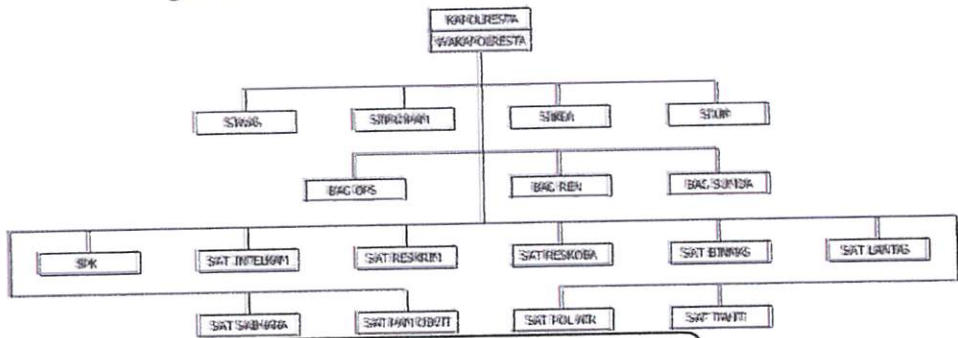
- a. R.KBO Sabhara
- b. R.Kasat Samapta
- c. Gudang
- d. Tangga
- e. R.Unit Sat Binmas
- f. R.Kasat Binmas
- g. R.Kabag Ren
- h. R.Unit Bag Ren
- i. R.Kabag Sumda
- j. R.Unit Bag Sumda
- k. Toilet
- l. Tangga

- r. -----
- s. R.Kanit Jatanras
- t. Tangga
- u. R.Kasat Reskrim
- v. R.Baur Yamin

- m. R.Tahanan Anak
- n. R.Tahanan Anak
- o. Unit PPA
- p. Unit PPA
- q. Unit PPA



❖ **Struktur Organisasi Polresta Pasuruan.**



Gambar 4.10
Struktur Organisasi Polresta Pasuruan

Anggota Kepolisian Resor Kota

- Kapolresta : 1 orang
- Wakapolresta : 1 orang
- Siwas : 5 orang
- Sipropam : 5 orang
- Sikeu : 5 orang
- Sium : 5 orang
- Bag Ops : 9 orang
- Bag Sumda : 9 orang
- Bag Ren : 9 orang
- Bag Binamitra : 9 orang
- Spk : 9 orang
- Sat Intelkam : 12 orang
- Sat Reskoba : 12 orang
- Sat Reskrim : 12 orang
- Sat Binmas : 12 orang



• Sat Sabhara	:	12 orang	
• Sat Samapta	:	12 orang	
• Sat Lantas	:	9 orang	
• Sat Pam Obvit	:	9 orang	
• Sat Pol Air	:	4 orang	
• Sat Tahti	:	9 orang	
• Unit P3d	:	6 orang	
• Taud	:	4 orang	
• Bensat	:	4 orang	
• Ur Telematika	:	4 orang	
• Biddokkes	:	4 orang	+
<hr/>			
Total anggota	:	196 anggota	

❖ **Kesimpulan Studi Banding Kantor kepolisian Resor Kota Pasuruan.**

Pada kantor kepolisian resor kota pasuruan msih belum memenuhi standar yang tertera pada SURAT PERINTAH NO. POL : SPRIN/390.A/RA/III/2009/BARESKRIM TANGGAL 31 MARET 2009 (program Quick Wins) tentang fungsi pelayanan pada kantor kepolisian resor maupun resor kota dengan cara membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul dan dipercaya masyarakat. Dengan demikian kebutuhan masyarakat akan pelayanan Polri yang optimal dapat diwujudkan. Sedangkan pada polresta Pasuruan ada beberapa fungsi pelayanan (kantornya) yang terpisah dari kantor polresta pasuruan, seperti SAT LANTAS, dan SAT POL AIR. Selain itu perhitungan ratio kepolisian juga belum tercapai dikarenakan perbandingan antara polisi dan penduduk berbanding 1:847 pada tahun 2010 dan standarnya yaitu 1:750. Program



quick wins tahap 3 (*Strive For Excellence*) yang akan berlangsung pada tahun 2016-2025.

Jumlah penduduk kota pasuruan pada tahun 2010 berjumlah 165.992 dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,19% per tahun, maka diperkirakan pada tahun 2025 berjumlah ± 195.617 , untuk jumlah minimal anggota kepolisian resor kota pasuruan diperkirakan ± 261 anggota. Dan jumlah anggota kepolisian tersebut bisa bertambah hingga 2 kali lipat banyaknya sesuai dengan keputusan polri.



BAB V

METODE KAJIAN

5.1 Metode Pengumpulan Data.

5.1.1 Data Primer.

Pengambilan data ini dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan dan pengambilan data terhadap obyek perancangan. Pengamatan dilakukan dengan survey langsung ke lapangan dan mendokumentasikan kondisi lapangan dalam bentuk foto yang kemudian akan dianalisa sesuai dengan teori-teori dan kajian-kajian literatur.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Untuk mengumpulkan data primer dapat digunakan metode survey dan metode observasi.

Pengumpulan data pada proses perancangan ini dilakukan dengan cara, yaitu:

1. Survey lapangan (observasi).

Melakukan pengamatan langsung ke lapangan sesuai dengan data yang diperlukan dalam perancangan kawasan. Mengadakan survey pada instansi-instansi yang terkait dengan kepolisian. Survey dilakukan pada kantor kepolisian yang ada di wilayah Indonesia, khususnya di Jawa Timur.

2. Interview (wawancara).

Melakukan wawancara langsung terhadap anggota kepolisian mengenai keorganisasian, tugas/fungsi kepolisian, serta program-program terkait dengan kepolisian.

3. Dokumentasi.

Pengumpulan data baik tertulis maupun tidak, gambar/photo tentang site/lokasi perancangan guna mengetahui kondisi fisik eksisting,



potensi, ataupun kendala yang ada di lokasi perencanaan sehingga dapat memperjelas gambaran obyek perancangan.

5.1.2 Data Skunder.

mengumpulkan data-data dari literatur yang bersifat teori, peraturan daerah, dan program pemerintah yang berhubungan dengan pengendalian citra kawasan serta program-program kepolisian, yang terkait langsung dengan judul perencanaan, namun tetap mendukung langkah-langkah perancangan selanjutnya, yang meliputi :

a. Studi literatur.

- Teori arsitektur.

Studi tentang teori-teori dalam berarsitektur yang dikemukakan oleh tokoh serta pengaplikasiannya terhadap bangunan.

- Lokasi.

Studi tentang lokasi dengan kriteria yang ditetapkan seperti letak geografisnya, peraturan-peraturan yang ada dan lainnya.

- objek

Studi tentang objek serta tinjauan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dengan kriteria yang ditetapkan seperti kriteria lokasi, ruang-ruang, dan faktor-faktor pendukung lainnya.

b. studi banding.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang obyek perancangan, diperlukan studi banding sebagai bahan perbandingan dalam pengolahan bangunan dan tapak yang akan dirancang dan untuk mengetahui lebih jelas aktivitas dan fasilitasnya.



5.2 Metode Pengolahan Data.

Proses yang digunakan dalam pengolahan data adalah analisis dan sintesis. Proses pengolahan data akan menghasilkan beberapa alternatif-alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan konsep perancangan, yang dijelaskan sebagai berikut :

1) *Analisis*

Tahapan pertama adalah analisis yang meliputi analisis bentuk, tapak, ruang, bangunan, tatanan massa, ruang luar dan sistem struktur serta utilitas, sehingga akan dapat dipergunakan sebagai pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

2) *Konsep*

Tahapan kedua adalah konsep yang berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan menghasilkan sebuah konsep programatik yang kemudian dituangkan ke dalam konsep desain yang selanjutnya menjadi gagasan utama dalam proses perancangan.

5.3 Metode Pembahasan.

Langkah-langkah yang digunakan dalam merumuskan permasalahan sampai dengan tahap pemecahan masalah menggunakan sistem *Problem Solving Steps*, tahapan yang diambil adalah sebagai berikut :

- a) mendefinisikan permasalahan.
- b) penentuan sasaran atau obyek.
- c) Batasan-batasan.
- d) pengumpulan data.
- e) analisa data.
- f) alternatif pemecahan (solusi).
- g) Penyelesaian / pemecahan masalah.



Pembahasan didasarkan pada cara berpikir, yaitu dimulai dari teori menggunakan metode analisa dan konsep untuk mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan yang kualitatif. Langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut :

- Mencari dan mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan dan perancangan.
- Menyeleksi data yang disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi, selanjutnya dianalisa untuk mendapatkan alternatif pemecahan masalah.
- Mengambil alternatif pemecahan masalah sebagai dasar penentuan konsep terpilih. alternatif-alternatif tersebut dianalisa dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah disusun dengan jelas, untuk mendapatkan keputusan rancangan.

5.4 Metode Perancangan.

Metode perancangan yang digunakan dalam perancangan kantor kepolisian kota adalah sebagai berikut :

a. identifikasi permasalahan

Identifikasi permasalahan dilakukan untuk mendapatkan berbagai indikator yang dapat digunakan sebagai variabel dalam memecahkan permasalahan. Indikator-indikator tersebut adalah:

- jumlah tindak kriminal seperti pencurian, rampok, copet, obat-obatan terlarang, sex, dll yang semakin marak terjadi menunjukkan bahwa masalah tindak kriminal sudah menjadi permasalahan negara yang mendesak untuk ditangani secara serius, namun tidak diimbangi dengan sarana dan fasilitas “hukum” sehingga jumlah tindak pidana atau kriminalitas tidak diketahui dengan jelas.



b. hipotesa

Pengambilan suatu kesimpulan sementara dan metode untuk mewujudkan sebuah rancangan kantor kepolisian resor kota.

c. analisa

Pengujian kebenaran dari hipotesa dengan membandingkan antara hasil studi dan data dengan kajian teori. Dari analisa dapat dihasilkan suatu pemecahan masalah yang ada :

- analisa lingkungan

Merupakan analisa terhadap faktor-faktor dan potensi tapak dan lingkungan serta aspek-aspek yang mencakup di dalamnya, meliputi :

- kondisi eksisting.
- pemilihan site.
- tapak dan lingkungan.

- analisa manusia

Hubungan manusia sebagai pengguna bangunan dan obyek bangunan serta berbagai fasilitas yang ditampung, meliputi :

- pelaku, aktivitas, dan fasilitas (peralatan).
- Organisasi ruang.
- pengelompokan dan hubungan antar aktivitas.
- pengelompokan ruang.
- studi besaran ruang.



- analisa fisik bangunan

Analisa terhadap faktor-faktor fisik bangunan dalam perancangan kantor kepolisian resor kota, meliputi :

- Bentuk bangunan.
- Tampilan bangunan.
- Perletakan masa bangunan
- Tata ruang dalam dan ruang luar (karakter, suasana ruang dan spasial ruang).
- Struktur dan bahan.
- Sistem utilitas bangunan.

d. konsep

konsep disebut juga sebagai konsep diskriptif yang merupakan suatu susunan gagasan yang sistematis. Kantor kepolisian resor kota didalamnya terdapat konsep bentuk, konsep tapak, konsep ruang, Konsep Utilitas dan konsep struktur bangunan.



5.5 Metodologi

Aktualita

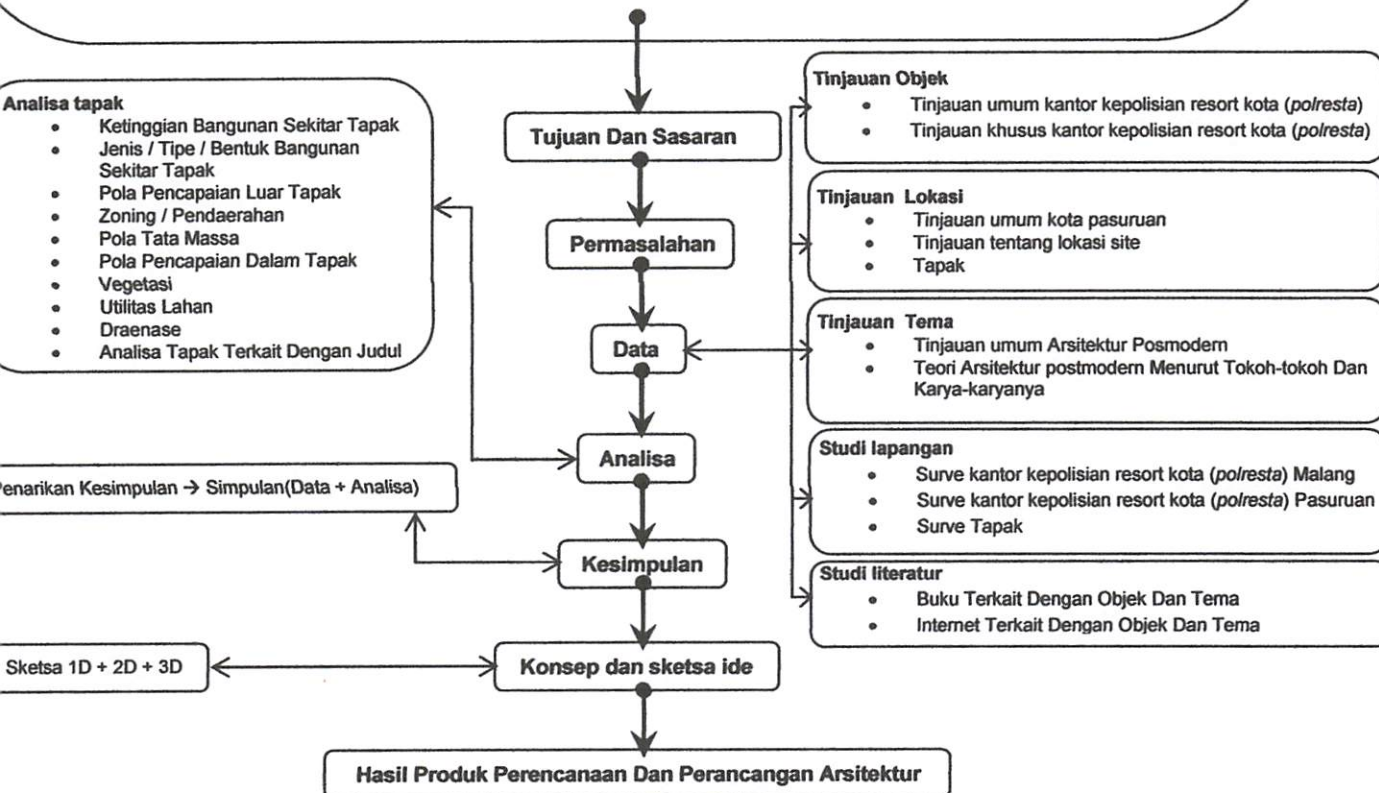
- Kantor Kepolisian Resort kota (*POLRESTA*) di Kota Pasuruan yang pada saat ini fungsi pelayanannya masih terpisah dari satu kesatuan lingkungan kepolisian Kota Pasuruan sehingga kurang mendukung proses pembinaan yang sesuai dengan system pemasyarakatan.
- Bentuk Fisik (*FASAD*) Kantor Kepolisian Resort kota (*POLRESTA*) di Kota Pasuruan mempunyai *image* "menyeramkan/menakutkan/kurang berwibawa" bagi masyarakat pasuruan.
- Belum terlaksananya program kepolisian *QUICK WINS* yang terdiri dari 3 tahap yakni:
 - Tahap I (2009-2010) membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*).
 - Tahap II (2011-2015) membangun Kemitraan Masyarakat (*Pathnership Building*)
 - Tahap III (2016-2025) melakukan pelayanan Prima (*Strive For Excellence*)
- pada tahap III melakukan pelayanan prima (*Strive For Excellence*) masih belum menemukan formula (bentuk bangunan/penataan fungsi bangunan) yang masih dalam satu kesatuan lingkungan kepolisian, untuk dapat melakukan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Urgensi

Di kota Pasuruan membutuhkan kantor kepolisian resort yang mendukung system/program *Quick Wins* yang telah direncanakan oleh polri dalam 3 tahapan yakni Tahap I (2009-2010) membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*), Tahap II (2011-2015) membangun Kemitraan Masyarakat (*Pathnership Building*), dan Tahap III (2016-2025) melakukan pelayanan Prima (*Strive For Excellence*) yang lebih mengutamakan pendekatan segi pelindung, pengayom dan pelayan terhadap masyarakat sehingga tidak adanya fungsi pelayanan yang terpisah dari lingkup lingkungan kepolisian.

Originalitas

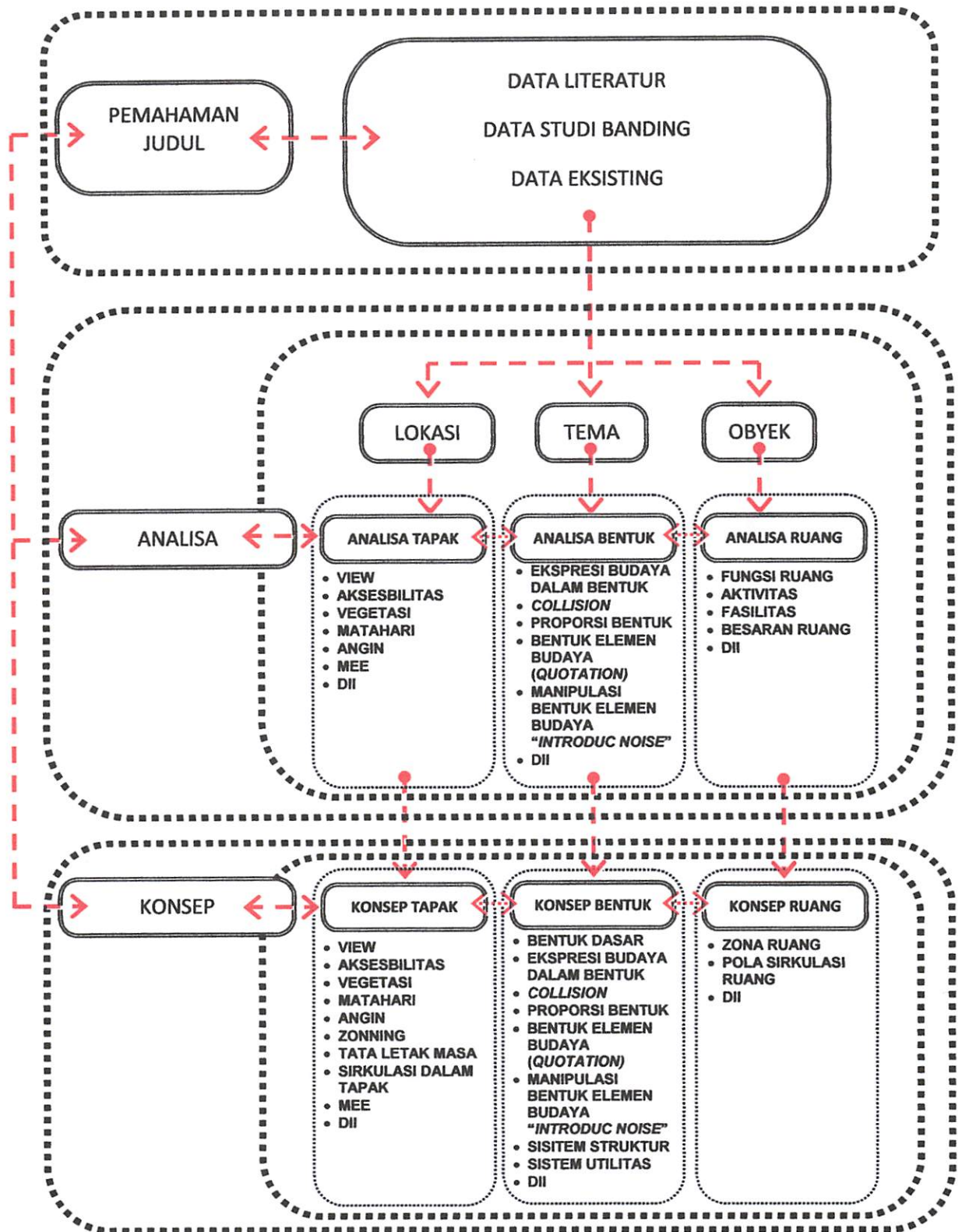
Merencanakan dan merancang kantor kepolisian resort kota pasuruan, yang sesuai dengan program *quick wins* tahap 3 pelayanan Prima (*Strive For Excellence*) yang telah digariskan kepolisian dengan menggunakan penekanan desain konsep Arsitektur postmodern.



Gambar 5.1
Skema Metodologi



5.6 Skema Proses Analisa



Gambar 5.2
Skema Proses Analisa



BAB VI ANALISA PEMBAHASAN

A. Analisa Bentuk Dan Tampilan.

❖ Skema Analisa Bentuk

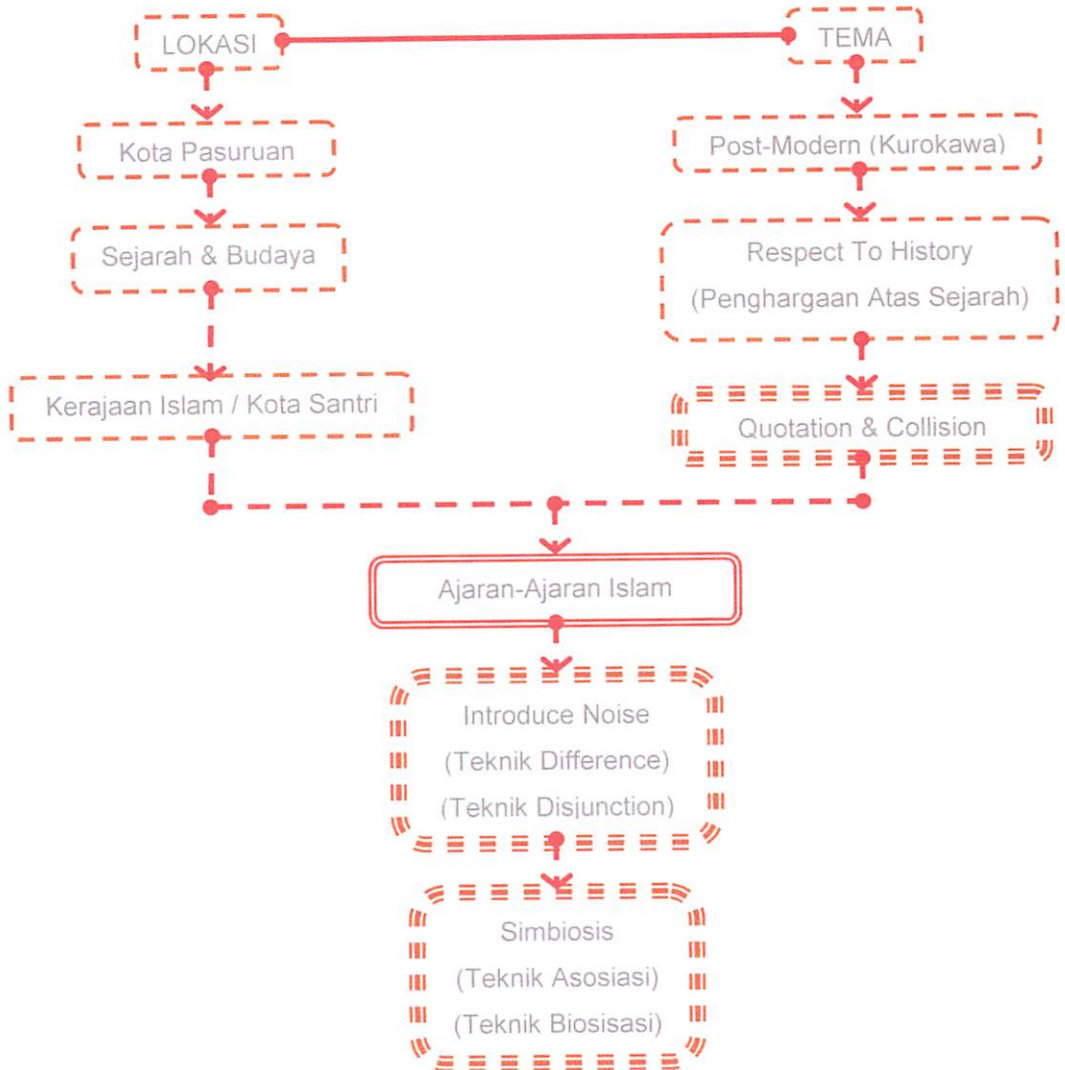


Diagram 6.1
Skema Analisa Bentuk Lokasi VS Tema

Keterangan:

- Quotation ; Pengambilan elemen-elemen dari berbagai budaya.
- Collision ; Percampuran antar budaya yang berbeda.
- Introduce Noise ; Memanipulasi atau memodifikasi elemen-elemen budaya tersebut.
- Simbiosis ; Percampuran dua unsur budaya yang berbeda dalam satu entitas, namun saling menguntungkan antara yang satu dengan lainnya.



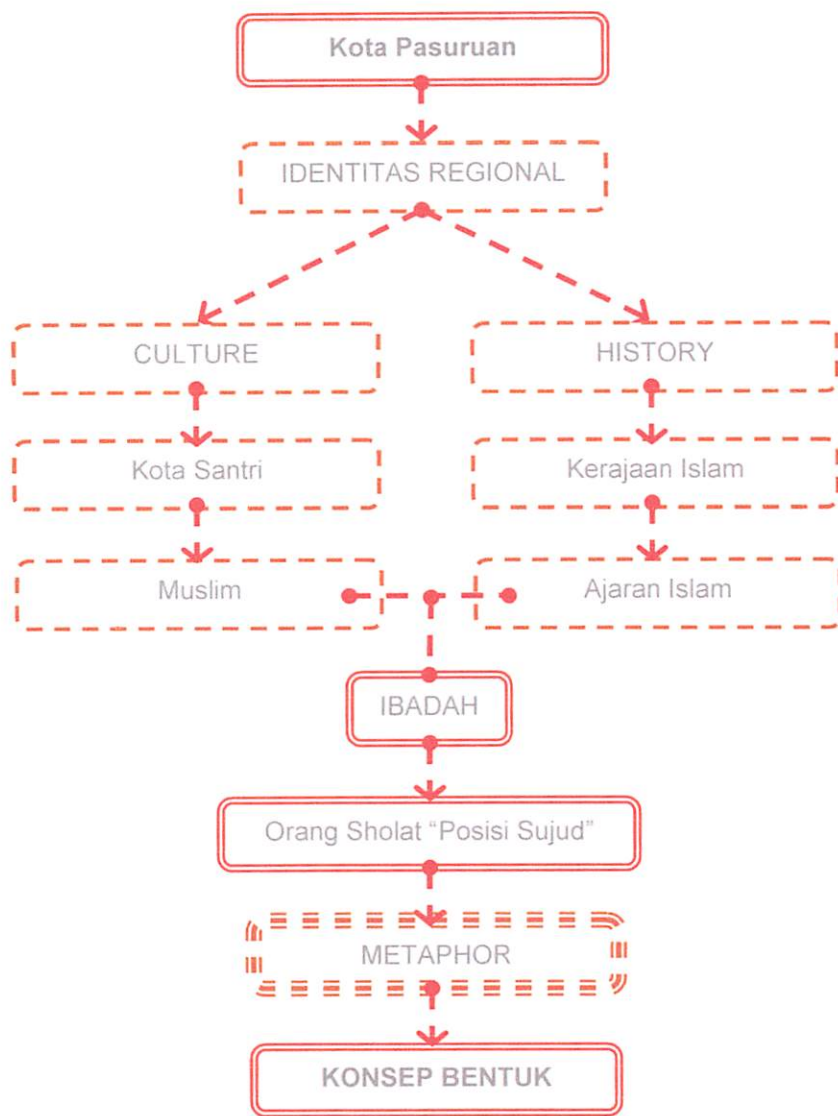


Diagram 6.2
Skema Analisa Bentuk "Metaphor"

Keterangan:

- Pluralitas ; Keberanekaragaman.
- Quotation ; Pengambilan elemen-elemen dari berbagai budaya.
- Collision ; Percampuran antar budaya yang berbeda.
- Simbiosis man and nature ; Simbiosis antara manusia dan alamnya



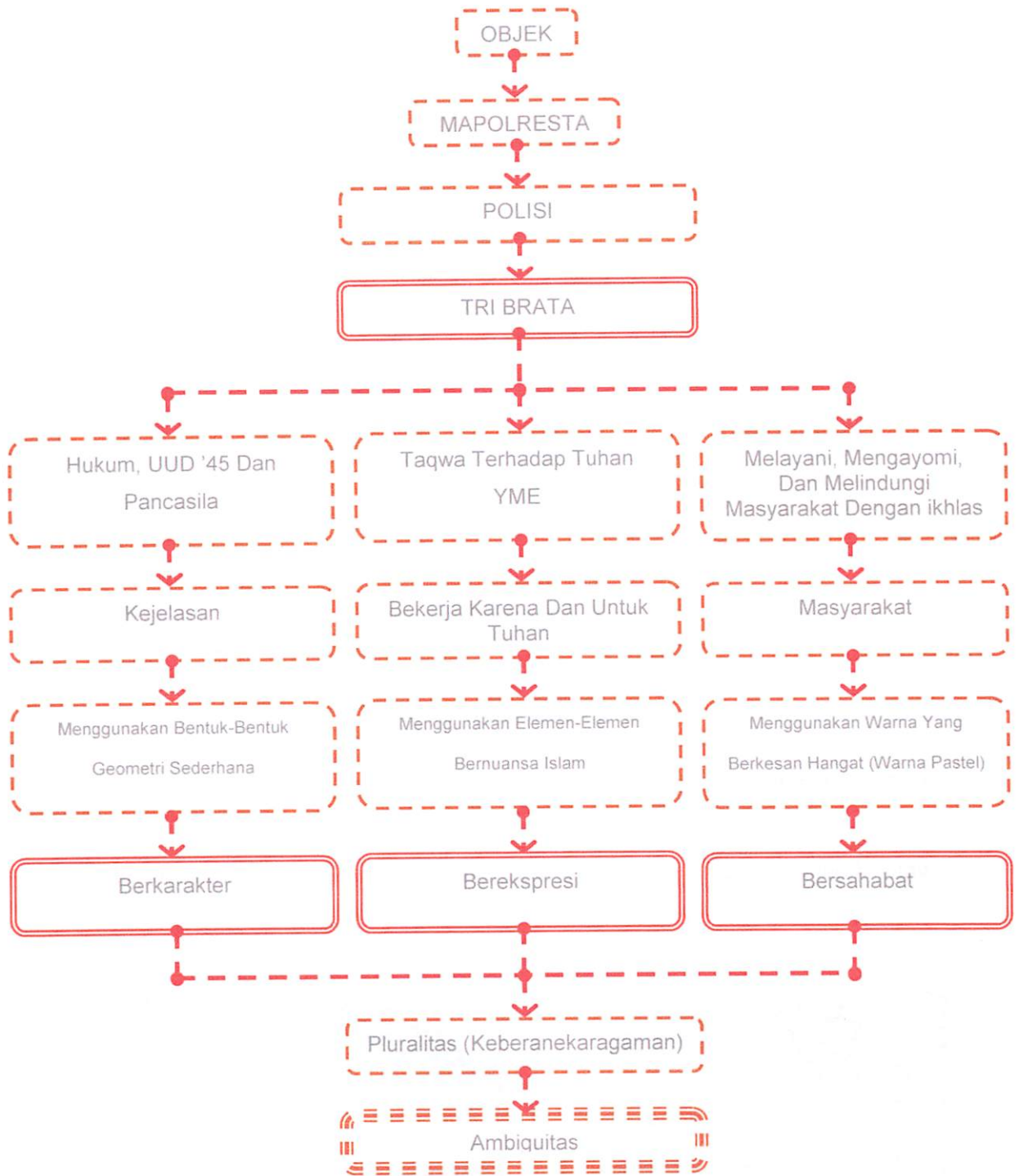
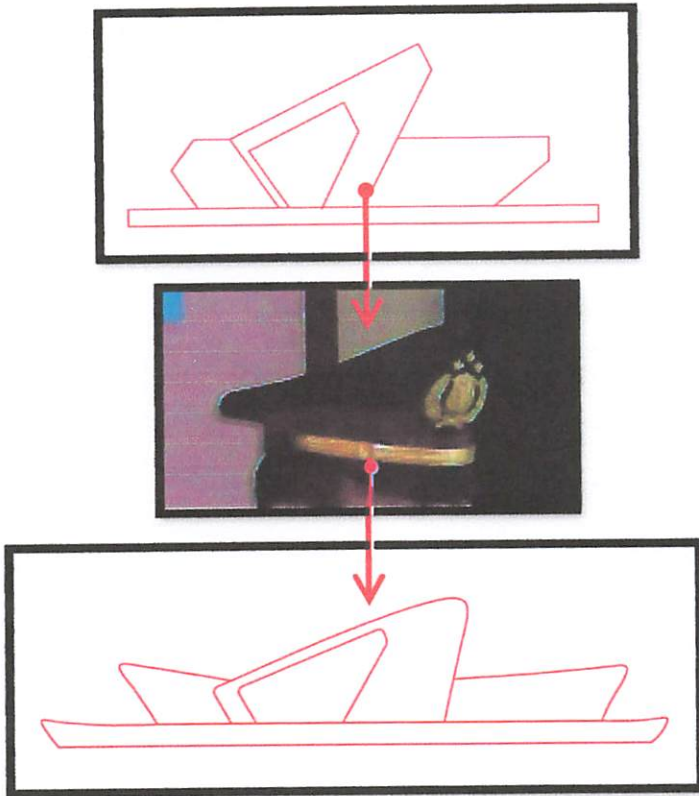


Diagram 6.3
Skema Analisa Bentuk "Ambiguities"

Keterangan:

- Pluralitas ; Keberanekaragaman.
- Ambiguities ; Percampuran antara yang memiliki aturan-aturan dan yang tidak teratur.
 "Tema utama sains dan filsafah".

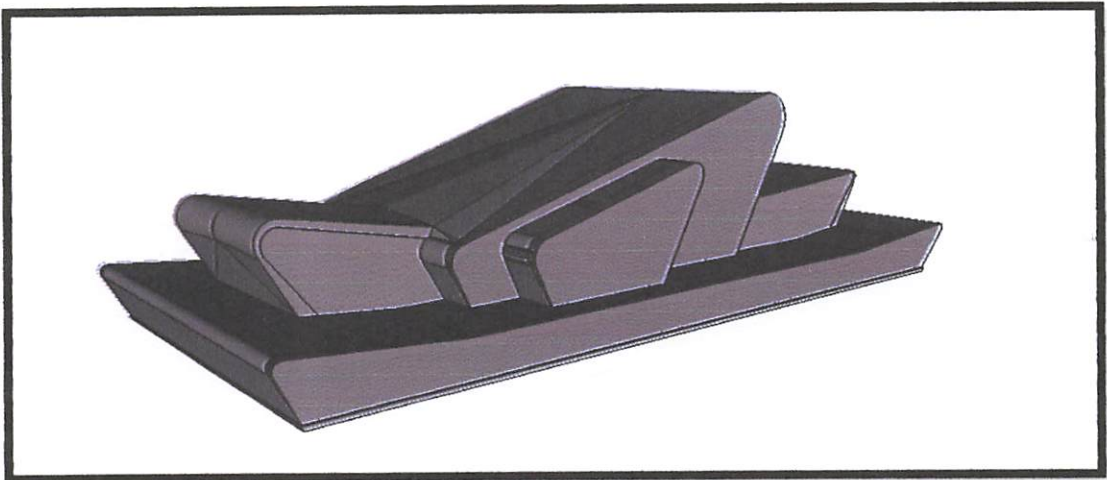




Gambar 6.2
Olah Bentuk

Bentukan yang dihadirkan pada perancangan dapat dilihat pada gambar disamping yaitu tampak samping dari orang sholat dalam posisi sujud.

Pemunculan bentuk topi polisi yang menggambarkan suatu fungsional objek yaitu sbagai kantor kepolisian resor kota. Sehingga penggabungan dua unsur bentuk tersebut menjadi ide dasar pengambilan bentuk arsitektur postmodern kantor kepolisian resor kota pasuruan.



Gambar 6.3
Perspektif Bentuk Dasar



B. Analisa Tapak.

❖ Data tapak

- Kota : Pasuruan
- Kecamatan : Bugulkidul
- Kelurahan : Pekuncen
- Lokasi Site : Jl. Pahlawan



Gambar 6.4
Analisa Data Tapak

B. Analisa Tapak.

❖ Data tapak

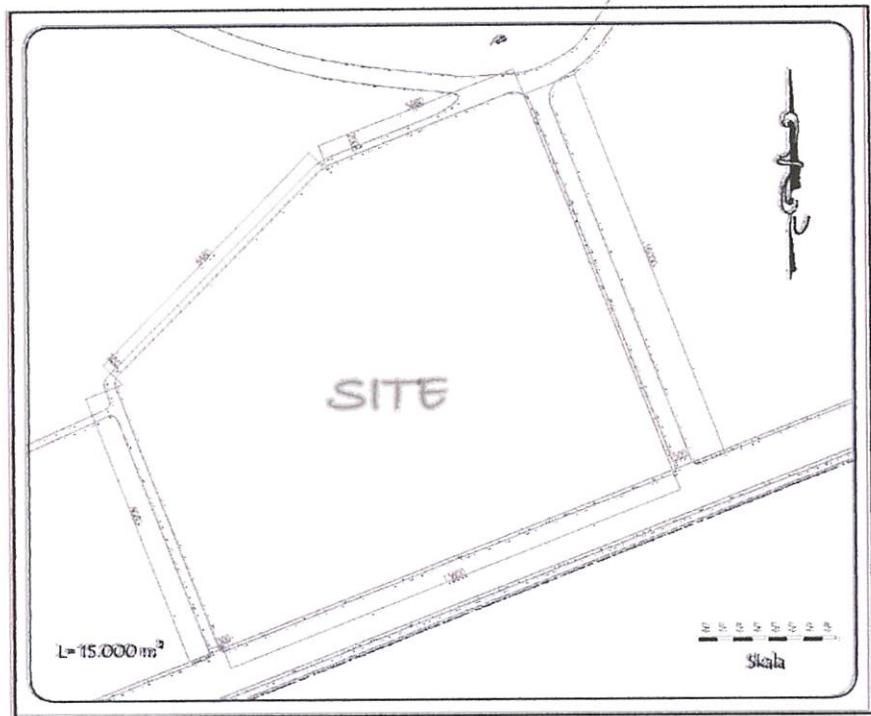
- Kota : Pasuruan
- Kecamatan : Bugulkidul
- Kelurahan : Pekuncen
- Lokasi Site : Jl. Pahlawan



Gambar 6.4
Analisa Data Tapak



Berikut ini adalah rincian dimensi atau ukuran tapak yang akan digunakan sebagai tempat dibangunnya *kantor kepolisian resor kota (polresta)*.



Gambar 6.5
Analisa Dimensi Tapak

Total luasan site: $\pm 15000\text{m}^2$

- **Kriteria pemilihan lokasi**

Kriteria pemilihan lokasi untuk kantor kepolisian resort kota (*POLRESTA*) adalah:

- POLRESTA* harus dibangun di lokasi yang sesuai dengan zona peruntukan dan keserasian lingkungan dengan memperhatikan rencana tata ruang dan tata guna tanah yang ada.
- POLRESTA* harus dibangun pada lokasi yang memungkinkan berfungsinya dengan baik saluran-saluran pembuangan air hujan dan jaringan air limbah kota.
- Lokasi *POLRESTA* harus mudah dicapai angkutan yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung pada waktu pembangunan



serta perkembangan di masa mendatang dengan memperhatikan keamanan, ketertiban dan gangguan pada lokasi sekitarnya.

- d. Lokasi *POLRESTA* harus dijangkau oleh pelayanan jaringan air bersih dan listrik Lokasi tapak berada di Kota Pasuruan, tepatnya di jalan Pahlawan yang diperuntukan sebagai lahan kantor pemerintahan.

- **Alasan pemilihan site**

Dalam penentuan site, diperlukan beberapa kriteria pendukung agar lokasi *POLRESTA* tersebut dapat sesuai dengan yang diharapkan, adapun kriteria-kriteria tersebut adalah:

- a. Pencapaian *POLRESTA*.

Faktor pencapaian merupakan faktor utama yang sangat penting bagi suatu kantor pemerintahan dimana tuntutan utama dari polri untuk mendapatkan kemudahan dalam pencapaian. Kemudahan pencapaian dari jalan utama kelokasi *POLRESTA* Terdapat jalur angkutan yang menghubungkan lokasi *POLRESTA* dengan pusat kota.

- b. Kebijaksanaan pemerintah.

Pemilihan site harus mendukung pembagian zona yang sudah ada. Site harus menaati KLB, KDB dan GSB yang sudah ada.

- c. Suasana lingkungan.

Meliputi kebisingan, keamanan dan kenyamanan, jauh dari bangunan industri.

- d. Fasilitas.

Kedekatan dengan fasilitas-fasilitas penunjang seperti; rumah sakit, bank, kantor-kantor pemerintahan, fasilitas pendidikan, pusat kota, dll

- e. Utilitas.

Sudah tersedianya sarana infastruktur yakni jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan komunikasi, jaringan air kotor.



Berdasarkan Rencana Dasar Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Bugulkidul, Jln. Utama Kawasan, Jln. Balaikota, dan Jln. Pahlawan memiliki fungsi sebagai tempat perkantoran, pemerintahan, pendidikan dan kesehatan. Dengan munculnya fungsi fasilitas umum (perkantoran, pemerintahan, pendidikan dan kesehatan) pada kawasan-kawasan tersebut, penetapan aturan mendirikan bangunannya disesuaikan dengan intensitas bangunan yang ada di kawasan-kawasan tersebut.

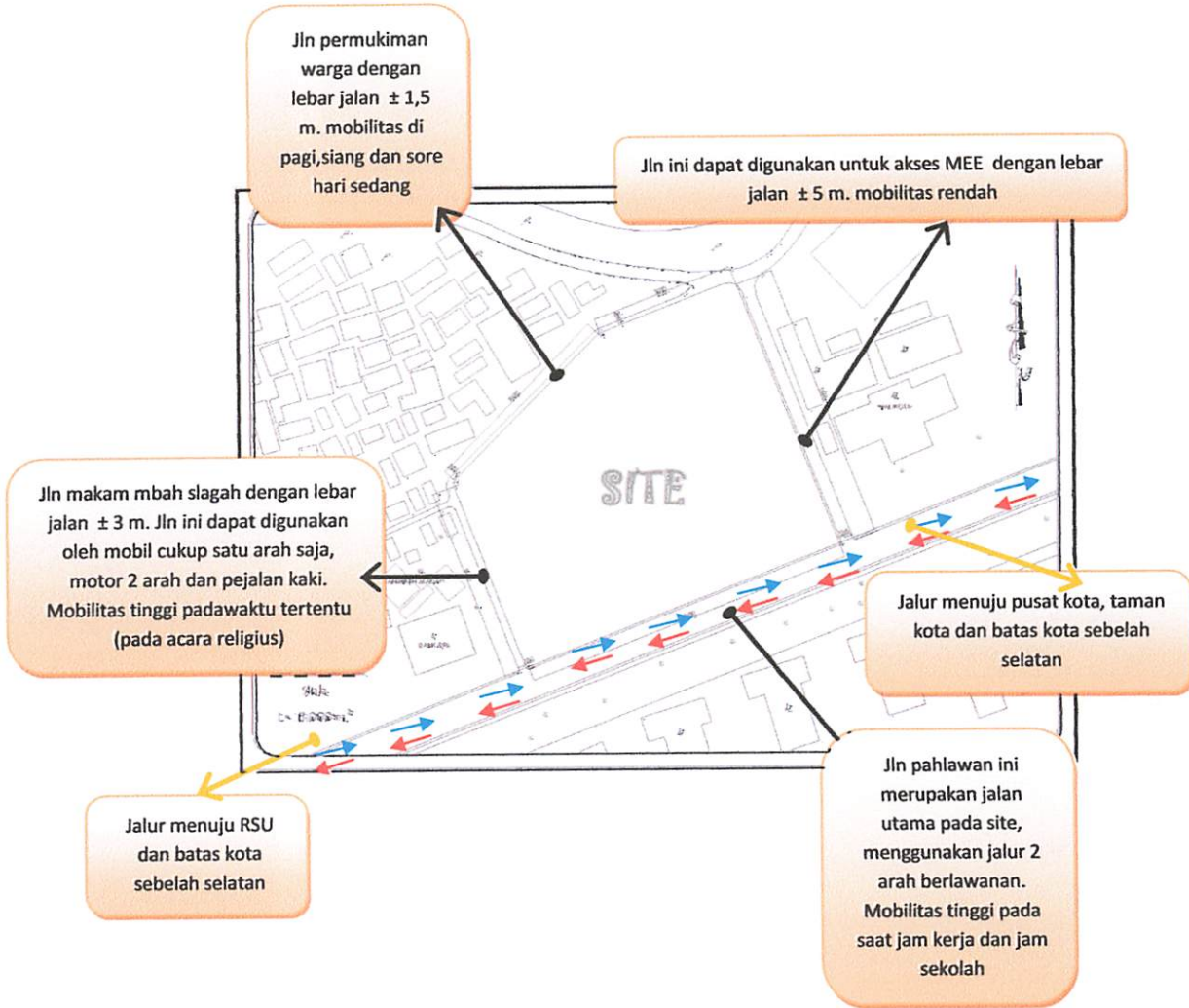
Aturan – aturan mendirikan bangunan tersebut berupa:

- Koefisien lantai bangunan 1,2 - 2.
- Koefisien dasar bangunan 40 % - 70 %.
- Tinggi lantai bangunan 1-2 lantai.
- Garis sepadan bangunan \pm 15 m.



❖ **Analisa Aksesibilitas Tapak.**

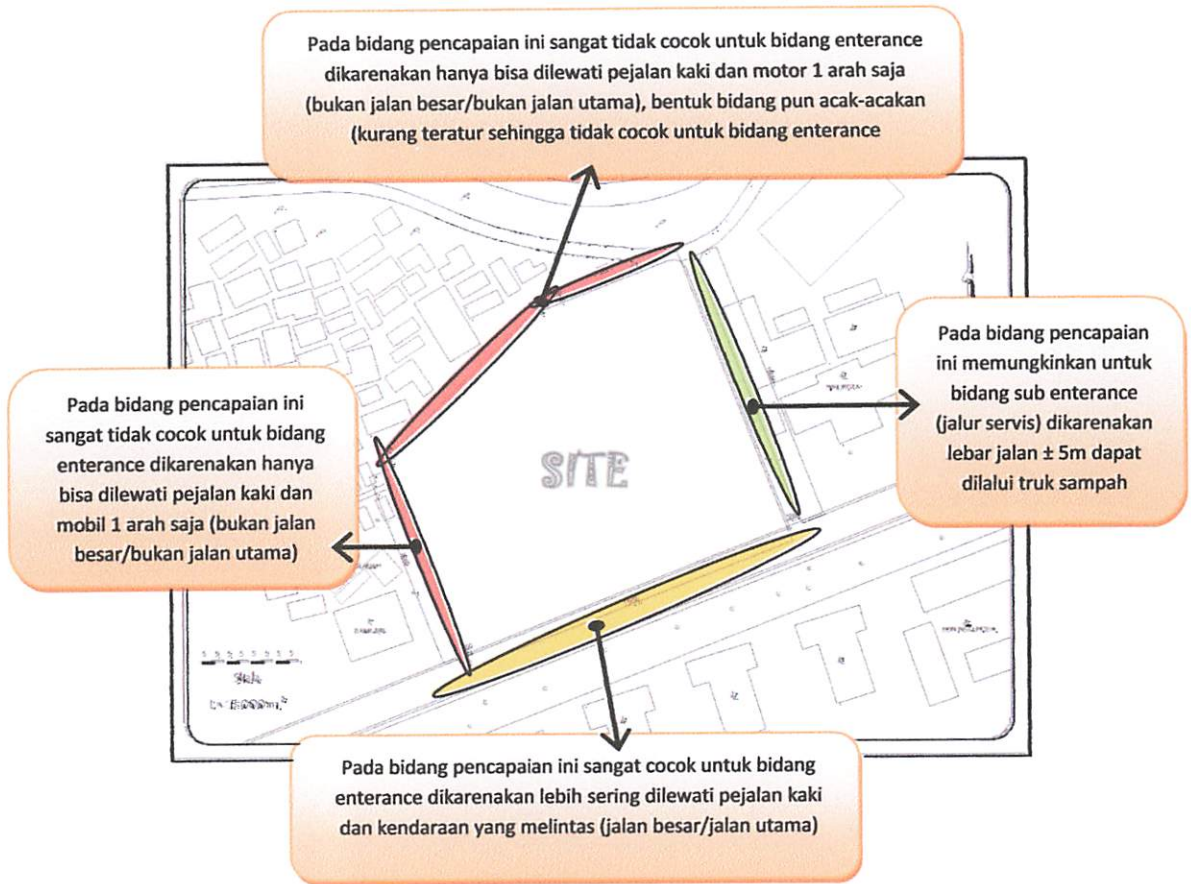
• **Aksesibilitas luar tapak**



Gambar 6.6
Analisa Aksesibilitas Luar Tapak



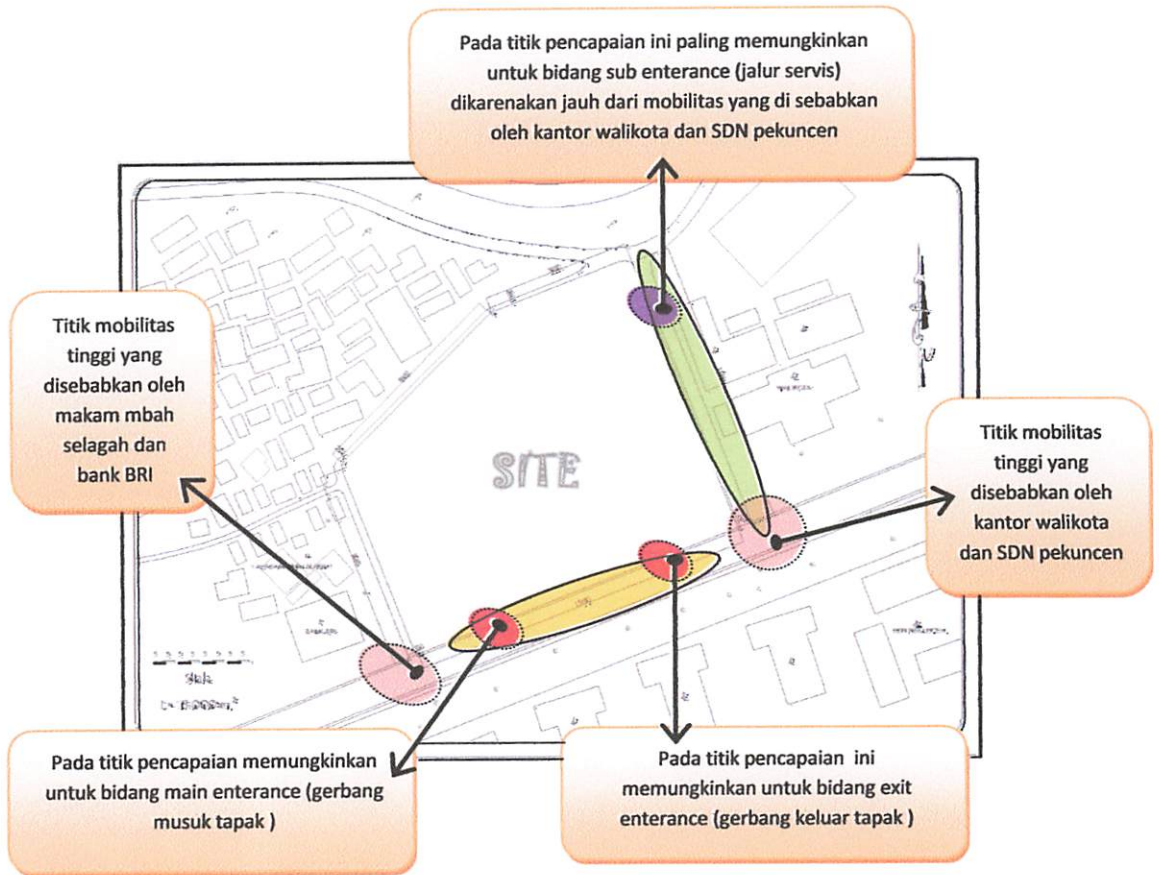
- **Pencapaian lahan**



Gambar 6.7
Pencapaian Lahan



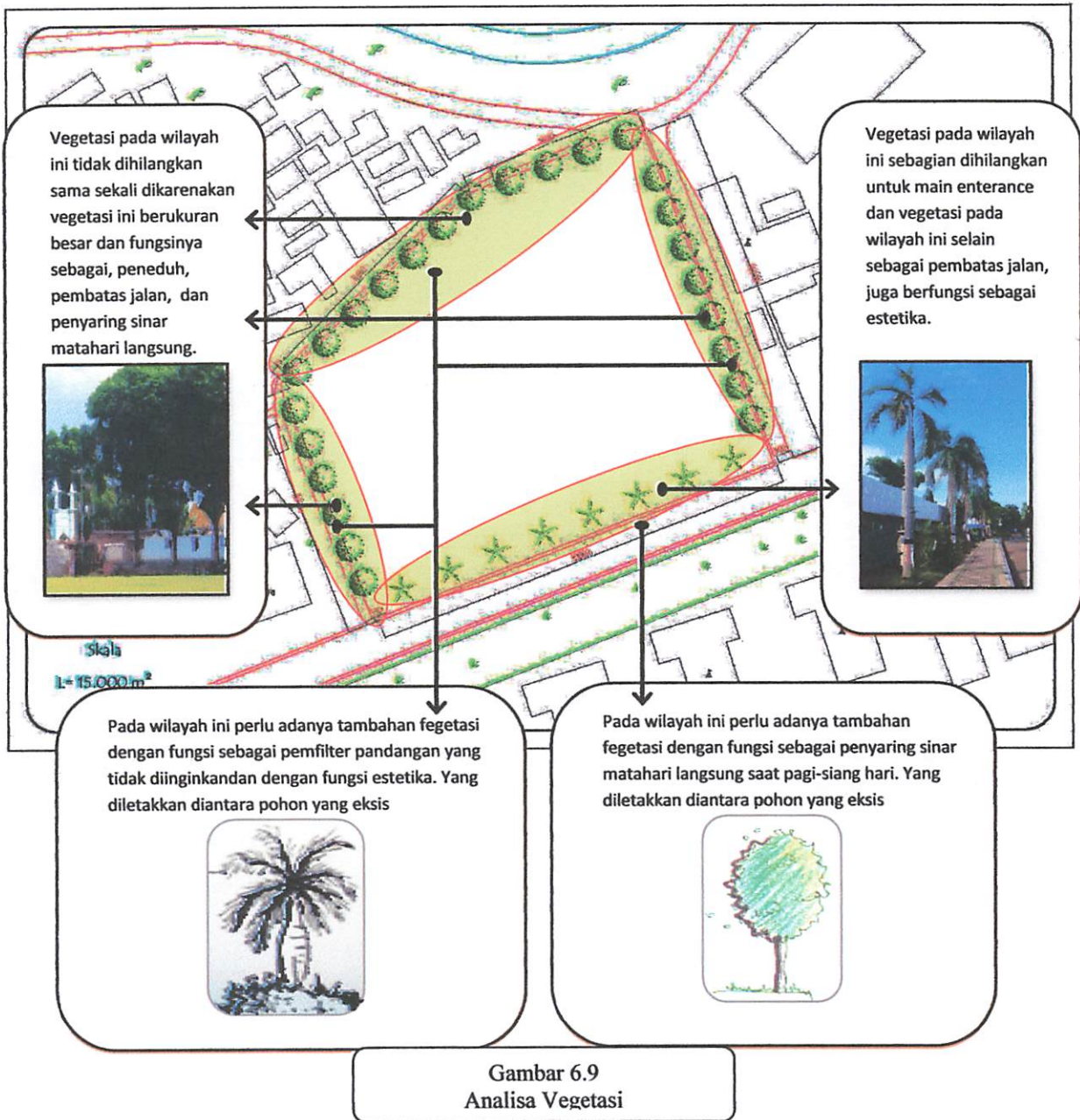
- **Perletakan titik entrance**



Gambar 6.8
Perletakan Titik Entrance



❖ **Analisa Vegetasi.**



Vegetasi adalah salah satu pertimbangan selama langkah-langkah permulaan dari proses, sebagai suatu faktor penentu utama dari keterlingkungan pada ruang eksterior, sebagai suatu petunjuk dari iklim dan suatu pemecahan masalah iklim. Vegetasi yang ada pada tapak merupakan potensi tapak yang harus dipertahankan, dan ada juga yang rus dihilangkan, selain sebagai pendukung peresapan air hujan, juga sebagai peneduh, dan mengurangi kebisingan.



Adapun fungsi vegetasi adalah

- a. Kontrol pandangan (*Visual control*)
- b. Keindahan (*estetik*)
- c. Pembatas fisik (*Physical barriers*)
- d. Pengendali iklim (*Climate control*)

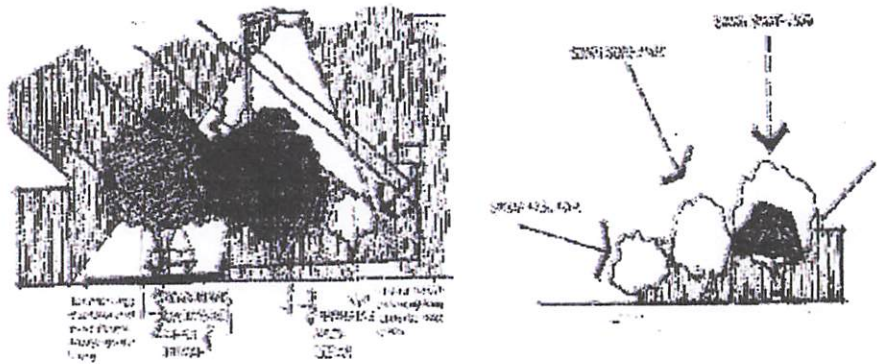
Menahan silau yang ditimbulkan oleh sinar matahari, lampu jalan, dan sinar lampu kendaraan pada:

- Jalan raya

Dengan peletakan tanaman di sisi jalan atau di jalur tengah jalan. Sebaiknya dipilih pohon atau perdu yang padat. Pada jalur jalan raya bebas hambatan, penanaman pohon tidak dibenarkan pada jalur median ditanami tanaman semak, agar sinar lampu kendaraan dari arah yang berlawanan dapat dikurangi.

- Bangunan

Peletakan pohon, perdu, semak ground cover, dan rumput dapat menahan pantulan sinar dari perkerasan, hampasan air hujan, dan menahan jatuhnya sinar matahari ke daerah yang membutuhkan keteduhan.



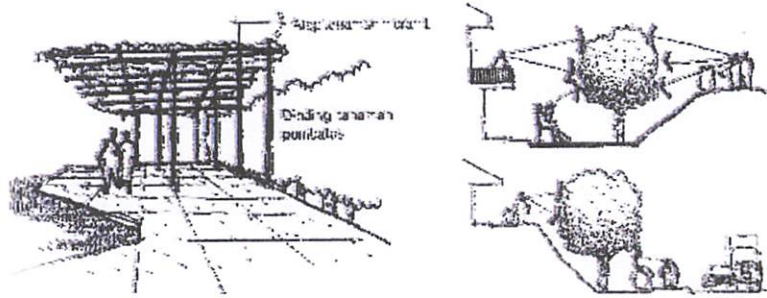
Gambar 6.10
Vegetasi Sebagai Pemfilter

- Kontrol pandangan terhadap hal yang tidak menyenangkan

Tanaman dapat pula dimanfaatkan sebagai penghalang pandangan terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan untuk



ditampilkan atau dilihat seperti timbunan sampah, tempat pembuangan sampah, dan galian tanah.



Gambar 6.11
Vegetasi Sebagai Kontrol Pandangan

a. Pembatas fisik (*Physical barriers*)

Tanaman dapat dipakai sebagai penghalang pergerakan manusia dan hewan. Selain itu juga dapat berfungsi mengarahkan pergerakan. Pembatas fisik yang ditimbulkan dari tanaman dapat memberikan kesan tersendiri bagi manusia yang berada di dalam koridor pembatas tersebut. Untuk pembatas dengan tinggi sebatas telapak kaki berfungsi sebagai penutup tanah, tinggi sebatas lutut berfungsi sebagai pola pangarah, tinggi di bawah pinggang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas ataupun pembentuk pola sirkulasi, tinggi sebatas dada berfungsi untuk membentuk ruang paling terasa, dan yang terakhir adalah tinggi sebatas mata yang berfungsi sebagai perlindungan.

b. Pengendali iklim (*Climate control*)

- Kontrol radiasi sinar matahari dan suhu

Tanaman menyerap panas dari pancaran sinar matahari dan memantulkannya sehingga menurunkan suhu dan iklim mikro.

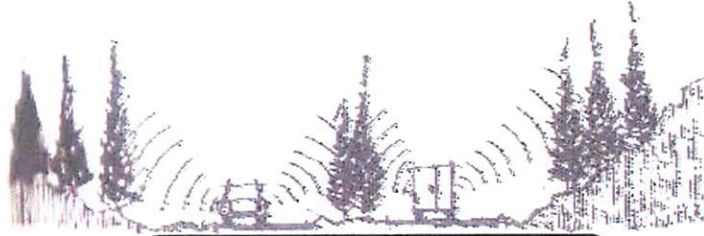


Gambar 6.12
Vegetasi Sebagai Pengendali Iklim



- Pengendali suara

Tanaman dapat menyerap suara kebisingan bagi daerah yang membutuhkan ketenangan. Pemilihan jenis tanaman tergantung dari tinggi pohon, lebar tajuk, dan komposisi tanaman.



Gambar 6.13
Vegetasi Sebagai Pengendali Suara

- Penyaring udara

Tanaman sebagai filter atau penyaring debu, bau, dan memberikan udara segar.

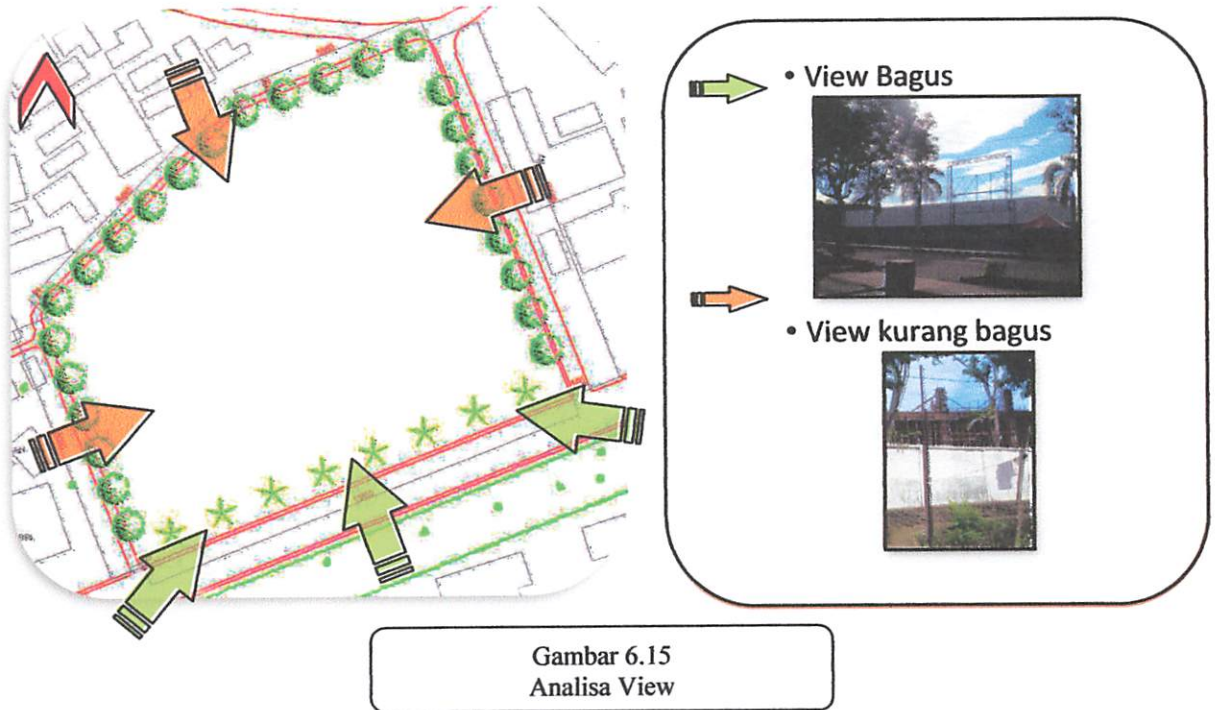


Gambar 6.14
Vegetasi Sebagai Penyaring Suara

Pada tapak kehadiran vegetasi sangat mambantu sekali, Karena bangunan yang akan dibangun pada site sangat membutuhkan adanya vegetasi.



❖ **Analisa View.**



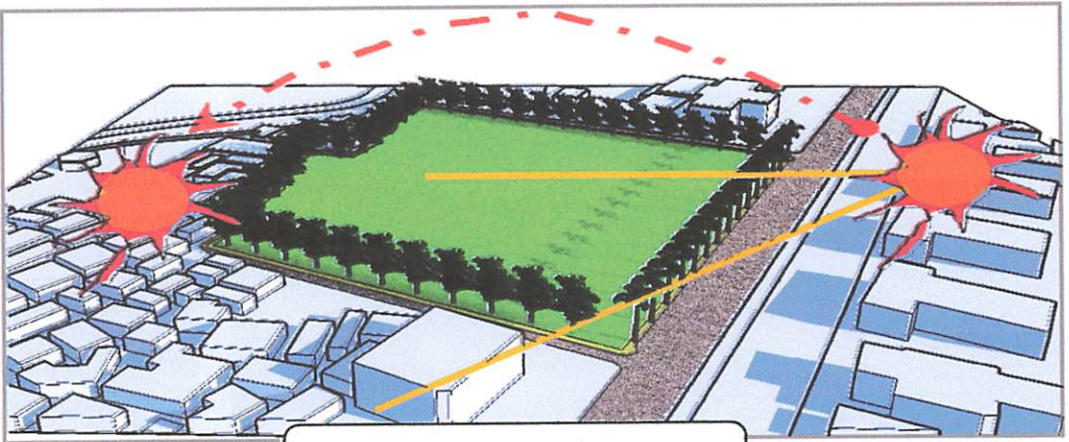
- Karena jenis arsitektur yang akan dirancang adalah arsitektur postmodern yang artinya bentuk arsitektur ini untuk dinikmati, maka sudut pandang terhadap bangunan yang direncanakan dan dirancang pada tapak tidak boleh terhalang.
- View ke arah tapak paling bagus jika dilihat dari Jln. pahlawan. Karena Tapak dapat terlihat bebas dari penghalang pandangan apapun dan memiliki space ruang untuk pengamat
- View tapak juga terlihat bagus dari Jln. Pahlawan pada sudut barat dan timur tapak, karena Tapak dapat terlihat bebas dari penghalang pandangan apapun dan memiliki space ruang untuk pengamat
- View ke luar tapak tidak diperlukan karena fungsi bangunan tidak memerlukan view ke luar.



❖ **Analisa Matahari.**

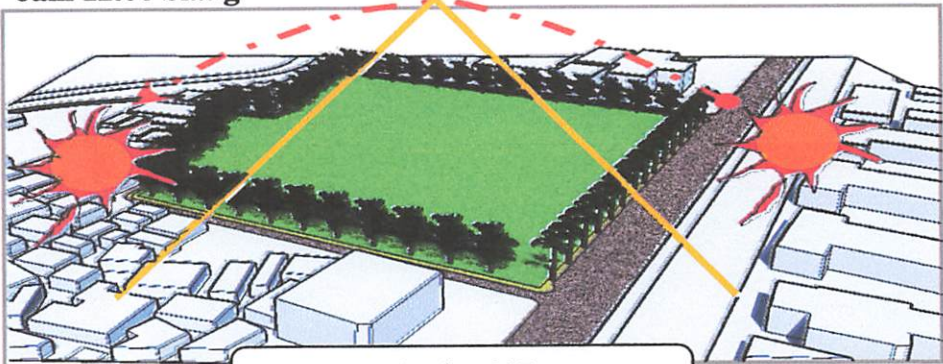
Pencahayaan alami sangat diperlukan dalam sebuah bangunan. Oleh karena itu, dalam merancang sebuah bangunan hendaknya memperhatikan arah sinar matahari sehingga nantinya tidak mengganggu kenyamanan di dalam ruang dan orientasi matahari terhadap bangunan tidak secara frontal mengenai titik tangkap atau posisi depan bangunan yang akan menjadi kategori utama dalam hal pencahayaan terutama untuk ruang-ruang yang di rencanakan.

• **Jam 08.00 Pagi**



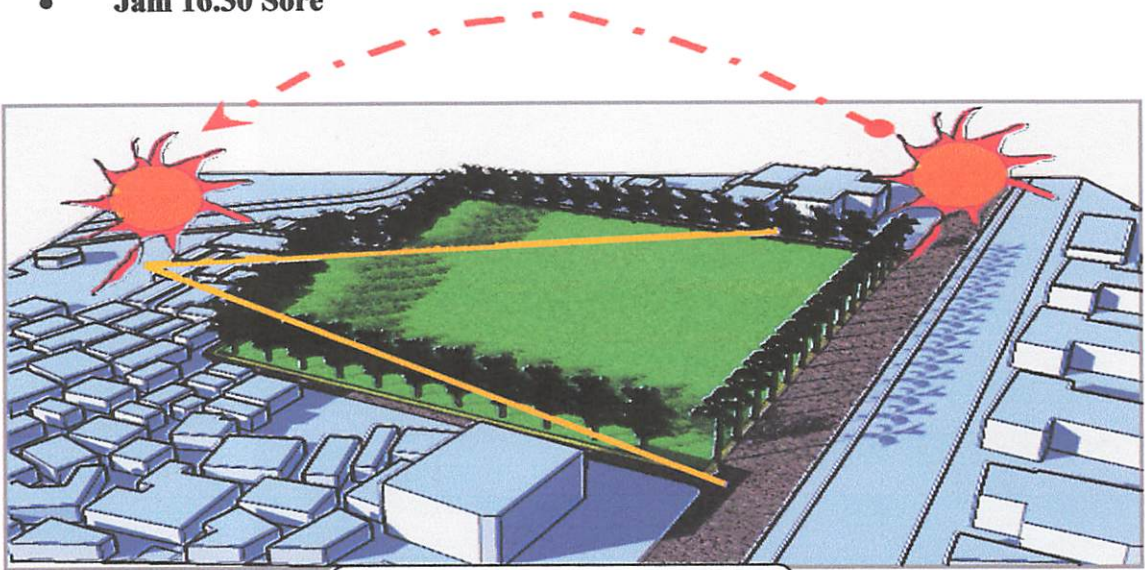
Gambar diatas menampilkan keadaan sinar matahari terhadap site pada pukul 08.00 di bulan Maret tepatnya tanggal 10. Dan terlihat dibagian selatan site sinar matahari pagi terhalang oleh beberapa pohon palm. Yang dapat mempengaruhi perletakan bangunan terhadap site guna untuk mendapatkan cahaya terhadap interior maupun eksteriornya.

• **Jam 12.00 Siang**



Gambar diatas menampilkan keadaan sinar matahari terhadap site pada pukul 12.00 di bulan Maret tepatnya tanggal 10. Pada jam tersebut merupakan waktu untuk para elemen penggunaan bangunan beristirahat siang dan kemungkinan entrance berada di sebelah selatan site, jadi di area entrance membutuhkan vegetasi yang bisa membantu dalam mengatasi radiasi matahari pada jam tersebut.

- **Jam 16.30 Sore**



Gambar 6.18
Analisa Matahari Sore

Gambar diatas menampilkan keadaan sinar matahari terhadap site pada pukul 16.30 di bulan Maret tepatnya tanggal 10. Efek bayangan yang berasal dari sebelah utara barat site yang cukup menjadikan site di sebelah utara barat gelap lebih dulu. Dengan begitu di area tersebut membutuhkan pencahayaan buatan lebih terang.



❖ Analisa Pendaerahan (Zonning)



Zonning tapak Eksterior

- A. Parkir Umum Mobil
 - B. Parkir Umum Motor
 - C. lap. Upacara
 - D. Taman
 - E. Parkir Kendaraan Patroli
 - F. Parkir Motor Tamu Khusus
 - G. Parkir Mobil Tamu Khusus
 - H. Parkir Kendaraan Polisi
 - I. Lapangan Test Drive
 - J. Ruang Transisi
 - K. Taman
 - L. Taman
- Interance
 Exit
 Sub Interance

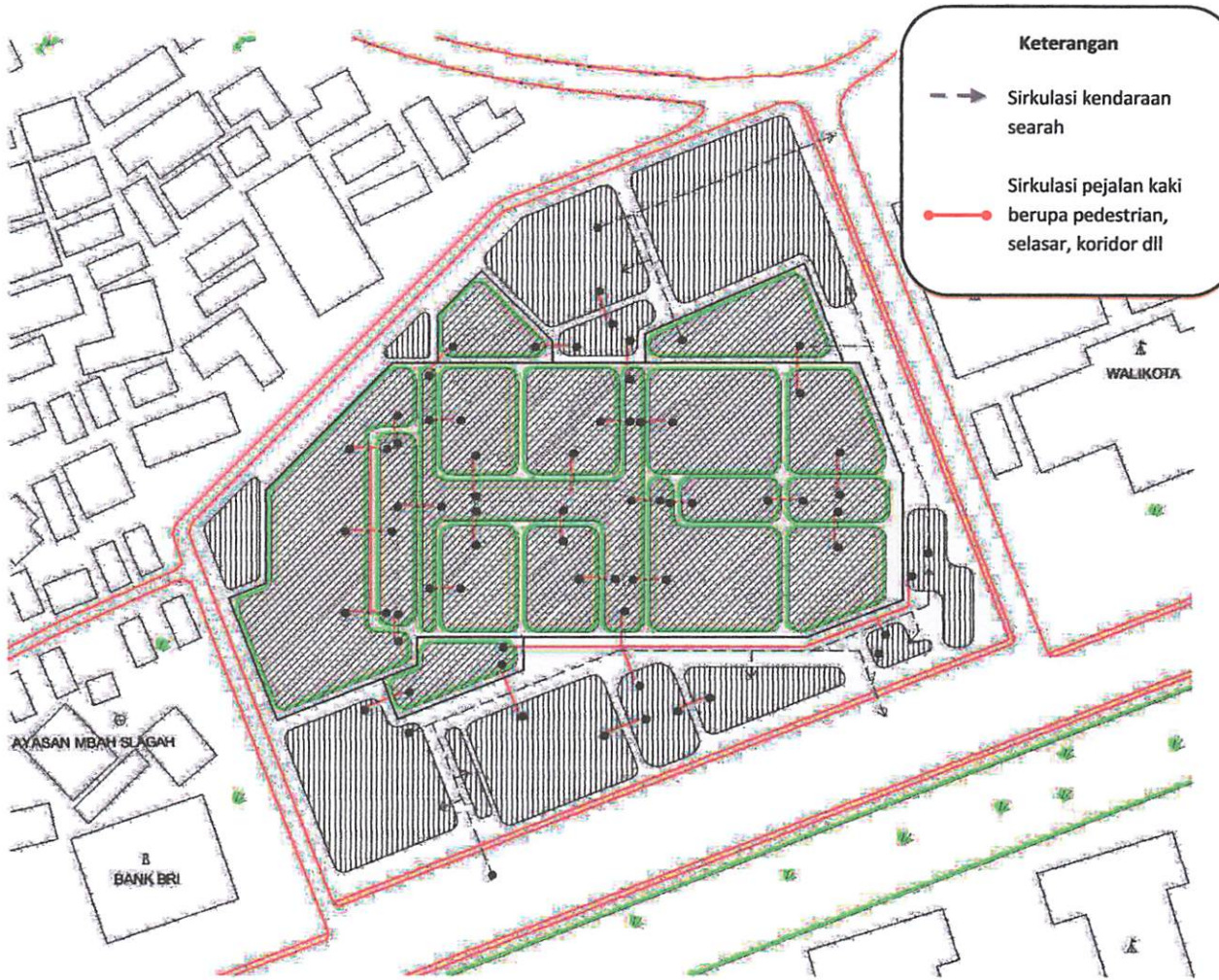
Zonning Interior

1. Teras Depan
2. Hall, Lobby dan Sirkulasi
3. Ruang Tunggu SIM, STNK dan BPKB
4. Ruang Admin SIM, STNK, dan BPKB
5. Zona Satuan SPK
6. Zona Satuan Reskrim
7. Zona Satuan Samapta
8. Zona Satuan Intelkam
9. Zona Satuan Hall
10. Ruang Jenguk Tahanan
11. Zona Satuan Tahti
12. Zona Satuan Lantas
13. Zona Satuan Reskoba
14. Zona Satuan Binmas
15. Kantin
16. Gudang Barang Bukti

Gambar 6.19
Analisa Pendaerahan (Zonning)



❖ Analisa pola sirkulasi dalam tapak



Gambar 6.20
Analisa Pola Sirkulasi Dalam Tapak

- - -> Sirkulasi kendaraan searah

Berputar. Sebuah jalan berputar memperpanjang urutan pencapaian dan mempertegas bentuk tiga dimensi suatu bangunan sewaktu bergerak mengelilingi tepi bangunan. (Ching, 1999).

—●— Sirkulasi pejalan kaki berupa pedestrian, selasar, koridor dll

Langsung. Suatu pencapaian yang mengarah langsung ke suatu tempat masuk melalui sebuah jalan yang segaris dengan sumbu bangunan (Ching, 1999).



C. Analisa ruang.

a. Asumsi anggota kepolisian resor kota

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menentukan besaran ruang, salah satunya adalah asumsi jumlah anggota kepolisian pada "kantoor kepolisian resor kota".

1. Anggota Kepolisian Resor Kota

- Kapolresta : 1 orang
- Wakapolresta : 1 orang
- Siwas : 8 orang
- Sipropam : 8 orang
- Sikeu : 8 orang
- Sium : 8 orang
- Bag Ops : 29 orang
- Bag Sumda : 29 orang
- Bag Ren : 15 orang
- Bag Binamitra : 15 orang
- Spk : 23 orang
- Sat Intelkam : 51 orang
- Sat Reskoba : 30 orang
- Sat Reskrim : 30 orang
- Sat Binmas : 30 orang
- Sat Sabhara : 30 orang



• Sat Samapta	:	72 orang	
• Sat Lantas	:	23 orang	
• Sat Pam Obvit	:	30 orang	
• Sat Pol Air	:	9 orang	
• Sat Tahti	:	23 orang	
• Unit P3d	:	15 orang	
• Taud	:	15 orang	
• Bensat	:	8 orang	
• Ur Telematika	:	8 orang	
• Biddokkes	:	35 orang	+
<hr/>			
Total anggota	:	554 orang	

b. Program Ruang (Macam-Macam Ruang).

Zona Ruang Utama		Ruang Utama
Zona Ruang	Zona Ruang Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang Kepala Polresta "KAPOLRESTA" ▪ Ruang Wakil Kepala Polresta "WAKAPOLRESTA"
	Zona Ruang Seksi-Seksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang SIWAS ▪ Ruang SIPROPAM ▪ Ruang SIKEU ▪ Ruang SIUM
	Zona Ruang Bagian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang BAG OPS ▪ Ruang BAG SUMDA



1940	1	1940	1
1941	1	1941	1
1942	1	1942	1
1943	1	1943	1
1944	1	1944	1
1945	1	1945	1
1946	1	1946	1
1947	1	1947	1
1948	1	1948	1
1949	1	1949	1
1950	1	1950	1

1950 1950

(Annual Report of the Board of Directors)

1951	1	1951	1
1952	1	1952	1
1953	1	1953	1
1954	1	1954	1
1955	1	1955	1
1956	1	1956	1
1957	1	1957	1
1958	1	1958	1
1959	1	1959	1
1960	1	1960	1

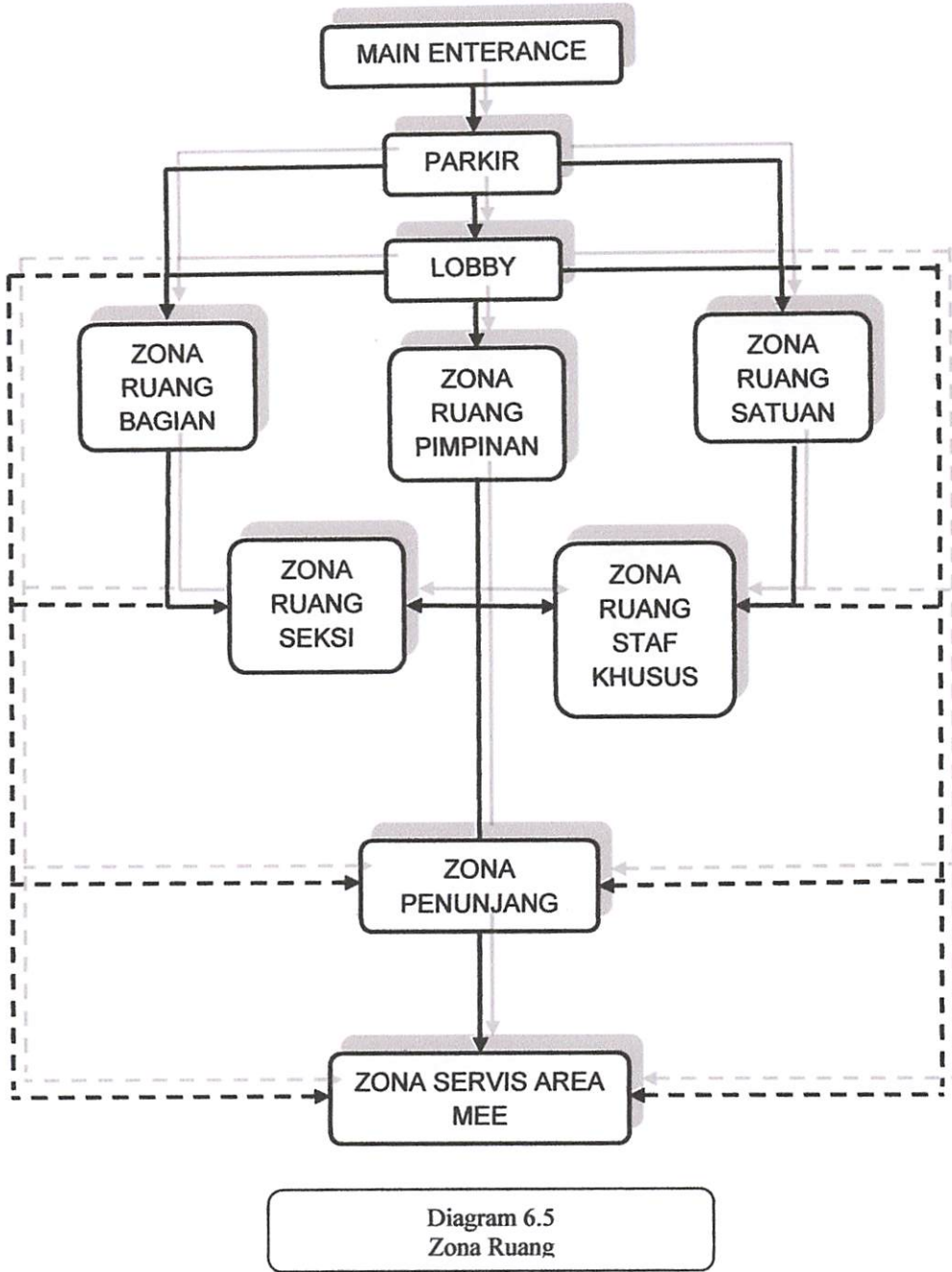
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang BAG REN ▪ Ruang BAG BINAMITRA
Zona Ruang Satuan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang SPK ▪ Ruang SAT INTELKAM ▪ Ruang SAT RESKRIM ▪ Ruang SAT RESKOBA ▪ Ruang SAT BINMAS ▪ Ruang SAT SABHARA ▪ Ruang SAT SAMAPTA ▪ Ruang SAT LANTAS ▪ Ruang SAT PAM OBVIT ▪ Ruang SAT POL AIR ▪ Ruang SAT TAHTI
Zona Staf Khusus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang UNIT P3D ▪ Ruang TAUD ▪ Ruang BENSAT ▪ Ruang UR TELEMATIKA ▪ Ruang BIDDOKKES
Zona penunjang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Musholla ▪ Koprasi ▪ Kantin
Zona servis (MEE)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang Genset ▪ Ruang Trafo ▪ Ruang Panel ▪ Ruang OB ▪ Gudang ▪ Dapur

Tabel 6.1
Program Ruang (Macam-Macam Ruang)



c. **Organisai Ruang.**

• **Zona Ruang**



• **Organisasi Ruang**

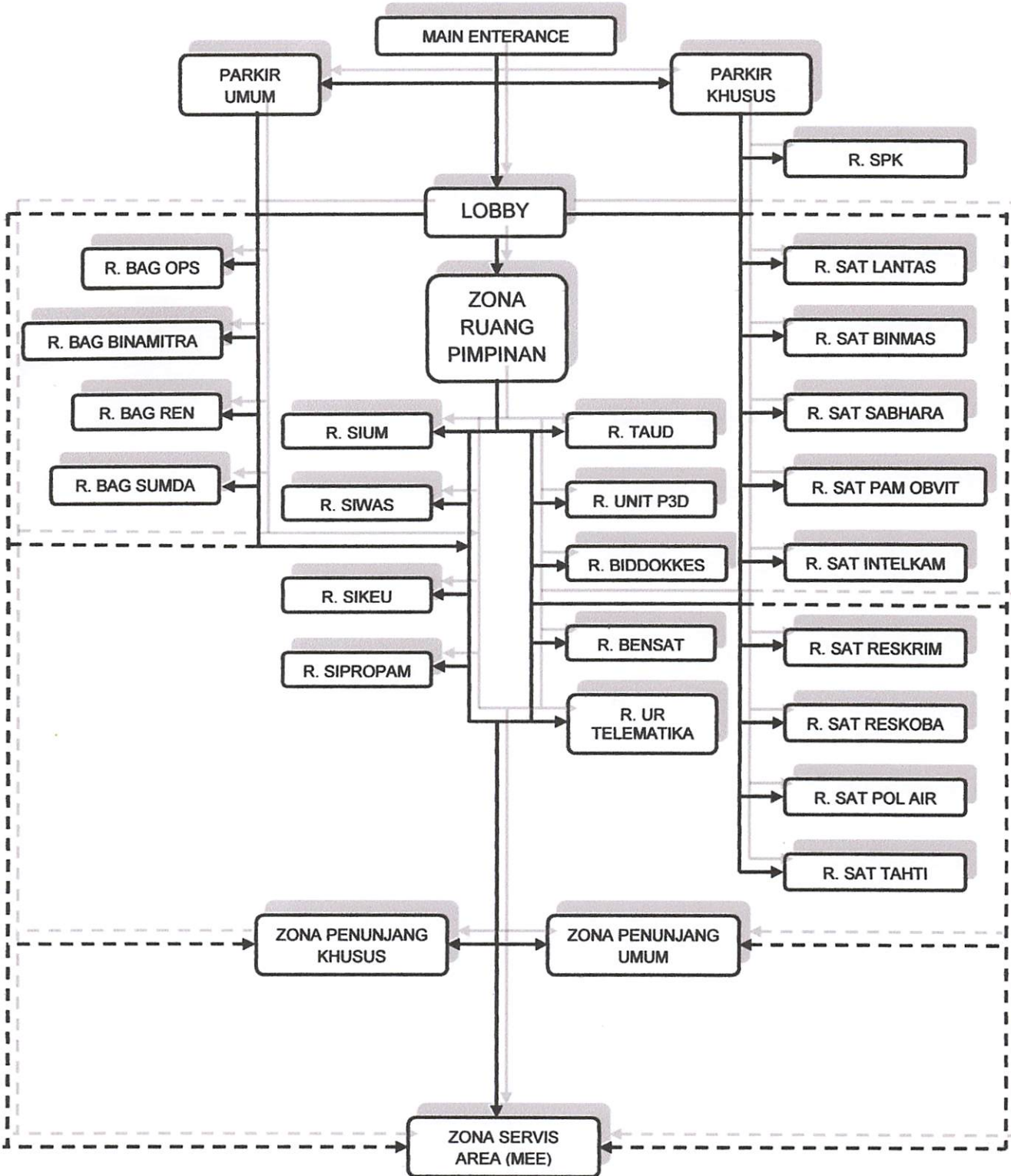


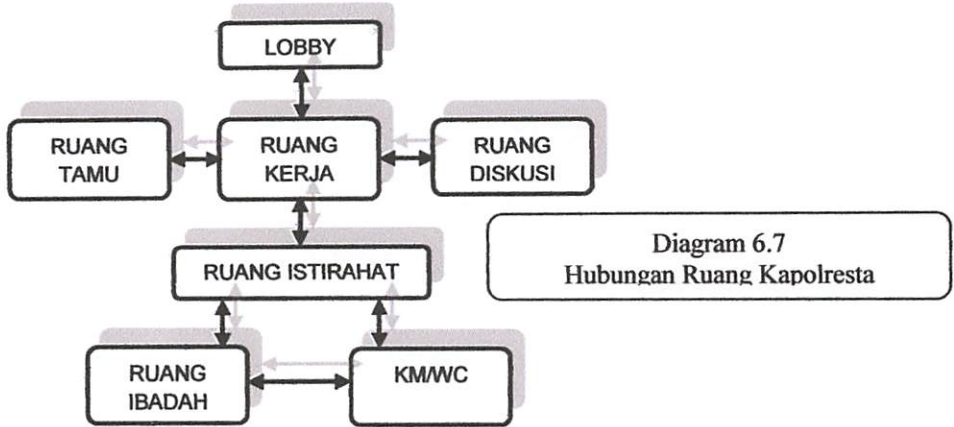
Diagram 6.6
Organisasi Ruang



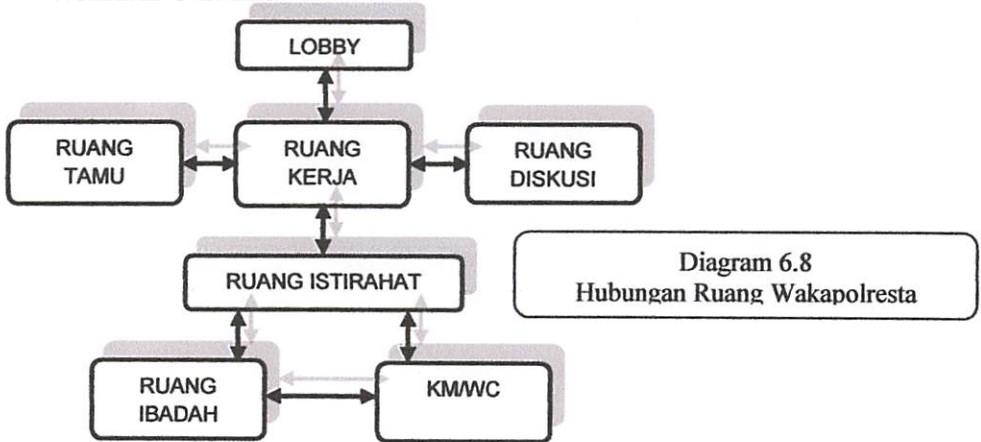
d. Hubungan Ruang.

❖ Zona Pimpinan

• KAPOLRESTA



• WAKAPOLRESTA



• LOBBY PIMPINAN



❖ **Zona Seksi**

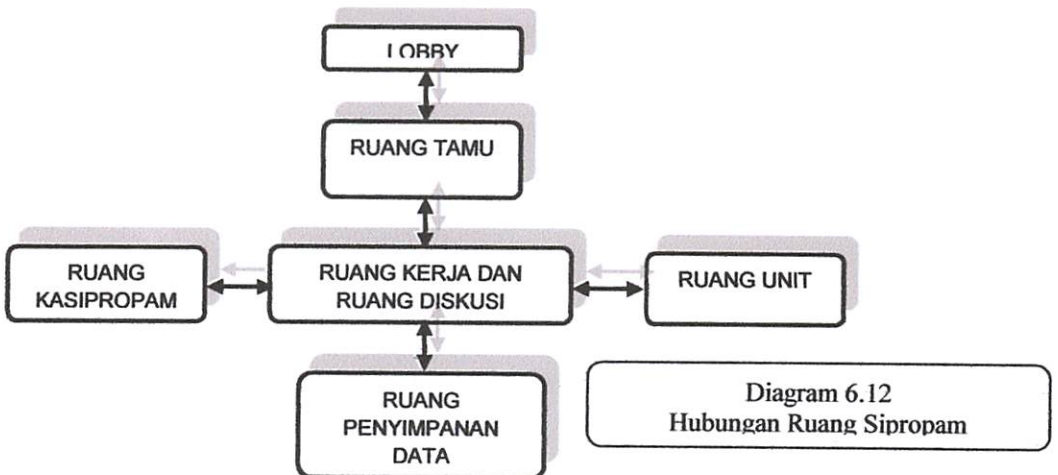
• **SIWAS**



• **SIUM**



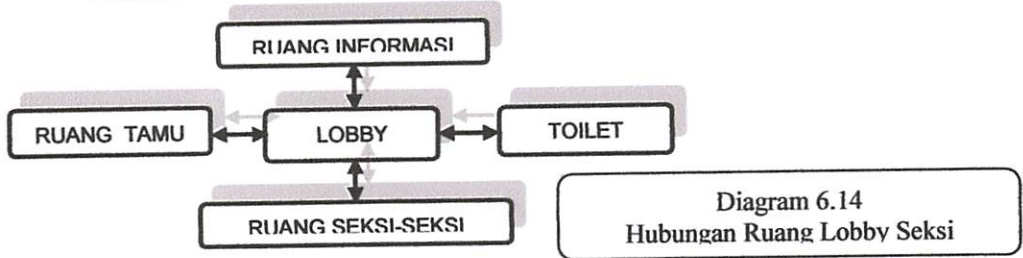
• **SIPROPAM**



- **SIKEU**

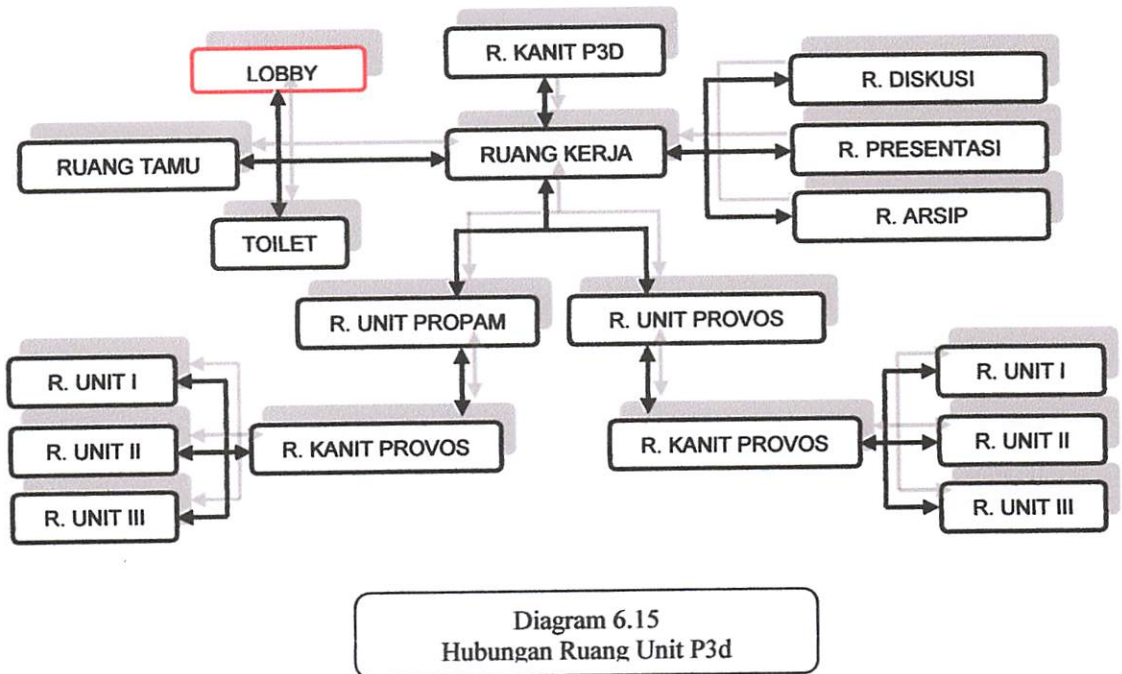


- **LOBBY SEKSI**

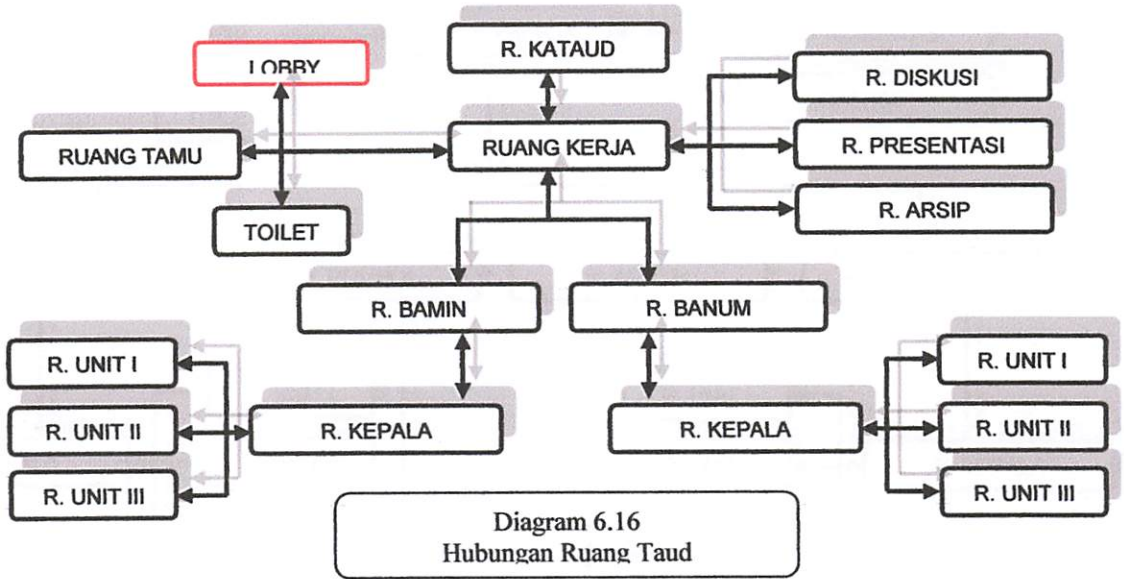


- ❖ **Zona Staf Khusus**

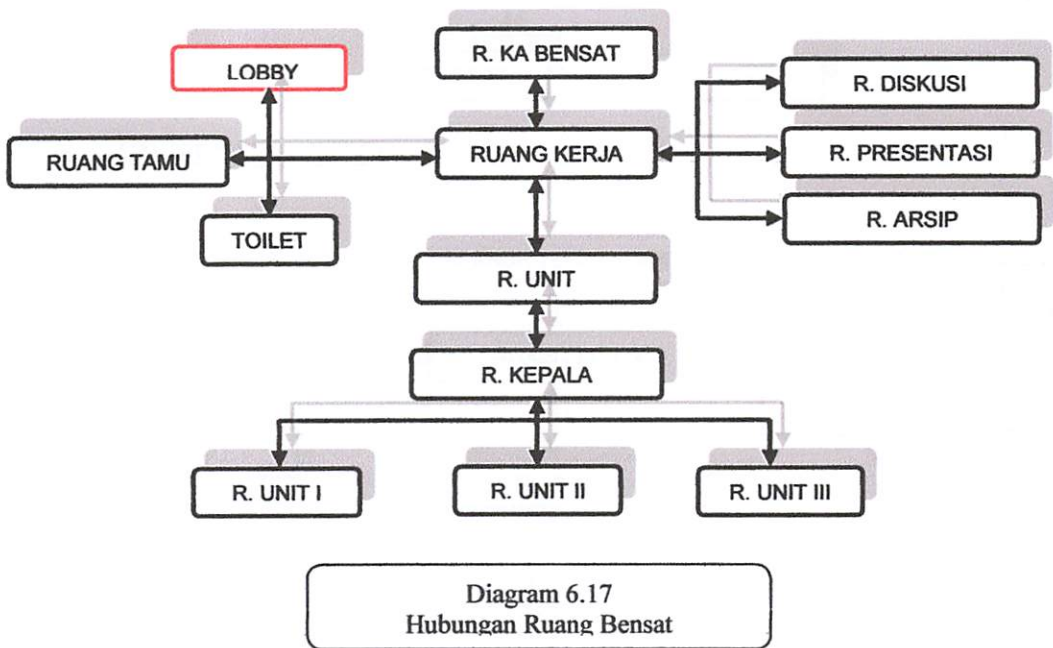
- **UNIT P3D**



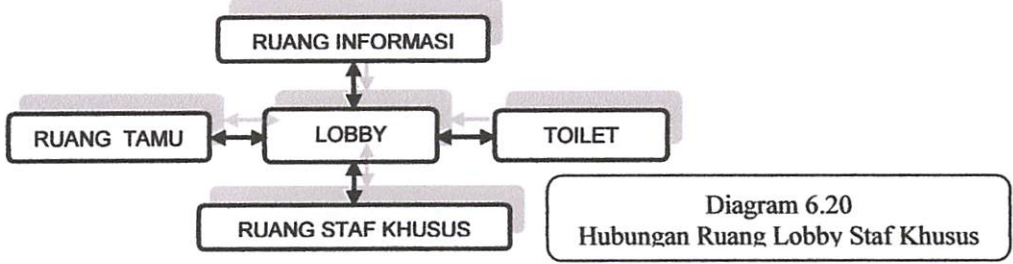
• TAUD



• BENSAT

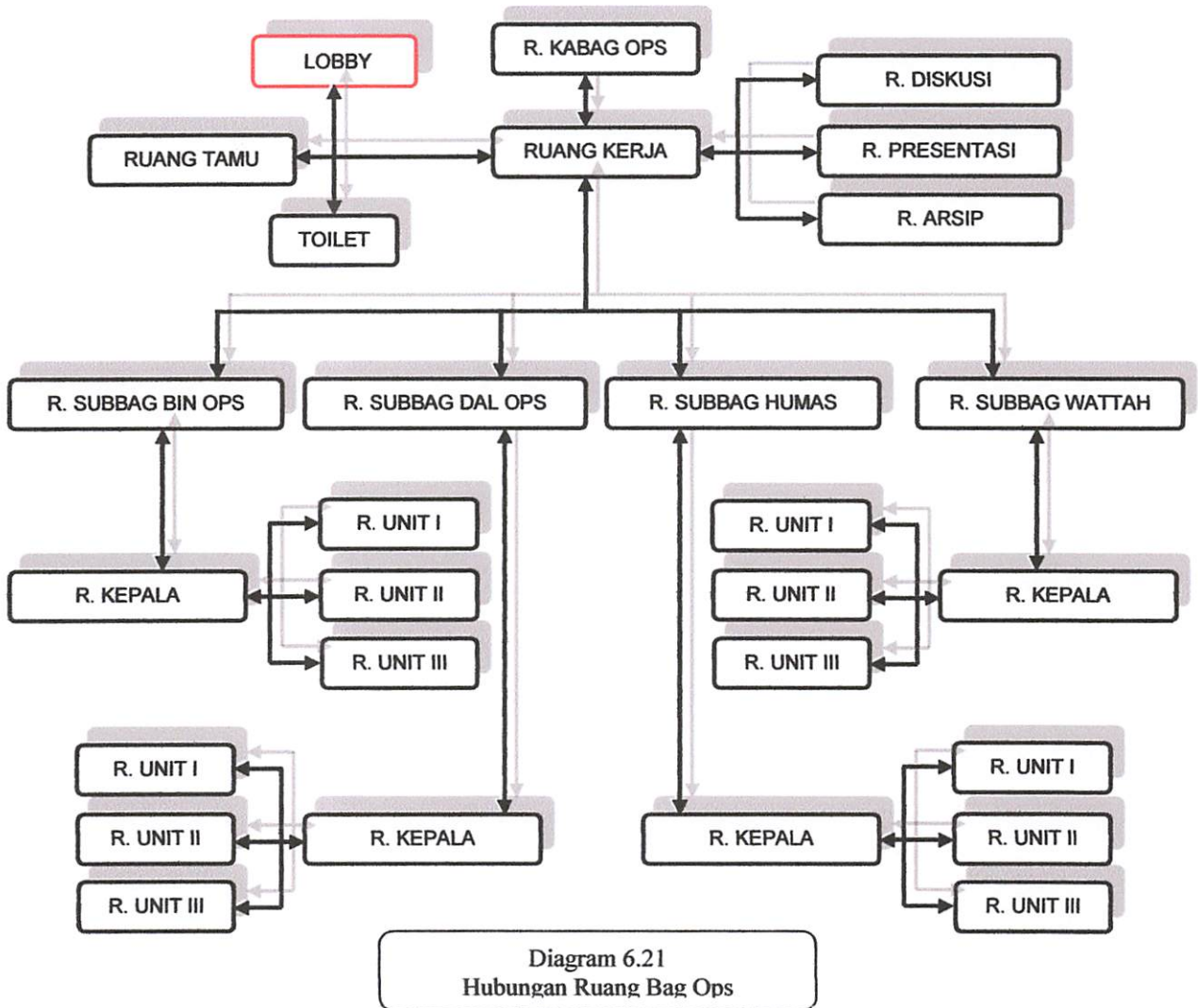


- **LOBBY STAF KHUSUS**

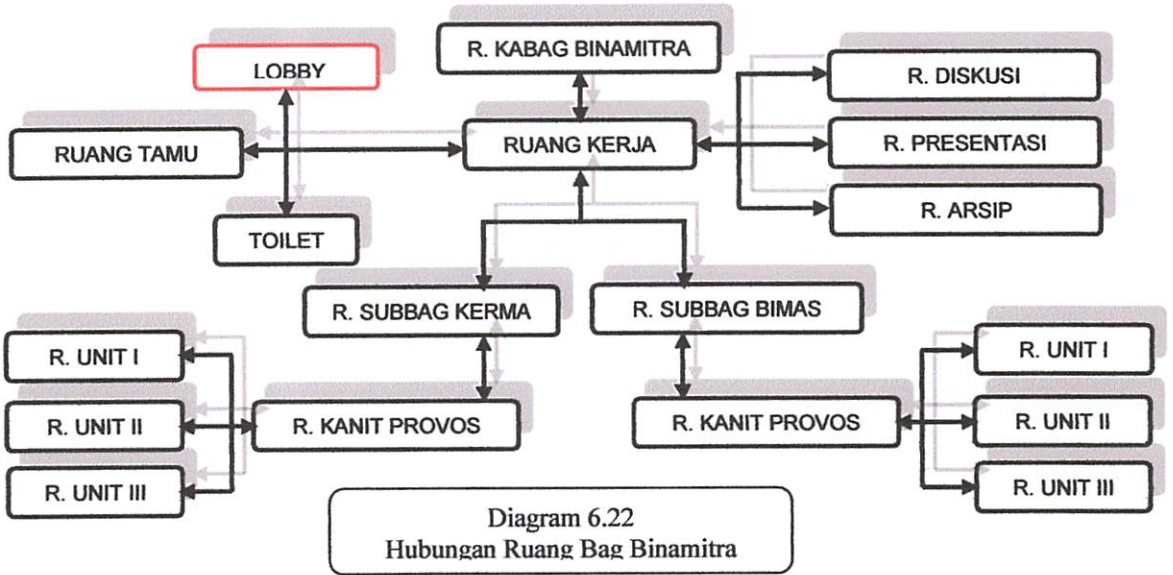


- ❖ **Zona Bagian**

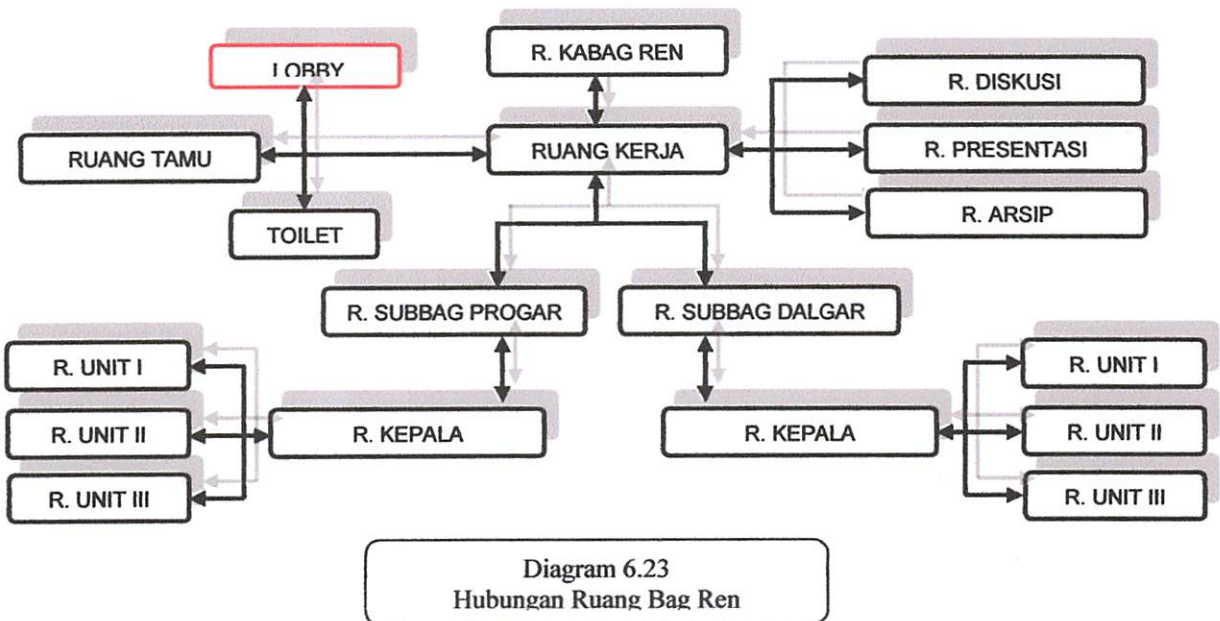
- **BAG OPS**



- **BAG BINAMITRA**



- **BAG REN**



• **BAG SUMDA**

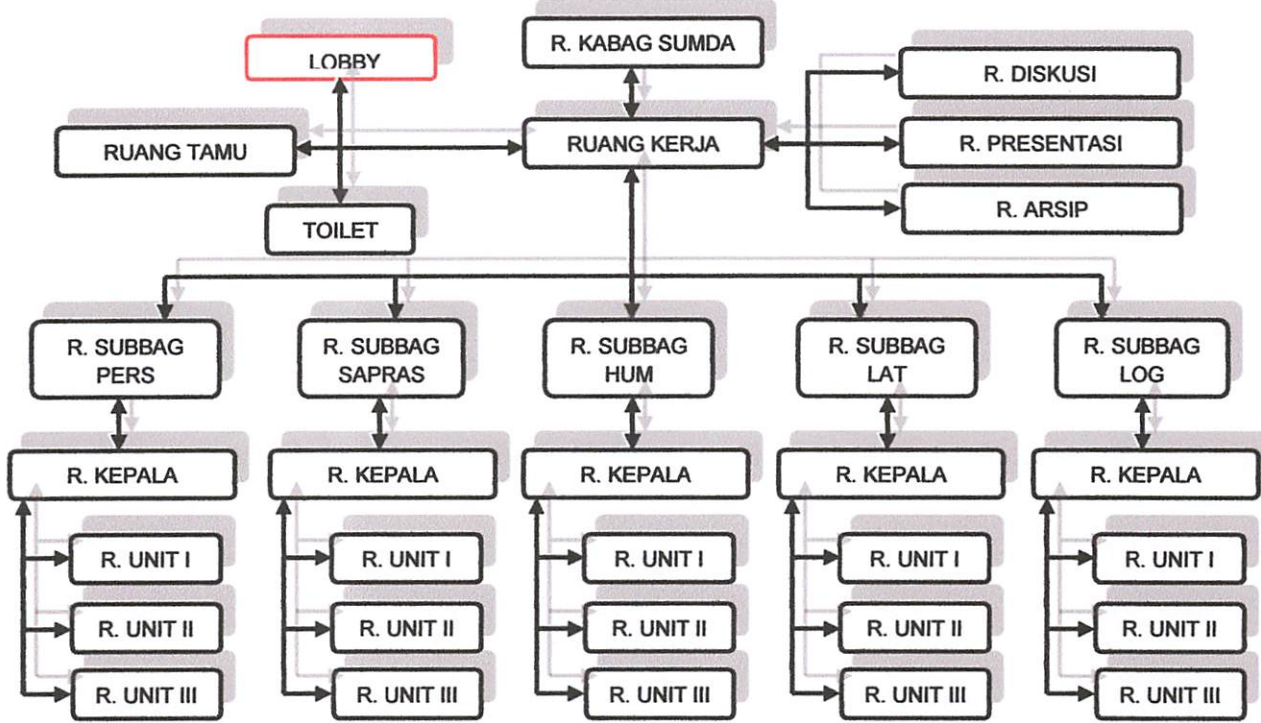


Diagram 6.24
Hubungan Ruang Bag Sumda

• **LOBBY BAGIAN**

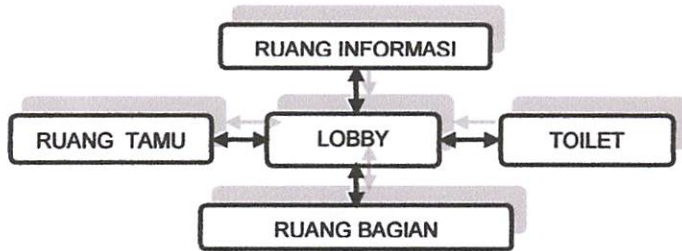


Diagram 6.25
Hubungan Ruang Lobby Bagian



❖ **Zona Satuan**

• **SPK**

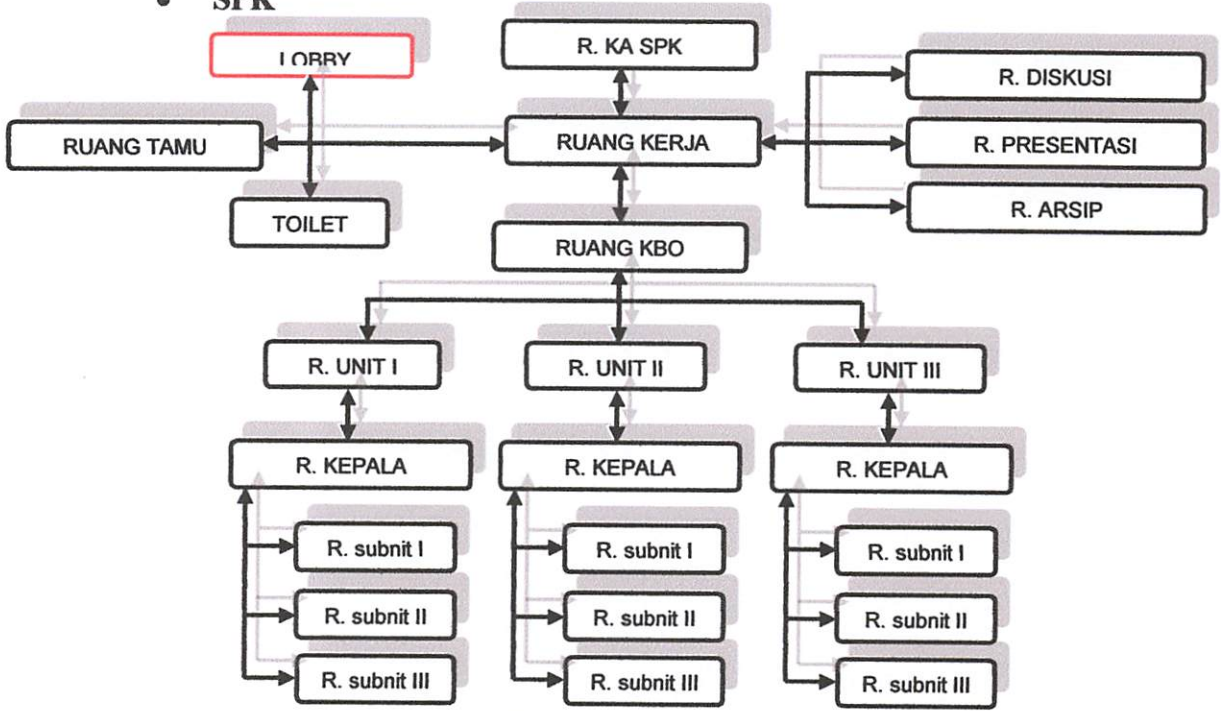


Diagram 6.26
Hubungan Ruang SPK

• **SAT LANTAS**

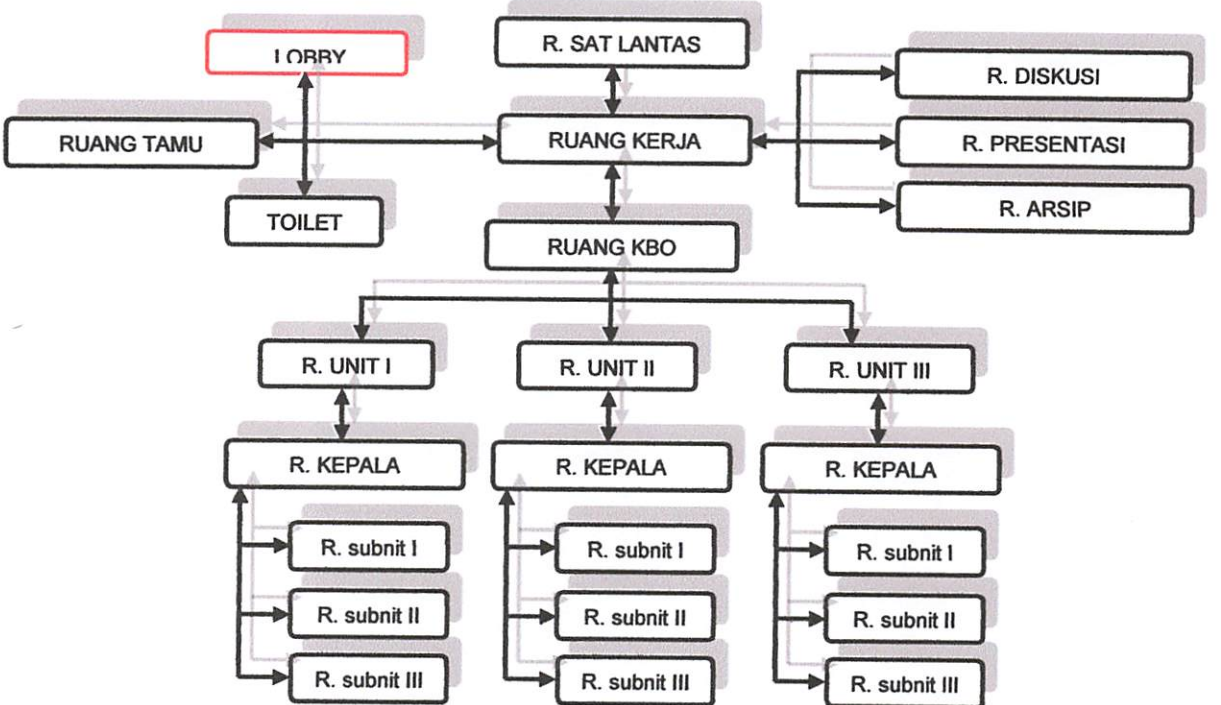


Diagram 6.27
Hubungan Ruang Sat Lantas



• SAT BINMAS

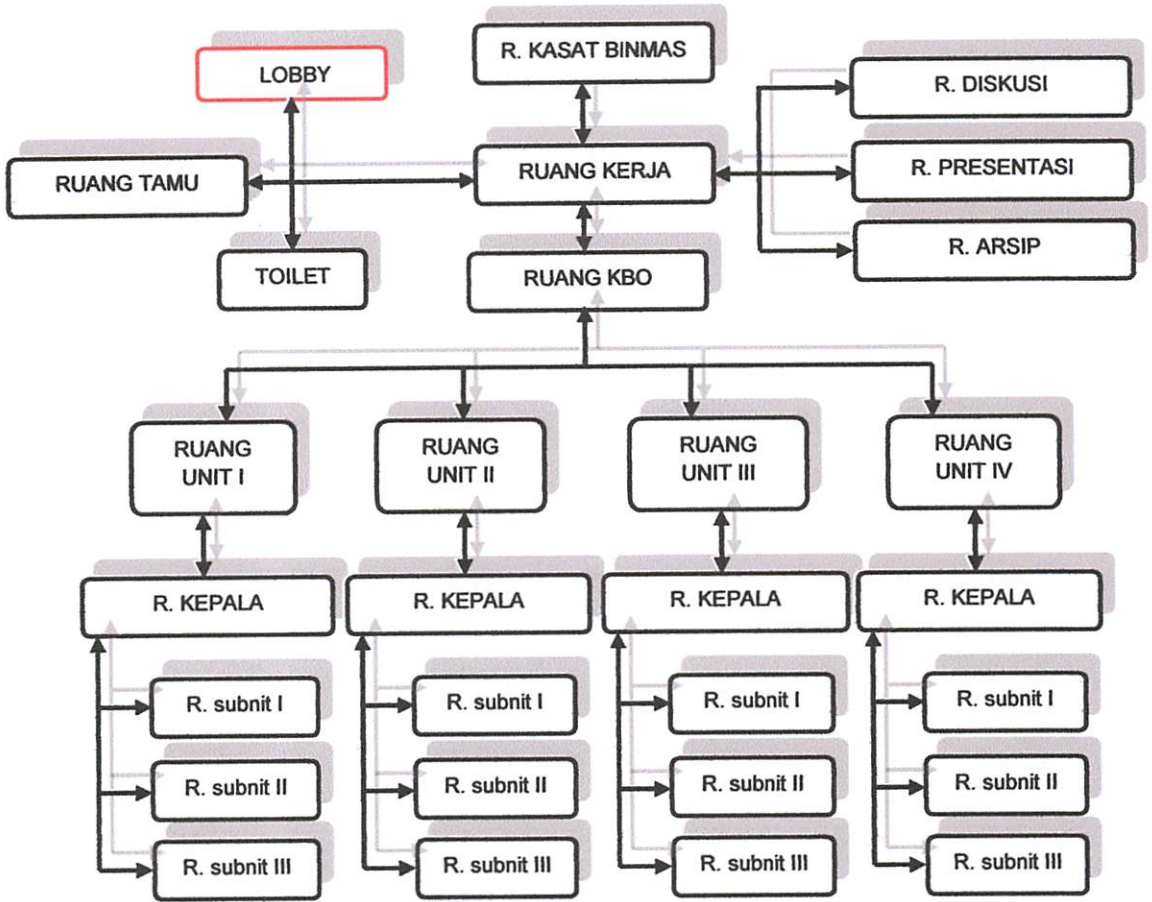


Diagram 6.28
Hubungan Ruang Sat Binmas



• SAT SAMAPTA

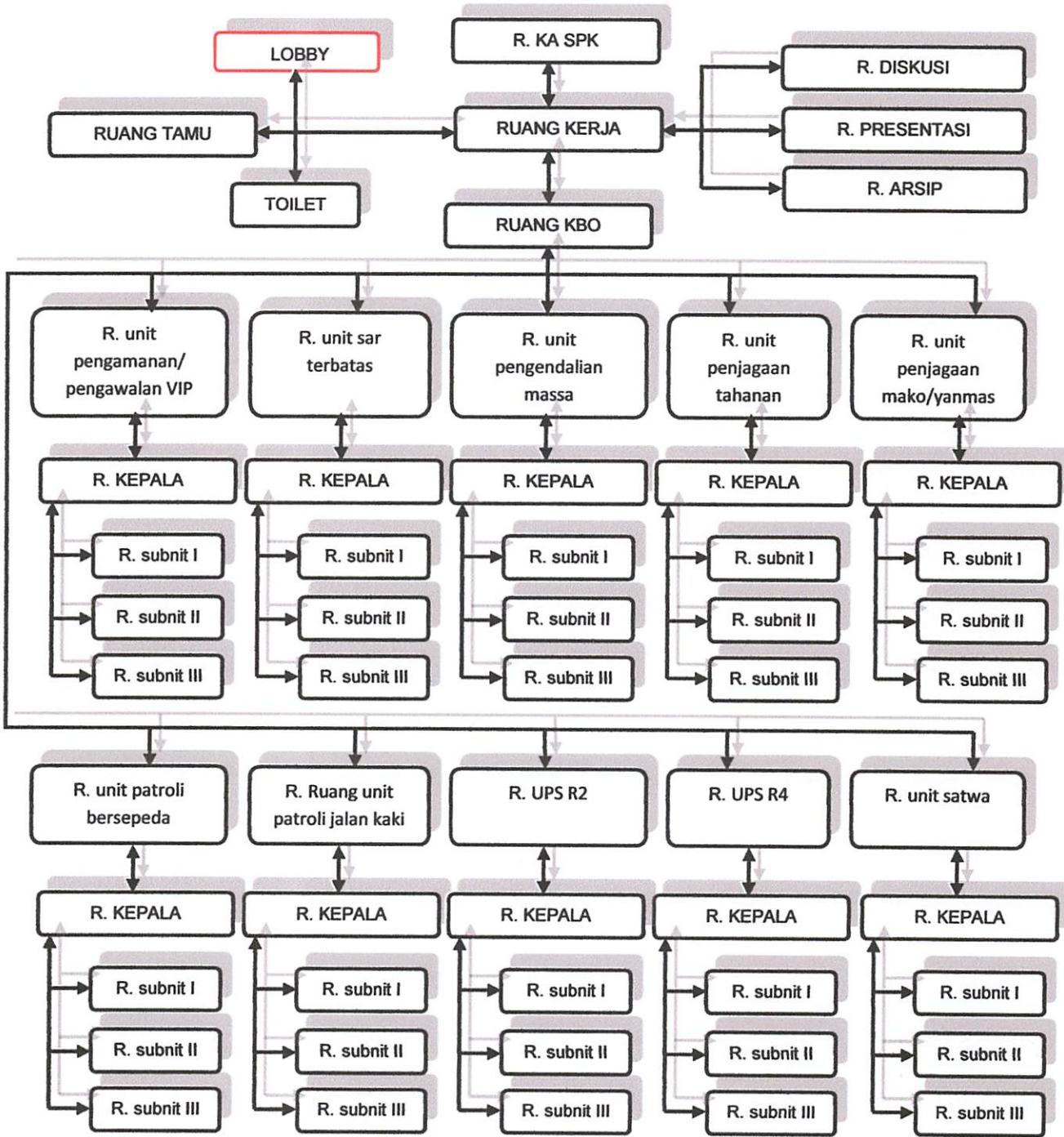


Diagram 6.29
Hubungan Ruang Sat Samapta



• **SAT SABHARA**

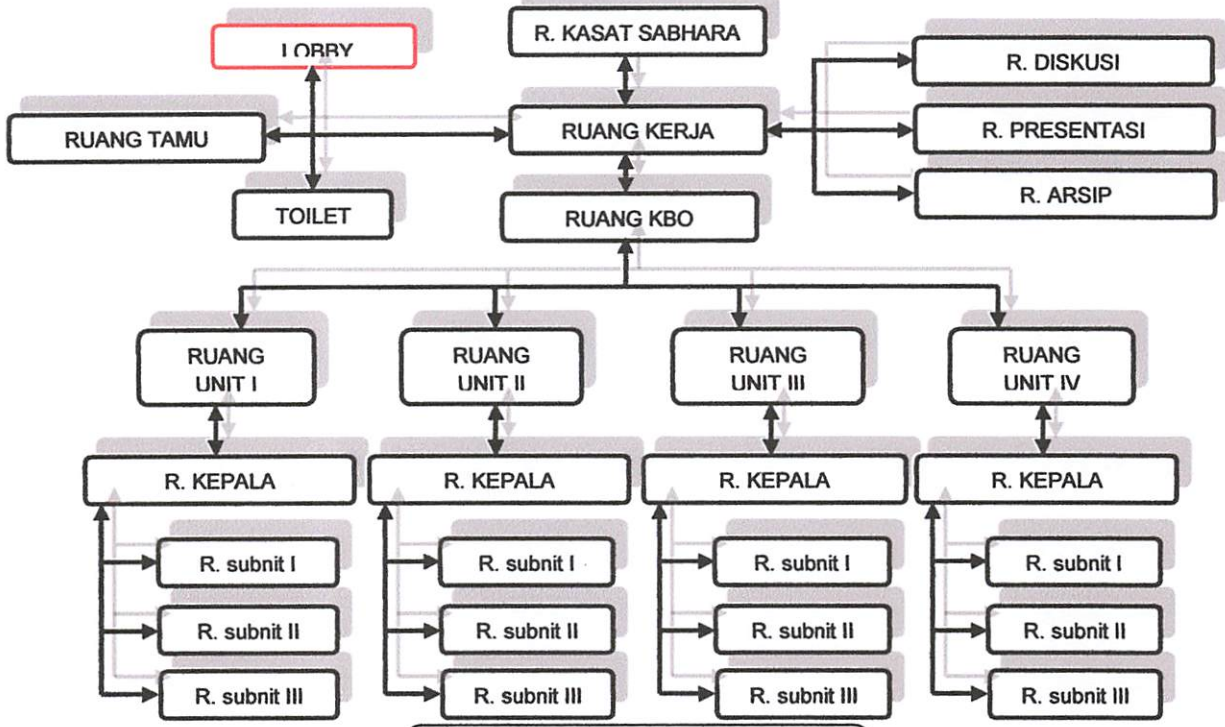


Diagram 6.30
Hubungan Ruang Sat Sabhara

• **SAT PAM OBVIT**

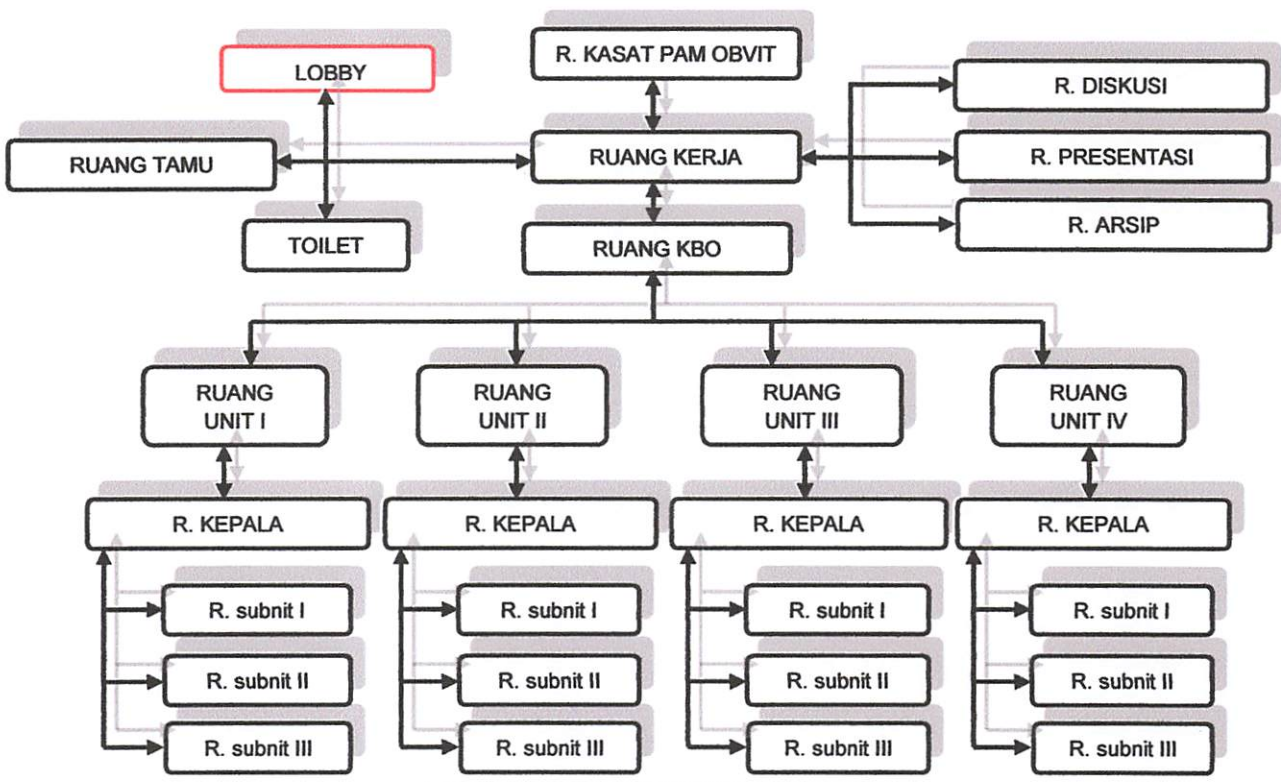


Diagram 6.31
Hubungan Ruang Sat Pam Obvit



• SAT INTELKAM

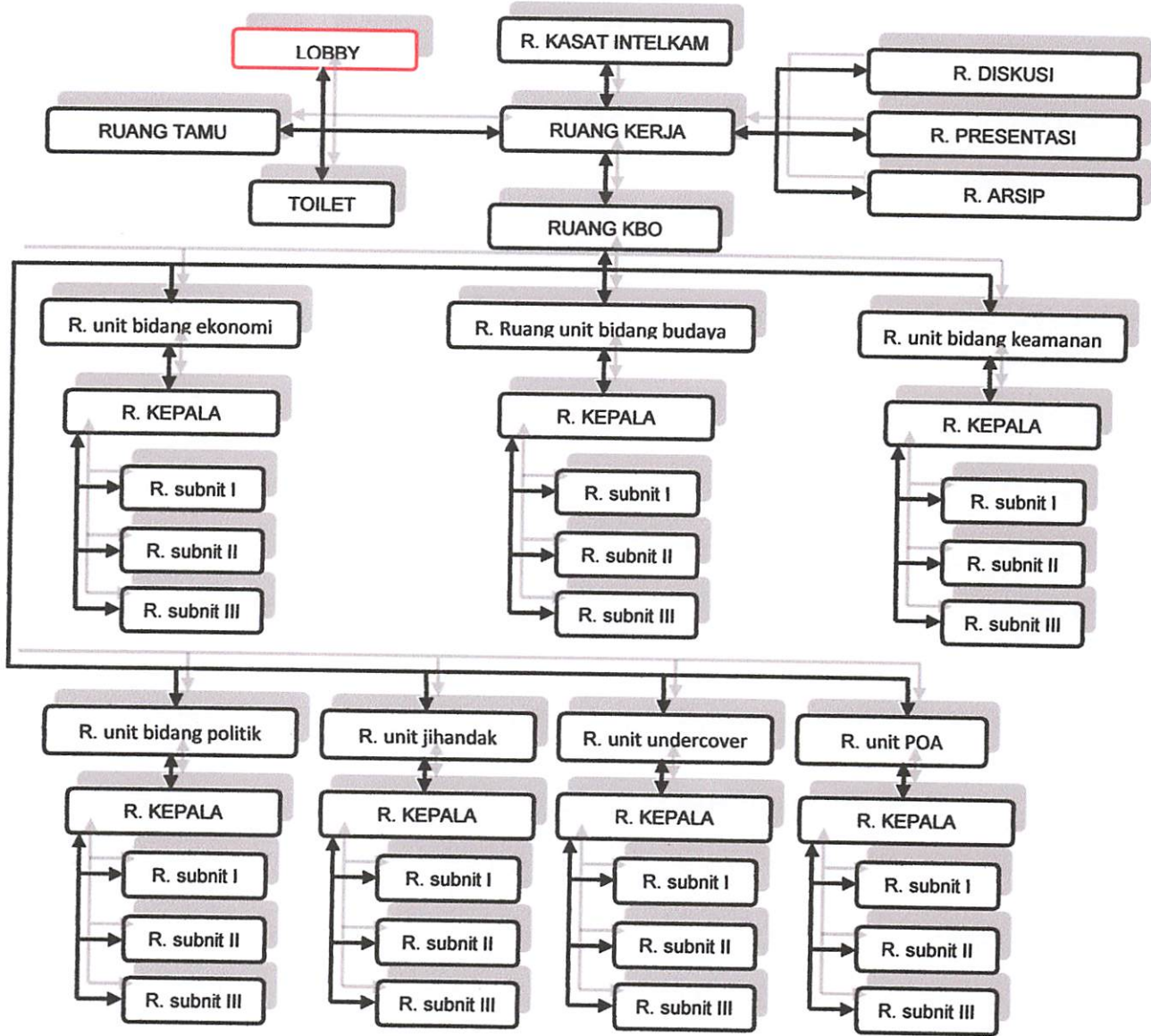


Diagram 6.32
Hubungan Ruang Sat Intelkam



• **SAT RESKRIM**

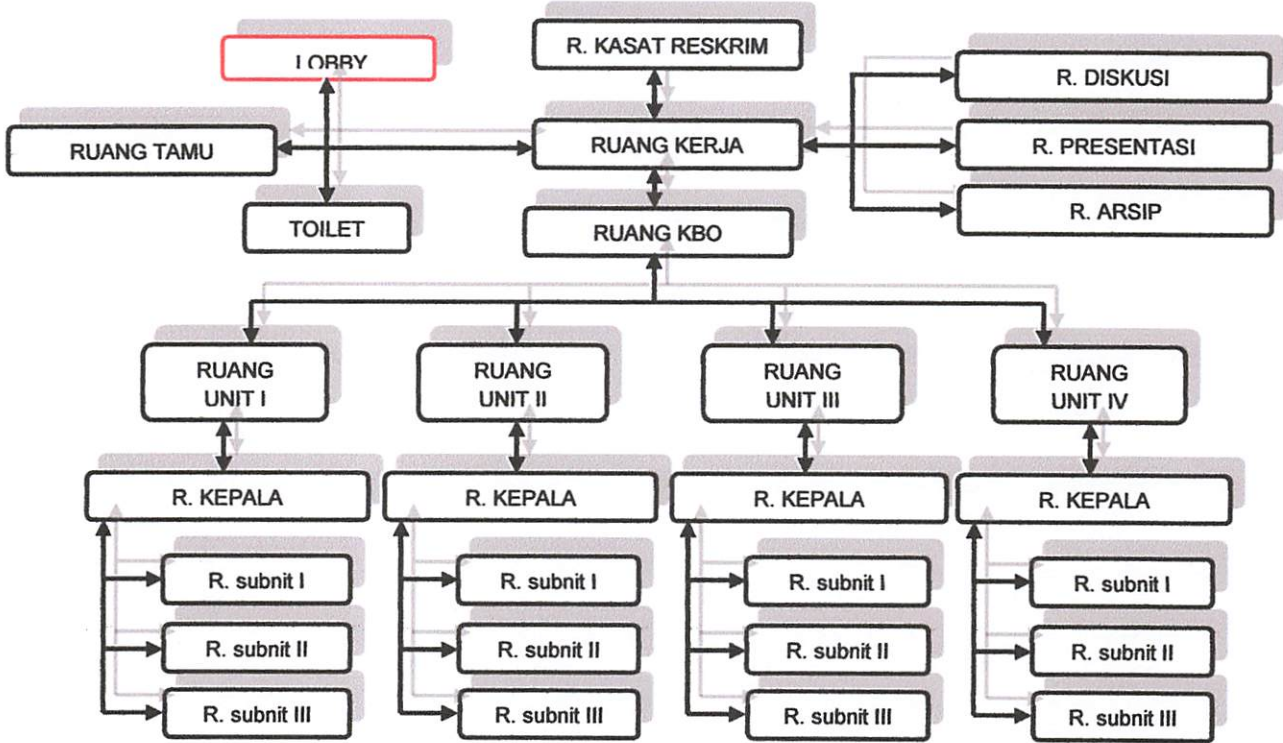


Diagram 6.33
Hubungan Ruang Sat Reskrim

• **SAT RESKOBA**

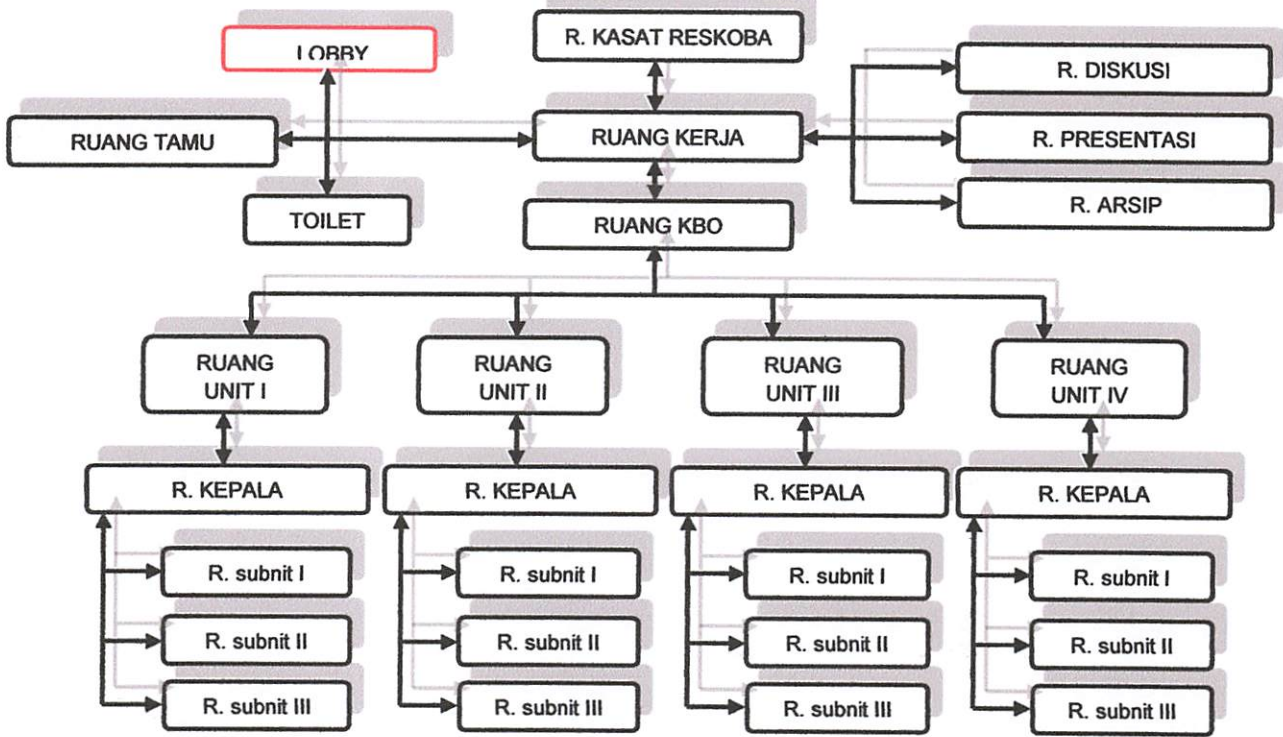


Diagram 6.34
Hubungan Ruang Sat Reskoba



• **SAT POL AIR**

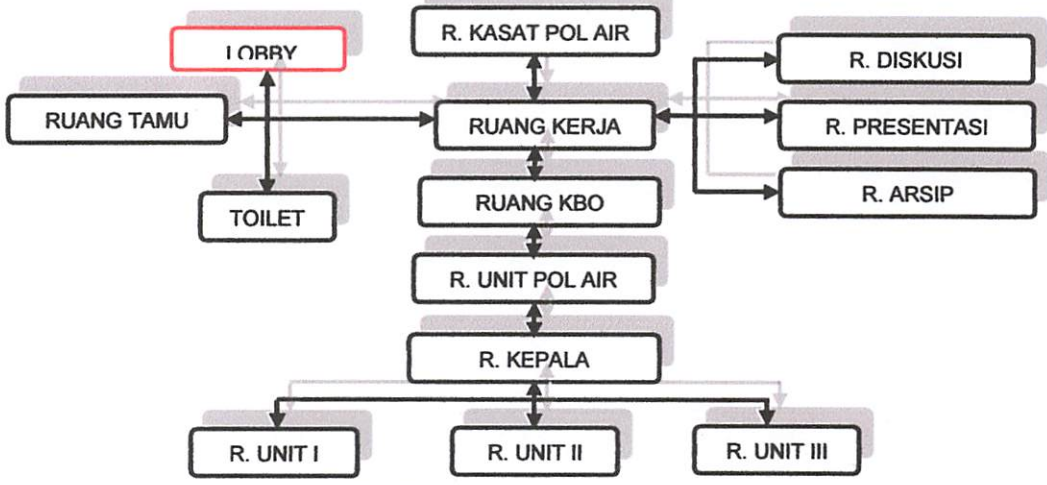


Diagram 6.35
Hubungan Ruang Sat Pol Air

• **SAT TAHTI**

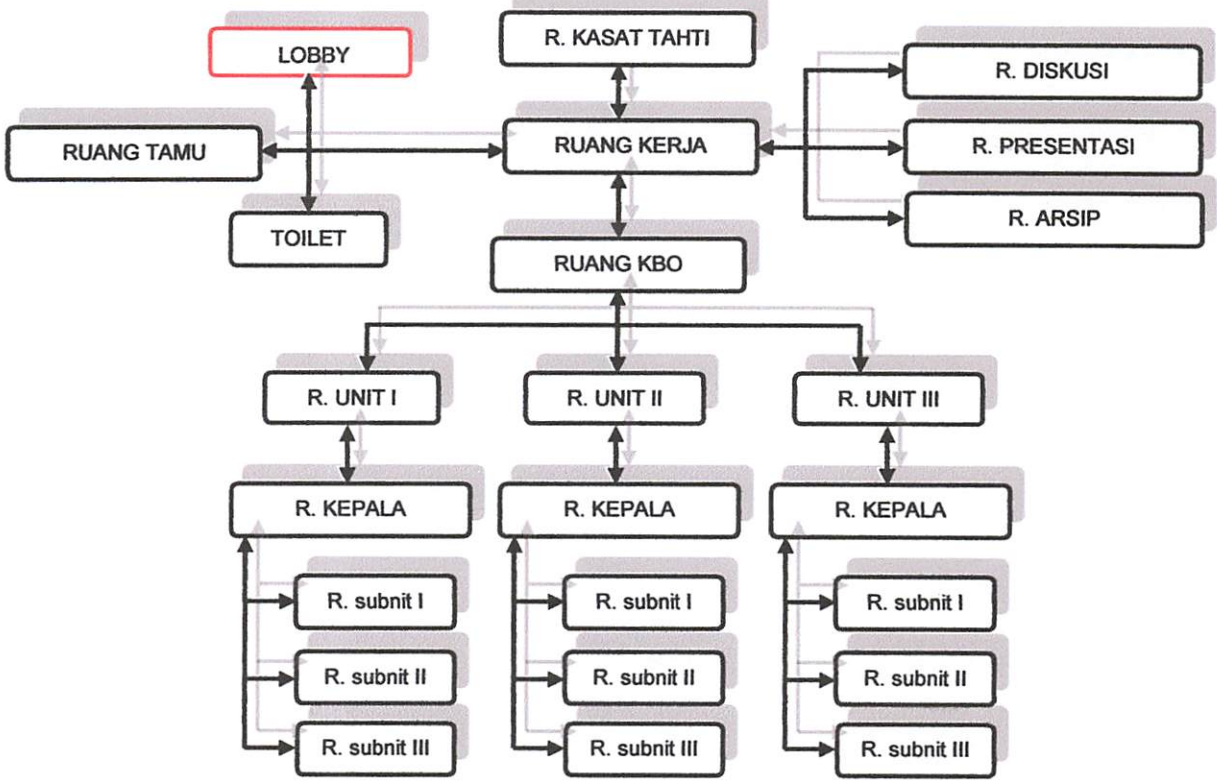


Diagram 6.36
Hubungan Ruang Sat Tahti



e. **Besaran Ruang.**

❖ **Zona Pimpinan**

• **KAPOLRESTA**

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang kerja Kapolresta	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
2.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /unit	NDA	20 m ²
3.	Ruang diskusi	1 unit	12 m ² / unit	NDA	12 m ²
4.	Ruang istirahat	1 unit	6 m ² /unit	NDA	6 m ²
5.	Ruang ibadah	1 unit	5 m ² /unit	NDA	5 m ²
6.	toilet	1 unit	5,72 m ² /unit	NDA	5,72 m ²
J U M L A H					72,72 m²
Sirkulasi 30%					21,816 m ²
JUMLAH TOTAL					94,536 m²

Tabel 6.2 Besaran Ruane Kapolresta

• **WAKAPOLRESTA**

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang kerja Wakapolresta	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
2.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /unit	NDA	20 m ²
3.	Ruang diskusi	1 unit	12 m ² / unit	NDA	12 m ²
4.	Ruang istirahat	1 unit	6 m ² /unit	NDA	6 m ²
5.	Ruang ibadah	1 unit	5 m ² /unit	NDA	5 m ²
6.	toilet	1 unit	5,72 m ² /unit	NDA	5,72 m ²
J U M L A H					72,72 m²
Sirkulasi 30%					21,816 m ²
JUMLAH TOTAL					94,536 m²

Tabel 6.33 Besaran Ruang Wakapolresta

• **Lobby Pimpinan**

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang informasi	1 unit	4 m ² / unit	NDA	4 m ²
2.	Lobby	1 unit	25 m ² / unit	NDA	25 m ²
3.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² / unit	NDA	20 m ²
4.	toilet	2 unit	5,72 m ² / unit	NDA	11,44 m ²
J U M L A H					60,44 m²
Sirkulasi 30%					18,132 m ²
JUMLAH TOTAL					78,572 m²

Tabel 6.4 Besaran Ruang Lobby Pimpinan

❖ **Zona Seksi**

• **SIWAS**

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang KASIWAS	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
2.	Ruang unit	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
3.	Ruang diskusi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
4.	Ruang penyimpanan data	1 unit	12 m ² /orang	NDA	12 m ²
5.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /unit	NDA	20 m ²
6.	Gudang	1 unit	25 m ² /unit	NDA	25 m ²
7.	Toilet	2 unit	5,72 m ² /unit	NDA	11,44 m ²
J U M L A H					178,23 m²



Sirkulasi 30%	53,469 m ²
JUMLAH TOTAL	231,699 m²

Tabel 6.5 Besaran Ruang Siwas

• SIUM

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang KASIUM	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
2.	Ruang unit	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
3.	Ruang diskusi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
4.	Ruang penyimpanan data	1 unit	12 m ² /orang	NDA	12 m ²
5.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /unit	NDA	20 m ²
9.	Gudang	1 unit	25 m ² /unit	NDA	25 m ²
6.	Toilet	2 unit	5,72 m ² /unit	NDA	11,44 m ²
J U M L A H					178,23 m²
Sirkulasi 30%					53,469 m ²
JUMLAH TOTAL					231,699 m²

Tabel 6.6 Besaran Ruang Sium

• SIPROPAM

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang KASIUM	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
2.	Ruang unit	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
3.	Ruang diskusi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
4.	Ruang penyimpanan data	1 unit	12 m ² /orang	NDA	12 m ²
5.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /unit	NDA	20 m ²
9.	Gudang	1 unit	25 m ² /unit	NDA	25 m ²
6.	Toilet	2 unit	5,72 m ² /unit	NDA	11,44 m ²
J U M L A H					178,23 m²
Sirkulasi 30%					53,469 m ²
JUMLAH TOTAL					231,699 m²

Tabel 6.7 Besaran Ruang Sipropam

• SIKEU

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang KASIUM	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
2.	Ruang unit	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
3.	Ruang diskusi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
4.	Ruang penyimpanan data	1 unit	12 m ² /orang	NDA	12 m ²
5.	Ruang penyimpanan uang (Banker)	1 unit	12 m ² /unit	NDA	12 m ²
6.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /unit	NDA	20 m ²
9.	Gudang	1 unit	25 m ² /unit	NDA	25 m ²
7.	Toilet	2 unit	5,72 m ² /unit	NDA	11,44 m ²
J U M L A H					190,23 m²
Sirkulasi 30%					57,069 m ²
JUMLAH TOTAL					247,299 m²

Tabel 6.8 Besaran Ruang Sikeu

• Lobby Seksi

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang informasi	1 unit	4 m ² /unit	NDA	4 m ²
2.	Lobby	1 unit	25 m ² /unit	NDA	25 m ²
3.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /unit	NDA	20 m ²



4.	toilet	2 unit	5,72 m ² / unit	NDA	11,44 m ²
J U M L A H					60,44 m²
Sirkulasi 30%					18,132 m ²
JUMLAH TOTAL					78,572 m²

Tabel 6.9 Besaran Ruang Lobby Seksi

❖ Zona Staf Khusus

• TAUD

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang KATAUD	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
2.	Ruang BANUM	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
3.	Ruang BAMIN	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
4.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /orang	NDA	20 m ²
5.	Ruang diskusi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
6.	Ruang presentasi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
7.	Ruang arsip	1 unit	12 m ² /orang	NDA	12 m ²
8.	toilet	2 unit	5,72 m ² /orang	NDA	11,44 m ²
9.	Gudang	1 unit	25 m ² /unit	NDA	25 m ²
J U M L A H					263,02 m²
Sirkulasi 30%					78,906 m ²
JUMLAH TOTAL					341,926 m²

Tabel 6.10 Besaran Ruang Taud

• UNIT P3D

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang KANIT P3D	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
2.	Ruang unit propam	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
3.	Ruang unit provos	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
4.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /orang	NDA	20 m ²
5.	Ruang diskusi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
6.	Ruang presentasi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
7.	Ruang arsip	1 unit	12 m ² /orang	NDA	12 m ²
8.	toilet	2 unit	5,72 m ² /orang	NDA	11,44 m ²
9.	Gudang	1 unit	25 m ² /unit	NDA	25 m ²
J U M L A H					263,02 m²
Sirkulasi 30%					78,906 m ²
JUMLAH TOTAL					341,926 m²

Tabel 6.11 Besaran Ruang Unit P3d

• BIDDOKKES

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang KABIDDOKKES	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
2.	Ruang subbiddokes	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
3.	Ruang subbidyanmatfakes	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
4.	Ruang polipol	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
5.	Ruang apotik				
7.	Ruang staf	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
8.	Gudang obat	1 unit	15 m ² /unit	NDA	15 m ²
9.	Ruang loket	3 orang	6 m ² /orang	NDA	18 m ²
10.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /orang	NDA	20 m ²
11.	Ruang diskusi	14 orang	2,75 m ² /orang	NDA	38,5 m ²
12.	Ruang presentasi	14 orang	2,75 m ² /orang	NDA	38,5 m ²



13.	Ruang arsip	1 unit	12 m ² /orang	NDA	12 m ²
14.	toilet	2 unit	5,72 m ² /orang	NDA	11,44 m ²
15.	Gudang	1 unit	25 m ² /unit	NDA	25 m ²
J U M L A H					454,6 m²
Sirkulasi 30%					136,38 m ²
JUMLAH TOTAL					590,98 m²

Tabel 6.12 Besaran Ruang Biddokkes

• **BENSAT**

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang KABENSAT	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
2.	Ruang Unit	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
3.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /orang	NDA	20 m ²
4.	Ruang diskusi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
5.	Ruang presentasi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
6.	Ruang arsip	1 unit	12 m ² /orang	NDA	12 m ²
7.	toilet	2 unit	5,72 m ² /orang	NDA	11,44 m ²
8.	Gudang	1 unit	25 m ² /unit	NDA	25 m ²
J U M L A H					200,23 m²
Sirkulasi 30%					60,069 m ²
JUMLAH TOTAL					260,299 m²

Tabel 6.13 Besaran Ruang Bensat

• **UR TELEMATIKA**

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang KAUR TELEMATIKA	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
2.	Ruang Unit	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
3.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /orang	NDA	20 m ²
4.	Ruang diskusi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
5.	Ruang presentasi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
6.	Ruang arsip	1 unit	12 m ² /orang	NDA	12 m ²
7.	toilet	2 unit	5,72 m ² /orang	NDA	11,44 m ²
8.	Gudang	1 unit	25 m ² /unit	NDA	25 m ²
J U M L A H					200,23 m²
Sirkulasi 30%					60,069 m ²
JUMLAH TOTAL					260,299 m²

Tabel 6.14 Besaran Ruang Ur Telematika

• **Lobby Staf Khusus**

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang informasi	1 unit	4 m ² / unit	NDA	4 m ²
1.	Lobby	1 unit	25 m ² / unit	NDA	25 m ²
2.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² / unit	NDA	20 m ²
5.	toilet	2 unit	5,72 m ² / unit	NDA	11,44 m ²
J U M L A H					60,44 m²
Sirkulasi 30%					18,132 m ²
JUMLAH TOTAL					78,572 m²

Tabel 6.15 Besaran Ruang Lobby Staf Khusus



❖ **Zona Bagian**

• **BAG OPS**

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang KABAG OPS	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
2.	Ruang subbag bin ops	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
4.	Ruang subbag dal ops	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
5.	Ruang subbag humas	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
6.	Ruang subbag watah	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
7.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /orang	NDA	20 m ²
8.	Ruang diskusi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
9.	Ruang presentasi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
10.	Ruang arsip	1 unit	12 m ² /orang	NDA	12 m ²
11.	toilet	2 unit	5,72 m ² /orang	NDA	11,44 m ²
12.	Gudang	1 unit	25 m ² /unit	NDA	25 m ²
J U M L A H					388,6 m²
Sirkulasi 30%					116,58 m ²
JUMLAH TOTAL					505,18 m²

Tabel 6.16 Besaran Ruang Bag Ops

• **BAG BINAMITRA**

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang KABAG BINAMITRA	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
2.	Ruang subbag kerma	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
3.	Ruang subbag bimas	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
4.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /orang	NDA	20 m ²
5.	Ruang diskusi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
6.	Ruang presentasi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
7.	Ruang arsip	1 unit	12 m ² /orang	NDA	12 m ²
8.	toilet	2 unit	5,72 m ² /orang	NDA	11,44 m ²
9.	Gudang	1 unit	25 m ² /unit	NDA	25 m ²
J U M L A H					263,02 m²
Sirkulasi 30%					78,906 m ²
JUMLAH TOTAL					341,926 m²

Tabel 6.17 Besaran Ruang Bag Binamitra

• **BAG REN**

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang KABAG REN	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
2.	Ruang subbag progar	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
3.	Ruang subbag dalgar	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
4.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /orang	NDA	20 m ²
5.	Ruang diskusi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
6.	Ruang presentasi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
7.	Ruang arsip	1 unit	12 m ² /orang	NDA	12 m ²
8.	toilet	2 unit	5,72 m ² /orang	NDA	11,44 m ²
9.	Gudang	1 unit	25 m ² /unit	NDA	25 m ²
J U M L A H					263,02 m²
Sirkulasi 30%					78,906 m ²
JUMLAH TOTAL					341,926 m²

Tabel 6.18 Besaran Ruang Bag Ren



• BAG SUMDA

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang KABAG SUMDA	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
2.	Ruang subbag pers	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
3.	Ruang subbag sapras	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
4.	Ruang subbag hum	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
5.	Ruang subbag lat	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
6.	Ruang subbag log	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
7.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /orang	NDA	20 m ²
8.	Ruang diskusi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
9.	Ruang presentasi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
10.	Ruang arsip	1 unit	12 m ² /orang	NDA	12 m ²
11.	toilet	2 unit	5,72 m ² /orang	NDA	11,44 m ²
12.	Gudang	1 unit	25 m ² /unit	NDA	25 m ²
J U M L A H					451,39 m²
Sirkulasi 30%					135,417 m ²
JUMLAH TOTAL					586,807 m²

Tabel 6.19 Besaran Ruang Bag Sumda

• Lobby Bagian

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang informasi	1 unit	4 m ² / unit	NDA	4 m ²
1.	Lobby	1 unit	25 m ² / unit	NDA	25 m ²
2.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² / unit	NDA	20 m ²
5.	toilet	2 unit	5,72 m ² / unit	NDA	11,44 m ²
J U M L A H					60,44 m²
Sirkulasi 30%					18,132 m ²
JUMLAH TOTAL					78,572 m²

Tabel 6.20 Besaran Ruang Lobby Bagian

❖ Zona Satuan

• SPK

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang KA SPK	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
2.	Ruang KBO SPK	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
3.	Ruang unit I	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
4.	Ruang unit II	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
5.	Ruang unit III	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
6.	Ruang informasi	1 unit	4 m ² / unit	NDA	4 m ²
7.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /orang	NDA	20 m ²
8.	Ruang diskusi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
9.	Ruang presentasi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
10.	Ruang arsip	1 unit	12 m ² /orang	NDA	12 m ²
11.	toilet	2 unit	5,72 m ² /orang	NDA	11,44 m ²
12.	Gudang	1 unit	25 m ² /unit	NDA	25 m ²
J U M L A H					354,81 m²
Sirkulasi 30%					106,443 m ²
JUMLAH TOTAL					461,253 m²

Tabel 6.21 Besaran Ruang SPK



• **SAT LANTAS**

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang KASAT LANTAS	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
2.	Ruang KBO SAT LANTAS	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
3.	Ruang unit patroli lantasi	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
4.	Ruang unit dikyasa	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
5.	Ruang unit laka	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
6.	Ruang unit pat mor	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
7.	Ruang unit gaktur	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
8.	Ruang informasi	1 unit	4 m ² / unit	NDA	4 m ²
9.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /orang	NDA	20 m ²
10.	Ruang diskusi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
11.	Ruang presentasi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
12.	Ruang arsip	1 unit	12 m ² /orang	NDA	12 m ²
13.	toilet	2 unit	5,72 m ² /orang	NDA	11,44 m ²
14.	Gudang	1 unit	25 m ² /unit	NDA	25 m ²
JUMLAH					480,39 m²
Sirkulasi 30%					144,117 m ²
JUMLAH TOTAL					624,507 m²

Tabel 6.22 Besaran Ruang Sat Lantas

• **SAT BINMAS**

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang KASAT BINMAS	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
2.	Ruang KBO SAT BINMAS	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
3.	Ruang unit I	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
4.	Ruang unit II	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
5.	Ruang unit III	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
6.	Ruang unit IV	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
7.	Ruang informasi	1 unit	4 m ² / unit	NDA	4 m ²
8.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /orang	NDA	20 m ²
9.	Ruang diskusi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
10.	Ruang presentasi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
11.	Ruang arsip	1 unit	12 m ² /orang	NDA	12 m ²
12.	toilet	2 unit	5,72 m ² /orang	NDA	11,44 m ²
13.	Gudang	1 unit	25 m ² /unit	NDA	25 m ²
JUMLAH					417,6 m²
Sirkulasi 30%					125,28 m ²
JUMLAH TOTAL					542,88 m²

Tabel 6.23 Besaran Ruang Sat Binmas

• **SAT SAMAPTA**

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang KASAT SAMAPTA	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
2.	Ruang KBO SAT SAMAPTA	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
3.	Ruang UPS R4	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
4.	Ruang UPS R2	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
5.	Ruang unit patroli bersepeda	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
6.	Ruang unit patroli jalan kaki	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
7.	Ruang unit penjagaan mako/yanmas	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
8.	Ruang unit penjagaan tahanan	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
9.	Ruang unit pengendalian masa	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
10.	Ruang unit sar terbatas	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²



11.	Ruang unit pengamanan/pengawalan VIP	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
12.	Ruang unit satwa	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
13.	Ruang informasi	1 unit	4 m ² /unit	NDA	4 m ²
14.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /orang	NDA	20 m ²
15.	Ruang diskusi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
16.	Ruang presentasi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
17.	Ruang arsip	1 unit	12 m ² /orang	NDA	12 m ²
18.	toilet	2 unit	5,72 m ² /orang	NDA	11,44 m ²
19.	Gudang	1 unit	25 m ² /unit	NDA	25 m ²
J U M L A H					794,34 m²
Sirkulasi 30%					238,302 m ²
JUMLAH TOTAL					1032,642 m²

Tabel 6.24 Besaran Ruang Sat Samapta

• **SAT SABHARA**

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang KASAT SABHARA	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
2.	Ruang KBO SAT SABHARA	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
3.	Ruang unit I	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
4.	Ruang unit II	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
5.	Ruang unit III	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
6.	Ruang unit IV	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
7.	Ruang informasi	1 unit	4 m ² /unit	NDA	4 m ²
8.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /orang	NDA	20 m ²
9.	Ruang diskusi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
10.	Ruang presentasi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
11.	Ruang arsip	1 unit	12 m ² /orang	NDA	12 m ²
12.	toilet	2 unit	5,72 m ² /orang	NDA	11,44 m ²
13.	Gudang	1 unit	25 m ² /unit	NDA	25 m ²
J U M L A H					417,6 m²
Sirkulasi 30%					125,28 m ²
JUMLAH TOTAL					542,88 m²

Tabel 6.25 Besaran Ruang Sat Sabahara

• **SAT PAM OBVIT**

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang KASAT PAM OBVIT	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
2.	Ruang KBO SAT PAM OBVIT	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
3.	Ruang unit I	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
4.	Ruang unit II	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
5.	Ruang unit III	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
6.	Ruang unit IV	6 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
7.	Ruang informasi	1 unit	4 m ² /unit	NDA	4 m ²
8.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /orang	NDA	20 m ²
9.	Ruang diskusi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
10.	Ruang presentasi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
11.	Ruang arsip	1 unit	12 m ² /orang	NDA	12 m ²
12.	toilet	2 unit	5,72 m ² /orang	NDA	11,44 m ²
13.	Gudang	1 unit	25 m ² /unit	NDA	25 m ²
J U M L A H					417,6 m²
Sirkulasi 30%					125,28 m ²
JUMLAH TOTAL					542,88 m²

Tabel 6.26 Besaran Ruang Sat Pam Obvit



• **SAT INTELKAM**

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang KASAT INTELKAM	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
2.	Ruang KBO SAT INTELKAM	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
3.	Ruang unit bidang ekonomi	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
4.	Ruang unit bidang budaya	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
5.	Ruang unit bidang keamanan	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
6.	Ruang unit bidang politik	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
7.	Ruang unit jihandak	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
8.	Ruang unit undercover	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
9.	Ruang unit POA	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
10.	Ruang informasi	1 unit	4 m ² / unit	NDA	4 m ²
11.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /orang	NDA	20 m ²
12.	Ruang diskusi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
13.	Ruang presentasi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
14.	Ruang arsip	1 unit	12 m ² /orang	NDA	12 m ²
15.	toilet	2 unit	5,72 m ² /orang	NDA	11,44 m ²
16.	Gudang	1 unit	25 m ² /unit	NDA	25 m ²
J U M L A H					605,97 m²
Sirkulasi 30%					181,791 m ²
JUMLAH TOTAL					787,761 m²

Tabel 6.27 Besaran Ruang Sat Intelkam

• **SAT RESKRIM**

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang KASAT RESKRIM	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
2.	Ruang KBO SAT RESKRIM	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
3.	Ruang unit I	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
4.	Ruang unit II	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
5.	Ruang unit III	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
6.	Ruang unit IV	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
7.	Ruang informasi	1 unit	4 m ² / unit	NDA	4 m ²
8.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /orang	NDA	20 m ²
9.	Ruang diskusi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
10.	Ruang presentasi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
11.	Ruang arsip	1 unit	12 m ² /orang	NDA	12 m ²
12.	toilet	2 unit	5,72 m ² /orang	NDA	11,44 m ²
13.	Gudang	1 unit	25 m ² /unit	NDA	25 m ²
J U M L A H					417,6 m²
Sirkulasi 30%					125,28 m ²
JUMLAH TOTAL					542,88 m²

Tabel 6.28 Besaran Ruang Sat Reskrim

• **SAT RESKOBA**

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang KASAT RESKOBA	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
2.	Ruang KBO SAT RESKOBA	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
3.	Ruang unit I	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
4.	Ruang unit II	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
5.	Ruang unit III	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
6.	Ruang unit IV	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
7.	Ruang informasi	1 unit	4 m ² / unit	NDA	4 m ²



8.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /orang	NDA	20 m ²
9.	Ruang diskusi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
10.	Ruang presentasi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
11.	Ruang arsip	1 unit	12 m ² /orang	NDA	12 m ²
12.	toilet	2 unit	5,72 m ² /orang	NDA	11,44 m ²
13.	Gudang	1 unit	25 m ² /unit	NDA	25 m ²
J U M L A H					417,6 m²
Sirkulasi 30%					125,28 m ²
JUMLAH TOTAL					542,88 m²

Tabel 6.29 Besaran Ruang Sat Reskoba

• SAT POL AIR

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang KASAT POL AIR	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
2.	Ruang KBO SAT POL AIR	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
3.	Ruang unit POL AIR	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
4.	Ruang informasi	1 unit	4 m ² / unit	NDA	4 m ²
5.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /orang	NDA	20 m ²
6.	Ruang diskusi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
7.	Ruang presentasi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
8.	Ruang arsip	1 unit	12 m ² /orang	NDA	12 m ²
9.	toilet	2 unit	5,72 m ² /orang	NDA	11,44 m ²
10.	Gudang	1 unit	25 m ² /unit	NDA	25 m ²
J U M L A H					229,23 m²
Sirkulasi 30%					68,769 m ²
JUMLAH TOTAL					297,999 m²

Tabel 6.30 Besaran Ruang Sat Pol Air

• SAT TAHTI

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang KA SPK	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
2.	Ruang KBO SPK	1 orang	25 m ² /orang	NDA	25 m ²
3.	Ruang unit I	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
4.	Ruang unit II	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
5.	Ruang unit III	7 orang	8,97 m ² /orang	NDA	62,79 m ²
6.	Ruang informasi	1 unit	4 m ² / unit	NDA	4 m ²
7.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² /orang	NDA	20 m ²
8.	Ruang diskusi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
9.	Ruang presentasi	8 orang	2,75 m ² /orang	NDA	22 m ²
10.	Ruang arsip	1 unit	12 m ² /orang	NDA	12 m ²
11.	toilet	2 unit	5,72 m ² /orang	NDA	11,44 m ²
12.	Gudang	1 unit	25 m ² /unit	NDA	25 m ²
J U M L A H					354,81 m²
Sirkulasi 30%					106,443 m ²
JUMLAH TOTAL					461,253 m²

Tabel 6.31 Besaran Ruang Sat Tahti

• Lobby Satuan

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang informasi	1 unit	4 m ² / unit	NDA	4 m ²
1.	Lobby	1 unit	25 m ² / unit	NDA	25 m ²
2.	Ruang tamu	1 unit	20 m ² / unit	NDA	20 m ²
5.	toilet	2 unit	5,72 m ² / unit	NDA	11,44 m ²
J U M L A H					60,44 m²



Sirkulasi 30%	18,132 m ²
JUMLAH TOTAL	78,572 m²

Tabel 6.32 Besaran Ruang Sat Tahti

❖ Zona Penunjang Khusus

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang rapat khusus pimpinan (<i>Indoor</i>)	111 orang	2,75 m ² /orang	NDA	305,25 m ²
2.	Ruang rapat seksi (<i>Indoor</i>)	32 orang	2,75 m ² /orang	NDA	88 m ²
3.	Ruang rapat staf khusus (<i>Indoor</i>)	81 orang	2,75 m ² /orang	NDA	222,75 m ²
4.	Ruang rapat bagian (<i>Indoor</i>)	88 orang	2,75 m ² /orang	NDA	242 m ²
5.	Ruang rapat satuan (<i>Indoor</i>)	351 orang	2,75 m ² /orang	NDA	965,25 m ²
6.	Lapangan upacara (<i>outdoor</i>)	1 unit	30X60 m ² /unit	Literatur	1800 m ²
7.	Lapangan lat. Tembak (<i>outdoor</i>)	1 unit	40X30 m ² /unit	Literatur	1200 m ²
8.	Ruang persiapan (<i>Indoor</i>)	1 unit	30 m ² /unit	NDA	30 m ²
9.	Ruang senjata (<i>Indoor</i>)	1 unit	30 m ² /unit	Literatur	30 m ²
10.	Gedung bhayangkari (<i>Indoor</i>)	554 orang	2,75 m ² /orang	NDA	1523,5 m ²
11.	Ruang tahanan pria (<i>Indoor</i>)	50 orang	3 m ² /orang	Literatur	150 m ²
12.	Ruang tahanan wanita (<i>Indoor</i>)	30 orang	3 m ² /orang	Literatur	90 m ²
13.	Ruang tahanan anak-anak (<i>Indoor</i>)	20 orang	2 m ² /orang	Literatur	40 m ²
14.	Ruang jenguk tahanan (<i>Indoor</i>)	3 unit	30 m ² /unit	Literatur	90 m ²
15.	Ruang jaga tahanan (<i>Indoor</i>)	3 unit	8 m ² /unit	Literatur	24 m ²
16.	Ruang barang bukti bermotor (<i>Indoor</i>)	1 unit	100 m ² /unit	Literatur	100 m ²
17.	Ruang barang bukti benda/barang (<i>Indoor</i>)	1 unit	50 m ² /unit	Literatur	50 m ²
18.	Gudang (<i>Indoor</i>)	1 unit	100 m ² /unit	NDA	100 m ²
18.	Pos Jaga (<i>Indoor</i>)	2 unit	4 m ² /unit	NDA	8 m ²
J U M L A H					7058,75 m²
Sirkulasi 30%					2117,625 m ²
JUMLAH TOTAL					9176,375 m²

Tabel 6.33 Besaran Ruang Penunjang Khusus

❖ Zona Penunjang Umum

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Musholla	40 orang	1 m ² /orang	Literatur	36 m ²
2.	Ruang wudlu	40 orang	3,5 m ² / 10 orang	NDA	14 m ²
3.	toilet	2 unit	5,72 m ² / unit	NDA	11,44 m ²
4.	Koperasi	1 unit	16 m ² /unit	NDA	16 m ²
5.	Kantin	50 orang	1 m ² /orang	NDA	50 m ²
J U M L A H					127,44 m²
Sirkulasi 30%					38,232 m ²
JUMLAH TOTAL					165,672 m²

Tabel 6.34 Besaran Ruang Penunjang Umum

❖ Zona MEE

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar	Sumber	Luas M ²
1.	Ruang Genset	1 unit	20 m ² /unit	NDA	20 m ²
2.	Ruang Trafo	1 unit	20 m ² /unit	NDA	20 m ²
3.	Ruang Panel	1 unit	12 m ² /unit	NDA	12 m ²
4.	Ruang OB	1 unit	20 m ² /orang	NDA	20 m ²
5.	Gudang	1 unit	50 m ² /unit	NDA	50 m ²



6.	Dapur	1 unit	12 m ² /orang	NDA	12 m ²
J U M L A H					134 m²
Sirkulasi 30%					40,2 m ²
JUMLAH TOTAL					174,2 m²

Tabel 6.35 Besaran Ruang MEE

❖ Rekapitulasi Besaran Ruang

Besaran Rekapitulasi Ruang.	Zona Ruang	Total Luas m ²
		Zona Pimpinan
	Zona Seksi	1020,968 m ²
	Zona Bagian	1854,411 m ²
	Zona Satuan	6258,387 m ²
	Zona Staf Khusus	1874,002 m ²
	Zona Penunjang Umum	165,672 m ²
	Zona Penunjang Khusus (<i>Indoor</i>)	4058,75 m ²
	Zona Penunjang Khusus (<i>outdoor</i>)	3000 m ²
	Zona Servis (<i>MEE</i>)	174,2 m ²
Total Luasan Kecuali "Outdoor"		15674,034 m²

Tabel 6.36 Rekapitulasi Besaran Ruang

❖ Karakteristik Dan Suasana Ruang.

No	Ruang	Pencahayaan		Penghawaan	
		Alami	Buatan	Alami	Buatan
1.	Ruang tamu	✓	✓	✓	✓
2.	Ruang informasi	✓	✓	✓	✓
3.	Ruang kerja	✓	✓	✓	✓
4.	Ruang istirahat	✓	✓	✓	✓
5.	Ruang rapat	✓	✓	✓	✓
6.	Ruang diskusi	✓	✓	✓	✓
7.	Ruang presentasi	✓	✓	✓	✓
8.	Ruang pertemuan	✓	✓	✓	✓
9.	Ruang arsip	✓	✓	✓	✓
10.	Ruang penyimpanan uang	✓	✓	✓	✓
11.	Ruang senjata	✓	✓	✓	✓
12.	Ruang barang bukti	✓	✓	✓	✓
13.	Ruang tahanan	✓	✓	✓	x
14.	Ruang jenguk tahanan	✓	✓	✓	✓
15.	Gudang	✓	✓	✓	x
16.	Ruang MEE	x	✓	✓	x
17.	Ruang servis	✓	✓	✓	x
18.	Ruang ibadah/musholla	✓	✓	✓	x
19.	koperasi	✓	✓	✓	x
20.	kantin	✓	✓	✓	x
21.	toilet	✓	✓	✓	x
22.	Pos jaga	✓	✓	✓	x

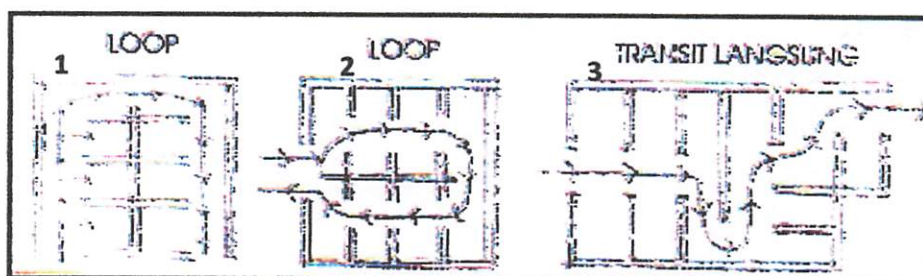
Tabel 6.37 Karakteristik Dan Suasana Ruang



❖ **Spasial Ruang.**

a. Sirkulasi melalui dan didalam ruang

Biasanya direncanakan sebagai sebuah putaran (loop), tetapi ada juga yang menggunakan sistem transit langsung. Pemisahan aliran pengunjung masuk dan keluar harus dilakukan secara tegas untuk menghindari kekacauan pergerakan pengunjung. Dibawah ini beberapa alternatif pola sirkulasi :



Gambar 6.21
Alternative pola sirkulasi

1. Berputar mengelilingi ruang dengan memisahkan aliran pengunjung masuk dan keluar guna menghindari kekacauan pergerakan pengunjung. Sebagai contoh pola sirkulasi ini baik digunakan untuk ruang kerja karena ada kesan kegiatan yang berurutan.
2. Berputar mengelilingi ruang dengan satu akses in - out, biasanya pada sirkulasi ini terjadi kekacauan pergerakan karena saling bertabrakan pada akses in dan out.
3. Transit langsung merupakan sirkulasi dimana ada suatu tempat peristirahatan sejenak dan akses pergerakan dipertegas dengan pemisahan alur masuk dan keluar pengunjung.

b. Sirkulasi melewati dan melalui rangkaian ruang

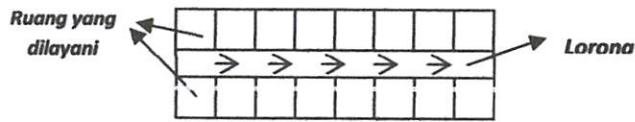
Pencapaian ini memanfaatkan pergerakan melalui beberapa ruangan secara berurutan dan berkesinambungan berupa sirkulasi melalui koridor keruang-ruang, baik melalui single koridor atau double koridor.



Adapun beberapa alternatif pergerakan sirkulasi melalui rangkaian ruang adalah sebagai berikut :

- Lorong melayani dua arah (*double loaded corridor*)

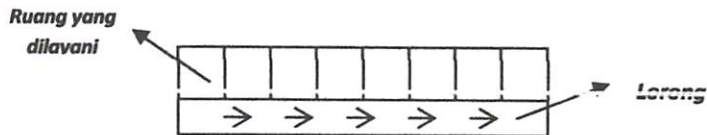
Sistem lorong yang melayani dua arah.



Gambar 6.22
double loaded corridor

- Lorong melayani satu arah (*single loaded corridor*)

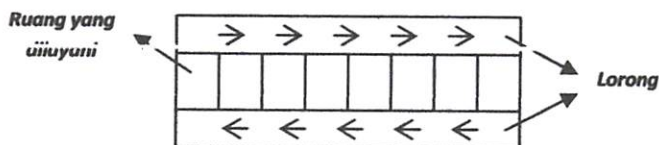
Sistem lorong yang melayani satu



Gambar 6.23
single loaded corridor

- Lorong pinggir (*perimeter corridor/ exterior corridor*)

Sistem ini sering dipakai untuk melayani ruang yang bentangnya besar.



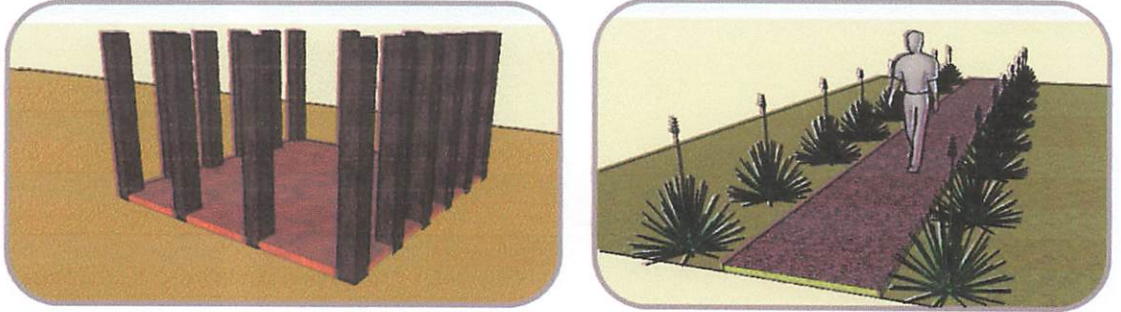
Gambar 6.24
perimeter corridor/ exterior corridor

Sirkulasi ini memberikan keuntungan dari kemudahan pencapaian, pengaturan arus sirkulasi dan kemudahan mengidentifikasi alur sirkulasi secara jelas.



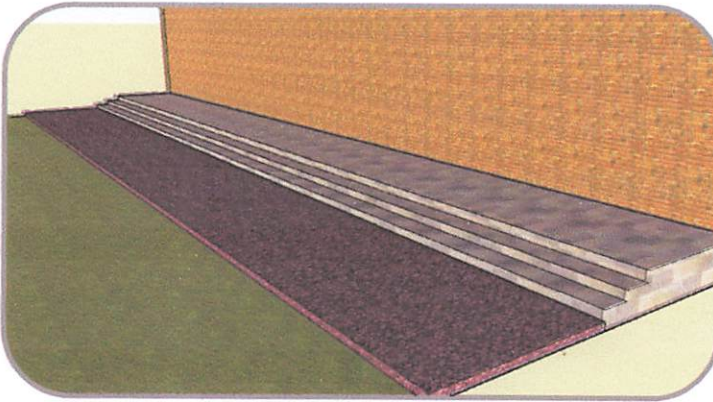
Alur sirkulasi diatas juga membentuk sebuah spasial ruang.
Alternatif menggunakan spasial ruang berupa:

- Pembatas (dinding,tiang/kolom, pagar, vegetasi, dll)



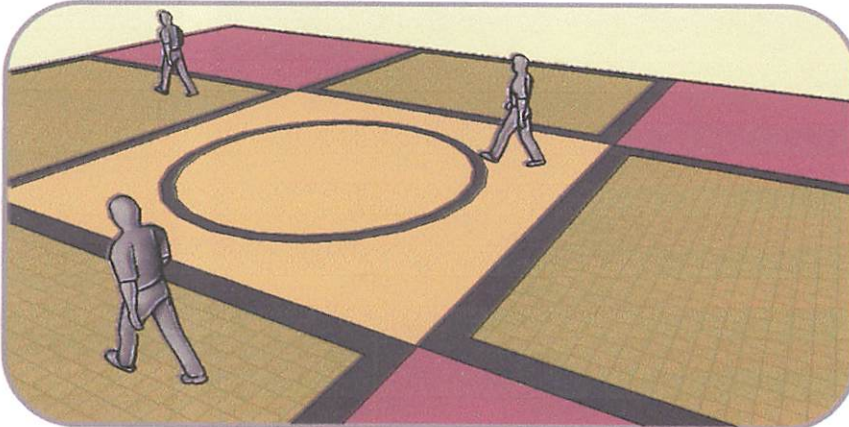
Gambar 6.25
Pembatas Spasial Ruang

- Perbedaan ketinggian lantai



Gambar 6.26
Perbedaan Ketinggian Lantai

- Perbedaan warna lantai



Gambar 6.27
Perbedaan Warna Lantai

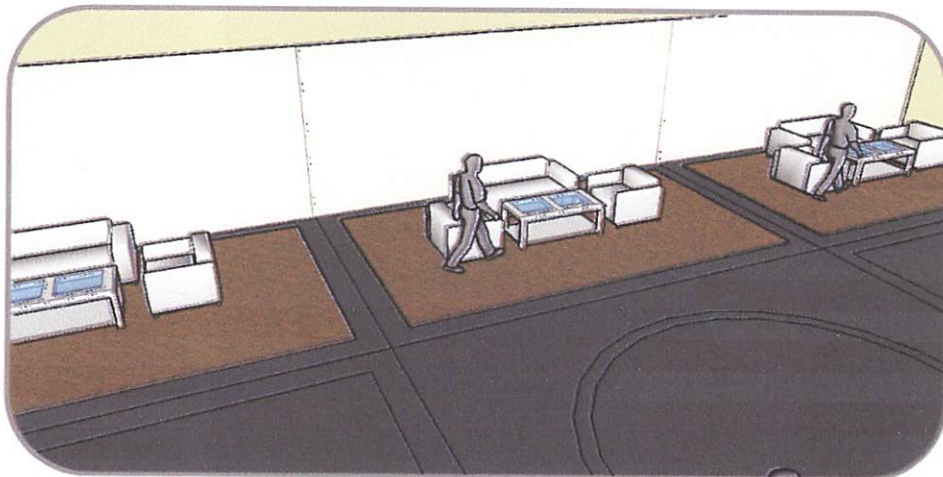


- Perbedaan material pada lantai



Gambar 6.28
Perbedaan Material Pada Lantai

- Penggunaan furniture (karpet, dll)



Gambar 6.29
Penggunaan Furniture



D. Analisa Utilitas.

❖ Utilitas Bangunan

• Distribusi Air Bersih

Air bersih yang digunakan di dalam kantor kepolisian resor kota bersumber dari PDAM yang ditampung di tandon bawah. Dari tandon bawah kemudian di distribusikan ke daerah bangunan fasilitas utama, penunjang, dan servis.

Skema Distribusi Air Bersih

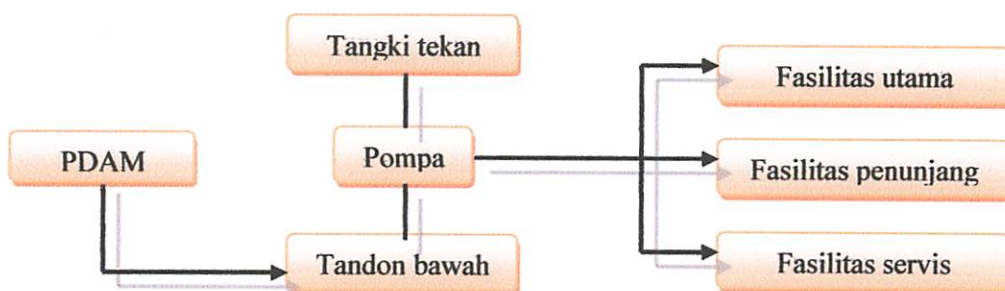
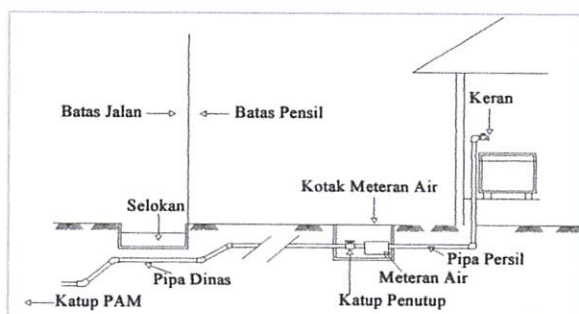


Diagram 6.37
Skema Distribusi Air Bersih

Air bersih distribusi dari PDAM

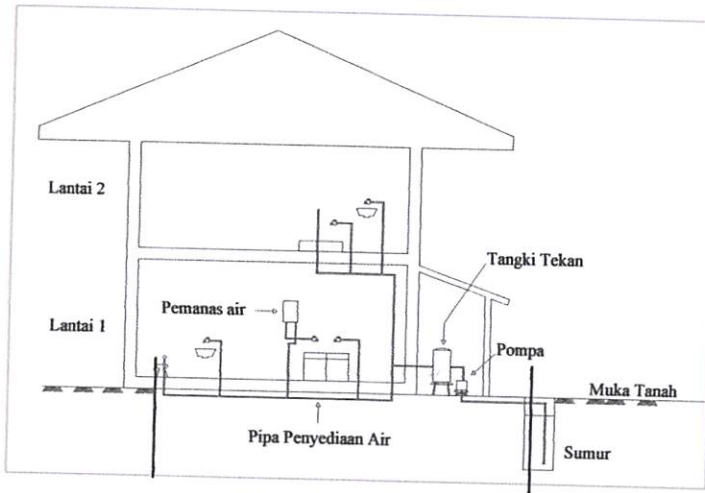
Dalam sistem ini pipa distribusi dalam gedung disambung langsung dengan pipa utama penyediaan air bersih (misalnya, pipa utama di bawah jalan dari perusahaan air minum). Karena terbatasnya tekanan dalam pipa utama dan dibatasinya ukuran pipa cabang dari pipa utama tersebut, maka sistem ini terutama dapat diterapkan untuk gedung tingkat > 1 lantai. Ukuran pipa cabang biasanya diatur oleh Perusahaan Air minum.



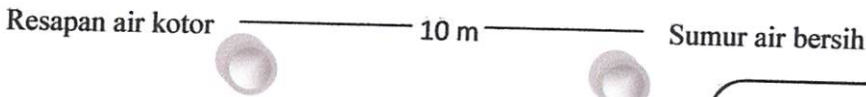
Gambar 6.30
Air Bersih Distribusi Dari PDAM



Air bersih distribusi dari sumur (cadangan)



Sistem tangki tekan digunakan karena lebih menguntungkan dari segi estetika karena tidak terlalu menyolok dibanding dengan tangki atap. Sistem tangki tekan dengan sumur sebagai sumber air bersih cadangan.



Gambar 6.31
Air Bersih Distribusi Dari Sumur (Cadangan)

Penempatan sumur air bersih tidak boleh berjarak kurang dari 10 m dari sumur resapan air kotor. Hal ini untuk menghindari terjadinya pencemaran.

• Sistem Pembuangan

Untuk sistem pembuangan air kotor, kotoran dari toilet diuraikan menjadi *black water* sedangkan dari urinoir, wastafel dan floor drain diuraikan menjadi *grey water*. Untuk *black water* sendiri disalurkan menuju ke septictank dan jarak maksimum pipa ± 15 m. Dari septictank *black water* kotor langsung di buang menuju sumur resapan atau unit pengolahan limbah.



Skema Pembuangan Air Kotor

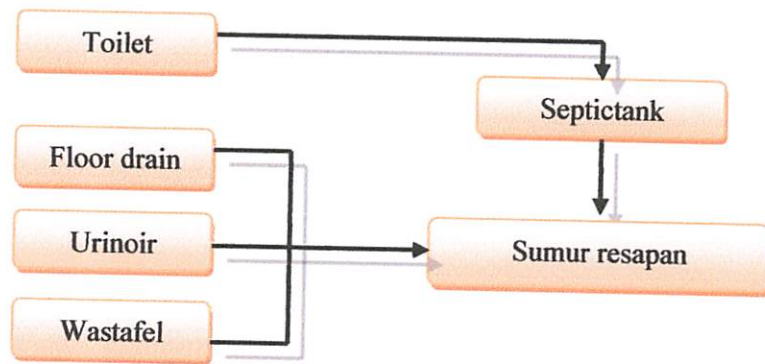


Diagram 6.38
Skema Pembuangan Air Kotor

Skema Pembuangan Air Hujan



Diagram 6.39
Skema Pembuangan Air Hujan

- **Sistem Elektrikal**

Listrik yang didapat bersumber dari PLN dengan back-up genset. Sumber daya tegangan menengah yang diambil dari genset pada gardu yang terpisah jauh dari objek bangunan diubah dengan menggunakan trafo menjadi tegangan rendah. Setelah itu listrik tadi disalurkan menuju panel utama dan kemudian disalurkan lagi ke kontrol-panel yang mengatur pengeluaran dan tegangan listrik pada satu cabang bangunan, dan kemudian didistribusikan ke semua unit yang membutuhkan tenaga listrik.

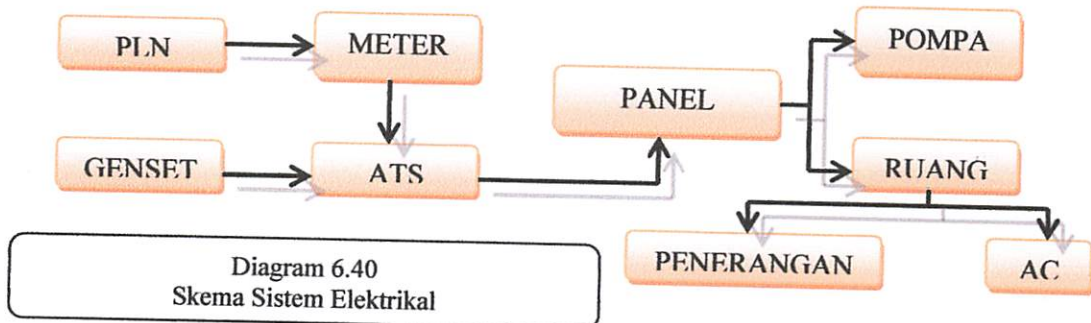


Diagram 6.40
Skema Sistem Elektrikal



- **Sistem Pembuangan Sampah**

Untuk pembuangan sampah digunakan sistem carry out. Dimana pada setiap harinya ada petugas kebersihan (karyawan) yang akan membersihkan setiap bangunan kemudian sampahnya dikumpulkan di tempat pembuangan sementara dalam bangunan kemudian diangkut menuju TPA kota. Untuk penyaluran sampah dalam bangunan secara vertical digunakan shaft.

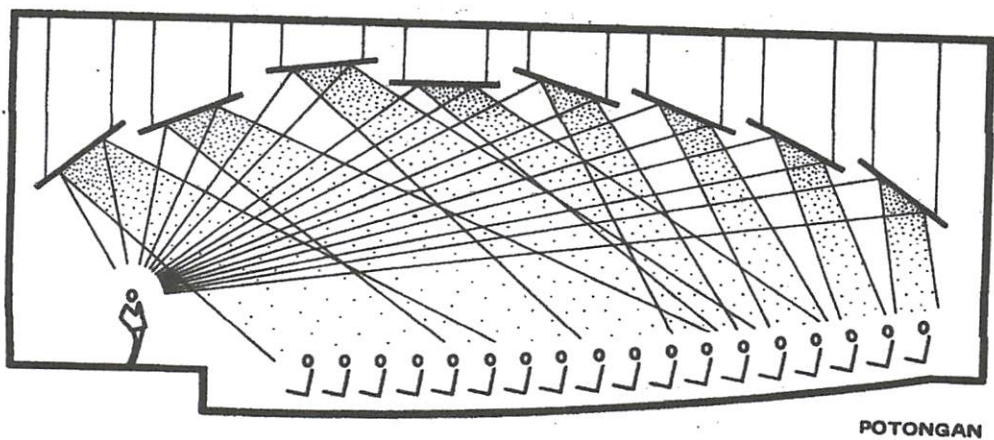


Diagram 6.41
Skema Sistem Pembuangan Sampah

- **Sistem Akustik Pada Ruang Rapat Dan Serbaguna**

Sistem akustik yang dipakai nantinya adalah sistem langit langit pemantul yang diletakkan dengan tepat, dengan pemantulan bunyi yang makin banyak ke tempat duduk yang jauh, secara efektif menyumbang kekerasan secara yang cukup.

Sistem plafon pemantul bunyi



Gambar 6.32
Sistem Plafon Pemantul Bunyi



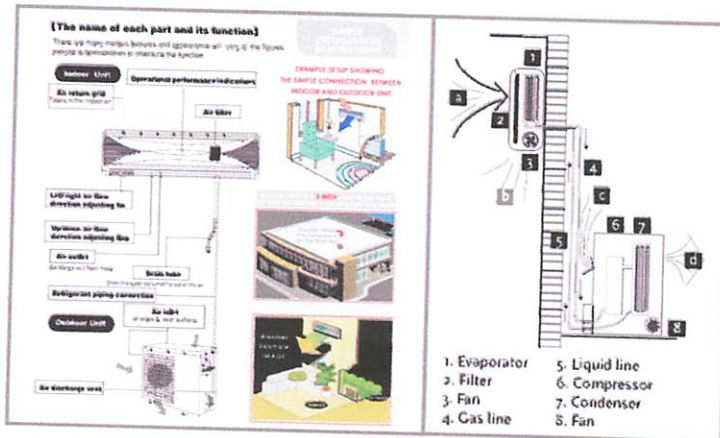
Sedangkan untuk dinding pada ruangan ini, tidak membutuhkan pemantulan bunyi tapi penyerapan bunyi agar suara tidak keluar ke luar ruangan. Bahan-bahan yang digunakan untuk penyerapan bunyi adalah kayu, gipsium dan lain-lain.

- **Sistem Pengkondisian Udara**

Jenis penyegaran udara yang digunakan pada objek gedung ini yaitu mesin penyegaran udara split (Single Pachage Unit). AC split terdiri dari dua bagian: unit outdoor dan indoor unit. Unit outdoor, dipasang di luar ruangan, rumah-rumah komponen seperti kondensor, kompresor dan katup ekspansi. Unit indoor terdiri dari evaporator atau koil pendingin dan kipas pendingin. Untuk unit ini tidak perlu membuat slot di dinding ruangan. Selanjutnya, split juga memiliki penampilan estetika dan menambah keindahan ruangan. AC split dapat digunakan untuk mendinginkan satu atau dua ruang.

Mesin perkondisian udara yang digunakan pada objek gedung ini ditempatkan untuk ruang – ruang yang tertutup misalkan seperti ruang pimpinan, ruang pertemuan, ruang rapat, ruang kerja, dll.

AC split adalah sistem perkondisian udara manual karena pengoperasiannya dapat diatur sendiri sesuai dengan yang dikehendaki. Hal tersebut cocok dengan aktifitas pada Kantor kepolisian resor kota.



Gambar 6.33
Sistem Perkondisian Udara dengan Single Pachage Unit





Gambar 6.34
AC Single Pachage Unit

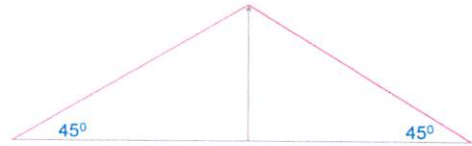
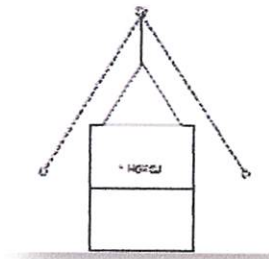
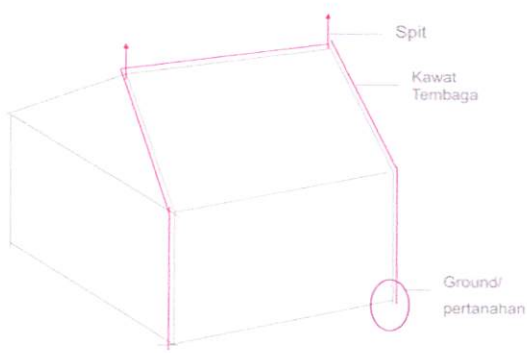
- **Sistem Penangkal Petir**

Karena bangunan yang dirancang adalah bangunan yang memiliki >1 lantai, maka diperlukan penangkal petir. Bangunan yang bertingkat sangat rawan terkena sambaran petir. Penangkal petir diberikan untuk mencegah kerusakan yang terjadi pada bangunan. Kerusakan yang ditimbulkan dapat membahayakan peralatan serta manusia yang berada di dalam gedung tersebut.

Sistem penangkal petir yang digunakan pada perancangan objek gedung ini adalah system penangkal petir *Fraklin*. Sistem penangkal petir Franklin terdiri dari komponen – komponen :

1. Alat penerima logam tembaga (logam bulat panjang runcing) / *spit*
2. Kawat penyalur tembaga
3. Pentanahan / ground sampai dengan bagian tanah basah





Gambar 6.35
Sistem Penangkal Petir Franklin

Elektroda batang pada metode Franklin mempunyai daerah perlindungan yang berbentuk kerucut dengan elektroda batang sebagai porosnya. Setengah dari sudut puncak disebut sebagai sudut perlindungan. Biasanya diambil sudut 56° , khusus untuk gedung yang mudah terbakar biasanya sudut perlindungan diambil dari 45° .



E. Analisa Struktur.

Pertimbangan struktur bangunan antara lain :

- Kondisi tanah
- Peruntukan bangunan
- Estetika dan ekonomis
- Kekuatan dan kemampuan serta kecepatan pelaksanaan pemasangan

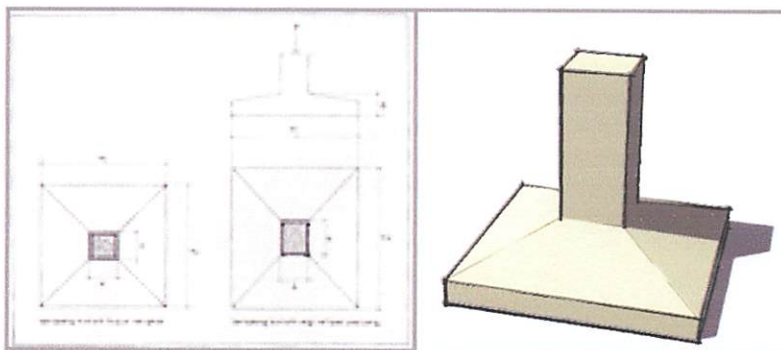
Struktur yang dipilih harus dapat memenuhi syarat :

- Kuat terhadap gaya-gaya yang bekerja
- Dapat menahan beban mati maupun benda hidup (bergerak)
- Stabil

❖ Dengan pertimbangan di atas, maka sistem struktur yang digunakan adalah:

- **Struktur Pondasi (Sub Structure)**

Sub structure pada obyek yang dirancang menggunakan pondasi setempat (*footplat*). Pondasi setempat (*footplat*) adalah pondasi beton bertulang yang dibuat setempat hanya dibawah kolom struktur. Pondasi setempat dipakai pada tanah keras dangkal dan beban bangunan tidak terlalu berat. Sistem pondasi setempat dianggap sesuai dengan obyek karena jumlah lantai yang dirancang hanya berjumlah 1-3 lantai.



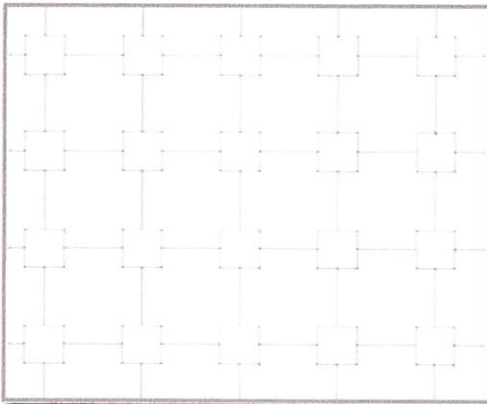
Gambar 6.36
Pondasi foot plat



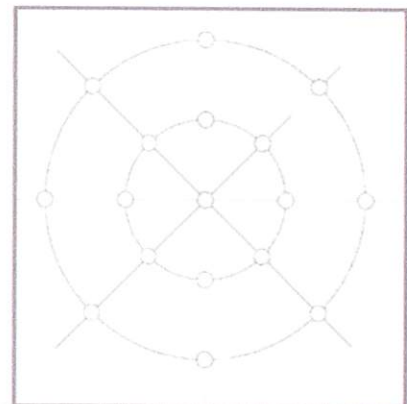
- **Struktur Dinding (Main Structure)**

Fungsi dinding sebagai pembatas ruang baik secara visual maupun akustik, dan menahan pengaruh dari luar ruangan (penghalau radiasi dan sinar matahari, pelindung dari angin dan hujan, dan melindungi dari serangan binatang dari luar). Sistem Main Structure yang digunakan adalah sistem rangka yang terdiri dari rangkaian balok dan kolom.

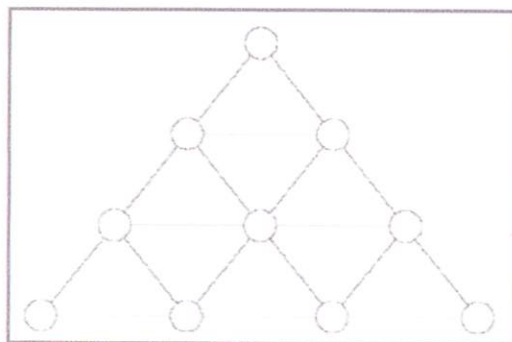
Modul adalah ukuran dasar yang digunakan untuk menentukan dimensi bangunan dan bagian-bagiannya untuk memudahkan perancangan dan fleksibilitas ruang menjadi lebih tinggi. Modul yang digunakan disesuaikan dengan bentuk bangunan . Dibawah ini adalah beberapa pola penataan modul antara lain:



Gambar 6.37
Modul Dengan Pola Grid

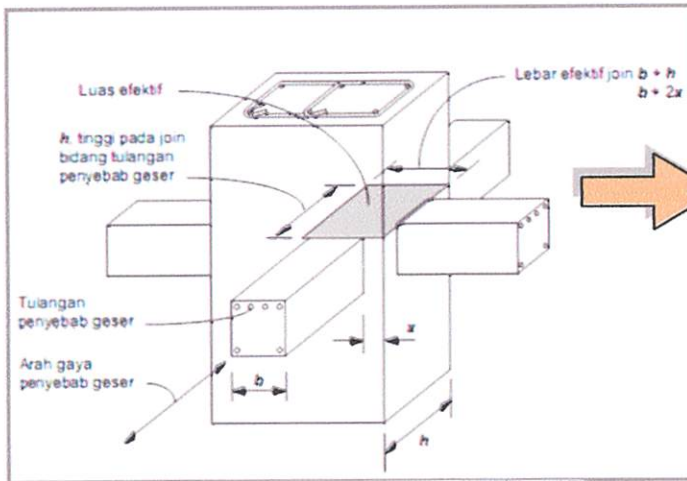


Gambar 6.38
Modul Dengan Pola Melingkar



Gambar 6.39
Modul Dengan Pola Segi Tiga





Gambar di samping menjelaskan hubungan antara balok dan kolom pada struktur rangka bangunan.

Gambar 6.40
Hubungan Antara Balok Dan Kolom

- **Struktur Atap (Upper Structure)**

Fungsi atap sebagai pelindung panas dan kesilauan cahaya matahari secara langsung memiliki peran penting untuk menjaga temperatur terhadap interior ruangan dan sebagai penghalau angin atau tempat sirkulasi udara. Pada material atap disesuaikan dengan bentuk ruang maupun fungsi di dalamnya serta sebagai struktur penopang atap ditentukan oleh beban (material atap, pengaruh angin, dan bentang). Sistem upper struktur yang digunakan adalah kuda-kuda baja karena bentangan yang lebar pada ruang-ruang yang ada pada obyek.



BAB VII KONSEP

A. Konsep Bentuk.

❖ Skema Analisa Bentuk

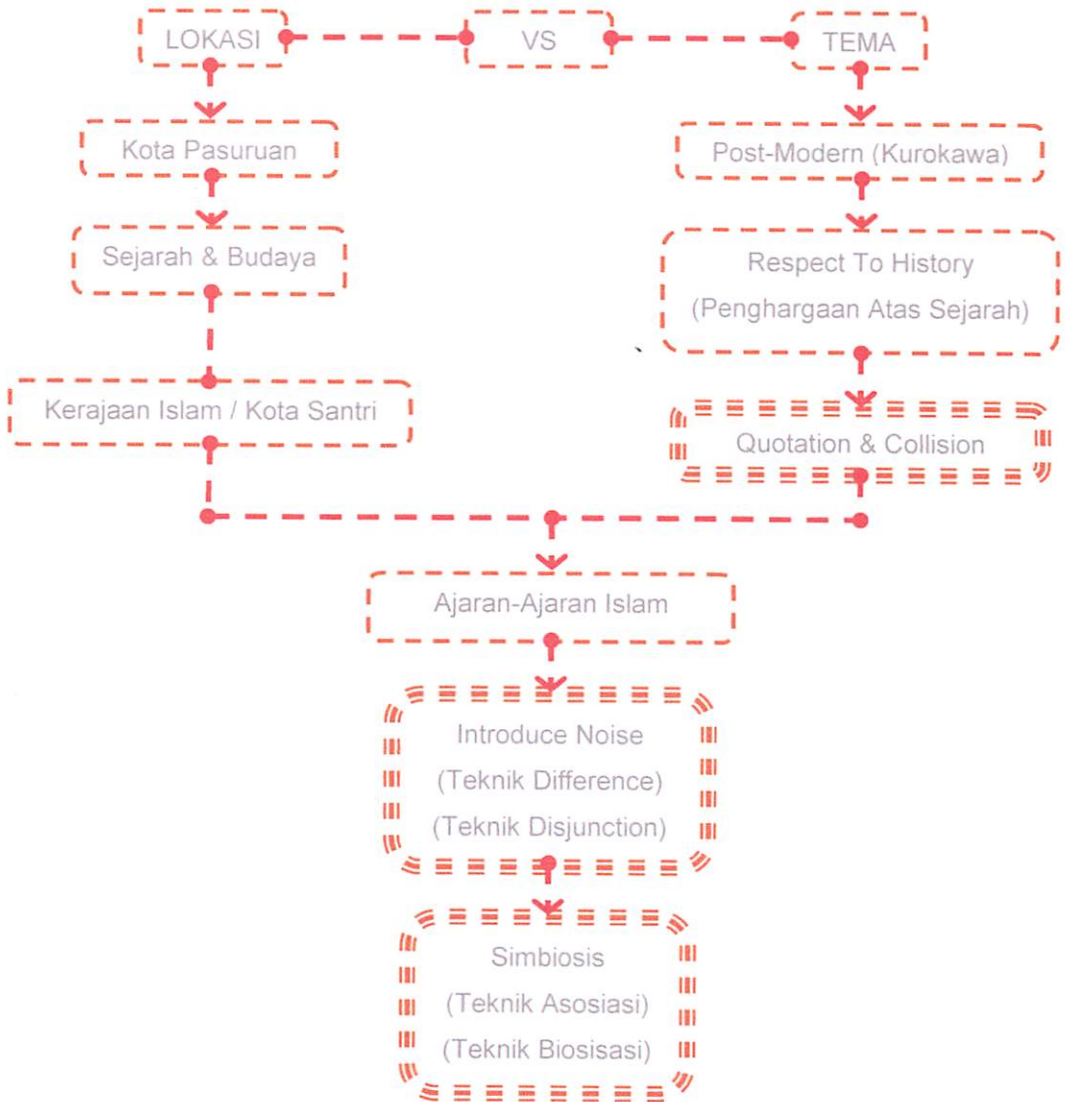


Diagram 7.1
Skema Analisa Bentuk Lokasi VS Tema

Keterangan:

- Quotation ; Pengambilan elemen-elemen dari berbagai budaya.
- Collision ; Percampuran antar budaya yang berbeda.
- Introduce Noise ; Memanipulasi atau memodifikasi elemen-elemen budaya tersebut.
- Simbiosis ; Percampuran dua unsur budaya yang berbeda dalam satu entitas, namun saling menguntungkan antara yang satu dengan lainnya.



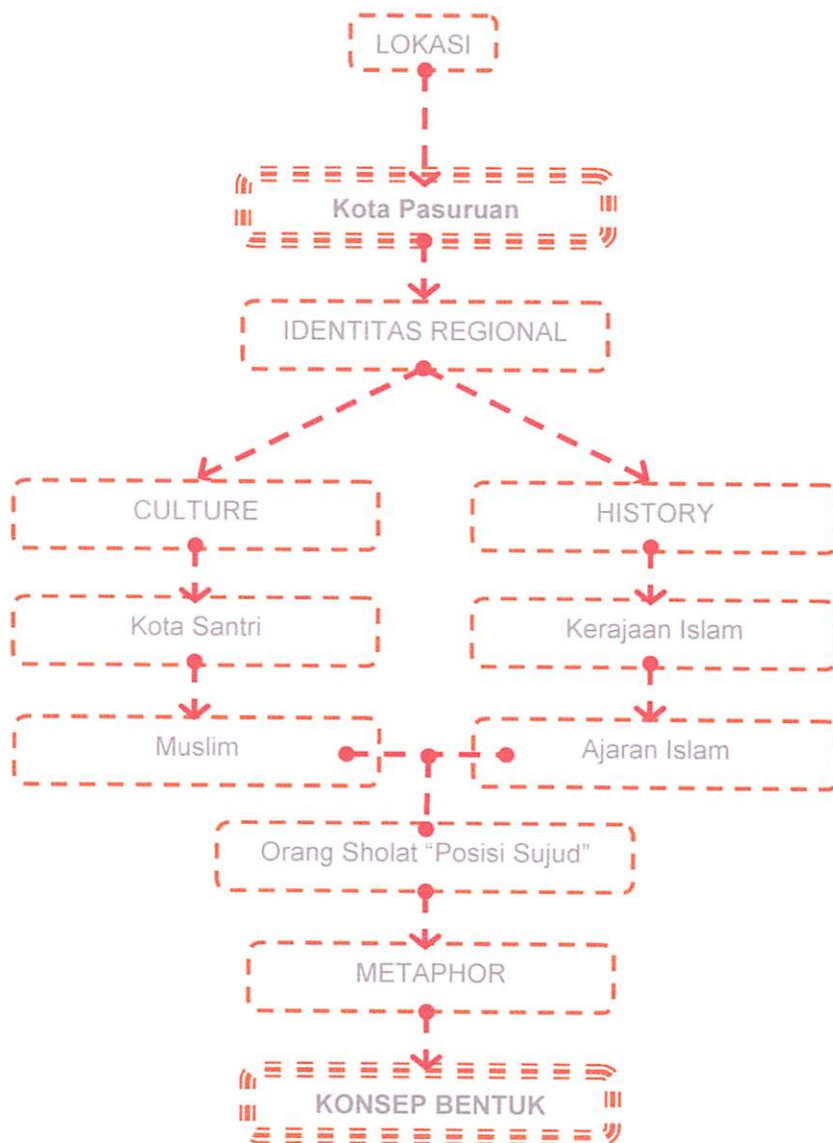


Diagram 7.2
Skema Analisa Bentuk "Metaphor"

Keterangan:

- Pluralitas : Keberanekaragaman.
- Quotation ; Pengambilan elemen-elemen dari berbagai budaya.
- Collision ; Percampuran antar budaya yang berbeda.
- Simbiosis man and nature : Simbiosis antara manusia dan alamnya



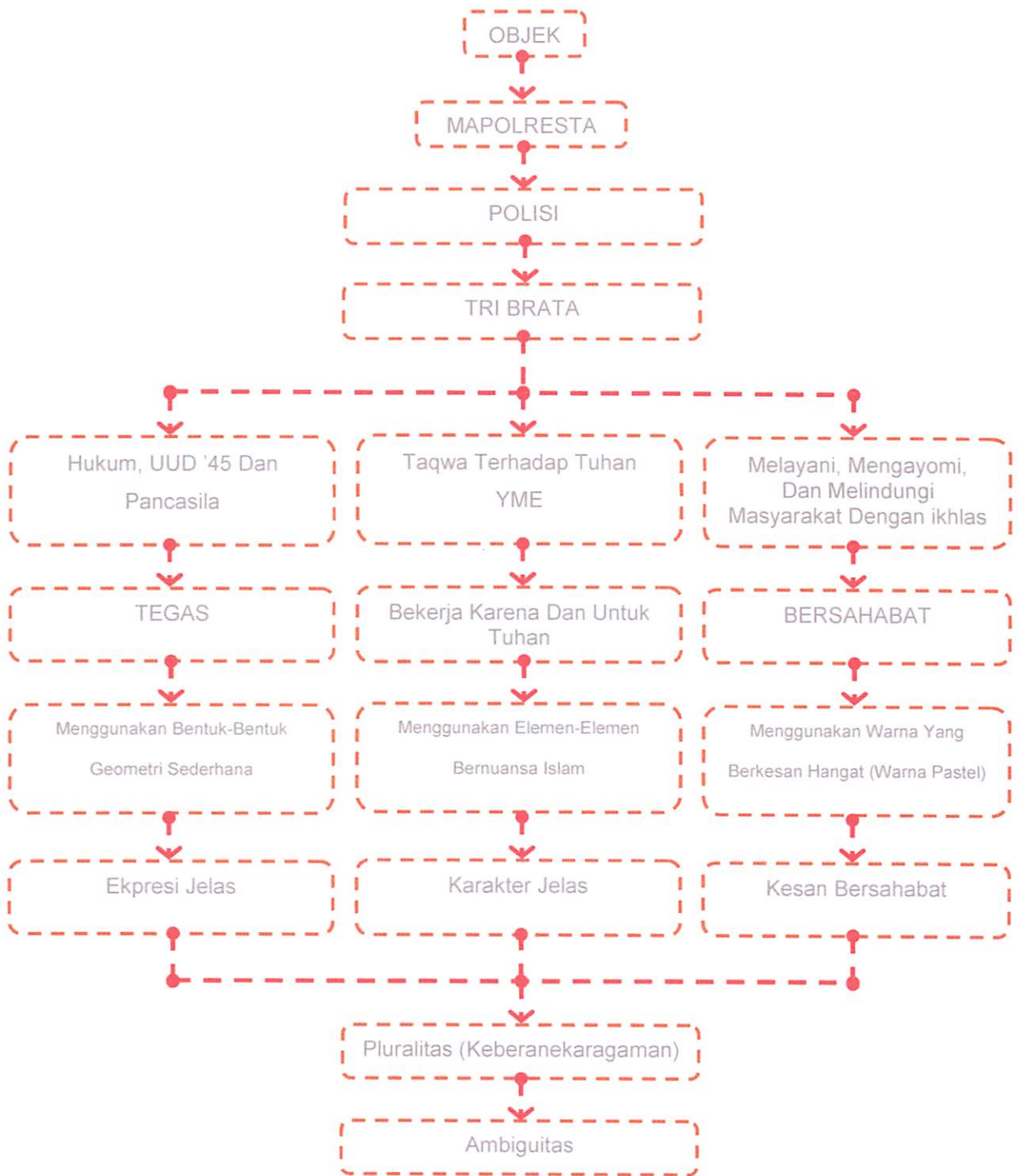


Diagram 7.3
Skema Analisa Bentuk "Ambiguitas"

Keterangan:

- Pluralitas : Keberanekaragaman.
- Ambiguitas : Percampuran antara yang memiliki aturan-aturan dan yang tidak teratur.
 "Tema utama sains dan filsafah".



B. Konsep ruang.

Pada konsep ruang untuk kantor kepolisian resor kota ini Mencuplik dari filosofi polisi yaitu *TRI BRATA*: (Hukum, UUD '45 Dan Pancasila), (Taqwa Terhadap Tuhan YME), dan (Melayani, Mengayomi, Dan Melindungi Masyarakat Dengan ikhlas). Terkait dengan hal tersebut, arsitektur postmodern “Kisho Kurokawa” memiliki konsep pluralitas yaitu keberanekaragaman sehingga karakter, suasana dan spasial ruang mempunyai ekspresi jelas, karakter jelas, dan terkesan bersahabat pada ruang.

C. Konsep Tapak.

- Konsep perletakan entrance pada tapak menggunakan main entrance (pintu masuk utama ke tapak) dan sub entrance (pintu masuk servis)
- Pada main entrance terdiri dari dua jalur yaitu pejalan kaki dan kendaraan.
- Aksesibilitas pejalan kaki pada tapak menggunakan sistem sirkulasi langsung atau linier.
- Aksesibilitas kendaraan pada tapak menggunakan sistem sirkulasi memutar.
- Konsep perletakan massa pada tapak mengadopsi budaya atau identitas regional kota Pasuruan.
- Konsep penempatan dan pemilihan vegetasi disesuaikan dengan fungsi vegetasi (pemfilter sinar matahari langsung, diletakkan disisi bagian barat tapak), (pemfilter bising, diletakkan pada segala bidang tapak, khususnya utara dan selatan), (pemfilter angin, diletakkan dibidang tapak bagian utara-selatan), (pengontrol pandangan dan estetika, diletakkan pada sisi-sisi jalur kendaraan dan jalur pejalan kaki didalam tapak), dan (pembatas, diletakkan pada tiap bidang tapak dan masing-masing zona bangunan dalam tapak).
- Konsep vokal point (point of interest) atau titik tangkap pada bangunan menggunakan warna dan tekstur yang tidak dominan dan olahan-olahan bentuk yang unik/menarik, serta titik tangkap pada tapak menggunakan semiotic topi polisi.



D. Konsep Utilitas.

❖ Konsep utilitas tapak

- Pada jalur sirkulasi dibuatkan saluran air tertutup pada kiri dan kanan jalan.
- Saluran air hujan dan air kotor dibuat terbuka dan tertutup. Untuk pembuangan akhir air dari kawasan mengikuti riol kota yang sudah ada di luar tapak.
- Penyediaan air bersih dari PDAM yang ditampung dalam tandon bawah sekitar tapak kemudian dipompa kompresor didistribusikan hanya ke ruang yang memerlukan air bersih.

❖ Konsep utilitas Bangunan

- Air bersih yang digunakan di dalam kantor kepolisian resor kota bersumber dari PDAM yang ditampung di sumuran. Dari sumuran kemudian di pompa ketandon atas kemudian didistribusikan kembali ke ruangan fasilitas utama, penunjang, dan servis.
- Pembuangan air kotor, kotoran dari toilet diuraikan menjadi *black water* sedangkan dari urinoir, wastafel dan floor drain diuraikan menjadi *grey water*. Untuk *black water* sendiri disalurkan menuju ke septictank dan jarak maksimum pipa ± 15 m. Dari septictank *black water* langsung di buang menuju sumur resapan atau unit pengolahan limbah.
- Listrik yang didapat bersumber dari PLN dengan back-up genset. Sumber daya tegangan menengah yang diambil dari genset pada gardu yang terpisah jauh dari objek bangunan diubah dengan menggunakan trafo menjadi tegangan rendah 220 Volt. Setelah itu listrik tadi disalurkan menuju panel utama dan kemudian disalurkan lagi ke kontrol-panel yang mengatur pengeluaran dan tegangan listrik pada satu cabang bangunan, dan kemudian didistribusikan ke semua unit yang membutuhkan tenaga listrik.



- Untuk pembuangan sampah digunakan sistem carry out. Dimana pada setiap harinya ada petugas kebersihan (karyawan) yang akan membersihkan setiap bangunan kemudian sampahnya dikumpulkan di tempat pembuangan sementara dalam bangunan kemudian diangkut menuju TPA kota. Untuk penyaluran sampah dalam bangunan secara vertical digunakan shaft.
- Sistem akustik yang dipakai adalah sistem langit langit pemantul yang diletakkan dengan tepat, dengan pemantulan bunyi yang makin banyak ke tempat duduk yang jauh, secara efektif menyumbang kekerasan secara yang cukup. Sedangkan untuk dinding pada ruangan ini, tidak membutuhkan pemantulan bunyi tapi penyerapan bunyi agar suara tidak keluar ke luar ruangan. Bahan-bahan yang digunakan untuk penyerapan bunyi adalah kayu, gipsum dan lain-lain.
- Mesin perkondisian udara yang digunakan pada objek gedung ini ditempatkan untuk ruang – ruang yang tertutup misalkan seperti ruang pimpinan, ruang pertemuan, ruang rapat, ruang kerja, dll. AC split adalah sistem perkondisian udara manual karena pengoperasiannya dapat diatur sendiri sesuai dengan yang dikehendaki. Hal tersebut cocok dengan aktifitas pada Kantor kepolisian resor kota.
- Sistem penangkal petir yang digunakan pada perancangan objek gedung ini adalah system penangkal petir *Fraklin*.



E. Konsep Struktur.

- Pertimbangan struktur bangunan antara lain :
 - Kondisi tanah
 - Peruntukan bangunan
 - Estetika dan ekonomis
 - Kekuatan dan kemampuan serta kecepatan pelaksanaan pemasangan
- Struktur yang dipilih harus dapat memenuhi syarat :
 - Kuat terhadap gaya-gaya yang bekerja
 - Dapat menahan beban mati maupun benda hidup (bergerak)
 - Stabil

- **Struktur Pondasi (Sub Structure)**

Sub structure pada obyek yang dirancang menggunakan pondasi setempat (*footplat*) dan tiang pancang. Pondasi setempat (*footplat*) adalah pondasi beton bertulang yang dibuat setempat hanya dibawah kolom struktur. Pondasi setempat dipakai pada tanah keras dangkal dan beban bangunan tidak terlalu berat.

- **Struktur Dinding (Main Structure)**

Fungsi dinding sebagai pembatas ruang baik secara visual maupun akustik, dan menahan pengaruh dari luar ruangan (penghalau radiasi dan sinar matahari, pelindung dari angin dan hujan, dan melindungi dari serangan binatang dari luar). Sistem Main Structure yang digunakan adalah sistem rangka yang terdiri dari rangkaian balok dan kolom.

Modul adalah ukuran dasar yang digunakan untuk menentukan dimensi bangunan dan bagian-bagiannya untuk memudahkan perancangan dan fleksibilitas ruang menjadi lebih tinggi. Dibawah ini adalah beberapa pola penataan modul antara lain:

- Modul dengan pola grid.
- Modul dengan pola melingkar.
- Modul dengan pola segitiga.

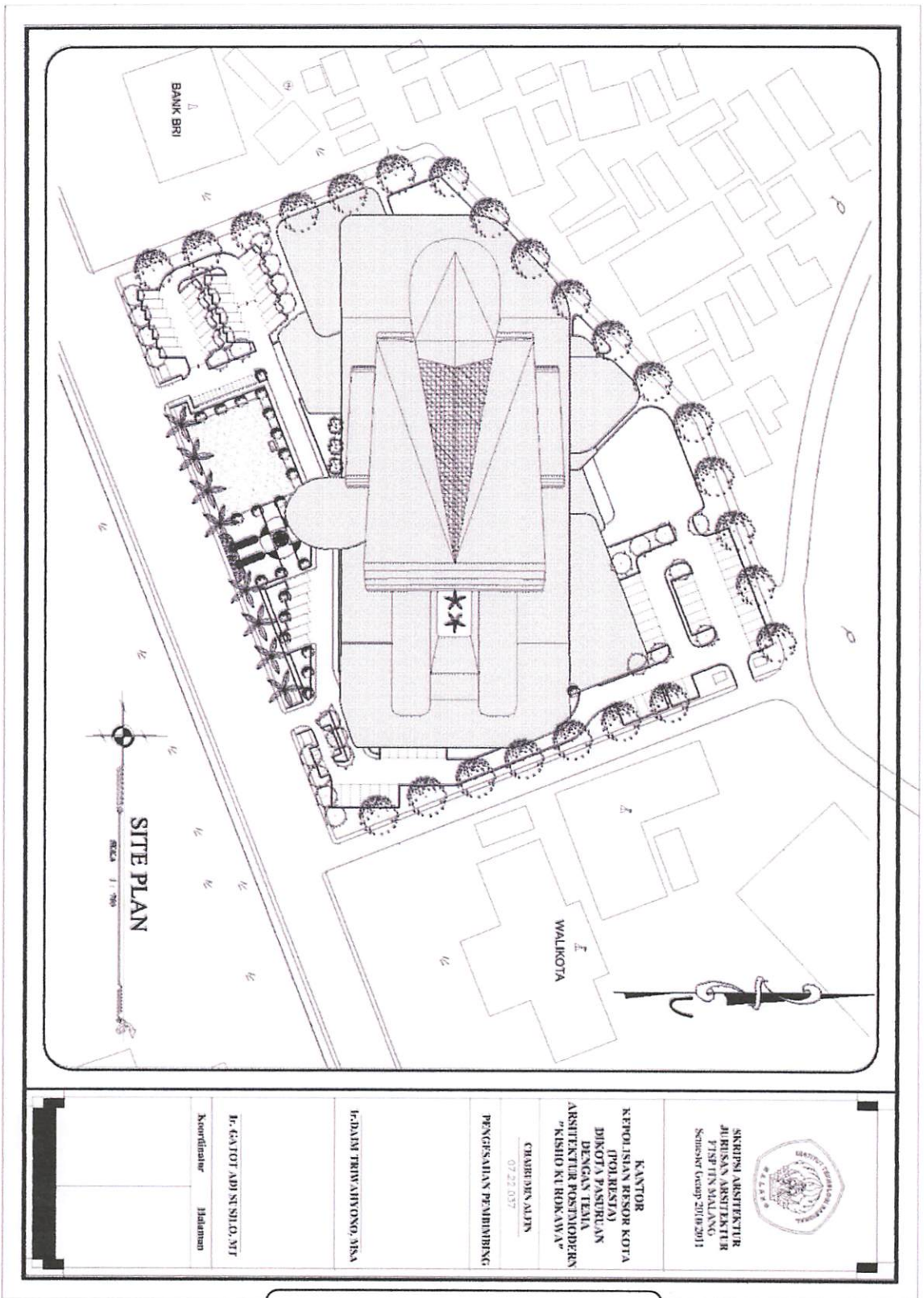


- **Struktur Atap (Upper Structure)**

Fungsi atap sebagai pelindung panas dan kesilauan cahaya matahari secara langsung memiliki peran penting untuk menjaga temperatur terhadap interior ruangan dan sebagai penghalau angin atau tempat sirkulasi udara. Pada material atap disesuaikan dengan bentuk ruang maupun fungsi di dalamnya serta sebagai struktur penopang atap ditentukan oleh beban (material atap, pengaruh angin, dan bentang). Sistem upper struktur yang digunakan adalah kuda-kuda baja karena bentangan yang lebar pada ruang-ruang yang ada pada obyek.

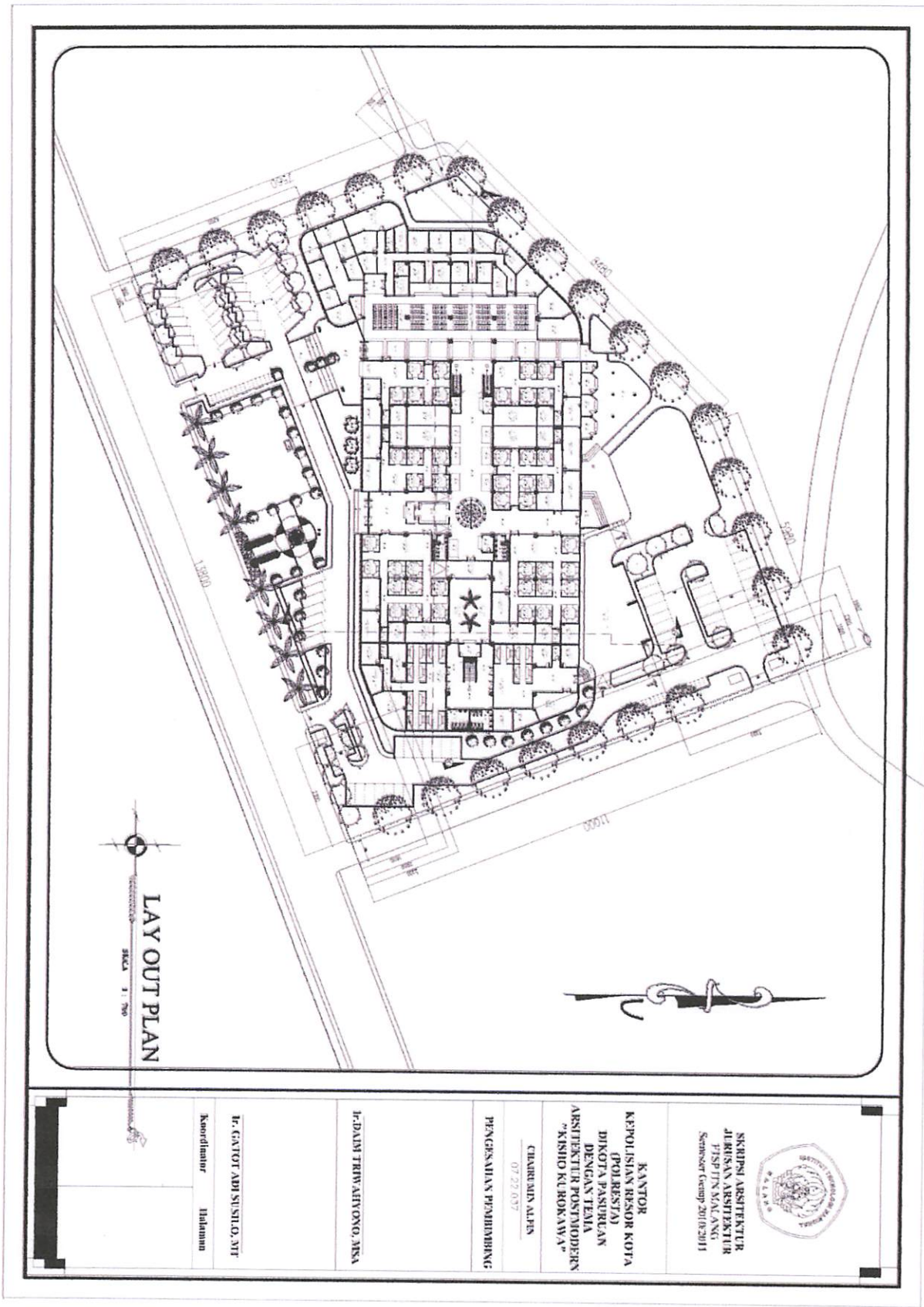


BAB VIII GAMBAR RANCANGAN



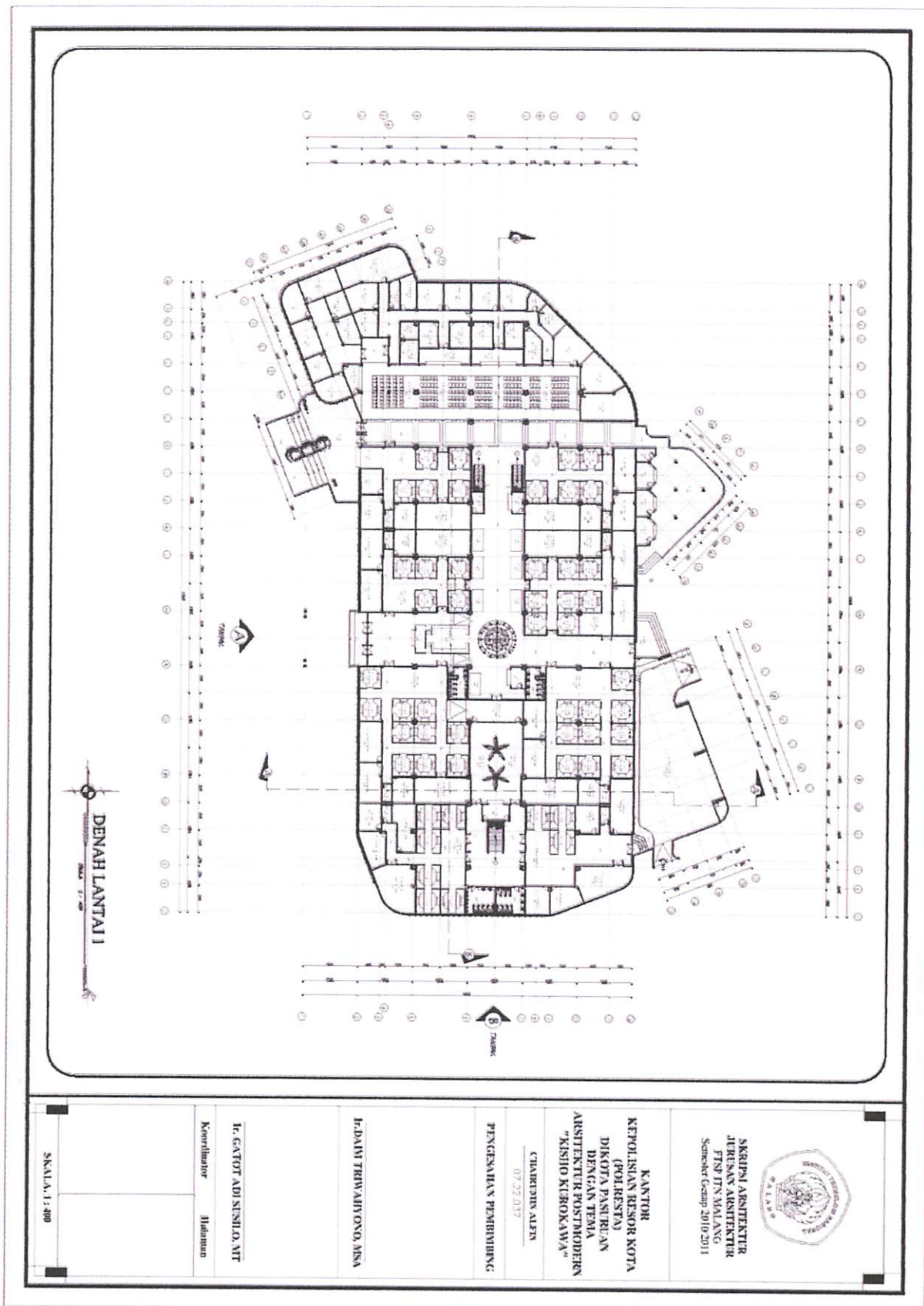
**Gambar 8.1
Site Plan**





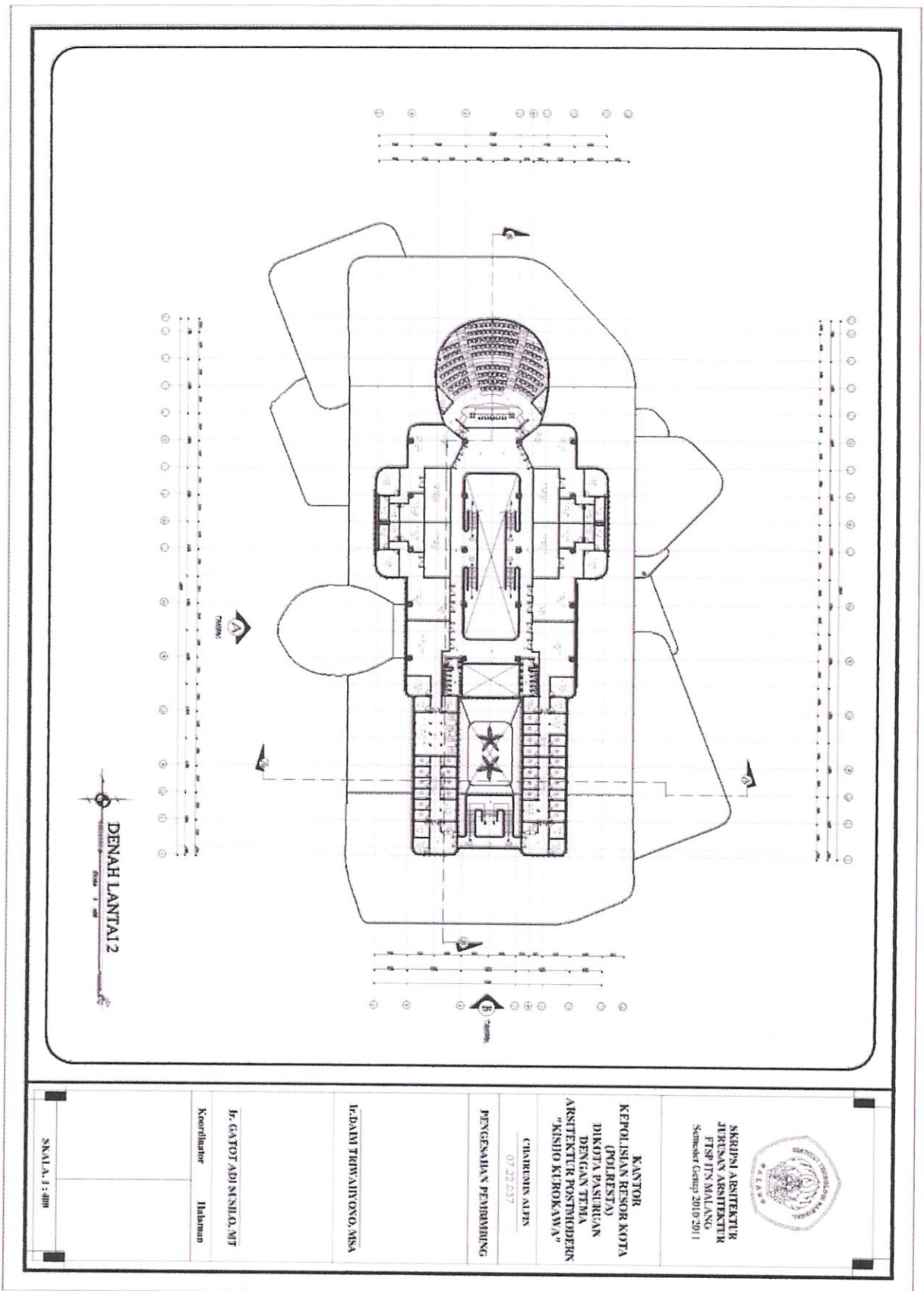
Gambar 8.2
Lay Out Plan



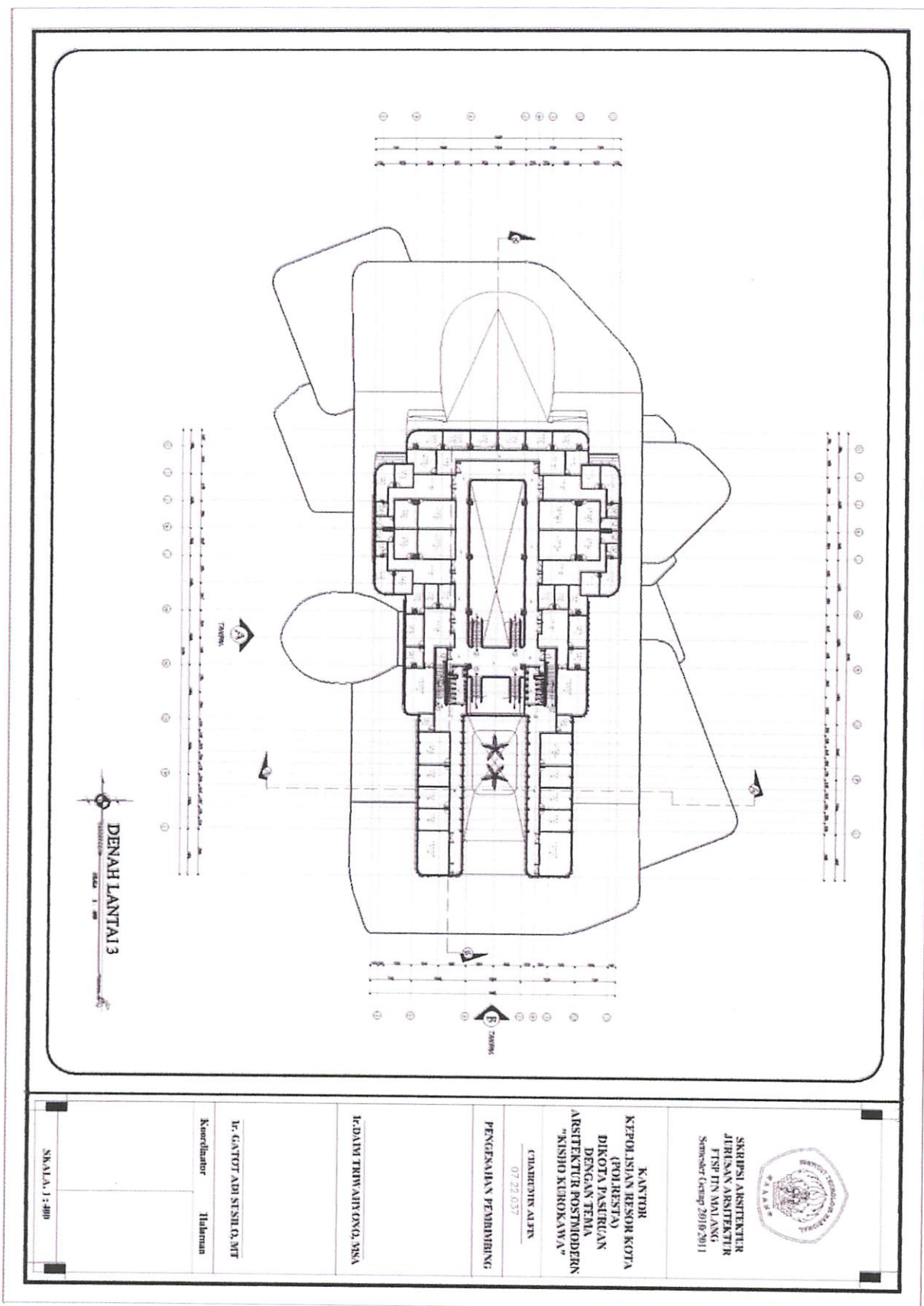


Gambar 8.3
Denah Lantai 1

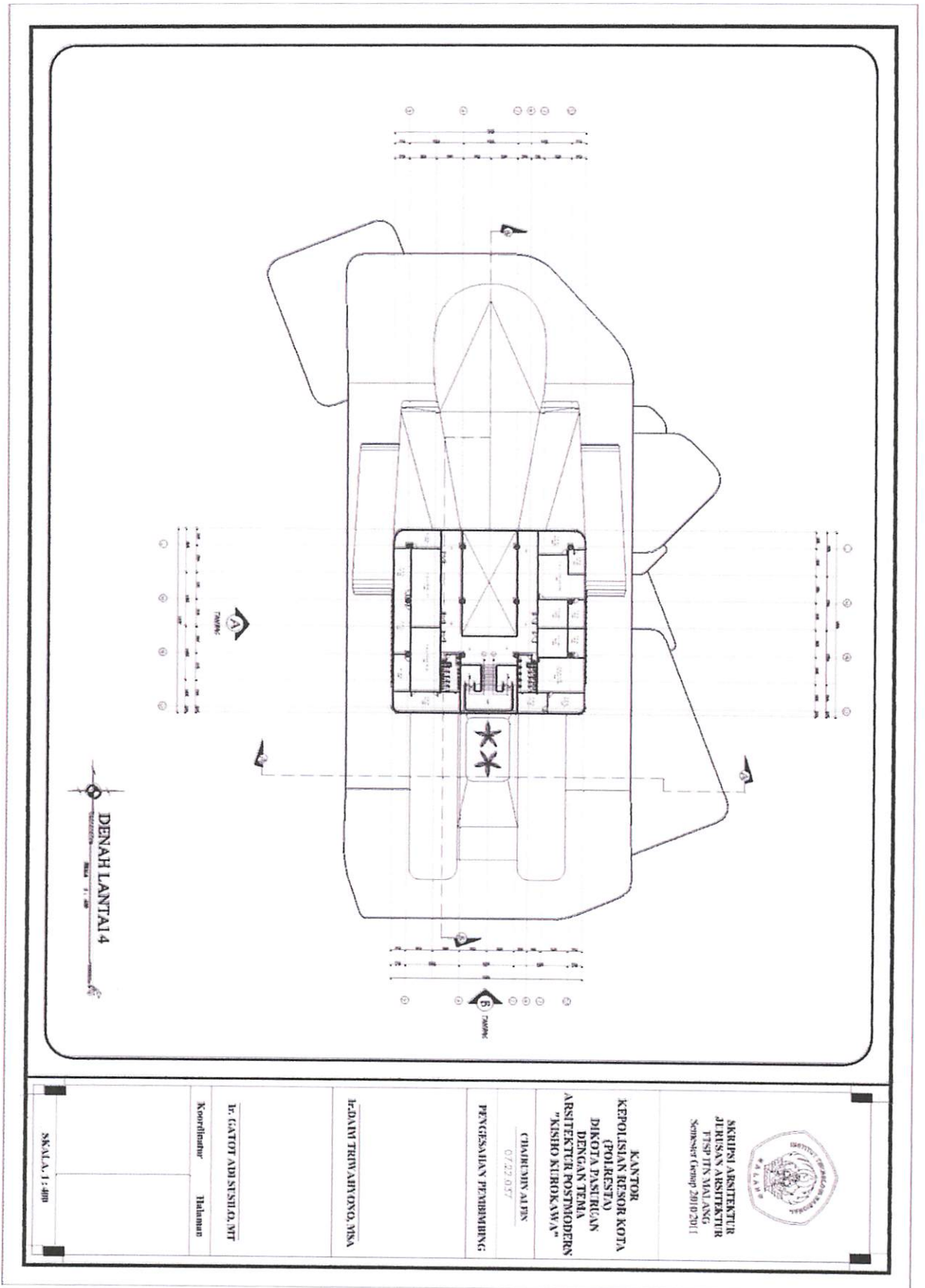




Gambar 8.4
Denah Lantai 2

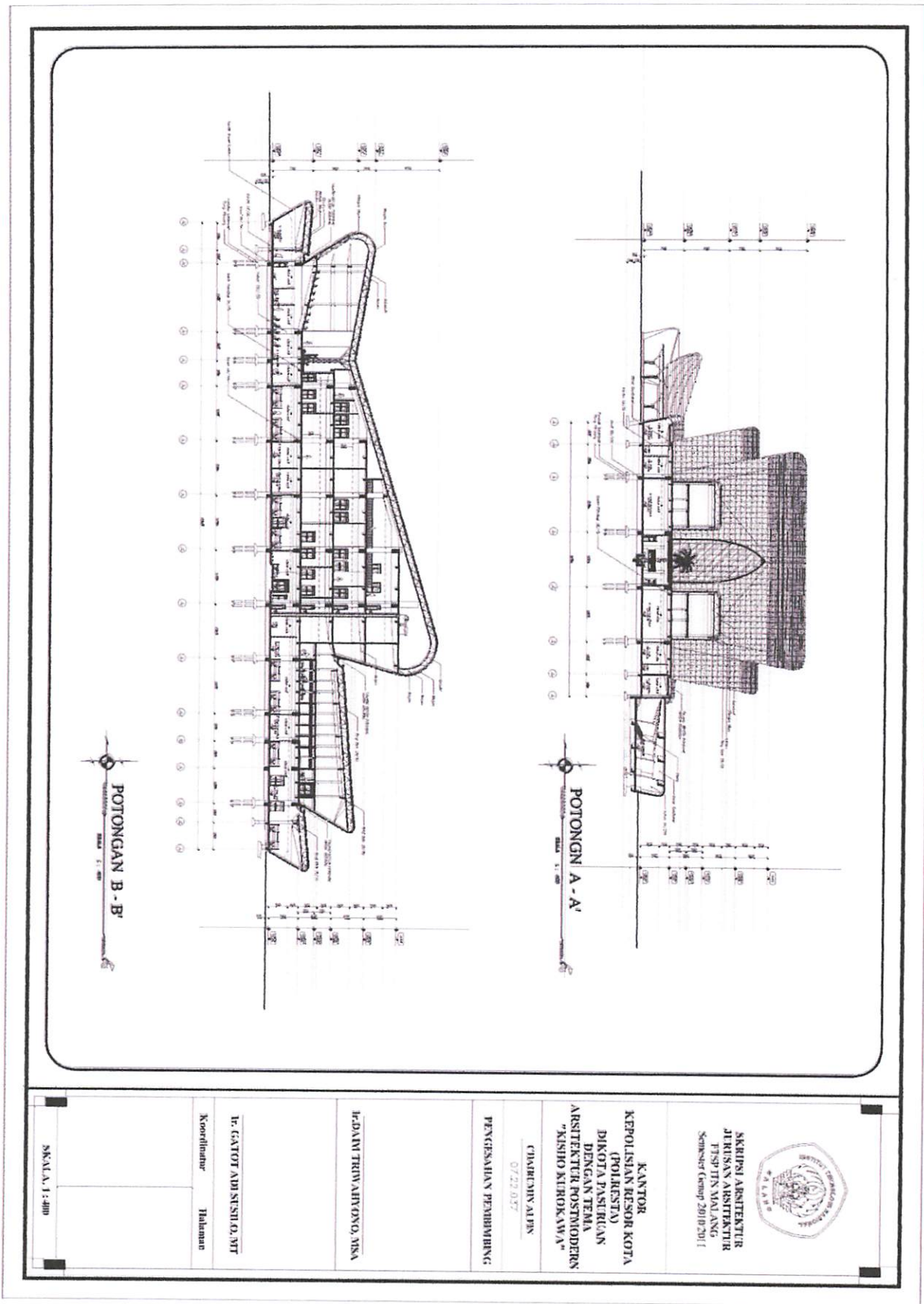


Gambar 8.5
Denah Lantai 3



Gambar 8.6
Denah Lantai 4





SKRIPSI ARSITEKTER
JURISAN ARSITEKTER
ITSPTN MALANG
Semester Genap 2010/2011

KANTOR
KEPOLISIAN RESOR KOTA
(POLRESTA)
DIKOTA PASURUAN
DENGAN TEMA
ARSITEKTER POSTMODERN
"KISHO KUROKAWA"

CHAIRUMIN ALFIN
0722037

PENGESAHAN PEMBIMBING

I-DANI TRIMAHAYONO, MSA

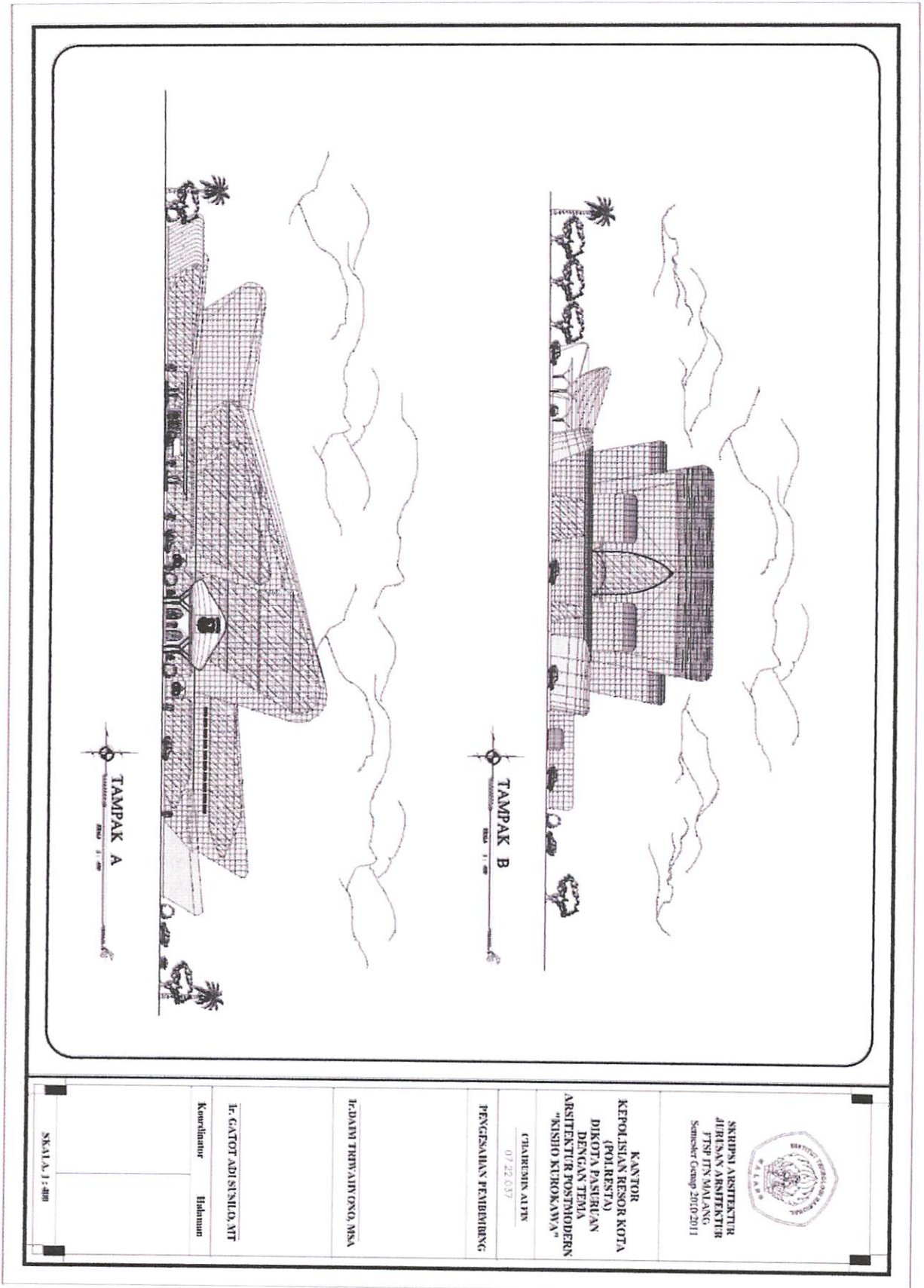
I. GATOT ARI SENSU, MT

Koordinator: Mahanau

SKALA: 1:400

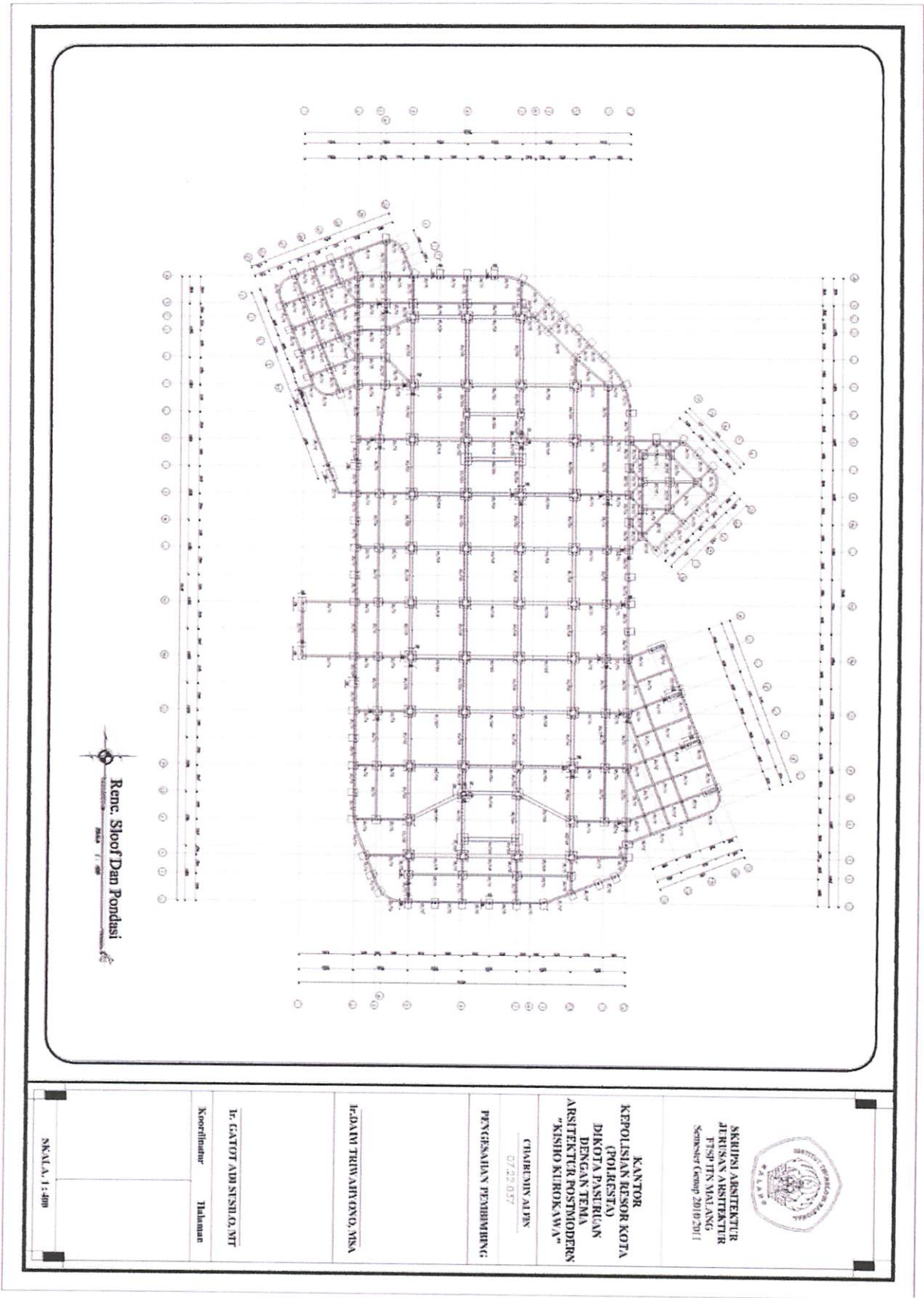
Gambar 8.7
Potongan Bangunan





Gambar 8.8
Tampak Bangunan





Renc. Sloof Dan Pondasi
 Skala 1 : 400

SKRIPSI ARSITEKTUR
 JURISAN ARSITEKTUR
 FSP ITS MALANG
 Semester Kemp 2010/2011



KANTOR
 KEPOLISIAN RESOR KOTA
 (POLRESKA)
 DIKOTA PASURUAN
 DENGAN TEMA
 ARSITEKTUR POSTMODERN
 "KISHO KUROKAWA"

CHAIRUMIN ALFIN
 07220157

PENGESAHAN PEMBIMBING

I:DAWI TRIMAHAYONO, MSA

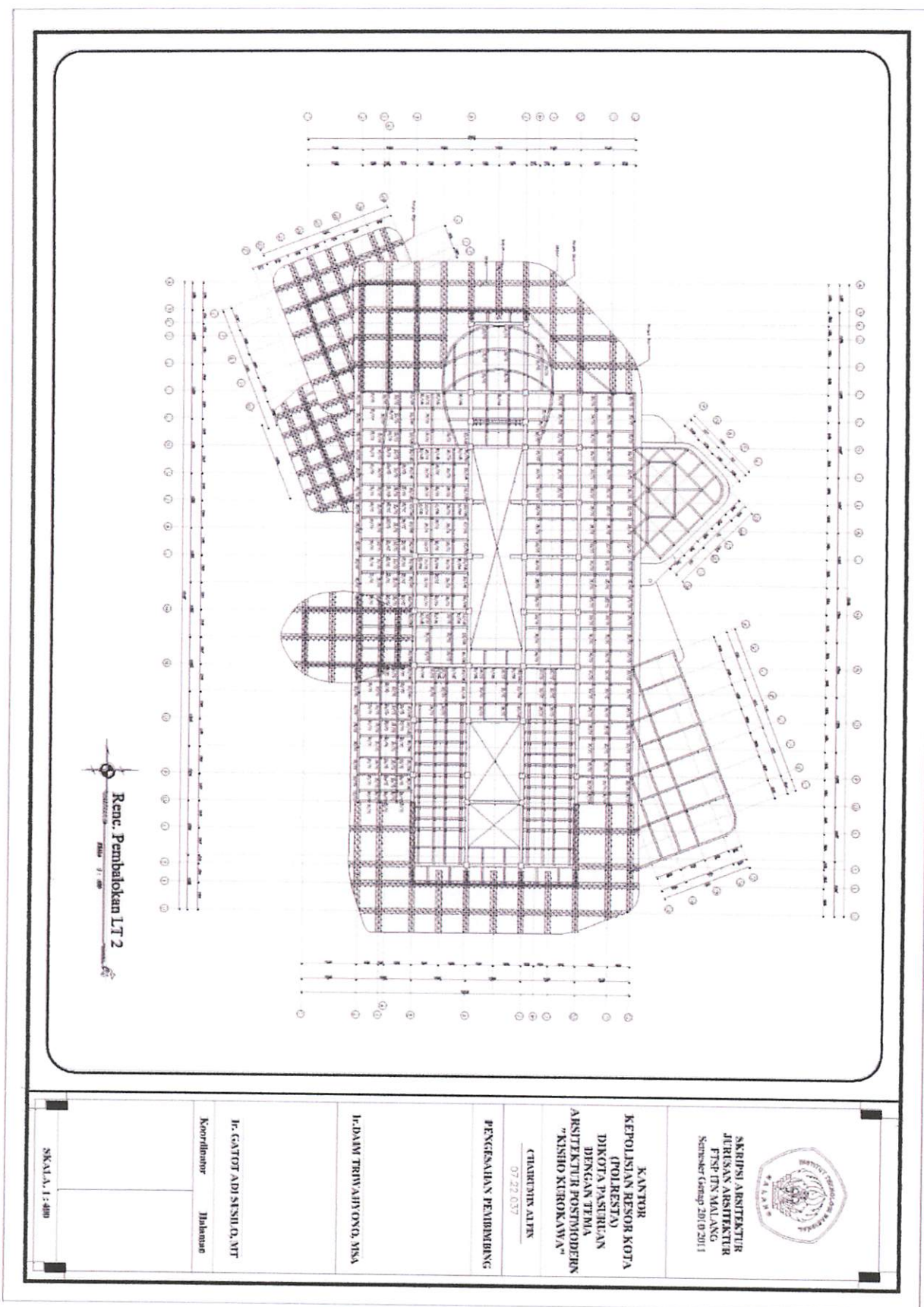
I: GATOT ARI NISRU, MT

Koordinator : Halaman

SKALA 1 : 400

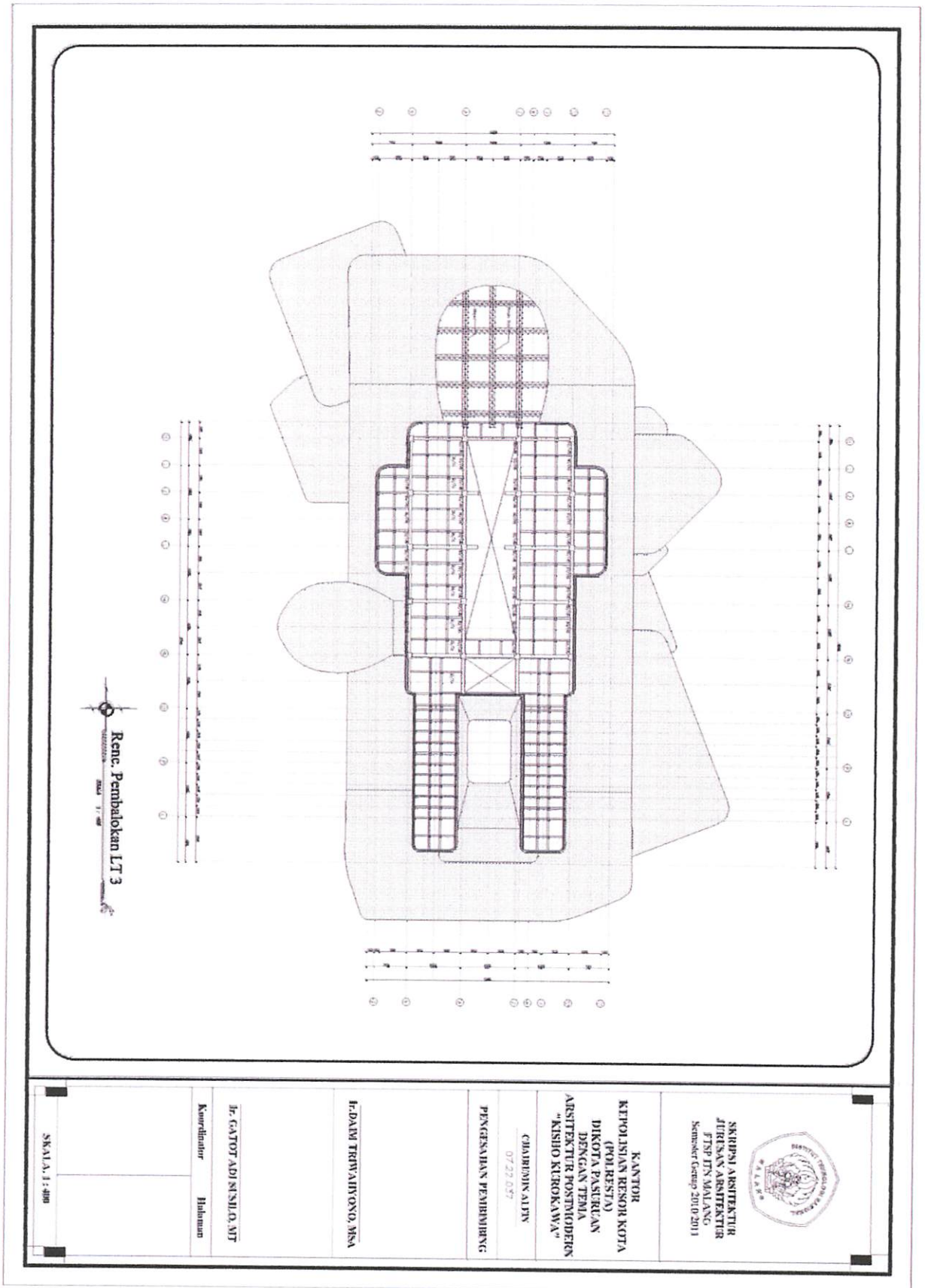
Gambar 8.9
 Rencana Sloof Dan Pondasi





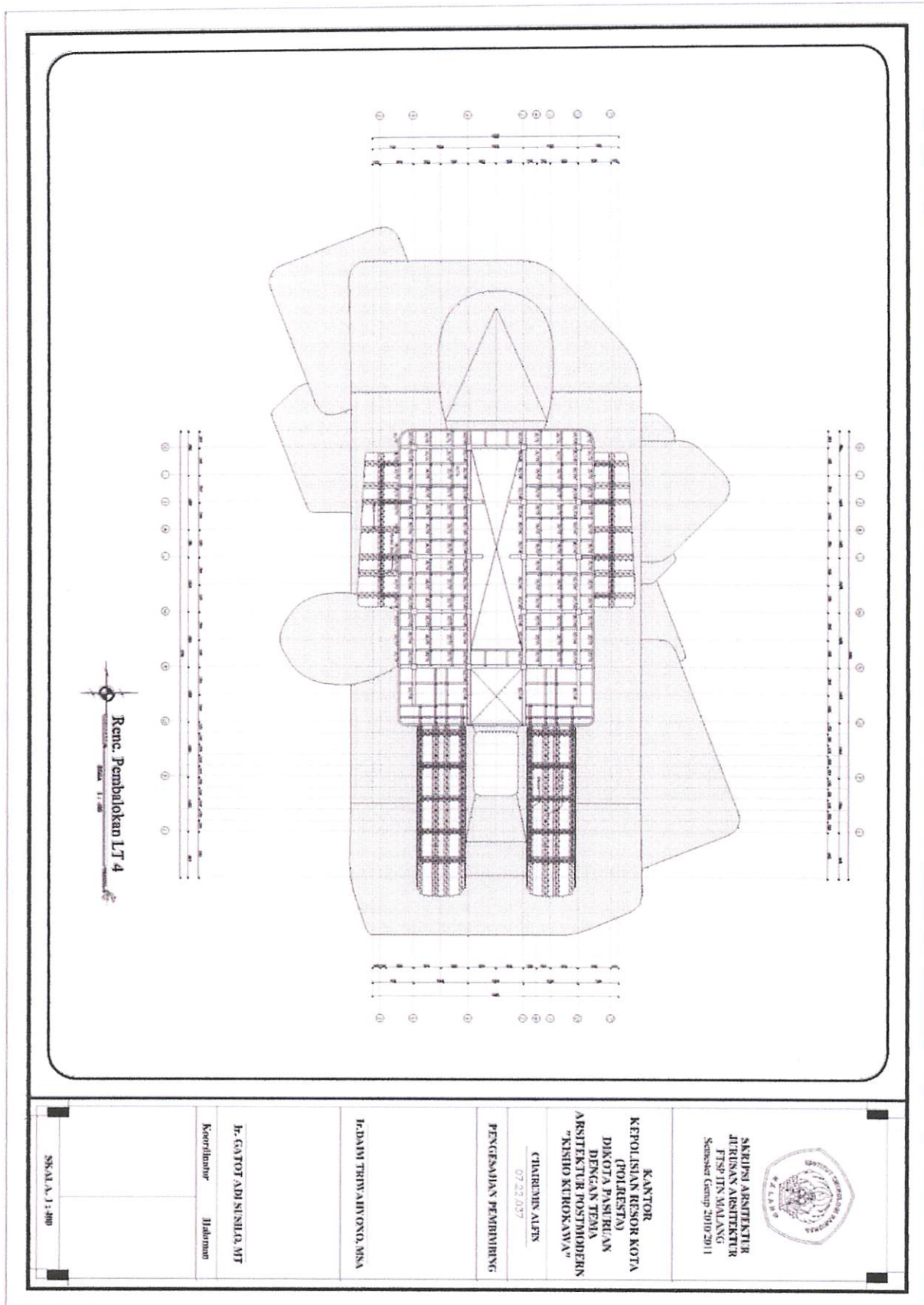
Gambar 8.10
Rencana Pembalokan Lantai 2





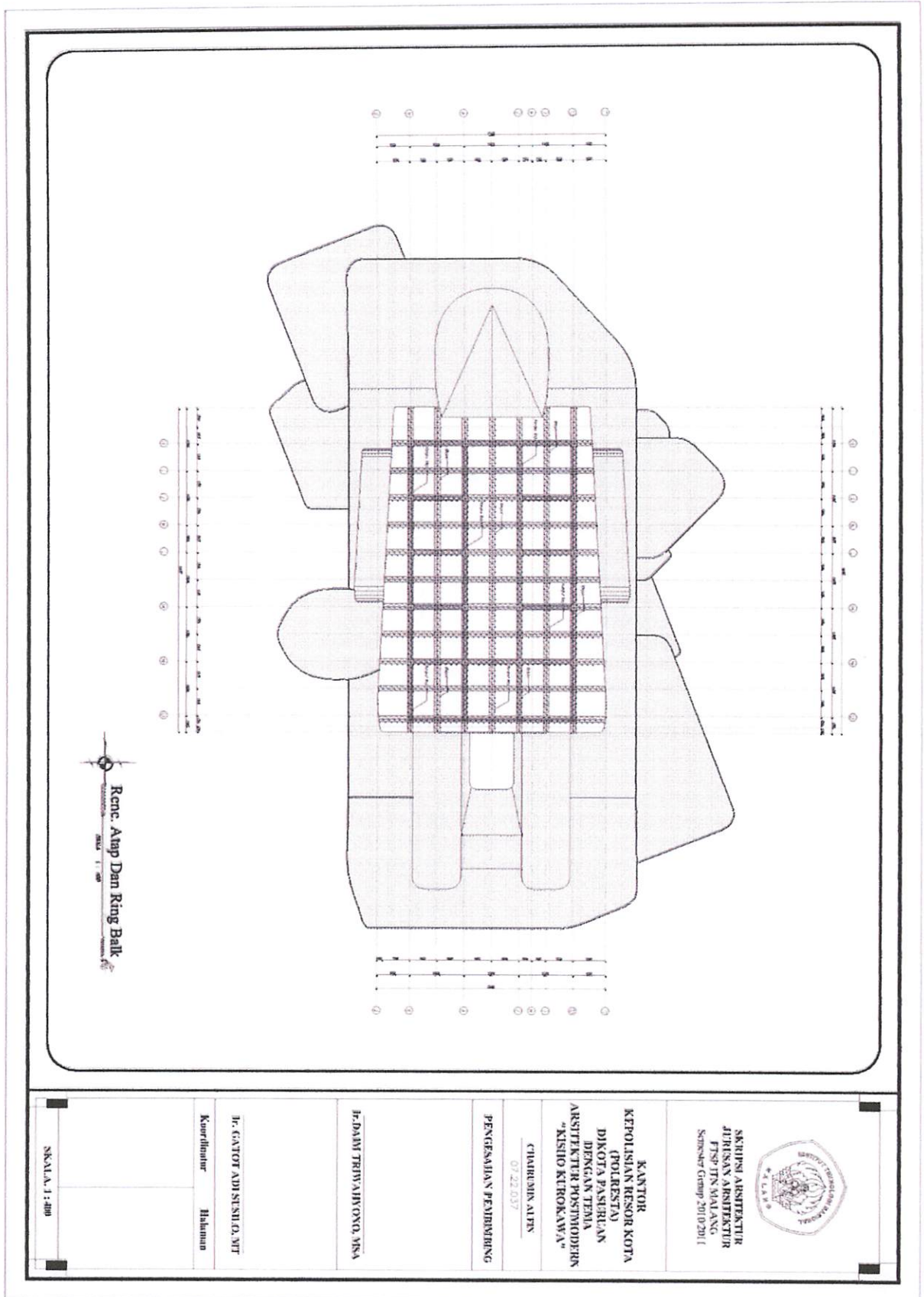
**Gambar 8.11
Rencana Pembalokan Lantai 3**





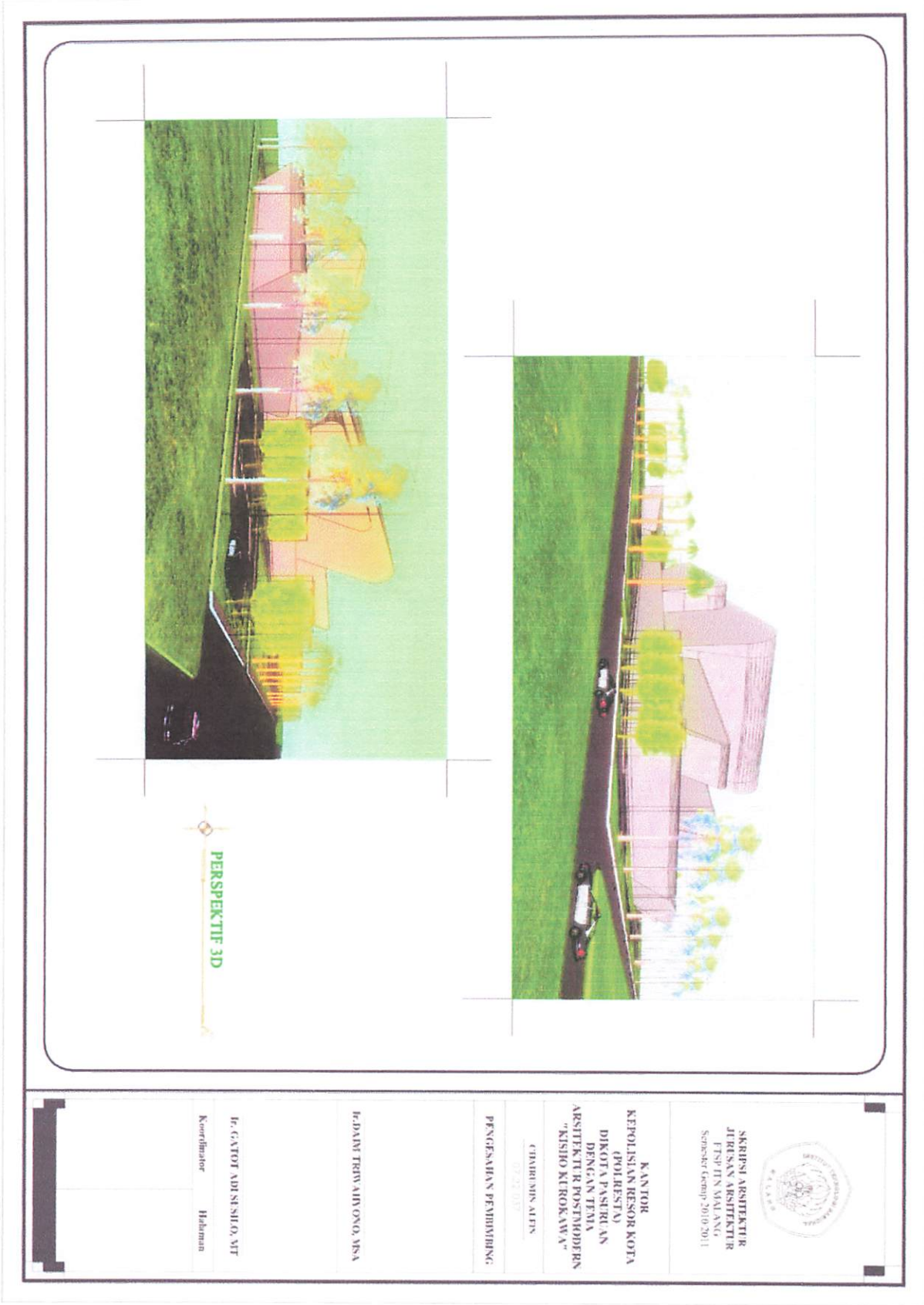
Gambar 8.12
Rencana Pembalokan Lantai 4





Gambar 8.13
Rencana Atap Dan Ring Balk



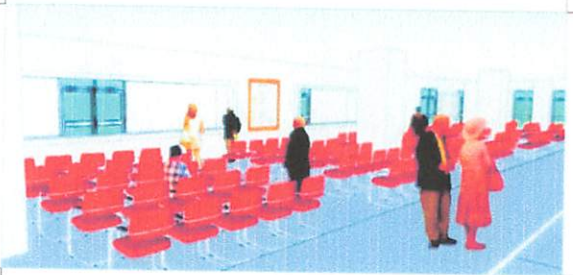


Gambar 8.14
Perspektif 3D

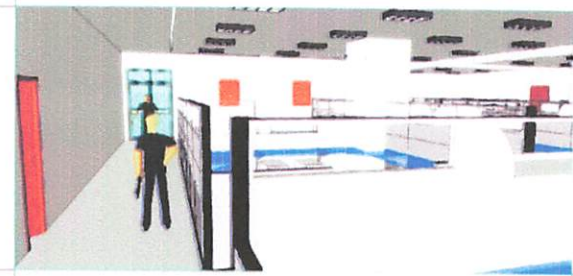




3D R. Tahanan Pria



3D R. Tunggu SIM, STNK, BPKB



3D R. Kerja Unit Sat Reskrim



3D R. Rapat Dan Diskusi



SKRIPSI ARSITEKTUR
JURUSAN ARSITEKTUR
FTSP ITN MALANG
Semester Genap 2010/2011

KANTOR
KEPOLISIAN RESOR KOTA
(POLRESTA)
DIKOTA PASURUAN
DENGAN TEMA
ARSITEKTUR POSTMODERN
"KISHO KUROKAWA"

CHAIRUMIN ALFIN
07.22.037

PENGESAHAN PEMBIMBING

Ir. DAIM TRIWAHYONO, MSA

Ir. GATOT ADISUSILO, MT

Koordinator Hakimam

Gambar 8.16
3D Interior



DAFTAR PUSTAKA

Deddy Halim, Ph.D., *Psikologi Arsitektur*, Jakarta, Penerbit: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005

Francis D.K. Ching, *Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatahan*. Edisi Kedua

Sugeng Gunadi Ir. MA.1988.*Pedoman Perencanaan Tapak dan Lingkungan*. Surabaya: Utama Press

Ir. Rustam Hakim MT.IALI & Ir. Hardi Utomo,MS.IAI., *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002

Hendraningsih dkk, *Peran, Kesan, dan Pesan Bentuk-Bentuk Arsitektur*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1985

Markus Zahnd, *Perancangan Kota Secara Terpadu*, Yogyakarta : kanisius. 1999

Prof. Dr. J. Badudu dan Prof. Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 1994

Poedjo Boedjo dkk, *Arsitektur, Manusia dan Pengamatnya*, Jakarta:Penerbit Djambatan, 1983

SURAT PERINTAH NO. POL : SPRIN/390.A/RA/III/2009/BARESKRIM
TANGGAL 31 MARET 2009.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri khususnya Pasal 13 huruf c.

PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2002.

UU NO.22 TAHUN 1999 TENTANG OTONOMI.



Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hal. 5.

STR John May lam, *The Police of Britain*, Terjemahan Bhayangkan, Majalah Bhayangkan, Jakarta, 1953, hal. 4.

John M. Echols, Kamus Inggris-Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1987.

RTDRK kota Pasuruan.

Peraturan Daerah Kota Pasuruan, Nomor 7/1971 yang ditetapkan pada tanggal 28 September 1971, dan diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 22 Juni 1972 Nomor : 27 / B

<http://seputar-pasuruan.blogspot.com>

humas@pasuruan.go.id

Ikhwanudin, *Menggali Pemikiran Postmodernisme Dalam Arsitektur*, Gadjah Mada University press.

Neufert, Ernst, *Data Arsitek*. Jilid 1, 2 Dan 3. Sunarto Tjahjadi.

Francis D.K. Ching, *Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan*. Edisi Kedua.

<http://www.konsultan-arsitektur.com/>

www.google.com

